



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2023 – 2053

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perbaikan kualitas lingkungan hidup diperlukan untuk menjaga kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023–2053;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023–2053.

BAB I  
KETENTUAN UMUM, ASAS,  
TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 2

RPPLH diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. manfaat;
- e. kehati-hatian;

- f. keadilan;
- g. ekoregion;
- h. keanekaragaman hayati;
- i. pencemar membayar;
- j. partisipatif;
- k. kearifan lokal;
- l. tata kelola pemerintah yang baik; dan
- m. otonomi Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan:

- a. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan sosial;
- b. mewujudkan perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara baik dan terukur berdasarkan indeks kualitas lingkungan hidup; dan
- c. memberikan legalitas dan pedoman terhadap kewenangan Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jangka waktu dan kedudukan RPPLH;
- b. muatan RPPLH;
- c. sistematika RPPLH;
- d. pelaksanaan, koordinasi dan kerja sama;
- e. monitoring, pelaporan dan *review*;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pendanaan.

## BAB II

### JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH

#### Pasal 5

RPPLH berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun.

#### Pasal 6

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III  
MUATAN RPPLH

Pasal 7

- (1) Penyusunan RPPLH memperhatikan:
  - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
  - b. sebaran penduduk;
  - c. sebaran potensi sumber daya alam;
  - d. kearifan lokal;
  - e. aspirasi masyarakat; dan
  - f. perubahan iklim.
- (2) RPPLH memuat rencana tentang:
  - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memuat skenario perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan target 5 (lima) tahunan.
- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. kebijakan sumber daya alam;
  - b. strategi implementasi; dan
  - c. indikasi program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB IV  
SISTEMATIKA RPPLH

Pasal 8

- (1) RPPLH disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah;
  - c. BAB III : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup;
  - d. BAB IV : Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  - e. BAB V : Penutup.

- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### PELAKSANAAN, KOORDINASI DAN KERJA SAMA

#### Pasal 9

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melaksanakan RPPLH.
- (2) Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja dan Program.

#### Pasal 10

- (1) Bupati melakukan koordinasi pelaksanaan RPPLH di Daerah.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menjalin sinergitas dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan RPPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Provinsi;
  - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain;
  - c. Pemerintah Desa; dan/atau
  - d. pihak lainnya.
- (4) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### MONITORING, PELAPORAN, DAN *REVIEW*

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melaporkan hasil monitoring kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

### Pasal 14

- (1) *Review* terhadap RPPLH dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) *Review* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembaharuan data dan informasi dokumen RPPLH.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta dalam RPPLH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian pendapat, saran dan masukan;
  - c. penyampaian pengaduan/keberatan;
  - d. pendampingan tenaga ahli; dan
  - e. bantuan teknis.

## BAB VIII

### PENDANAAN

#### Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rencana pembangunan Daerah yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 18 Desember 2023  
BUPATI KEBUMEN,  
ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 18 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,  
ttd.

EDI RIAN TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 14  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (14-345/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,  
ttd.

AKHMAD HARUN,S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2023 – 2053

I. UMUM

Pembangunan merupakan suatu bentuk kegiatan yang tidak terlepas dari dukungan berbagai sumber daya baik sumber daya alam maupun lingkungan hidup. tanah, air, tumbuhan dan berbagai komponen lingkungan lainnya merupakan unsur material penting dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Mengingat, selama ini kegiatan pembangunan yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan tidak terlepas dari upaya penggunaan berbagai material bahan baku. Keberadaan sumber daya yang memadai tentunya mendorong proses pembangunan menjadi lebih berjalan secara masif. Namun demikian, tingginya berbagai kegiatan dan bertambahnya tingkat eksploitasi sudah barang tentu akan menurunkan keberadaan kuantitas maupun kualitas sumber daya setempat sehingga mengurangi daya dukung wilayah.

Pembangunan pada dasarnya menimbulkan perubahan besar baik berupa struktur ekonomi, kondisi fisik wilayah, pola konsumsi, teknologi, sistem nilai, dan keberadaan sumber alam beserta lingkungan hidup. Berbagai kondisi tersebut tentunya memerlukan antisipasi yang salah satunya diwujudkan melalui upaya pelestarian lingkungan hidup secara arif dan bijaksana. Hal ini karena lingkungan hidup merupakan tempat berlangsungnya berbagai proses kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, dalam konteks ini Kabupaten Kebumen sebagai suatu wilayah yang mempunyai perkembangan sangat cepat dan pesat, perlu mengupayakan untuk merespon dampak negatif akibat pembangunan melalui usaha pelestarian lingkungan. Seiring hal tersebut, maka akan meminimalkan dan mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pengembangan berbagai kegiatan yang berlangsung secara cepat dan intensif di Kabupaten Kebumen pada dasarnya berpengaruh terhadap kondisi kualitas maupun keberlanjutan lingkungan sekitar. Berdasarkan fenomena yang berkembang, Kabupaten Kebumen dihadapkan dengan berbagai permasalahan lingkungan baik berupa permasalahan alih fungsi lahan, kualitas dan kuantitas air serta pengolahan sampah. Berbagai fenomena tersebut memerlukan tindakan antisipasi dan penanganan. Hal ini karena seiring upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Kebumen yang berlangsung cenderung masif dan terus mengalami ekstensifikasi, maka permasalahan tersebut juga berkembang. Oleh karena itu, berbagai keadaan tersebut turut memicu terjadinya degradasi lingkungan hidup.

Lingkungan hidup merupakan komponen penting yang perlu diperhatikan kelangsungannya di setiap daerah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa lingkungan adalah salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan perlindungannya. Adapun secara lebih terperinci terkait pengelolaan lingkungan hidup termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang apabila ditelaah maka setiap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pada tahap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan sejumlah kegiatan, meliputi: inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah-wilayah ekoregion, dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan guna memperoleh data beserta informasi terkait sumber daya alam yang bentuknya berupa: potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, dan konflik serta penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah untuk meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber

daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas otonomi Daerah” adalah bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan indeks kualitas lingkungan hidup adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain: perusahaan, pelaku usaha dan/atau lembaga swadaya masyarakat dibidang lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengawasan sosial adalah hak masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RPPLH guna terwujudnya pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemberian pendapat, saran dan masukan adalah hak masyarakat untuk secara aktif memberikan pendapat, saran, masukan terhadap kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyampaian pengaduan/keberatan adalah hak masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau keberatan atas kebijakan pelaksanaan RPPLH melalui mekanisme pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pendampingan tenaga ahli adalah tindakan atau kebijakan menjadikan pihak-pihak yang memiliki kompetensi keahlian sebagai pendamping yang bertugas melakukan assistensi, pengorganisasi dan pemberdayaan guna meningkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bantuan teknis adalah bantuan yang diberikan kepada pemangku kepentingan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik dalam bentuk uang, tenaga ahli ataupun sarana pendukung lain guna mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 208

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023-2053

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. POSISI DAN PERAN RPPLH**

Pembangunan merupakan suatu bentuk kegiatan yang tidak terlepas dari dukungan berbagai sumberdaya baik sumberdaya alam maupun lingkungan hidup. Tanah, air, tumbuhan dan berbagai komponen lingkungan lainnya merupakan unsur material penting dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Mengingat, selama ini kegiatan pembangunan yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan tidak terlepas dari upaya penggunaan berbagai material bahan baku. Keberadaan sumberdaya yang memadai tentunya mendorong proses pembangunan menjadi lebih berjalan secara masif. Namun demikian, tingginya berbagai kegiatan dan bertambahnya tingkat eksploitasi sudah barang tentu akan menurunkan keberadaan kuantitas maupun kualitas sumberdaya setempat sehingga mengurangi daya dukung wilayah.

Pembangunan pada dasarnya menimbulkan perubahan besar baik berupa struktur ekonomi, kondisi fisik wilayah, pola konsumsi, teknologi, sistem nilai, dan keberadaan sumber alam beserta lingkungan hidup (Hardjosoemantri, 2012). Berbagai kondisi tersebut tentunya memerlukan antisipasi yang salah satunya diwujudkan melalui upaya pelestarian lingkungan hidup secara arif dan bijaksana. Hal ini karena lingkungan hidup merupakan tempat berlangsungnya berbagai proses kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, dalam konteks ini Kabupaten Kebumen sebagai suatu wilayah yang mempunyai perkembangan sangat cepat dan pesat perlu mengupayakan untuk merespon dampak negatif akibat pembangunan melalui usaha pelestarian lingkungan. Seiring hal tersebut, maka akan meminimalkan dan mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pengembangan berbagai kegiatan yang berlangsung secara cepat dan intensif di Kabupaten Kebumen pada dasarnya berpengaruh terhadap kondisi kualitas maupun keberlanjutan lingkungan sekitar. Berdasarkan fenomena yang berkembang, Kabupaten Kebumen dihadapkan dengan berbagai permasalahan lingkungan baik berupa permasalahan tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, dan resiko bencana (IKPLHD Kabupaten Kebumen, 2022). Berbagai fenomena tersebut memerlukan tindakan antisipasi dan penanganan. Hal ini karena seiring upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen yang berlangsung cenderung masif dan terus mengalami ekstensifikasi, maka permasalahan tersebut juga berkembang. Oleh karena itu, berbagai keadaan tersebut turut memicu terjadinya degradasi lingkungan hidup.

Lingkungan hidup merupakan komponen penting yang perlu diperhatikan kelangsungannya di setiap daerah. Hal ini ditegaskan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 bahwa lingkungan adalah salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan perlindungannya. Adapun secara lebih terperinci terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menelaah isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota wajib menyusun dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam pasal-pasal berikut.

Bab II bagian ketiga tentang Ruang Lingkup Pasal 4 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum. Pada pasal-pasal berikutnya dijelaskan tentang definisi, cakupan kajian, cakupan wilayah, dan tujuan dari masing-masing tahapan tersebut. Bab II Pasal 5 menyatakan bahwa pada tahap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan sejumlah kegiatan, meliputi inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah - wilayah ekoregion, dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan guna memperoleh data beserta informasi terkait sumberdaya alam yang bentuknya berupa potensi dan

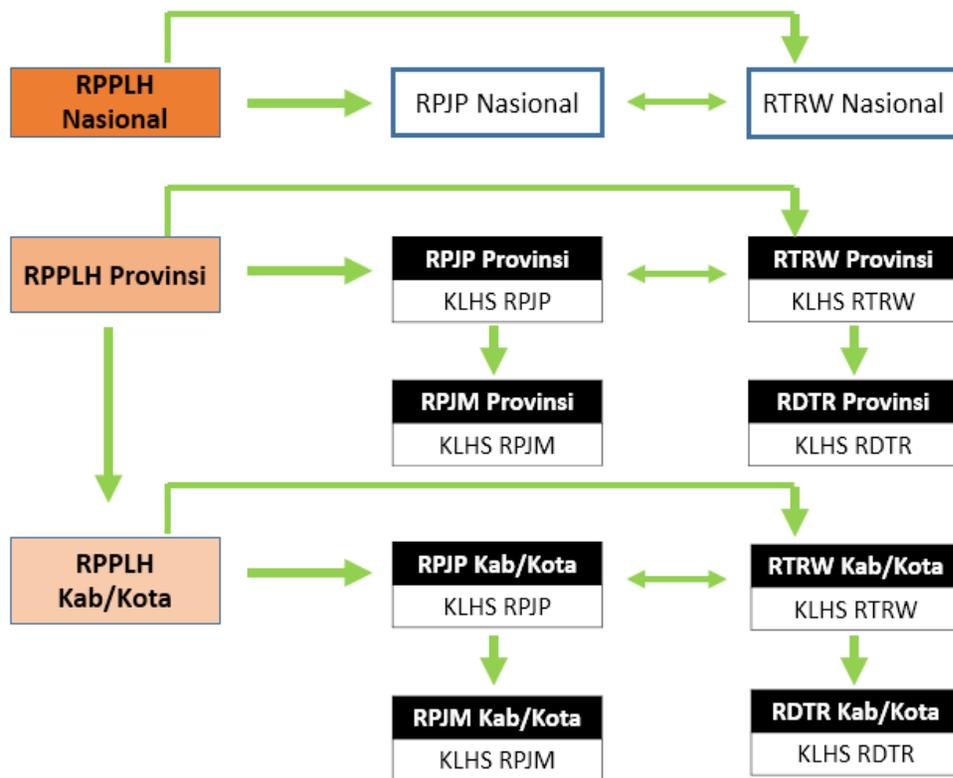
ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, dan konflik serta penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Sementara itu, ekoregion sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (29) dijelaskan sebagai suatu wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut memberikan pedoman secara jelas kepada pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara baik. Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung. Keterkaitan daya dukung dan daya tampung dengan KLHS, RPPLH, dan pemanfaatan sumberdaya alam.

#### **1.1.1. Posisi dan Kedudukan RPPLH**

Kedudukan RPPLH dalam sistem perencanaan pembangunan sesuai pasal 10 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka RPPLH dari segi sistem perencanaan pembangunan sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RPPLH merupakan suatu keharusan mengingat materi muatan RPJP dan RPJM sangat luas secara substansi maupun pelaksanaannya terutama berkenaan dengan muatan rencana perlindungan lingkungan hidup. Sementara itu, pada dasarnya perencanaan pembangunan di Indonesia dijabarkan dalam dua sistem rencana yaitu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Penataan Ruang. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Sedangkan Rencana Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang berupa rencana umum dan rencana rinci. Rencana pembangunan menjadi

pedoman dalam penyusunan Rencana Penataan Ruang dan demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa RPPLH sebenarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Rencana Penataan Ruang terutama terkait dengan adanya rencana pemanfaatan ruang. Rencana penataan ruang atau RTRW adalah mengatur bagaimana memanfaatkan ruang atau dalam artian luas adalah lingkungan, RPPLH memberikan informasi, arahan maupun acuan sebagaimana seharusnya lingkungan dimanfaatkan/dikelola dengan baik agar tetap terjaga kualitasnya. RTRW Kabupaten/Kota disusun salah satunya dengan memperhatikan RPJP Kabupaten/Kota yang muatan didalamnya didasarkan pada substansi RPPLH terutama yang berkaitan dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen. Dengan kata lain, RPPLH seharusnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota sehingga pemanfaatan ruang yang direncanakan didasarkan sesuai dengan karakteristik ekoregionnya. Ditinjau dari sistem perundang-undangan nasional, RPPLH Kabupaten/Kota memiliki kedudukan yang setara dengan RPJPD, RPJMD, RTRW kabupaten/kota karena RPPLH diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

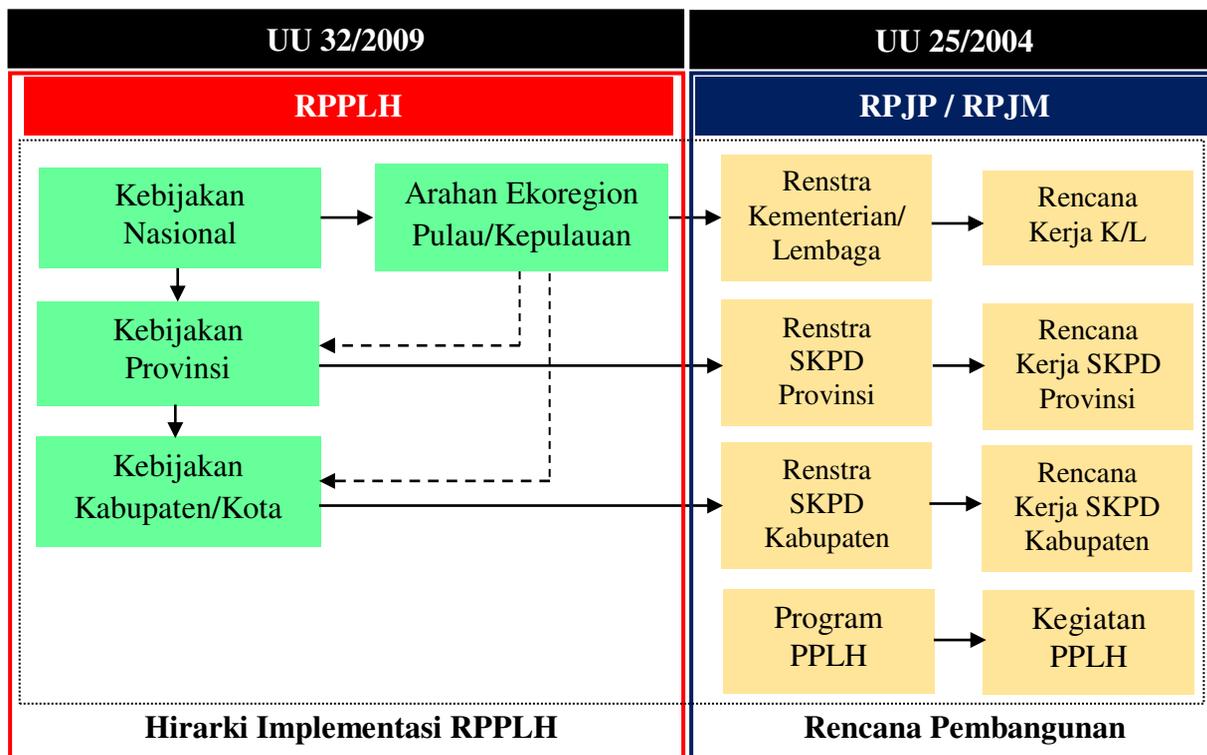


Gambar 1.1. Kedudukan RPPLH didalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) didalam pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Kebumen memiliki posisi yang sangat penting sebagai pedoman pembangunan yang berwawasan lingkungan. Posisi dan kedudukan RPPLH terhadap perencanaan pembangunan dalam hal ini kaitannya dengan RPJPD/RPJMD dan isu-isu strategis pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen yaitu :

1. Rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, persoalan lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolanya dalam kurun waktu 30 tahun dan dikuatkan penetapannya melalui peraturan daerah, dengan dimuatnya substansi RPPLH kedalam dokumen perencanaan daerah lainnya terutama RPJPD dan RPJMD maka seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Kebumen diharapkan memiliki data dan informasi serta upaya yang dapat dilakukan agar Pembangunan yang dijalankan memiliki prinsip dan asas keberlanjutan;
2. Penyusunan RPPLH merupakan mandat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Penyusunan RPPLH merupakan mandat dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. RPPLH merupakan perencanaan yang berbasis ekoregion atau bentang lahan, yang diharapkan dapat mengatur upaya penyelesaian masalah lingkungan hidup yang bervariasi pada setiap ekoregion, hal ini dikarenakan masing-masing ekoregion memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan potensi permasalahan lingkungan yang berbeda, sehingga dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup upaya penanganan berbasis ekoregion termuat didalam RPPLH, dengan demikian pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Kebumen diharapkan dapat berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah ekoregionnya;

5. RPPLH mengarahkan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diharapkan dapat diadopsi dan diimplementasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/SKPD dalam penyusunan program-program pembangunan sektoral daerah yang ramah lingkungan. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah khususnya di Kabupaten Kebumen tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, agar implementasi seluruh upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan, maka tata kelola, sistem koordinasi dan tanggung jawab semua *stake holder* telah dijabarkan didalam RPPLH, mulai dari tahapan perencanaan, tahap implementasi hingga tahap monitoring dan evaluasi. Didalam RPPLH juga dijelaskan *stake holder* mana saja yang memiliki peran didalam memenuhi target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen.



Gambar 1.2. Diagram Keterkaitan RPPLH dengan Dokumen Perencanaan

### 1.1.2. Peran RPPLH

Peran dari RPPLH didalam proses pembangunan di Kabupaten Kebumen antara lain :

1. Dari sisi perencanaan pembangunan daerah, RPPLH merupakan rencana yang bersifat umum dan lintas sektoral dari perencanaan sektor lainnya;
2. RPPLH terstruktur dari tingkat Nasional yang dijabarkan dalam tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota;
3. RPPLH merupakan bagian dari kerangka perencanaan pembangunan di daerah, yang materi muatannya, harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang & Menengah (RPJP/M) dan merupakan bagian yang integral dalam pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan di tingkat daerah;
4. RPPLH menjadi dasar dan dimuat dalam rencana pembangunan, serta menjadi masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan daerah agar pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam lebih terkontrol;
5. RPPLH menjadi acuan bagi dokumen-dokumen perencanaan sumberdaya lainnya yang lebih spesifik.

### **1.1.3. Prinsip RPPLH Kabupaten Kebumen**

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (RPPLH) Kabupaten Kebumen memegang prinsip dasar sebagai berikut :

1. **Pembangunan Berkelanjutan** : Pembangunan Ekonomi dan Sosial tidak mengorbankan Lingkungan Hidup dan mengintegrasikan perlindungan lingkungan dari lingkungan paling kecil;
2. **Pembangunan Rendah Karbon** : Membangun wilayah yang ada di Kabupaten Kebumen dengan prinsip rendah karbon dan hemat energi, dan menciptakan *win-win solution* antara pembangunan ekonomi dan perlindungan ekologi;
3. **Partisipasi Publik** : Melibatkan publik dalam seluruh proses dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi dari implementasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen;
4. **Kerjasama antar Daerah** : Mengutamakan kerjasama antar daerah dalam satu ekoregion dan antar ekoregion sebagai keniscayaan untuk mendorong keberhasilan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## **1.2. TUJUAN DAN SASARAN RPPLH**

### **1.2.1. Tujuan RPPLH**

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) disusun dengan tujuan antara lain untuk :

1. Mengharmonisasikan seluruh perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Kebumen dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan karakteristik ekoregion/bentang lahan;
2. Tercapainya kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen pada tahun 2053 dengan kategori baik;
3. terselesaikannya isu pokok/isu strategis maupun isu prioritas dalam RPPLH Kabupaten Kebumen Tahun 2023 – 2053;
4. Rumusan arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kebumen meliputi :
  - a. Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya Alam;
  - b. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan hidup;
  - c. Rencana Pengendalian, Pemantauan Serta Pendayagunaan Pelestarian SDA;
  - d. Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim.

### **1.2.2. Sasaran RPPLH**

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) di Kabupaten Kebumen berdasarkan karakteristik ekoregion/bentang lahan;
2. Peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen secara bertahap hingga tahun 2053 menjadi 76,88;
3. Pencapaian persentase target RPPLH Kabupaten Kebumen dalam penyelesaian isu prioritas yang dibagi menjadi target penanganan isu prioritas setiap 10 tahunan meliputi :
  - a. pengelolaan sampah dan limbah sebesar 35 % pada tahun 1, 35 % pada tahun 2 dan 30 % pada tahun 3

- b. risiko bencana sebesar 25 % pada tahun 1, 25 % pada tahun 2 dan 50 % pada tahun 3
  - c. alih fungsi lahan sebesar 20 % pada tahun 1, 20 % pada tahun 2 dan 60 % pada tahun 3
  - d. penurunan kualitas dan kuantitas air sebesar 15 % pada tahun 1, 15 % pada tahun 2 dan 70 % pada tahun 3
4. Tersusunnya arahan kebijakan, strategi dan indikasi program dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kebumen meliputi :
- a. Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya Alam;
  - b. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan hidup;
  - c. Rencana Pengendalian, Pemantauan Serta Pendayagunaan Pelestarian SDA;
  - d. Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim.

### **1.3. KERANGKA HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum formal untuk mendukung Penyusunan RPPLH Kabupaten Kebumen ini, antara lain :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

- Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
- 7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
  - 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumberdaya Air;
  - 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  - 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
  - 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 18) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- 19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan;
- 20) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
- 21) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, tentang Pedoman Perumusan Materi Muatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-undangan;
- 22) Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013, tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertambangan;
- 23) Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Indonesia;
- 24) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 26) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018, tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia;
- 27) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional;
- 28) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52/KPTS-II/2001, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- 29) Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 30) Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tentang Pedoman Metode

- Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2020 – 2024;
- 31) Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S-408/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2021 tentang Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2021;
  - 32) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
  - 33) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038;
  - 34) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023;
  - 35) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
  - 36) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2030;
  - 37) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 - 2031;
  - 38) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 39) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - 40) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2025;
  - 41) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - 42) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kebumen Tahun 2019 – 2039;

- 43) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) Karangambung Karangbolong.
- 44) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 45) Keputusan Bupati Kebumen Nomor 660.1/343, Tahun 2018, tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kebumen;

**BAB II**  
**KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG**  
**DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH**

**2.1. KONDISI WILAYAH**

**2.1.1. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi**

**A. Letak Geografis Kabupaten Kebumen**

Kabupaten Kebumen secara geografis terletak pada koordinat 7°27' – 7°50' Lintang Selatan dan 109°22' – 109°50' Bujur Timur. Kabupaten Kebumen secara administrasi terdiri dari 26 Kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 ha atau 1.281,115 km<sup>2</sup>. Kabupaten Kebumen secara administrasi berbatasan dengan beberapa wilayah di antaranya :

- Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo dan Wonosobo
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas

Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian selatan yang mempunyai dukungan alam dengan potensi cukup tinggi. Keragaman dan kelengkapan topologi wilayah mulai dari kawasan pantai selatan yang mendukung sub sektor perikanan, dataran rendah yang relatif subur untuk pertanian sertadataran tinggi, baik berupa perkebunan maupun hutan, memberikan peluang yang sangat besar bagi kemandirian wilayah dalam mencukupi kebutuhan sendiri.

**B. Wilayah Administrasi Kabupaten Kebumen**

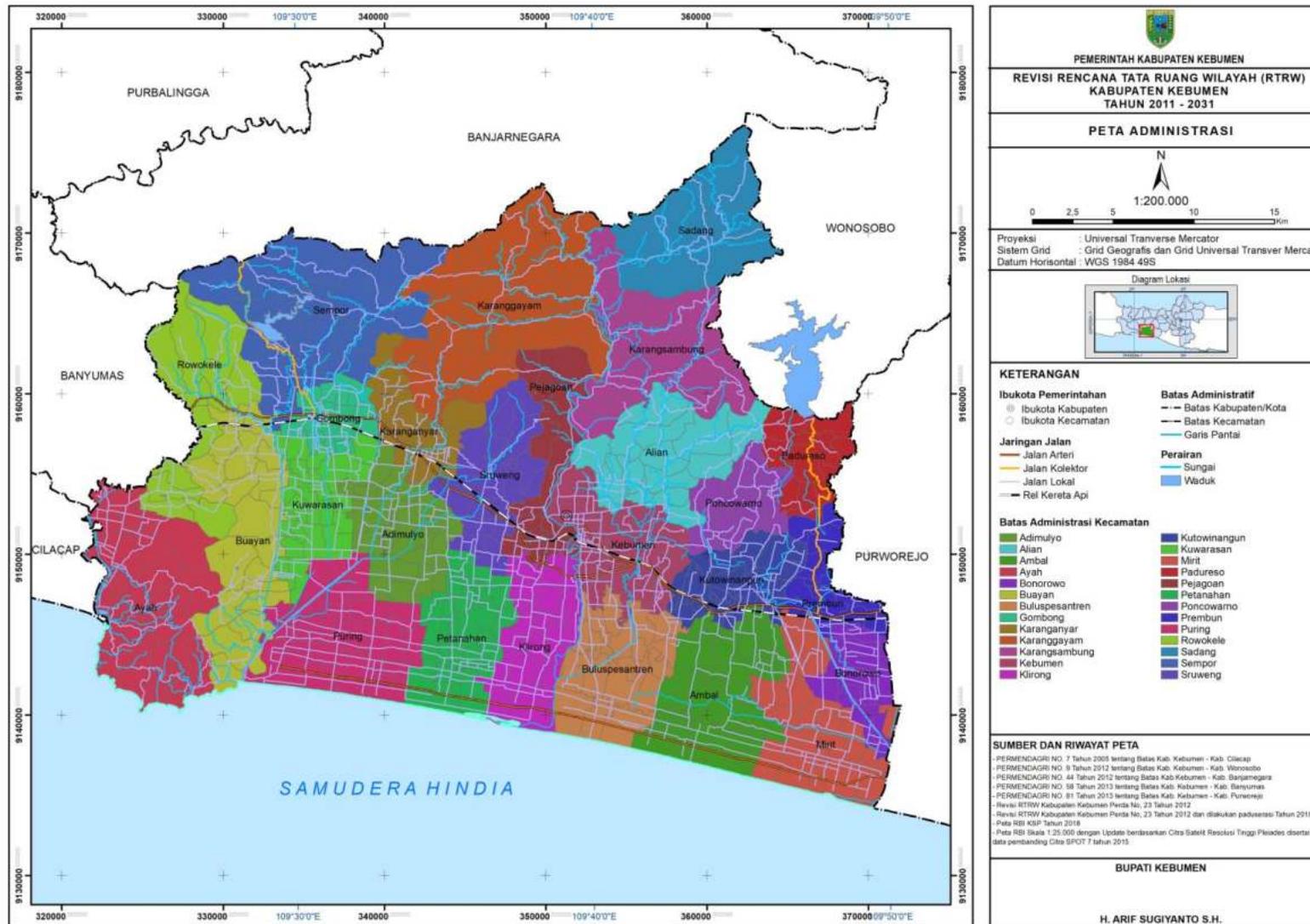
Untuk pembagian wilayah administrasi dari Kabupaten Kebumen dilihat pada tabel dan peta berikut ini.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Kebumen Dirinci  
Menurut Kecamatan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )
1.	Ayah	76,370
2.	Buayan	68,420

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Luas (Km<sup>2</sup>)</b>
3.	Puring	61,970
4.	Petanahan	44,840
5.	Klirong	43,250
6.	Buluspesantren	48,770
7.	Ambal	62,410
8.	Mirit	52,350
9.	Bonorowo	20,910
10.	Prembun	22,910
11.	Padureso	28,960
12.	Kutowinangun	33,730
13.	Alian	57,750
14.	Poncowarno	27,370
15.	Kebumen	42,040
16.	Pejagoan	34,580
17.	Sruweng	43,680
18.	Adimulyo	43,430
19.	Kuwarasan	33,840
20.	Rowokele	53,795
21.	Sempor	100,150
22.	Gombong	19,480
23.	Karamanyar	31,400
24.	Karanggayam	109,290
25.	Sadang	54,230
26.	Karangsambung	65,150
<b>Jumlah</b>		<b>1.281,12</b>

*Sumber : Kabupaten Kebumen Dalam Angka Tahun 2023, BPS*

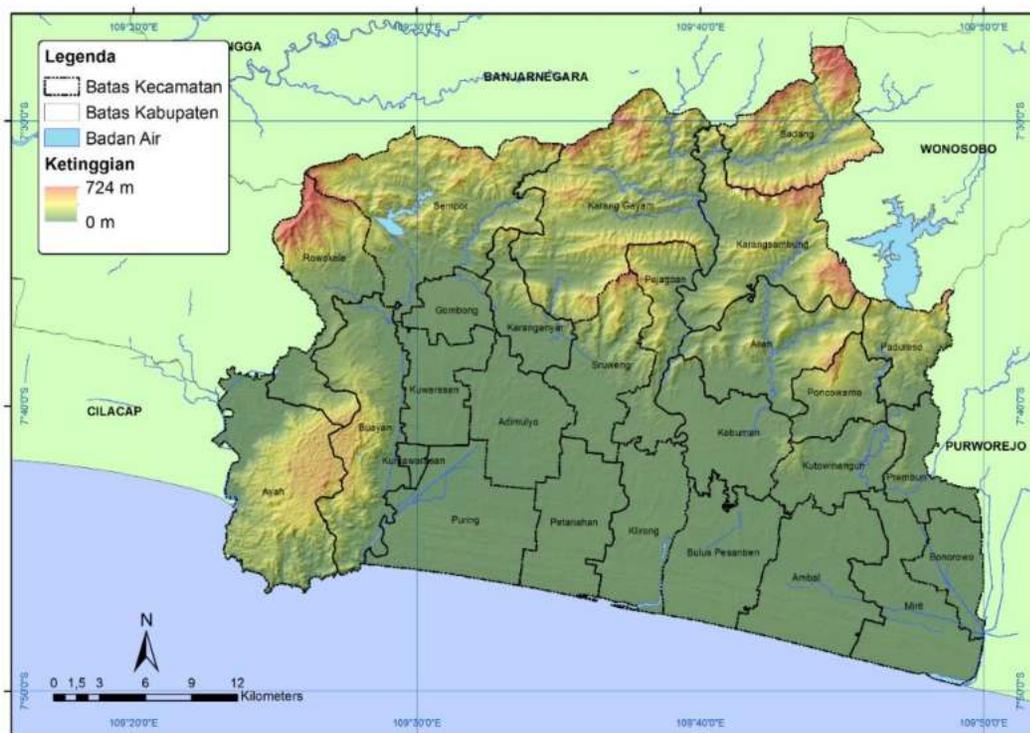


Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kebumen

## 2.1.2. Kondisi Fisik Kabupaten Kebumen

### A. Topografi

Topografi atau bentang alam merupakan salah satu faktor penting untuk mengetahui kemampuan alami suatu wilayah bagi perencanaan pembangunan. Daerah berbukit/terjal umumnya butuh penanganan khusus akibat terdapat limitasi pembangunan sehingga lebih sulit dikembangkan dibandingkan dengan dataran rendah. Kemiringan lereng dan garis kontur merupakan kondisi fisik topografi suatu wilayah yang sangat berpengaruh terhadap daya dukung lahan dan banyak memengaruhi penataan lingkungan alami. Pada kawasan terbangun, kondisi topografi memengaruhi terhadap konstruksi bangunan dan terjadinya longsor. Kabupaten Kebumen terletak pada ketinggian 0 – 724 meter.



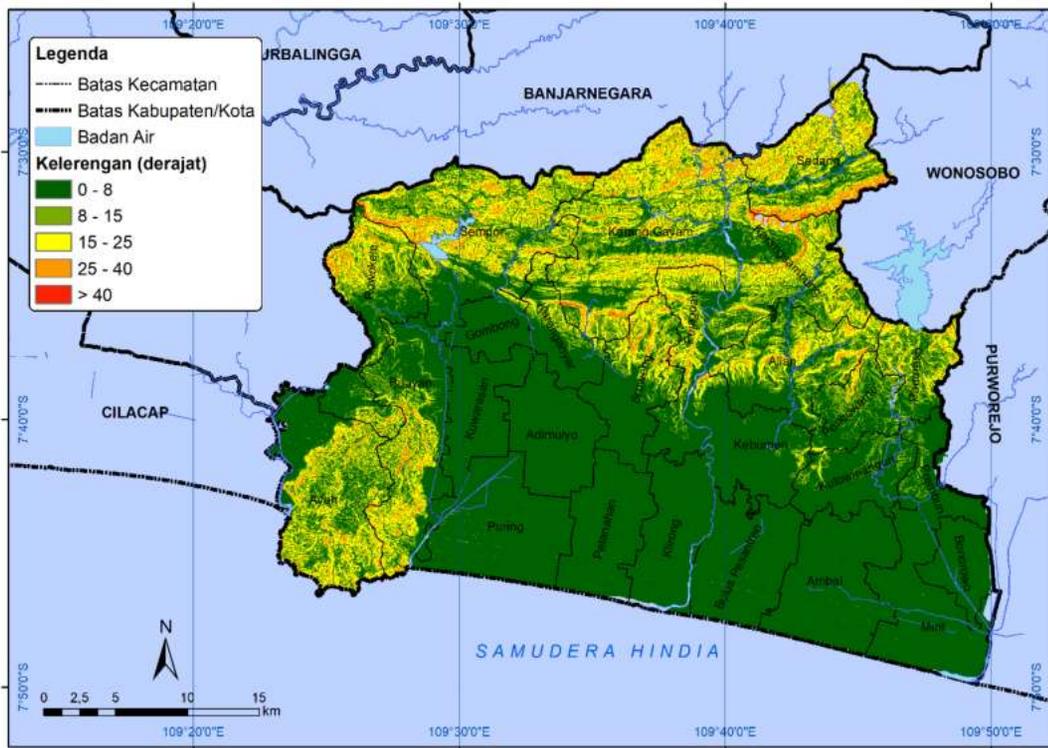
Gambar 2.2. Peta Topografi Kabupaten Kebumen

(Sumber : Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Kebumen, Tahun 2020)

### B. Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng merupakan faktor utama dalam penentuan pembudidayaan suatu daerah. Dominasi kemiringan lereng di Kabupaten Kebumen adalah berupa kelas kemiringan datar 0-8 derajat berada pada selatan Kabupaten Kebumen dan 15-25 derajat

pada utara dan barat Kabupaten Kebumen. Secara lebih jelas, kondisi kemiringan lereng dapat dilihat pada peta kemiringan lereng Kabupaten Kebumen berikut ini



Gambar 2.3. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Kebumen  
(Sumber : Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Kebumen, Tahun 2020)

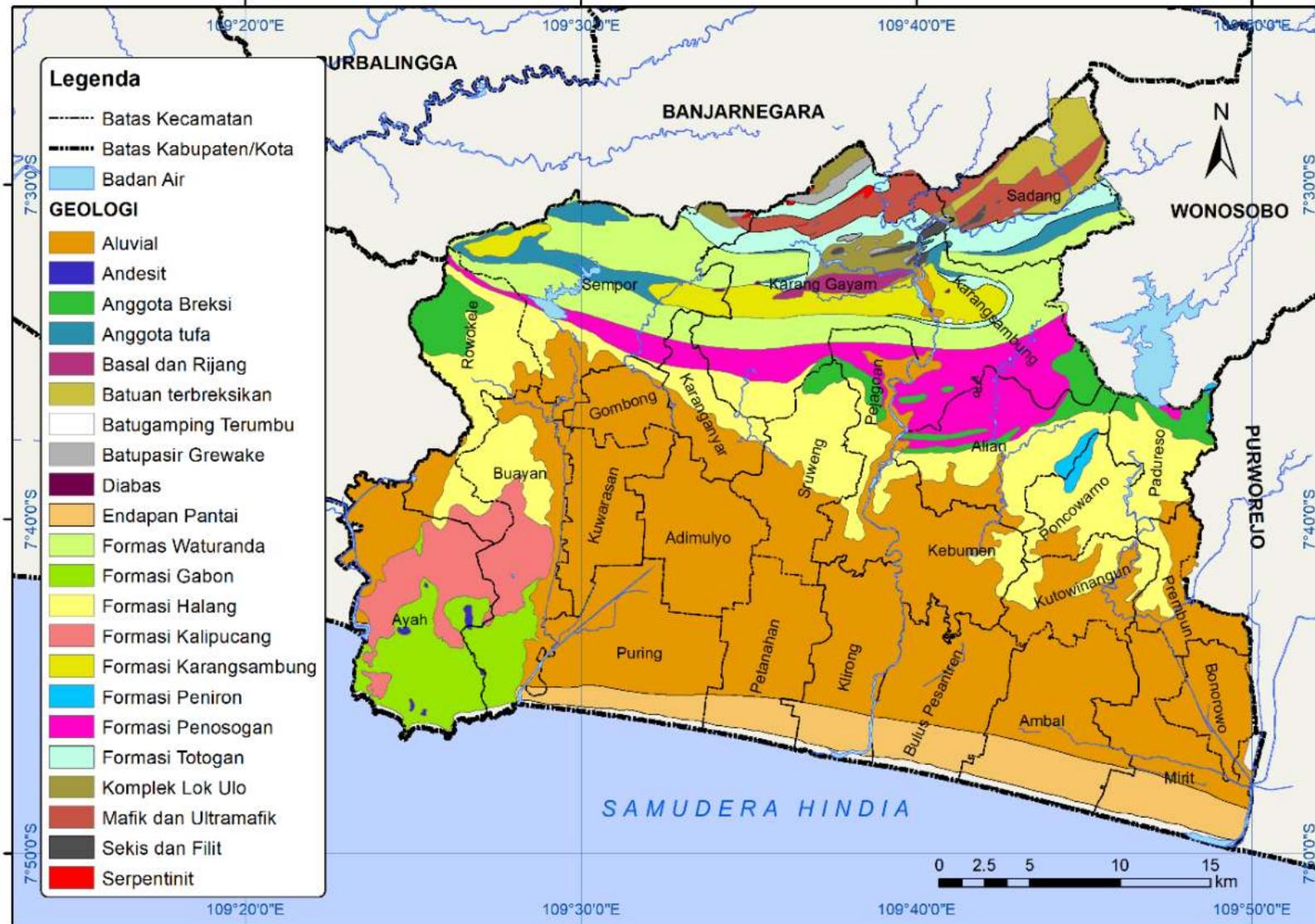
### C. Geologi

Sebaran jenis geologi di Kabupaten Kebumen sebagaimana digambarkan didalam Peta Geologi Skala 1 : 100.000 Lembar Kebumen dan Banyumas Tahun 1992 yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi (PPPG) Bandung, dijelaskan jenis batuan yang ada di Kabupaten Kebumen antara lain :

1. Aluvium (Qa), merupakan formasi batuan yang berupa lempung, lanau, pasir, kerikil dan kerakal. Formasi endapan Aluvium ini dapat juga disebut dengan endapan permukaan.
2. Endapan Pantai (Qac), merupakan formasi batuan yang terbentuk dari endapan pasir lepas dan terpilah dengan baik hingga sedang.
3. Formasi Halang (Tmph), Formasi batuan yang berupa perselingan batu pasir, batu gamping, nafal dan tuf dengan sisipan batuan breksi. Formasi ini dipengaruhi oleh arus turbid dan pelengseran bawah air laut

4. Formasi Peniron (Tpp), formasi Peniron merupakan formasi batuan yang terdiri dari batu andesit, batu lempung, batu gamping, batu pasir tufan dan bersisifan dengan tuf.
5. Anggota Breksi Formasi Halang, (Tmpb), jenis geolgi yang berupa breksi dengan komponen andesit, basal dan batu gamping, masa dasar batupasir tufan kasar dan sisipan batupasir dan lava basalt.
6. Formasi Penosogan (Tmpe), merupakan formasi batuan berupa perselingan batupasir gampingan, batu lempung, tuf, napal dan kalkarenit. Formasi batuan ini terbentuk karena pengaruh arus turbid.
7. Formasi Waturanda (Tmw), formasi batuan yang tersusun oleh batupasir kasar pada lapisan bawahnya dan semakin ke atas berubah menjadi breksi dengan komponen andesit basalt; masa dasar batupasir dan tuf.
8. Anggota Tuf Formasi Waturanda (Tmwt), Merupakan formasi batuan yang berupa perselingan antara tu gelas, tuf kristal, batupasir gampingan dan batu napal tufan.
9. Formasi Totogan (Tomt), formasi batuan yang terdiri dari breksi dengan komponen batu lempung, batupasir, batu gamping dan basal.
10. Formasi Karangsembung (Teok), janis formasi batuan dengan batuan penyusun berupa batu lempung berstruktur sisik dengan fragmen batugamping, konglomerat, batupasir, batulempung dan basal.
11. Basal dan Rijang (Kobc), merupakan jenis batuan yang terdiri dari lava bantal bersusun basal dan rijang radiolaria terdapat sebagai kepungan tektonik.
12. Sekis dan Felit (Km), sekis amfibol, mika, glaukofan dan filit merupakan hasil kepungan tektonik.
13. Kompleks Lukulo (KTI), merupakan berbagai macam bongkah yang tercampur secara tektonik.
14. Serpentinit (Kose), Formasi batuan yang tersusun oleh serpentinit yang terbreksikan, umumnya menyudut dan dijumpai sebagai kepungan tektonik.

15. Formasi Gabon (Tomg), Formasi batuan berupa breksi dengan komponen andesit bermasa dasar tuf dan batupasir kasar, lava dan endapan lahar.
16. Grauwake (KTs), merupakan formasi batuan yang tersusun oleh Garuwake dan terdapat sebagai kebugan tektonik.



Gambar 2.4. Peta Geologi Kabupaten Kebumen

Potensi dari aspek Geologi yang ada di Kabupaten Kebumen berupa Cagar Alam Nasional Geologi

Karangsembung. Salah satu potensi geologi yang ada di

Kabupaten Kebumen adalah Cagar Alam Nasional Geologi Kebumen yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM

No.2187K/40/MEM/2006

dimana penetapan tersebut

didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26, Tahun 2008, diantaranya tertuang di dalam Pasal 51 tentang kawasan lindung geologi sebagai salah satu kawasan lindung nasional. Kawasan cagar alam nasional geologi Kebumen diperuntukan untuk berbagai kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pariwisata.

Geopark Kebumen secara administrasi berada di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Geopark Kebumen meliputi kawasan seluas 543.599 Km<sup>2</sup> yang mencakup 12 Kecamatan dengan 117 Desa mempunyai morfologi yang bervariasi mulai dari perbukitan, lembah, dataran sampai pantai. Morfologi yang terbentuk hasil proses geologi Jaman Kapur sampai Kuartar dan tersebar dari mulai dari utara sampai selatan kawasan geopark. Kekayaan geologi di Cagar Alam Nasional Geologi Kebumen sangat penting karena mengandung berbagai fenomena geologi unik yang jarang ditemukan di tempat lainnya, bahkan di dunia. Berkembangnya teori Tektonika Lempeng (*Plate Tectonic*) pada 1970-1980 ternyata banyak didukung oleh bukti-bukti geologi yang dikumpulkan dari lapangan di Kebumen. Kawasan Cagar Alam Nasional Geologi Kebumen menyimpan berbagai fenomena geologi yang sangat unik, setidaknya terdapat 32 situs geologi di kawasan ini. Ini tidak lepas dari letak geografis wilayah ini sekitar 120 juta tahun lalu yang merupakan dasar laut dan menjadi pertemuan lempeng benua dan samudra. Proses subduksi selama



ratusan juta tahun menyebabkan batu-batuan purba itu tersingkap ke permukaan.



Gambar 2.5. Peta Lokasi Kawasan Geopark Kebumen

Geomorfologi Kawasan Karangasambung memiliki 3 bentuklahan proses asal, yaitu Bentuklahan fluvial, bentuklahan denudasional, dan bentuklahan struktural. Bentuklahan asal proses fluvial meliputi; dataran banjir, dataran aluvial, sungai teranyam, sungai *meandering* dan daerah sedimentasi. Bentuklahan asal proses denudasional memiliki keragaman yang banyak yang diklasifikasikan berdasarkan kekuatan pengikisan dan kemiringan lerengnya, seperti halnya perbukitan terkikis lemah hingga perbukitan terkikis kuat. Selain itu juga terdapat pedimen yang merupakan bentuklahan asal proses denudasional yang merupakan hasil endapan longsoran pada lahan perbukitan. Sedangkan pada bentuklahan asal proses struktural memiliki bentuklahan meliputi lembah antiklinal, dan perbukitan patahan. Perkembangan bentuklahan karst Kawasan Karangbolong sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Perkembangannya dipengaruhi oleh adanya faktor pengontrol seperti batuan, struktur geologi, vegetasi, dan iklim. Faktor tersebut berpengaruh terhadap intensitas dan kecepatan karstifikasi. Pada kawasan ini memiliki wilayah estetika landscape yang sangat indah. Pada bagian perbukitan terdapat laut sebagai latar belakangnya. kawasan karst ini memiliki batuan gamping yang berumur miosen

berbentuk kerucut yang rapat. Bentukan lahan dari proses pelarutan tersebut memiliki bentuk lahan yang unik, antara lain berupa; gua (*stalagtit* dan *stalagmit*), *dolin* dan *uvala*, *polje*, *keygel karst* (cone), ponor, dan juga terdapat *blind valley*. Morfologi karst makro di suatu wilayah dapat meliputi beberapa kombinasi dari bentukan negatif berupa *dolin*, *uvala*, *polje*, atau ponor; dan bentukan positif berupa *kegel*, *mogote*, atau *pinacle*. Pantai yang terbentuk pada kawasan inipun memiliki 2 tipe, yaitu tipe pantai bergisik dan pantai bertebing terjal. Pada tipe pantai bertebing terjal terdapat adanya beberapa *notch* dan *platform* akibat adanya abrasi laut selatan.

Sungai Lukulo memiliki panjang sekitar 68,5 km, pola aliran dominan dendritik di bagian atas hingga tengah, sedangkan dari tengah ke bawah pola aliran berbentuk paralel hingga sub paralel. Fisiografi bagian hulu berupa perbukitan, pegunungan dan lembah antar pegunungan. Litologi, topografi serta lingkungan fisik yang berbeda-beda di dalam DAS (Daerah Aliran Sungai) menjadikan sifat dan karakteristik yang berbeda-beda pula pada setiap sub-DAS nya, khususnya pengaruh terhadap aliran air permukaan. Perbedaan ketinggian yang mencolok menyebabkan aliran permukaan memiliki kecepatan yang tinggi dan secara fisiografi mudah terbentuknya riil-riil alur sungai yang baru. Kemiringan lereng yang menghadap ke arah barat memiliki jumlah riil sungai lebih banyak, hal ini menandakan bahwa intensitas pelapukan batuan relatif lebih sedikit.

#### **D. Klimatologi**

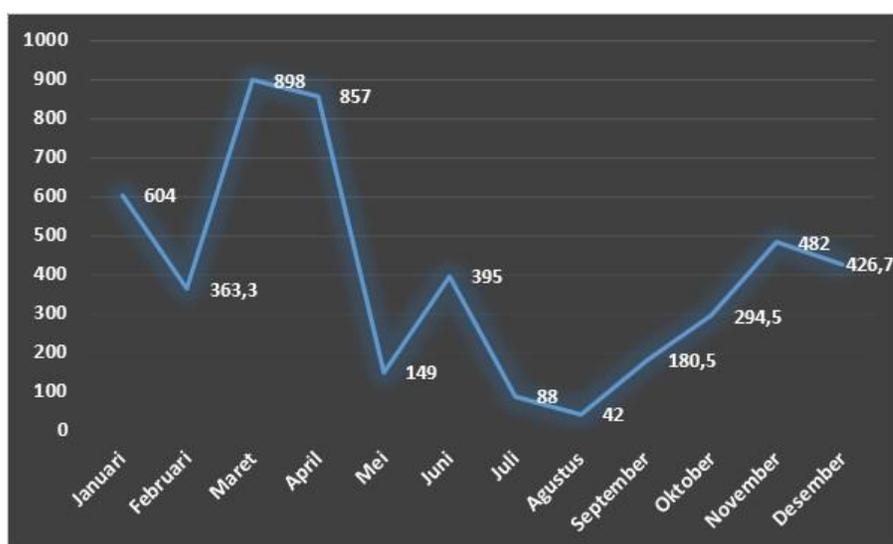
Kabupaten Kebumen berada pada daerah dengan iklim tropis, dengan suhu udara tertinggi di Kabupaten Kebumen tahun 2022 mencapai 34 °C yang terjadi pada Bulan Maret, sedangkan suhu terendah di Kabupaten Kebumen mencapai 19 °C yang terjadi pada bulan Juli. Kelembaban udara di Kabupaten Kebumen maksimum sebesar 97 % terjadi di bulan November dan Februari tahun 2021, sedangkan kelembaban minimum tahun 2022 di Kabupaten Kebumen sebesar 63 % yang terjadi pada bulan Februari. Secara klimatologis Kabupaten Kebumen terdapat bulan basah dengan curah hujan dan hari hujan yang begitu tinggi serta mengenal pula bulan kering dengan curah dan hari hujan begitu rendah. Curah hujan tertinggi selama tahun

2022 di Kabupaten Kebumen terjadi pada bulan Maret dengan intensitas 898 mm dengan jumlah hari hujan tertinggi berada pada bulan Desember yaitu sebanyak 27 hari hujan. Total curah hujan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 adalah sebesar 4780 mm. Secara rinci distribusi curah hujan dan hari hujan sepanjang tahun 2022 di Kabupaten Kebumen disajikan pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 2.2. Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Bulan	Hari Hujan per Bulan (Hari)	Curah Hujan per Bulan (mm)
1	Januari	23	604
2	Februari	20	363,30
3	Maret	23	898
4	April	12	857
5	Mei	6	149
6	Juni	12	395
7	Juli	4	88
8	Agustus	7	42
9	September	14	180,50
10	Oktober	18	294,50
11	November	26	482
12	Desember	27	426,70
<b>Jumlah</b>		<b>192</b>	<b>4780</b>

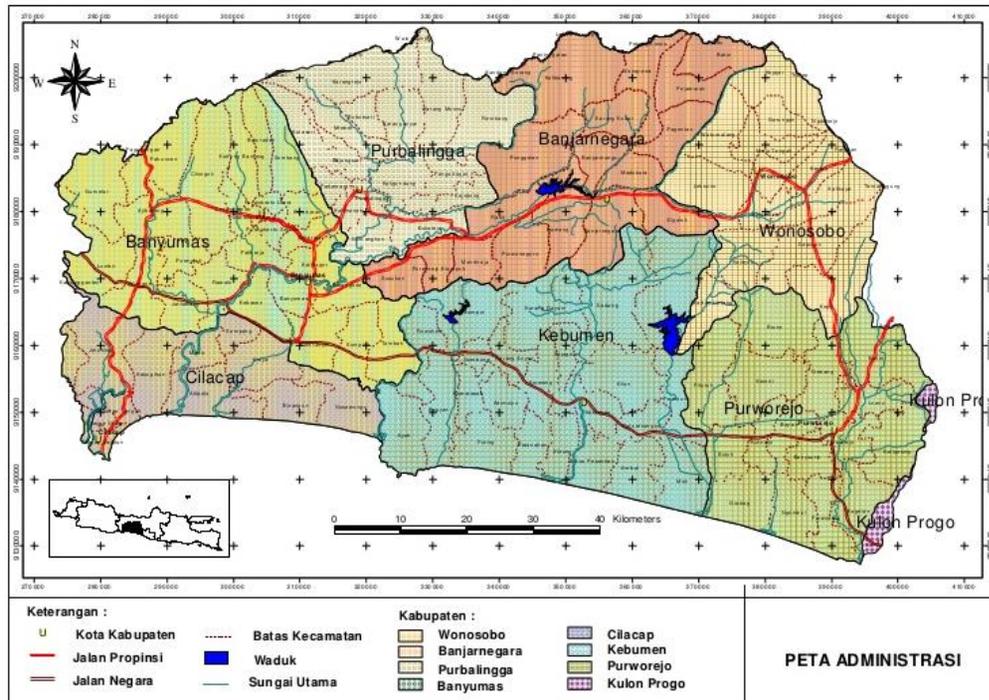
Sumber : BPS, Kabupaten Kebumen dalam Angka Tahun 2023



Gambar 2.6. Grafik Curah Hujan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

### E. Hidrologi

Sistem hidrologi yang ada di Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari sistem Wilayah Sungai (WS) secara keseluruhan. Kabupaten Kebumen didalam sistem Wilayah Sungai merupakan bagian dari Wilayah Sungai Serayu – Bogowonto.



Gambar 2.7. Peta Wilayah Administrasi Wilayah Sungai Serayu – Bogowonto

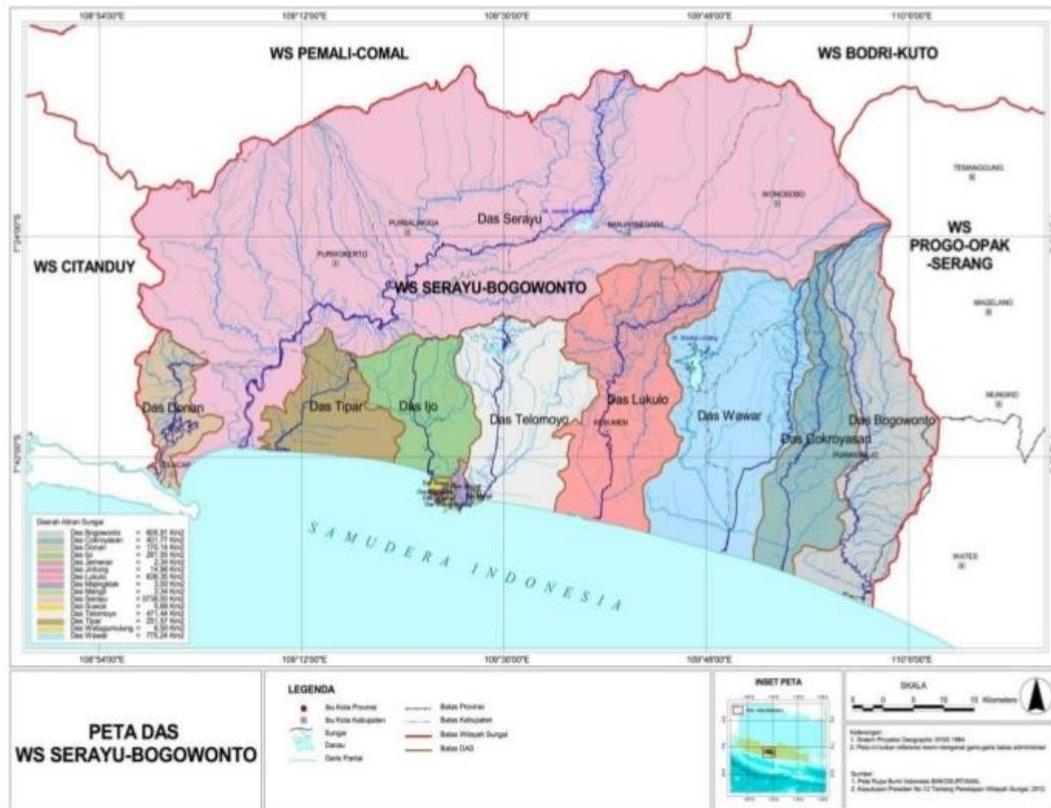
Berdasarkan peta tersebut diatas, Kabupaten Kebumen secara hidrologis dilalui oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) antara lain DAS Ijo, DAS Telomoyo, DAS Lukulo dan DAS Wawar. Ketersediaan air atau potensi air untuk masing-masing DAS dibedakan menjadi potensi air total dan potensi air potensial. Potensi air total adalah potensi air secara keseluruhan sampai muara (laut), sedangkan potensi air potensial adalah potensi air sampai lokasi atau tempat yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya.

Tabel 2.3. Rekapitulasi Ketersediaan Air di WS Serayu Bogowonto

No	Nama DAS	Luas (km <sup>2</sup> )	Potensi Ketersediaan Air Baku
1	Ijo	281,18	13.018,01 liter/detik
2	Telomoyo	472,98	25.941,66 liter/detik

3	Lukulo	640,84	31.126,08 liter/detik
4	Wawar	777,13	11.097,38 liter/detik

Sumber : DPUPR, Tahun 2022



Gambar 2.8. Peta Pembagian DAS Wilayah Sungai Serayu - Bogowonto

## 2.2. POTENSI SUMBERDAYA ALAM KABUPATEN KEBUMEN

### 2.2.1. Sumberdaya Air

Sumber daya air di Kabupaten Kebumen adalah berasal dari mata air, sungai, danau/ waduk/ bendungan, rawa dan air tanah. DAS Luk Ulo Hulu merupakan salah satu DAS yang berada di Propinsi Jawa Tengah yang meliputi 3 Kabupaten, yakni Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Wonosobo. Dua waduk besar di Kabupaten Kebumen yaitu Waduk Wadaslintang dan Waduk Sempor dengan kapasitas penyimpanan air 324.087 m<sup>3</sup> belum sepenuhnya bisa dimaksimalkan penggunaannya untuk berbagai sektor. Sedangkan hutan yang mempunyai luasan 19.872 ha juga sebagian mengalami kerusakan akibat penebangan dan alih fungsi yang tidak menggunakan kaidah konservasi.

### A. Sungai dan Waduk

Sungai di wilayah Kabupaten Kebumen dibagi menjadi 4 Sub Daerah Alirah Sungai (DAS) yaitu :

1) Sub DAS Telomoyo : 55.613,552 Ha terdiri atas :

• Sub DAS Jladri 1 Pecaron	=	5.593,690 Ha
• Sub DAS Jatinegara	=	18.589,897 Ha
• Sub DAS Kemit	=	19.636,080 Ha
• Sub DAS Karanganyar	=	11.789,885 Ha
• Dengan volume tampung air	=	1.786.863.425 m <sup>3</sup>

2) Sub DAS Luk Ulo = 67.553,245 Ha, dengan volume tampung air : 2.170.485.700 m<sup>3</sup>.

3) Sub DAS Medono (Wawar) : 64.984 Ha, dengan volume tampung air 2.087.935.920 m<sup>3</sup>.

4) Sub DAS Ijo : 4.579,583 Ha, dengan volume tampung air : 147.142.002 m<sup>3</sup>. Sehingga total aliran sungai di Kabupaten Kebumen adalah ± 6.192.427.107 m<sup>3</sup>. SWS ini termasuk dalam wilayah pengelolaan BPSDA Probolo ( Progo, Bogowonto, Luk Ulo).

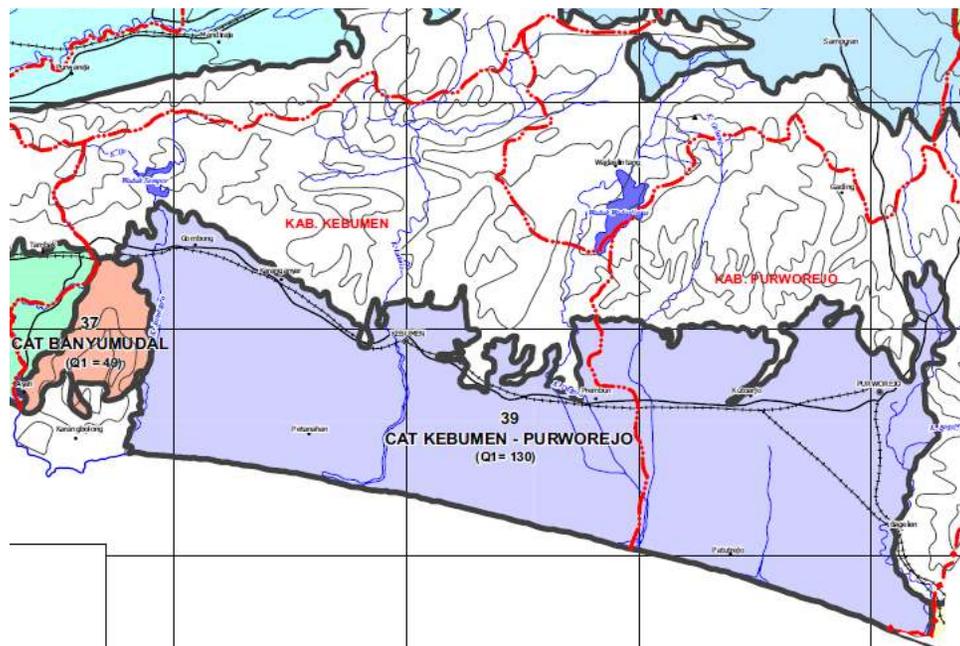
Sungai Luk Ulo mempunyai daerah tangkapan air seluas 596 km<sup>2</sup>, dengan panjang sungai utama 62 km. Beberapa anak sungai Jeblog, Gebog, Mondo, Lokidang dan Loning. Target pelestarian sungai yang diprioritaskan adalah DAS sungai Luk Ulo, karena karakter sungai ini yang unik berbentuk meander. Sungai Luk Ulo melintas sepanjang Kabupaten Kebumen yang berhulu di Kabupaten Banjarnegara dan bermuara di pantai selatan Desa Tanggulangin Klirong. Pada musim penghujan debit sungai Luk Ulo meningkat tajam sedangkan pada musim kemarau sangat kecil.

### B. Cekungan Air Tanah (CAT)

Potensi cekungan air tanah yang ada di Kabupaten Kebumen, sebagaimana data yang di peroleh menurut SK Menteri ESDM No.716 K/40/MEM/2003, tentang Batas Horisontal CAT di Pulau

Jawa dan Madura, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Tengah bahwa debit air tanah bebas yang ada di Kabupaten Kebumen terdiri dari :

- 1) Cakungan Air Tanah (CAT) Banyumudal, dengan debit  $Q_1 = 49$  juta  $m^3$ /tahun
- 2) Cakungan Air Tanah (CAT) Kebumen - Purworejo, dengan debit  $Q_1 = 130$  juta  $m^3$ /tahun



Gambar 2.9. Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Kebumen

### C. Sumber Mata Air

Potensi sumberdaya air di Kabupaten Kebumen selain air permukaan dan air tanah, juga terdapat sumber mata air berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup diketahui bahwa jumlah mata air yang terdata sebanyak 277 buah dan tersebar di beberapa wilayah kecamatan.

Tabel 2.4. Jumlah Sebaran Sumber Mata Air  
Di Rinci Menurut Kecamatan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Mata Air
1.	Ayah	18
2.	Buayan	37
3.	Puring	-
4.	Petanahan	-
5.	Klirong	-

No.	Kecamatan	Jumlah Mata Air
6.	Buluspesantren	-
7.	Ambal	-
8.	Mirit	-
9.	Bonorowo	-
10.	Prembun	5
11.	Padureso	18
12.	Kutowinangun	3
13.	Alian	28
14.	Poncowarno	12
15.	Kebumen	1
16.	Pejagoan	14
17.	Sruweng	25
18.	Adimulyo	-
19.	Kuwarasan	-
20.	Rowokele	27
21.	Sempor	22
22.	Gombong	-
23.	Karanganyar	20
24.	Karanggayam	23
25.	Sadang	11
26.	Karangsambung	13
<b>Jumlah</b>		<b>277</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan, 2022

### 2.2.2. Sumber daya Kehutanan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2030, Kabupaten Kebumen memiliki luas kawasan hutan sebesar 17.574,57 ha, dari total luas kawasan hutan tersebut, 35,56 ha merupakan kawasan hutan prioritas untuk direhabilitasi. Kawasan hutan yang ada di Kabupaten Kebumen yang dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi sebesar 12.343,77 ha, sedangkan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat di Kabupaten Kebumen sebesar 1.357,55 ha. Selain pemanfaatan hutan berbasis korporasi dan berbasis Masyarakat, kawasan hutan di Kabupaten

Kebumen yang dijadikan fungsi perlindungan hutan alam dan ekosistemnya sebesar 3.387,69 ha.

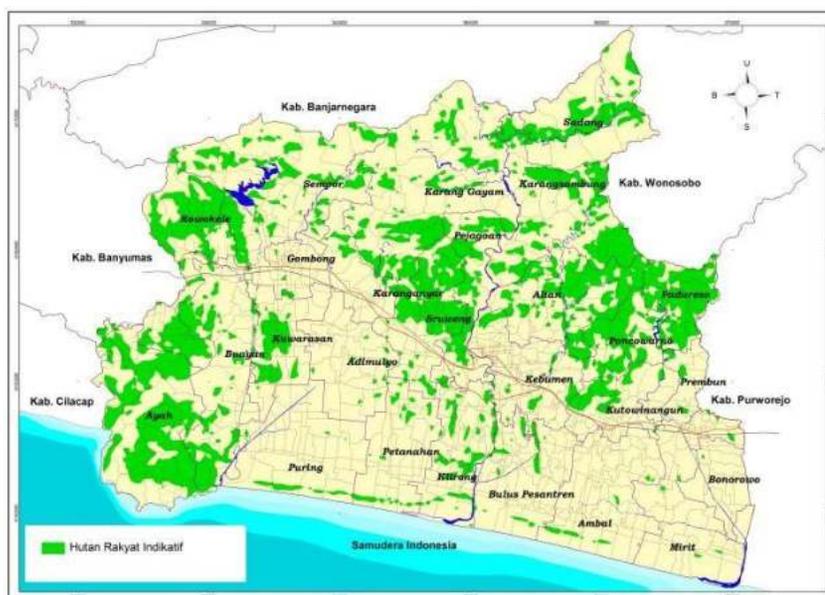


Gambar 2.10. Kawasan Hutan Kabupaten Kebumen

Total luas hutan rakyat yang ada di Kabupaten Kebumen sebesar 26.958,46 ha (Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, 2018) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Hutan rakyat untuk budidaya, terdiri dari hutan yang perlu direhabilitasi sebesar 451,07 ha dan yang tidak perlu direhabilitasi = 26.090,77 ha
- b) Hutan rakyat untuk perlindungan, terdiri dari hutan yang perlu direhabilitasi 0 ha yang tidak perlu direhabilitasi = 416,42 ha

Sebaran secara spasial kawasan hutan rakyat di Kabupaten Kebumen disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 2.11. Sebaran Indikatif Hutan Rakyat di Kabupaten Kebumen

Jenis tanaman kayu-kayuan yang ditanam oleh masyarakat di Lahan Hutan Rakyat. Kabupaten Kebumen meliputi jenis Jati, Akasia auri, Mahoni, Albasia, Sonokeling dan Jenis Rimba campur lainnya. Pola tanam yang diterapkan ada yang murni kayu – kayuan saja dan ada yang dikombinasikan dengan tanaman pangan atau tanaman perkebunan dalam bentuk tumpang sari ( Agroforestry ). Kegiatan usaha tani hutan rakyat di Kabupaten Kebumen sudah mulai digalakkan sejak adanya kegiatan Penghijauan (P3RPDAS) pada tahun 70 - an. Dalam sepuluh tahun terakhir kegiatan usaha tani hutan rakyat telah disuport oleh pemerintah dalam bentuk kegiatan Gerhan/GN-RHL, KBR (Kebun Bibit Rakyat), dan Program RHL DAK Bidang Kehutanan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6605/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2021, hutan negara di Kabupaten Kebumen seluas 17.558,88 ha dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hutan Lindung sebesar 3.819,25 ha
- b. Hutan Produksi Terbatas sebesar 13.074,88 ha
- c. Hutan Produksi sebesar 664,75 ha

### **2.2.3. Sumberdaya Lahan / Tanah**

Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Kebumen berdasarkan data Statistik Sektoral Kabupaten Kebumen Tahun 2023, terdiri dari Lahan Sawah dengan luas lahan sebesar 40.146,71 Ha, lahan pertanian bukan sawah dengan luas sebesar 53.359,71 Ha, dan lahan bukan pertanian seluas 34.605,08 Ha. Untuk kawasan tanah yang diperuntukkan untuk sawah terdiri dari sawah irigasi teknis, sawah irigasi setengah teknis, sawah irigasi sederhana, sawah irigasi desa dan sawah tadah hujan.

Untuk tanah kering berdasarkan data Kabupaten Kebumen dalam Angka Tahun 2023 diklasifikasikan menjadi dua kawasan yaitu kawasan pertanian dan kawasan non pertanian. Untuk penggunaan lahan berupa kawasan pertanian yang meliputi tegalan, ladang,

perkebunan, hutan rakyat, tambak, kolam, padang rumput dan penggunaan lainnya. Sedangkan kawasan non pertanian terdiri dari rumah/bangunan dan lahan sekitarnya, hutan negara, rawa-rawa dan penggunaan lahan lainnya. Secara rinci, gambaran mengenai penggunaan lahan di Kabupaten Kebumen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5. Luas Penggunaan Lahan (Ha) Menurut Wilayah Administrasi

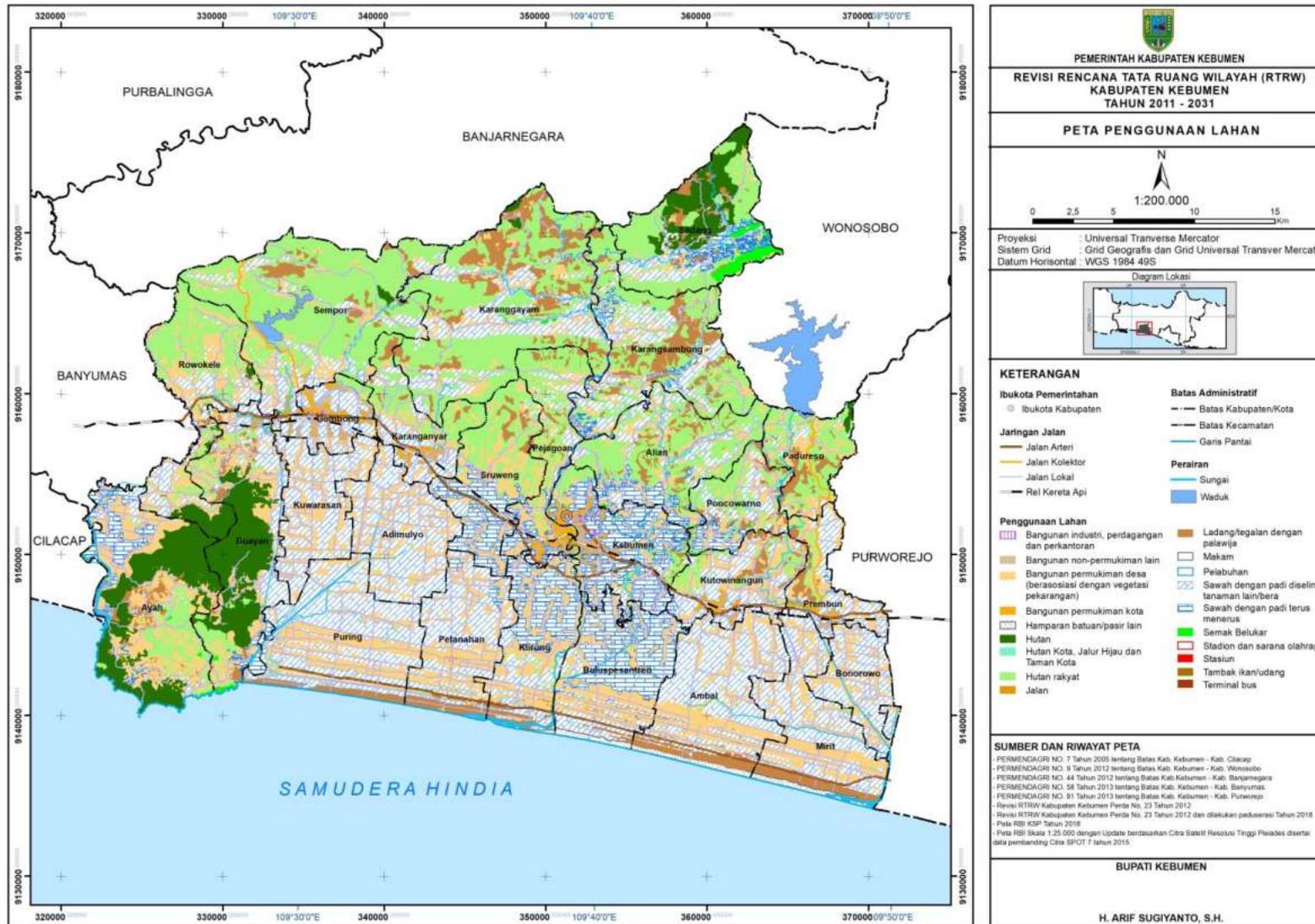
No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Satuan
LUAS WIAYAH KABUPATEN KEBUMEN MENURUT LAHAN SAWAH DAN LAHAN KERING PER KECAMATAN							
1	Lahan Sawah	40.073,2 0	40.173,1 5	40.127,15	40.146,71	40.146,71	Ha
	1. Kecamatan Ayah	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	Ha
	2. Kecamatan Buayan	1.151,19	1.151,20	1.151,20	1.151,20	1.151,20	Ha
	3. Kecamatan Puring	2.477,00	2.477,00	2.477,00	2.477,00	2.477,00	Ha
	4. Kecamatan Petanahan	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	Ha
	5. Kecamatan Klirong	1.353,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	Ha
	6. Kecamatan Buluspesantren	2.089,00	2.089,00	2.089,00	2.114,00	2.114,00	Ha
	7. Kecamatan Ambal	2.837,05	2.837,05	2.837,05	2.837,05	2.837,05	Ha
	8. Kecamatan Mirit	2.029,90	2.029,90	1.946,90	1.945,96	1.945,96	Ha
	9. Kecamatan Bonorowo	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	Ha
	10. Kecamatan Prembun	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	Ha
	11. Kecamatan Padureso	342,00	404,00	404,00	404,00	404,00	Ha
	12. Kecamatan Kutowinangun	1.404,00	1.404,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	Ha
	13. Kecamatan Alian	1.627,00	1.627,00	1.627,00	1.627,00	1.627,00	Ha
	14. Kecamatan Poncowarno	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	Ha
	15. Kecamatan Kebumen	2.235,26	2.235,20	2.228,20	2.223,70	2.223,70	Ha
	16. Kecamatan Pejagoan	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	Ha
	17. Kecamatan Sruweng	1.366,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00	Ha
	18. Kecamatan Adimulyo	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	Ha
	19. Kecamatan Kuwarasan	2.119,00	2.119,00	2.119,00	2.119,00	2.119,00	Ha
	20. Kecamatan Rowokele	962,00	962,00	962,00	962,00	962,00	Ha

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Satuan
	21. Kecamatan Sempor	1.267,80	1.267,80	1.267,80	1.267,80	1.267,80	Ha
	22. Kecamatan Gombang	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	Ha
	23. Kecamatan Karanganyar	813,00	813,00	813,00	813,00	813,00	Ha
	24. Kecamatan Karanggayam	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	Ha
	25. Kecamatan Sadang	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	Ha
	26. Kecamatan Karangsambung	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	Ha
2	Pertanian Bukan Sawah	53.511,95	53.327,33	53.361,48	54.478,68	53.359,71	Ha
	1. Kecamatan Ayah	4.582,30	4.582,30	4.582,30	4.582,30	4.582,30	Ha
	2. Kecamatan Buayan	4.646,70	4.646,80	4.646,80	4.646,80	4.646,80	Ha
	3. Kecamatan Puring	3.489,00	3.489,00	3.489,00	3.487,00	3.487,00	Ha
	4. Kecamatan Petanahan	827,00	827,00	827,00	827,00	827,00	Ha
	5. Kecamatan Klirong	977,80	1.000,90	1.000,30	1.000,30	1.000,30	Ha
	6. Kecamatan Buluspesantren	1.173,57	1.173,57	1.173,57	1.148,57	1.148,57	Ha
	7. Kecamatan Ambal	1.309,02	1.309,02	1.309,02	1.309,02	1.309,02	Ha
	8. Kecamatan Mirit	1.756,72	1.756,44	1.839,44	1.853,51	1.853,51	Ha
	9. Kecamatan Bonorowo	95,02	96,80	96,85	96,85	96,85	Ha
	10. Kecamatan Prembun	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	Ha
	11. Kecamatan Padureso	1.824,30	1.646,40	1.646,40	1.646,40	1.646,40	Ha
	12. Kecamatan Kutowinangun	711,30	711,30	659,00	659,00	659,00	Ha
	13. Kecamatan Alian	2.869,45	2.869,50	2.869,45	2.879,91	2.879,91	Ha
	14. Kecamatan Poncowarno	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	Ha
	15. Kecamatan Kebumen	339,10	339,10	339,10	339,10	339,10	Ha
	16. Kecamatan Pejagoan	1.279,67	1.248,30	1.248,30	2.366,97	1.248,00	Ha
	17. Kecamatan Sruweng	1.464,00	1.464,00	1.461,00	1.461,00	1.461,00	Ha
	18. Kecamatan Adimulyo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ha
	19. Kecamatan Kuwarasan	165,00	165,00	164,00	165,00	165,00	Ha
	20. Kecamatan Rowokele	3.307,00	3.307,00	3.307,05	3.307,05	3.307,05	Ha

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Satuan
	21. Kecamatan Sempor	6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00	Ha
	22. Kecamatan Gombang	6,00	5,90	5,90	5,90	5,90	Ha
	23. Kecamatan Karanganyar	1.081,00	1.081,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	Ha
	24. Kecamatan Karanggayam	5.301,00	5.301,00	5.301,00	5.301,00	5.301,00	Ha
	25. Kecamatan Sadang	3.686,00	3.686,00	3.686,00	3.686,00	3.686,00	Ha
	26. Kecamatan Karangsambung	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	Ha
3	Bukan Pertanian	34.525,75	34.611,02	34.622,87	33.486,11	34.605,08	Ha
	1. Kecamatan Ayah	1.784,70	1.784,70	1.784,70	1.784,70	1.784,70	Ha
	2. Kecamatan Buayan	1.044,11	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	Ha
	3. Kecamatan Puring	231,00	231,00	231,00	233,00	233,00	Ha
	4. Kecamatan Petanahan	1.663,00	1.663,00	1.663,00	1.663,00	1.663,00	Ha
	5. Kecamatan Klirong	1.994,20	1.933,10	1.933,70	1.933,70	1.933,70	Ha
	6. Kecamatan Buluspesantren	1.614,43	1.614,43	1.614,43	1.614,43	1.614,43	Ha
	7. Kecamatan Ambal	2.094,73	2.094,93	2.094,93	2.094,93	2.094,93	Ha
	8. Kecamatan Mirit	1.448,66	1.448,66	1.448,66	1.435,53	1.435,53	Ha
	9. Kecamatan Bonorowo	680,98	679,20	679,15	679,15	679,15	Ha
	10. Kecamatan Prembun	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	Ha
	11. Kecamatan Padureso	728,70	844,60	844,60	844,60	844,60	Ha
	12. Kecamatan Kutowinangun	1.257,70	1.257,70	1.266,00	1.266,00	1.266,00	Ha
	13. Kecamatan Alian	1.278,55	1.278,50	1.278,55	1.268,09	1.268,09	Ha
	14. Kecamatan Poncowarno	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	Ha
	15. Kecamatan Kebumen	1.629,64	1.629,70	1.636,70	1.641,20	1.641,20	Ha
	16. Kecamatan Pejagoan	1.471,15	1.502,70	1.502,70	384,03	1.503,00	Ha
	17. Kecamatan Sruweng	1.538,00	1.538,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	Ha
	18. Kecamatan Adimulyo	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	Ha
	19. Kecamatan Kuwarasan	1.100,00	1.100,00	1.101,00	1.100,00	1.100,00	Ha

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Satuan
	20. Kecamatan Rowokele	1.110,00	1.110,50	1.110,45	1.110,45	1.110,45	Ha
	21. Kecamatan Sempor	2.171,20	2.171,20	2.171,20	2.171,20	2.171,20	Ha
	22. Kecamatan Gombong	889,00	889,10	889,10	889,10	889,10	Ha
	23. Kecamatan Karanganyar	1.246,00	1.246,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	Ha
	24. Kecamatan Karangayam	4.012,00	4.012,00	4.012,00	4.012,00	4.012,00	Ha
	25. Kecamatan Sadang	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00	Ha
	26. Kecamatan Karangsambung	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00	Ha

*Sumber : Dokumen Statistik Sektoral Kabupaten Kebumen Tahun 2023*



Gambar 2.12. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kebumen

## 2.3. KEANEKARAGAMAN HAYATI

### 2.3.1. Jenis Flora dan Fauna

Jumlah keanekaragaman hayati jenis flora di Kabupaten Kebumen sebanyak 382 spesies flora yang terbagi ke dalam 102 famili dan 204 spesies fauna yang tercakup dalam 103 famili. Jenis fauna ini terbagi ke dalam 178 spesies fauna terestrial dengan jumlah famili sebanyak 84 dan 26 spesies fauna aquatik dengan jumlah famili sebanyak 19. Keberadaan jenis flora dan fauna tersebut pada umumnya mudah dijumpai di desa-desa di wilayah studi, kecuali untuk beberapa spesies. Jenis-jenis flora yang jarang ditemui, yaitu jenis-jenis yang populasinya sedikit, terdiri dari spesies:

Tabel 2.6. Jenis Flora yang Jarang Dijumpai Tahun 2022

No.	Nama Lokal	Nama Latin	Habitat/ Ekosistem	Lokasi
1	Bisbul	<i>Diospyros blancoi</i>	Pekarangan	Ds. Kemujan, Adimulyo
2	Butun darat	<i>Barringtonia racemosa</i>	Pekarangan	Ds. Sugihwaras, Adimulyo
3	Cempaka kuning	<i>Michelia champaca</i>	Pekarangan	Ds. Karanganyar, Karanganyar
4	Cempaka putih/kantil	<i>Michelia alba</i>	Pekarangan	Ds. Wonorejo, Karanganyar
5	Cermai	<i>Phyllanthus acidus</i>	Pekarangan	Ds. Grenggeng, Karanganyar
6	Gebang	<i>Corypha utan</i>	Pekuburan	Ds. Sidoharjo, Sruweng
7	Gembili	<i>Dioscorea esculenta</i>	Talun	Ds. Pohkumbang, Karanganyar
8	Gempol	<i>Nauclea orientalis</i>	Pekarangan	Ds. Kemujan, Adimulyo
9	Janglot	<i>Milium horsfieldii</i>	Pekarangan	Ds. Adikarto, Adimulyo
10	Kepel	<i>Stelelocarpus burahol</i>	Pekarangan	Ds. Grenggeng, Karanganyar

No.	Nama Lokal	Nama Latin	Habitat/ Ekosistem	Lokasi
11	Kopi anjing/ nam-nam	<i>Cinometra cauliflora</i>	Pekarangan	Ds. Grenggeng, Karanganyar
12	Kweni	<i>Mangifera odorata</i>	Talun	Ds. Pohkumbang, Karanganyar
13	Mulwo	<i>Annona reticulata</i>	Pekarangan	Ds. Giwangretno, Sruweng
14	Nagasari	<i>Messua ferrea</i>	Pekuburan	Ds. Wonorejo, Karanganyar
15	Pinang	<i>Areca catechu</i>	Pekarangan	Ds. Wonorejo, Karanganyar
16	Pucung	<i>Pangium edule</i>	Talun	Ds. Pohkumbang, Karanganyar

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab.

Kebumen, 2022

Adapun jenis-jenis fauna yang sudah jarang ditemui di alam adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7. Jenis Fauna yang Jarang Dijumpai Tahun 2022

No.	Nama Lokal	Nama Latin	Habitat/ Ekosistem	Lokasi
<b>I. Fauna Terestrial</b>				
1.	Alap alap	<i>Falco moluccensis</i>	Hutan	Karanggayam
2.	Belibis kembang	<i>Dendrocygna arcuata</i>	Sawah Teegenang Musiman	Ds. Tegalretno, Petanahan
3.	Elang jawa	<i>Nisaetus bartelsi</i>	Hutan	Karanggayam
4.	Landak	<i>Hystrix javanica</i>	Hutan	Karanggayam
5.	Trenggiling	<i>Manis javanica</i>	Hutan	Karanggayam
6.	Ular jali	<i>Ptyas mucosus</i>	Talun	Ds.

				Pohkumbang, Karang
7.	Ular welang	<i>Bungarus fasciatus</i>	Talun	Ds. Pohkumbang, Karang
8.	Ular weling	<i>Bungarus candidus</i>	Talun	Ds. Pohkumbang, Karang
<b>II. Fauna Aquatik</b>				
1.	Penyu belimbing	<i>Dermochelys coriacea</i>	Samudera	Petanahan
2.	Penyu hijau	<i>Chelonia mydas</i>	Samudera	Petanahan
3.	Penyu lekang	<i>Lepidochelys olivacea</i>	Samudera	Petanahan
4.	Sidat	<i>Anguilla sp.</i>	Sungai	Adimulyo

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab.

Kebumen, 2022

### 2.3.2. Flora dan Fauna Identitas

Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik tingkatan gen, tingkatan spesies, maupun tingkatan ekosistem. Keanekaragaman hayati berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, obat-obatan, dan bahan bakar.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati tidak terbatas pada hal tersebut di atas, tetapi lebih luas lagi yaitu berperan dalam pengaturan kondisi lingkungan seperti kesuburan tanah, hidrologi, suhu, kelembaban dan pengendalian pencemaran udara, namun potensi yang sangat besar belum dimanfaatkan dengan baik, bahkan pada tahun-tahun terakhir ini terjadi kemerosotan keanekaragaman hayati akibat dari eksploitasi yang berlebihan dan dapat menyebabkan penurunan dalam hal jenis serta populasinya bahkan kepunahan. Keanekaragaman hayati

merupakan aset bagi pembangunan nasional dan daerah sehingga diperlukan pengelolaan secara terpadu, baik antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan.

Kabupaten Kebumen menetapkan Flora dan Fauna identitas sebagai berikut :

- **Flora identitas : Kelapa Genjah Entog (*Cocos Nucifera LCV Entog*)**

Jenis kelapa ini termasuk memiliki umur berbuah lebih cepat dibandingkan jenis kelapa lain. Selain umur panen yang relatif lebih cepat, kelapa genjah juga mampu menghasilkan buah lebih banyak. Burung walet putih banyak ditemui secara alami di dalam goa-goa karst di bagian selatan Kabupaten Kebumen.

Kelapa genjah termasuk produk unggulan daerah Kabupaten Kebumen. Jenis kelapa ini termasuk memiliki umur berbuah lebih cepat dibandingkan jenis kelapa lain. Selain umur panen yang relatif lebih cepat, kelapa genjah juga mampu menghasilkan buah lebih banyak. Cara panen pun lebih mudah karena pohon kepala genjah tidak tinggi. Produk turunan kelapa antara lain : gula merah, batok kelapa, fiber sabut, kayu. Keanekaragaman hayati tumbuhan dan hewan merupakan sumber penghasil pangan, sandang dan papan.



Gambar 2.13. Jenis Kelapa Genjah Entog (*Cocos Nucifera LCV Entog*)

- **Fauna Identitas : Walet Putih (*Collocalea Fusiphagus*)**

Keberadaan burung walet dapat ditemukan banyak terdapat di bagian selatan Kebumen terutama di dalam goa-goa karst yang lembab sesuai dengan habitatnya. Selain itu, saat ini sudah banyak budidaya burung walet rumahan dengan mereplikasi kondisi lingkungan dan kelembapan sesuai dengan habitat aslinya.

Burung ini menghasilkan air liur yang kaya akan protein yang kemudian dikenal dengan nama “sarangburung walet”. Sarang burung walet merupakan salah satu komoditas penting di Kabupaten Kebumen mengingat nilai ekonomisnya yang sangat tinggi. Burung walet (*Collocalia fuciphaga*) merupakan ciri khas Kabupaten Kebumen. Saat ini, hasil unduhan burung walet terus menurun dari tahun ketahun. Burung yang dahulu hidup dominan di goa sekarang banyak yang dibudidayakan di rumah-rumah penduduk khusus untuk budidaya burung walet. Penurunan populasi walet digoa terjadi karena sistem panen yang kurang mengakomodasi kelestarian burung terbut juga karena berkurangnya makanan alami burung dari hutan sekitarnya yang banyak mengalami perubahan dan kerusakan.



Gambar 2.14. Jenis Walet Putih (*Collocalea Fusiphagus*)



Gambar 2.15. Proses Pemanenan Sarang Burung Walet dan Sarang Burung Walet Yang Sudah Dibersihkan

Degradasi lingkungan kawasan pantai selatan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yang juga dipicu kerusakan hutan akibat penjarahan pada tahun 1997-1998 mengakibatkan populasi burung walet (*Collocalia*) di goa-goa pantai selatan, seperti Karangbolong, Pasir, dan Karangduwur, kini turun tajam. Hal itu terlihat dari kian kecilnya hasil panen sarang burung sarat protein di tiga kawasan tersebut. Pada tahun 1994 hasil panen sarang burung walet masih 264,8 kilogram. Namun, selama 12 tahun terakhir ini angka itu menurun tajam. Pada tahun 2005 tercatat hanya 78,1 kilogram sarang burung yang dihasilkan di kawasan tersebut. Hasil unduhah (panen) pertama tahun ini bahkan hanya 18 kilogram. Kondisi terparah terjadi di kawasan Karangbolong.

Hasil panen sarang burung walet tahun lalu hanya 12,6 kilogram, merosot tajam dari tahun 1994 yang tercatat 135 kilogram. Empat kali panen Selain karena kerusakan hutan, depopulasi terjadi akibat tidak tersedianya waktu yang cukup bagi burung untuk berkembang biak. Dalam satu tahun sarang burung walet bisa dipanen empat kali, yang dalam perhitungan Jawa terjadi pada masa Kapitu (Januari), Kasanga (Maret), Karo (Agustus), dan Kapapat (September). Semestinya dalam empat periode panen itu, satu kali panen tidak berorientasi hasil, tetapi menitikberatkan pada aspek konservasi. Selain itu, penurunan populasi walet digoa terjadi karena sistem panen yang kurang mengakomodasi kelestarian burung tersebut juga karena berkurangnya makanan alami burung dari hutan sekitarnya yang banyak mengalami perubahan dan kerusakan.

Dari tiga goa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, yang terdiri dari Goa Karangbolong, Goa Pasir dan Goa Karangduwur, tercatat tahun 2006 dan 2007 penghasil sarang burung walet terbanyak adalah Goa Karangduwur. Secara series juga ditampilkan data sejak dari awal pengunduhan yaitu tahun 1993/1994 sampai akhir tahun 2007 dimana terlihat dengan jelas bahwa hasil unduhan cenderung mengalami penurunan yang sangat drastis. Mulai Tahun 2012 aset daerah dari burung walet yang semula dikelola oleh pemerintah daerah diserahkan kepada

pemerintah desa. Tentu hal ini akan berdampak terhadap kelestarian burung walet.

### **2.3.3. Flora dan Fauna yang Dilindungi**

#### **A. Flora**

Keberadaan flora yang populasinya menurun drastis sehingga jarang ditemui, seperti tercantum dalam Tabel 2.6. pada umumnya kini hanya bisa dijumpai di lahan pekarangan, talun dan/atau pemakaman. Tipe ekosistem pekarangan/talun yang belum mengalami alih fungsi pada umumnya masih menyimpan spesies flora alami. Bersama dengan areal pemakaman tipe ekosistem ini seakan-akan menjadi benteng pertahanan terakhir bagi spesies-spesies flora alami untuk menjaga keberlangsungan populasinya di wilayah pedesaan.

Untuk jenis-jenis flora yang ada di wilayah studi tidak ada yang termasuk dalam kategori dilindungi. Namun demikian keberadaan populasi dari jenis-jenis flora yang cukup rendah (langka secara lokalitas) patut mendapat perhatian. Selain itu, perhatian terhadap flora lainnya yang bernilai penting juga perlu ditingkatkan. Jenitri (*Elaeocarpus ganitrus*) dan kelapa genjah entog (*Cocos nucifera*) adalah kekayaan hayati flora yang bernilai penting. Keragaman genetik yang dimiliki jenitri (ragam bentuk buah) menjadi daya tarik dan bernilai ekonomi tinggi serta telah menjadi komoditas ekspor. Begitu juga dengan genjah entog yang menjadi flora identitas Kabupaten Kebumen. Spesies ini, dengan keunggulan dari sisi umur dan tinggi pohon siap produksi, memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai komoditas penghasil nira untuk bahan baku gula kelapa.

#### **B. Fauna**

Sementara itu keberadaan fauna terestrial dan akuatik air tawar yang masih bertahan, seperti tercantum dalam Tabel 2.7. dengan populasi rendah di Kabupaten Kebumen pada umumnya menempati habitat yang berada di hulu-hulu sungai atau ekosistem hutan tanaman yang berada di perbukitan-pegunungan dengan kondisi topografi agak curam hingga curam. Kondisi yang sulit dijangkau

memungkinkan satwa-satwa tersebut terhindar dari kegiatan perburuan liar, pemakaian pestisida, dan penggunaan strum. Dari jenis-jenis fauna yang berhasil diidentifikasi beberapa diantaranya merupakan satwa yang memiliki status konservasi dilindungi menurut peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia, yaitu: Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Jenis-jenis yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8. Jenis Fauna yang Dilindungi di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	Nama Lokal	Nama Latin
<b>I. Fauna Terestrial</b>		
1.	Alap alap	<i>Falco moluccensis</i>
2.	Cekakak jawa	<i>Halcyon chloris</i>
3.	Cucuk urang	<i>Alcedo coerulescens</i>
4.	Elang jawa	<i>Nisaetus bartelsi</i>
5.	Landak	<i>Hystrix javanica</i>
6.	Madu kelapa	<i>Anthreptes malacensis</i>
7.	Prit gantil	<i>Arachnothera longirostra</i>
8.	Prit gantil gunung	<i>Nectarinia sperata</i>
9.	Tengkek	<i>Halcyon cyanoventris</i>
10.	Trenggiling	<i>Manis javanica</i>
<b>II. Fauna Aquatik</b>		
1.	Penyu belimbing	<i>Dermochelys coriacea</i>
2.	Penyu hijau	<i>Chelonia mydas</i>
3.	Penyu lekang	<i>Lepidochelys olivacea</i>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen, 2022

#### 2.4. SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT KABUPATEN KEBUMEN

Kabupaten Kebumen memiliki wilayah dengan panjang garis pantai mencapai 57,5 Km yang berada di bagian selatan. Potensi ini sangat mendukung pengembangan perikanan air laut maupun untuk perikanan darat.

## 1) Sumberdaya Perikanan

Berdasarkan database Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2020, Luas (Ha) pemanfaatan lahan untuk penangkapan dan budidaya perikanan di Kabupaten Kebumen tahun 2020 sebesar 42,451.13 Ha, yang tersebar di beberapa kecamatan dan lahan yang dimanfaatkan meliputi kolam, tambak, sungai, rawa, waduk, genangan dan sawah. Dari beberapa jenis lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan, terbesar adalah 39,748.00 ha berupa lahan sawah sedangkan pemanfaatan terkecil pada lahan rawa dengan luas sebesar 65 ha.

Total produksi ikan konsumsi di Kabupaten Kebumen tahun 2022, total sebesar 2.609.726,90 Kg dengan jumlah nilai sebesar Rp. 48.281.813.646,- dan tersebar di beberapa kecamatan. Produksi perikanan tangkap tahun 2022 di Kabupaten sebesar 9.138.317,30 kg yang tersebar di beberapa lokasi TPI dengan total nilai Rp. 173.982.608.774,-

Tabel 2.9. Produksi (Kg) dan Nilai Produksi Ikan (Rp) di Kabupaten Kebumen

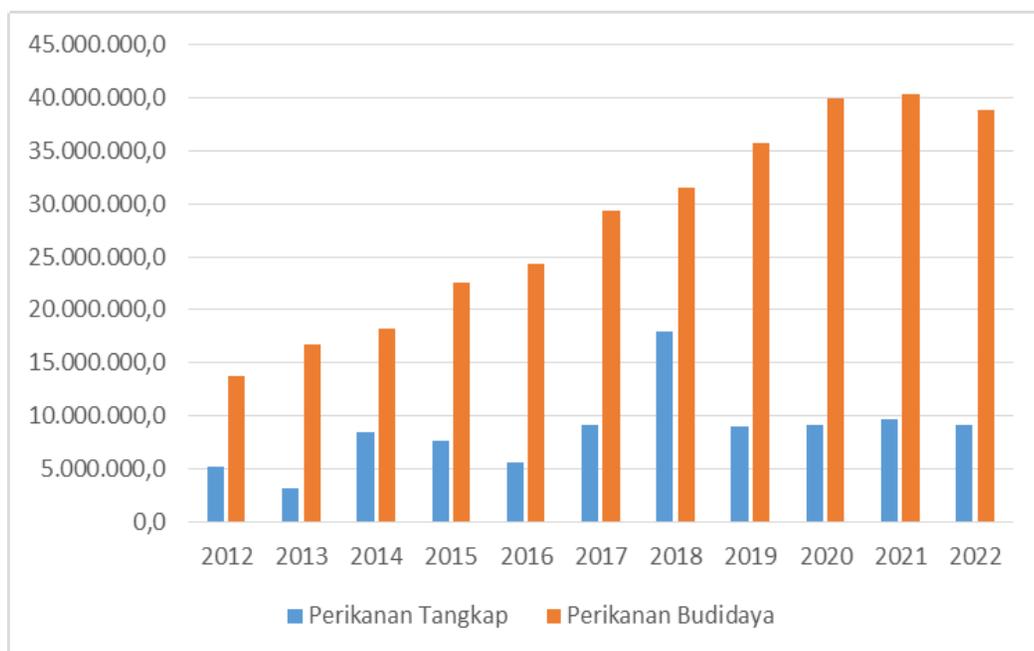
No	Tahun	Volume (Kg)		Nilai (Rp)	
1	2012	3.264.538,56		45.704.675.648	
2	2013	1.773.609,00	-46,90%	57.302.530.077	25,38%
3	2014	6.856.887,43	295,53%	53.649.259.553	-6,38%
4	2015	4.087.465,04	-40,39%	78.962.820.611	47,18%
5	2016	870.893,09	-78,69%	45.493.076.278	-42,39%
6	2017	4.655.432,15	434,56%	66.734.969.285	46,69%
7	2018	16.903.447,02	263,09	93.073.615.849	39,47%
8	2019	3.790.400,19	-18,58%	114.997.725.658	23,56%
9	2020	1.560.547,59	-90,77%	108.835.290.491	-5,36%
10	2021	2.197.176,65	40,80%	93.963.681.746	-13,66%
11	2022	2.609.726,90	18,78%	48.281.813.646	-48,62%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 2.10. Produksi Perikanan di Kabupaten Kebumen Tahun 2012–  
2022

Tahun	Perikanan Tangkap		Perikanan Budidaya	
	Volume (Kg)	Nilai (Rp)	Volume (Kg)	Nilai (Rp)
2012	5.138.000,00	75.913.504.000	13.693.122,30	15.142.364.570
2013	3.188.463,60	81.628.361.727	16.713.990,30	17.905.336.750
2014	8.423.093,00	78.474.964.364	18.196.920,84	27.497.047.505
2015	7.598.465,00	85.789.847.661	22.569.888,38	92.570.733.526
2016	5.585.094,00	121.345.095.660	24.316.234,00	112.809.639.750
2017	9.068.456,45	128.210.826.243	29.312.560,00	126.133.394.650
2018	17.987.363,63	110.051.417.462	31.493.973,00	161.941.528.398
2019	8.915.800,00	208.409.454.306	35.703.671,00	123.720.160.025
2020	9.068.530,00	196.258.500.419	39.958.881,00	137.731.856.235
2021	9.646.661,67	212.457.910.669	40.409.074,00	142.137.000.090
2022	9.138.317,30	173.982.608.774	38.828.017,00	145.584.860.700

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten  
Kebumen Tahun 2023



Gambar. 2.16. Grafik Produksi Perikanan (Kg) di Kabupaten Kebumen

Potensi sumberdaya ikan di Kabupaten Kebumen berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 sebesar 264.133,34 ton/tahun dengan komoditas terbesar berupa ikan Demersal dengan potensi sebesar 98.343,74 ton/tahun dan ikan pelagis sebesar 64.155,88 ton/tahun. Secara rinci, potensi sumberdaya ikan di Kabupaten Kebumen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11. Potensi Sumberdaya Ikan di Kabupaten Kebumen

No	Jenis Sumberdaya Ikan	Luas Penyebaran (Km <sup>2</sup> )	Potensi (Ton/Tahun)
1	Ikan pelagis	17.880,68	64.155,88
2	Ikan Demersal	17.880,68	98.343,74
3	Udang Penaeidae	268,21	86,90
4	Udang barong/lobster	268,21	326,41
5	Cumi-cumi	17.880,68	5.364,20
6	Sotong	17.880,68	697,35
7	Ikan tuna	1.600	64.000
8	Ikan cakalang	420	30.240
9	Ikan karang	134,10	516,55
10	Ikan ekor kuning	134,10	402,30
<b>Jumlah</b>			<b>264.133,34</b>

Sumber : Dokumen Database, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2022

## 2) Terumbu Karang

Potensi sumber daya terumbu karang terdapat di perairan Kecamatan Ayah Desa Menganti, dengan total luasan sebesar 21,95 Ha dengan kondisi baik sebesar 96,4% dan kondisi rusak sebesar 5,4%.

Tabel 2.12. Luas dan Kondisi Tutupan Terumbu Karang di Kabupaten Kebumen

No.	Kabupaten/Kota	Luas Tutupan (Ha)	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
1	Ayah	21.95		96.40		5.40
2	Buayan					
3	Puring					
4	Petanahan					
5	Ambal					
6	Mirit					
<b>Jumlah</b>		<b>21.95</b>		<b>96.4</b>		<b>5.4</b>

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten Kebumen Tahun 2022

### 3) Mangrove

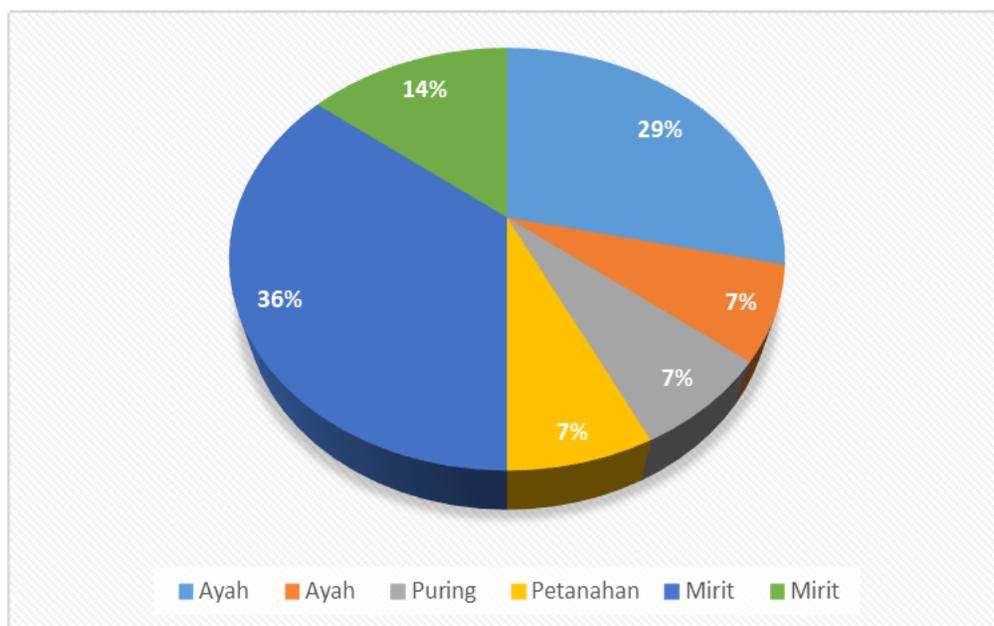
Kabupaten Kebumen memiliki garis pantai sepanjang 57,5 km yang terbentang dari Kecamatan Mirit hingga Kecamatan Ayah. Luas total tutupan mangrove di Kabupaten Kebumen seluas 74,61 Ha yang tersebar di tujuh lokasi, yaitu: Kecamatan Ayah, Buayan, Buluspesantren, Klirong, Mirit, Petanahan dan Puring dengan persentase tutupan 100%. Kondisi kerapatan tutupan mangrove di Kabupaten Kebumen menunjukkan kisaran 14,167 pohon/hektar. Secara rinci terkait luas dan kerapatan hutan mangrove di Kabupaten Kebumen disajikan pada tabel dibawah ini

Tabel 2.13. Luasan dan Kerapatan Hutan Mangrove di Kabupaten Kebumen

No	Desa	Kecamatan	Luas Lokasi (Ha)	Keterangan
1	Ayah	Ayah	20	Kondisi : Baik, sebagian merupakan tegakan tua yang sudah berbuah, terletak di Muara Sungai Bodho/DAS Ijo Hilir dengan jenis <i>Rizophora spp</i> dan <i>Bruguiera spp</i>
2	Candirenggo	Ayah	5	Tanaman awal adalah nipah, mulai tahun 2008 ada introdusir penanaman jenis <i>Rizophora spp</i> dan <i>Bruguiera spp</i>
3	Tambakmulyo	Puring	5	Dominasi jenis nipah
4	Tegalretno	Petanahan	5	Ada introdusir jenis <i>Rizophora spp</i> dan <i>Avicenia spp</i> tahun 2008,2009. Lokasi di

No	Desa	Kecamatan	Luas Lokasi (Ha)	Keterangan
				Laguna/Sungai buntu Lukulo
5	Lembupurwo	Mirit	25	Kondisi sangat baik, jenis utama adalah <i>Rizhopora spp</i> <i>Avicenia spp</i> dan <i>Bruguiera spp</i> . Mulai dirintis sejak tahun 2008. Sekarang kondisinya rapat/lebat.
6	Wiromartan	Mirit	10	Kondisi baik, jenis <i>Rizhopora spp</i> <i>Avicenia spp</i> dan <i>Bruguiera spp</i> . Mulai dirintis sejak tahun 2008. Kondisinya sekarang rapat/lebat.
<b>Total</b>			<b>70</b>	

Sumber : Dokumen RP-RHL Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VIII Periode 2020-2024



Gambar 2.17. Persentase Kondisi Hutan Mangrove di Kabupaten Kebumen

## 2.5. PERTAMBANGAN

Potensi pertambangan di Kabupaten Kebumen, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031, terdiri atas :

1. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara.
2. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.

Potensi mineral bukan logam di antaranya phospat di Kecamatan Ayah; kalsit berada di Potensi mineral logam meliputi mangan di Kecamatan Ayah dan Buayan; pasir besi di sepanjang pantai; dan emas di Kecamatan Ayah, Buayan, Karanggayam, Sadang dan Karangsembung, Kecamatan Ayah dan Buayan; tanah liat berada di Kecamatan Buayan, Klirong, Kebumen, Pejagoan, Sruweng, Adimulyo, dan Rowokele; kaolin berada di Kecamatan Ayah dan Sempor; pasir kuarsa berada di Kecamatan Karangsembung, Sadang, Karanggayam dan Sempor; serta bentonit berada di Kecamatan Gombong.

Sementara potensi batuan, meliputi andesit berada di Kecamatan Ayah, Buayan, Padureso, Alian, Poncowarno, Sempor, Karanggayam, Sadang, dan Karangsembung; pasir berada di sepanjang sungai; gamping berada di Kecamatan Buayan dan Karangsembung; marmer berada di Kecamatan Karanggayam, Sadang, dan Karangsembung; tanah urug berada di Kecamatan Ayah, Buayan, Prembun, Padureso, Kutowinangun, Alian, Poncowarno, Sruweng, Rowokele, Sempor, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Sadang, dan Karangsembung; tras berada di Kecamatan Ayah; dan sirtu berada di Kecamatan Buayan, Klirong, Alian, Pejagoan, Sadang, dan Karangsembung. Sementara potensi batubara terdapat di Kecamatan Ayah dan Buayan. Potensi Mineral di Kabupaten Kebumen disebutkan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.14. Potensi Mineral di Kabupaten Kebumen

No.	Kecamatan	Jenis Mineral	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
<b>A</b>	<b>Kelompok bahan Bangunan</b>			
1	Ayah, Sadang, Buayan	Andesit	452	560.000.000
2	Sadang	Diabas	17.762	
3	Sadang	Basalt dan gabro	2	1.500.000
4	Sepanjang sungai	Sirtu	8	1.800.000
5	Sadang, Sempor, Karanggayam	Marmer	3	8.000.000
6	Sadang dan Alian	Breksi		
7	Sadang	Serpentinit		
<b>B</b>	<b>Kelompok Bahan Keramik</b>			
8	Ayah dan Sadang	Kaolin	3	36.000
9	Kebumen, Pejagoan, Sruweng	Lempung / tanah	5.162	132.600.000
10	Sadang	Liat / Clay	4.505	4.995
<b>C</b>	<b>Kelompok Mineral Industri</b>			
11	Ayah dan Buayan	Batu Gamping / Kapur	4.505	17.500.000.000
12	Ayah dan Buayan	Phosphat	21	2.100.000
13	Ayah dan Gombang	Bentonit	6	700.000
14	Sempor dan Karanggayam	Asbes	2	600.000

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031

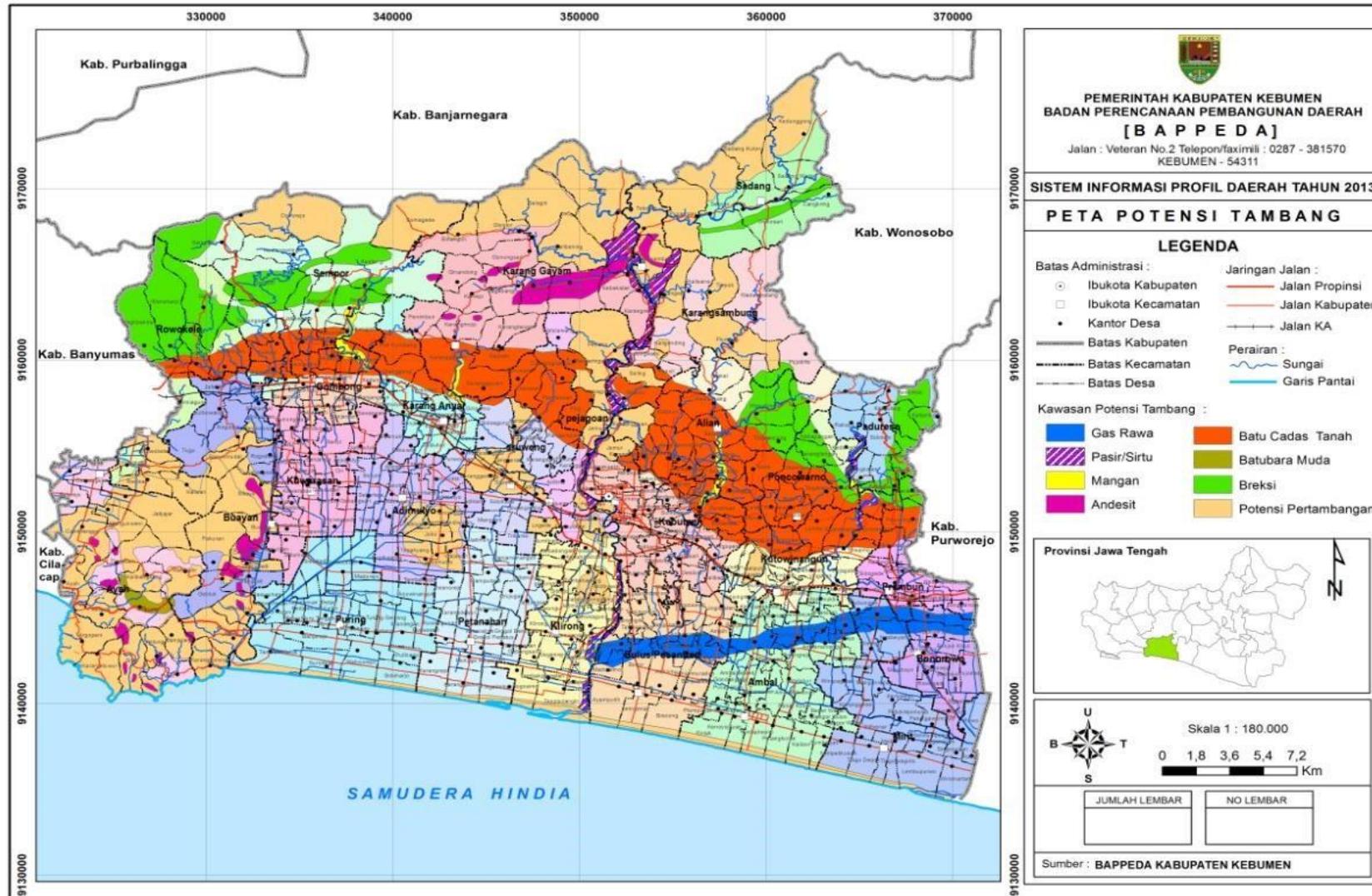
Hingga tahun 2023, luas izin usaha pertambangan di Kabupaten Kebumen sebesar 107,84 ha yang tersebar di beberapa lokasi dan terdiri

dari 15 perusahaan pertambangan. Sebagian besar komoditas yang ditambang adalah andesit. Secara rinci terkait Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Kebumen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Kebumen

No	Nama Pemegang Perizinan	Lokasi		Luas (Ha)	Rencana Produksi Tahunan (m <sup>3</sup> )	Komoditas
		Desa	Kecamatan			
1	CV. Lista Karya	Karangbolong	Buayan	5,0875	46.705	Andesit
2	Sdr. Eko Prayitno	Giyanti	Rowokele	5,456	11.797	Andesit
3	Sdr. Sudarmanto	Sendangdalem	Padureso	7,65	14.837	Andesit
4	CV. Graha Kirana	Kemanggukan	Alian	6,756	25.000	Andesit
5	CV. Duta Karya Mining	Sendangdalem	Padureso	5,06	11.832	Andesit
6	CV. JKN	Jladri, Karangbolong	Buayan	5,29	15.000	Andesit
7	Sdr. Imam Mudakir	Jintung	Ayah	3,7	15.000	Andesit
8	CV. Giri Pundi Mas	Mangunweni	Ayah	4,84	41.668	Andesit
9	PT. Kebumen Tata Resources	Tlogosari	Ayah	27,7	35.000	Andesit
10	Sdr. Anton Hernugroho, ST	Jladri, Karangbolong	Buayan	7,65	21.375	Andesit
11	Sdr. Widodo	Jintung	Ayah	4,5	45.543	Andesit
12	PT. Maju Bersama Joko	Mangunweni	Ayah	4,09	19.800	Andesit
13	CV. Selo Inggil Manis	Mangunweni	Ayah	3,99	15.000	Andesit
14	CV. Giat Alam Sejahtera	Rangkah & Adiwarno	Buayan	5,88	28.535	Sirtu
15	CV. Lista Karya	Pasir	ayah	10,19	75.000	Andesit

Sumber : Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan, 2023



Gambar 2.18. Peta Potensi Tambang di Kabupaten Kebumen

## 2.6. PERTANIAN DAN PETERNAKAN

### 2.6.1. Pertanian

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian di Kabupaten Kebumen mengingat bahwa kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen tahun 2022 menurut lapangan usaha dan atas dasar harga berlaku mencapai 21,31 %. Sektor pertanian mencakup sub sektor tanaman pangan, sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor kehutanan.

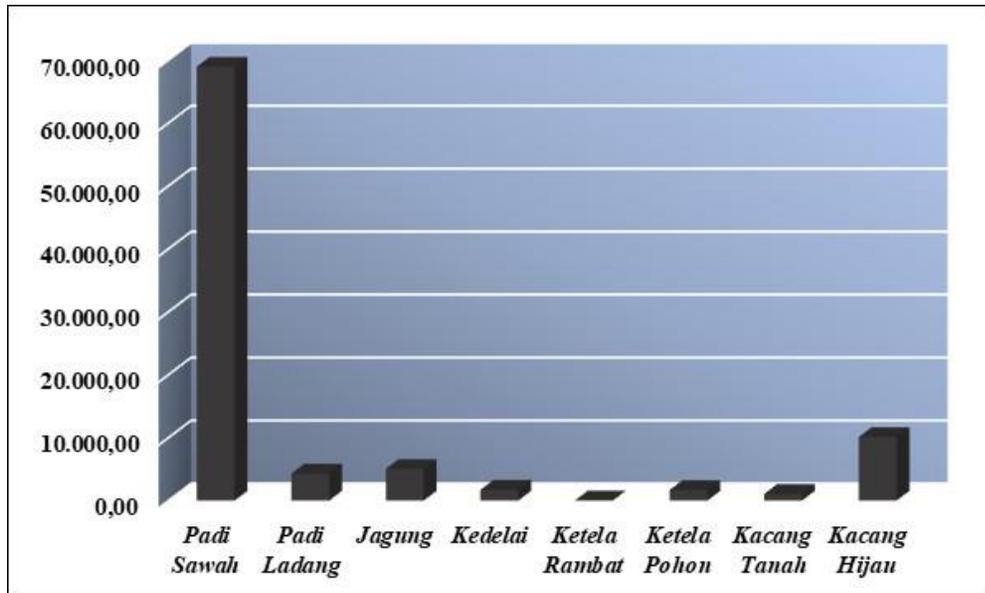
#### 1) Tanaman Pangan

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen tahun 2022, total luas panen untuk tanaman pangan adalah sebesar 92.807,90 ha dengan total jumlah produksi sebesar 543.955,79 ton yang terdiri dari beberapa jenis tanaman atau komoditas. Jenis tanaman pangan padi sawah merupakan jenis tanaman pangan dengan jumlah produksi terbesar yaitu sebesar 80,69 % atau 438.900,23 dan merupakan jenis tanaman pangan yang mempunyai luas panen terbesar di Kabupaten Kebumen yaitu 68.933,60 ha atau 74,28 %. Secara rinci mengenai distribusi luas panen dan jumlah produksi untuk tanaman pangan di Kabupaten Kebumen disajikan pada table berikut ini.

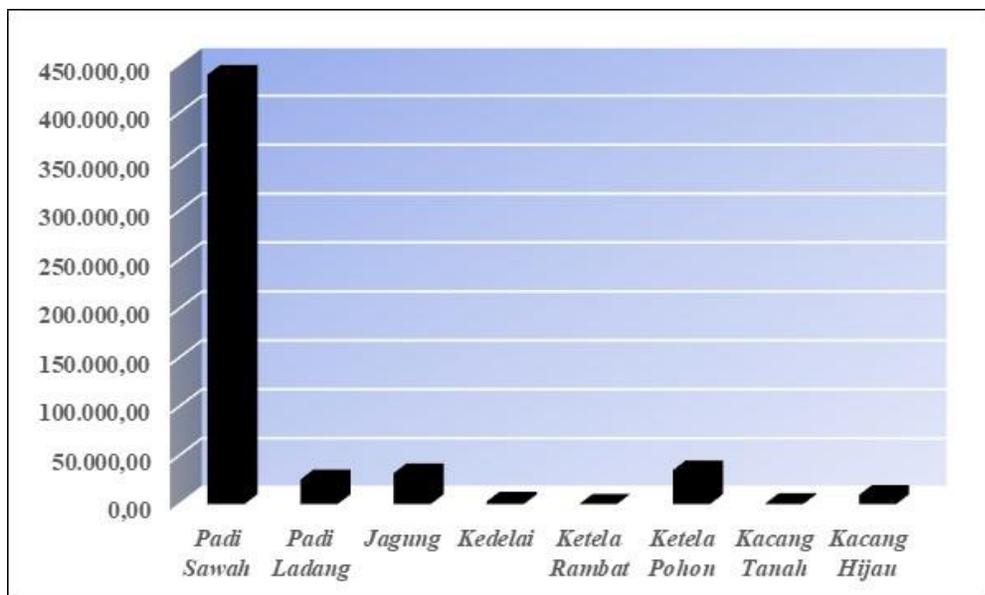
Tabel 2.16. Luas Panen dan Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Jenis Tanaman Pangan	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
1	Padi Sawah	68.933,60	438.900,23
2	Padi Ladang	4.280,00	25.234,88
3	Jagung	5.032,00	31.545,61
4	Kedelai	1.712,40	2.702,17
5	Ketela Rambat	27,50	418,89
6	Ketela Pohon	1.677,00	34.663,14
7	Kacang Tanah	1.059,40	1.100,90
8	Kacang Hijau	10.086,00	9.389,97
<b>Jumlah</b>		<b>92.807,90</b>	<b>543.955,79</b>

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kebumen, 2022



Gambar 2.19. Diagram Luas Panen (Ha) Tanaman Pangan di Kabupaten Kebumen



Gambar 2.20. Diagram Jumlah Produksi (Ton) Tanaman Pangan di Kabupaten Kebumen

## 2) Tanaman Sayuran

Potensi pertanian untuk tanaman sayur di Kabupaten Kebumen tahun 2022 masih didominasi oleh jenis tanaman melinjo, kangkong dan cabe rawit dengan jumlah produksi dalam kwintal masing-masing sebesar 44.427,00, 27.332,00, 16.462,00. Luas panen (ha) untuk jenis tanaman sayuran tahun 2019 terbesar untuk jenis tanaman melinjo yaitu sebesar 108.714,00 ha dan terkecil untuk jenis tanaman sayuran bayam sebesar 31 ha. Distribusi luas panen dan jumlah produksi tanaman sayuran di Kabupaten Kebumen disajikan pada table berikut ini.

Tabel 2.17. Luas Panen dan Jumlah Produksi Tanaman Sayuran di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Jenis Tanaman Sayuran	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Kwintal)
1	Cabe Besar	293	14.611
2	Cabe Rawit	339	16.462
3	Kacang Panjang	204	7.303
4	Tomat	62	3.286
5	Ketimun	41	6.462
6	Terong	144	12.019
7	Petsai/Sawi	57	2.155
8	Jamur	6.211	6.063
9	Kangkung	98	27.332
10	Bayam	31	1.772
11	Petai	22.898	7.630
12	Melinjo	108.714	44.427
<b>Jumlah</b>		<b>139.092</b>	<b>149.522</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

### 3) Tanaman Buah-buahan

Data jenis tanaman buah-buahan tahun 2022 di Kabupaten Kebumen total mencapai 22 jenis tanaman dengan jumlah produksi terbesar berupa jenis tanaman pisang yaitu mencapai 131.912 kwintal sedangkan jumlah produksi yang terendah selama tahun 2021 berupa tanaman markisa sebesar 22 kwintal. Luas panen terbesar untuk jenis tanaman buah-buahan adalah tanaman pisang dengan luas panen 307.669 ha. Luas panen terkecil adalah untuk jenis tanaman bengkoang dengan total sebesar 102 ha.

Tabel 2.18. Luas Panen dan Jumlah Produksi Tanaman Buah-buahan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

<b>No</b>	<b>Jenis Tanaman Buah-buahan</b>	<b>Luas Panen (Ha)</b>	<b>Jumlah Produksi (Kwintal)</b>
1	Pisang	307.669	131.912
2	Pepaya	114.940	63.726
3	Jeruk Siam	53.877	45.536
4	Semangka	319	62.709
5	Bengkoang	102	33.465
6	Belimbing	6.108	3.768
7	Durian	22.183	16.401
8	Mangga	77.181	56.950
9	Alpoket	6.802	3.884
10	Jmbu Biji	41.702	54.459
11	Jambu Air	14.098	4.833
12	Sukun	5.304	3.189
13	Nangka	36.560	31.193
14	Rambutan	28.911	11.362
15	Duku	2.032	1.154
16	Nanas	8.084	371
17	Salak	13.306	1.340
18	Sawo	3.721	2.682
19	Jeruk Besar	307	172
20	Manggis	1.104	770
21	Markisa	116	22
22	Sirsak	8.249	3.005
<b>Jumlah</b>		<b>752.675</b>	<b>532.903</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kebumen, 2022

#### 4) Tanaman Biofarmaka

Tanaman biofarmaka merupakan jenis tanaman yang mempunyai khasiat untuk kesehatan tubuh dan daya tahan tubuh manusia. Jenis tanaman biofarmaka yang terdata selama tahun 2022 di Kabupaten Kebumen antara lain jahe, mengkudu/pace, temukunci, kencur, temulawak, kunyit, laos, lempuyang dan temuireng. Dari beberapa jenis tanaman biofarmaka tersebut, tanaman jahe merupakan tanaman dengan luas panen terbesar di Kabupaten Kebumen yaitu mencapai 124.051,00 ha, sedangkan jumlah produksi tanaman biofarmaka terbesar adalah jenis tanaman kencur dengan jumlah produksi 2.156,34 kwintal.

Tabel 2.19. Luas Panen dan Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Jenis Tanaman Biofarmaka	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Kwintal)
1	Jahe	124.051,00	1.200,98
2	Mengkudu/Pace	4.302,00	189,47
3	Temukunci	0,80	9,30
4	Kencur	27,60	2.156,34
5	Temulawak	2,25	329,24
6	Kunyit	14,49	1.223,22
7	Laos	9,11	1.101,65
8	Lempuyang	0,75	69,36
9	Temuireng	1,49	203,67
<b>Jumlah</b>		<b>128.409,49</b>	<b>6.483,23</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

## 5) Tanaman Perkebunan

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen tahun 2022 potensi tanaman perkebunan di Kabupaten Kebumen mencapai total 18.133,59 kwital dengan total luas panen 2.222,80 ha untuk berbagai jenis tanaman perkebunan seperti tembakau, pandan, tebu, jenitri, mete, lada, nilam, pala dan karet. Khusus untuk tanaman perkebunan berupa Kelapa, jumlah produksi tahun 2021 di Kabupaten Kebumen terdiri dari :

- a) Kelapa muda : 1.350.300 batang
- b) Kelapa sayur : 2.666.697 batang
- c) Kelapa deres : 450.638 batang
- d) Tidak produksi : 169.725 batang
- e) Produksi : 171.659.110 batang
- f) Gula kelapa : 324.836,58 butir

Secara rinci, luas panen dan jumlah produksi untuk tanaman perkebunan di Kabupaten Kebumen tahun 2022 disajikan pada table berikut ini.

Tabel 2.20. Luas Panen dan Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Jenis Tanaman Perkebunan	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Kwintal)
1	Tembakau	811,00	4.676,23
2	Pandan	62,00	4.998,87
3	Tebu	93,30	3.745,17
4	Jenitri	214,00	2.940,78
5	Mete	152,00	103,85
6	Lada	27,50	35,47
7	Nilam	22,00	884,00
8	Pala	164,00	607,50
9	Karet	677,00	141,72
<b>Jumlah</b>		<b>2.222,80</b>	<b>18.133,59</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

### 2.6.2. Peternakan

Potensi peternakan di Kabupaten Kebumen tahun 2022 baik untuk hewan ternak maupun unggas cukup besar total populasi hewan ternak mencapai 647.382 ekor dengan jenis populasi ternak terbesar berupa kambing dengan jumlah 424.626 ekor. Populasi hewan unggas di Kabupaten Kebumen mencapai total 6.421.524 ekor dengan komoditas utama berupa ayam sayur dan ayam ras pedaging dengan jumlah populasi masing-masing sebesar 3.927.815 ekor dan 2.167.722 ekor.

Tabel 2.21. Jumlah Populasi Hewan Ternak (ekor)  
di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Populasi Ternak	Jumlah (ekor)
1	Sapi perah	10
2	Sapi Potong	65.976
3	Kerbau	244
4	Kuda	271
5	Kambing	424.626
6	Domba	138.135
7	Babi	409
8	Kelinci	17.711
<b>Jumlah</b>		<b>647.382</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

Tabel 2.22. Jumlah Populasi Hewan Unggas (ekor)  
di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Populasi Unggas	Jumlah (ekor)
1	Ayam Ras Petelur	8.479
2	Ayam Ras Pedaging	2.167.722
3	Ayam Sayur	3.927.815
4	Itik	192.165
5	Burung Puyuh	48.369
6	Angsa	2.583
7	Itik Manila	74.391
<b>Jumlah</b>		<b>6.421.524</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

## 2.7. INDUSTRI

### 2.7.1. Gambaran Sektor Industri di Kabupaten Kebumen

Berdasarkan data Kabupaten Kebumen Dalam Angka tahun 2023 jenis klasifikasi industri yang ada di Kabupaten Kebumen tahun 2022 terdiri dari industri besar sebanyak 3 perusahaan tersebar di Kecamatan Kebumen, Sempor dan Gombang, industri menengah 57 perusahaan tersebar di beberapa wilayah Kecamatan dan industri kecil sebanyak 49.504 perusahaan tersebar di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.23. Jumlah Perusahaan Industri Menurut Klasifikasi dan Kelompok Industri di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Klasifikasi Industri	Besar	Menengah	Kecil
1	Industri batubara dan pengilangan minyak	-	-	-
2	Industri makanan dan minuman	-	8	35.723
3	Pengolahan tembakau	1	2	56
4	Industri tekstil dan pakaian jadi	-	2	745
5	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	-	7	181
6	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus	1	5	8.858
7	Industri anyaman dari bamboo, rotan dan sejenisnya		-	-
8	Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman-	-	3	82
9	Industri kimia, farmasi dan obat tradisional	-	9	454
10	Industri karet, barang dari karet dan plastik	1	-	14
11	Industri barang galian bukan logam	-	19	3.205
12	Industri logam dasar	-	-	-
13	Industri barang dari logam, computer	-	1	185
14	Industri barang elektronik, optik dan peralatan dari listrik		-	-

No	Klasifikasi Industri	Besar	Menengah	Kecil
15	Industri mesin dan perlengkapan YTDL	-	1	1
16	Industri alat angkutan	-	-	-
17	Industri mesin dan perlengkapan YTDL	-	-	-
18	Industri alat angkutan	-	-	-
<b>Jumlah Tahun 2022</b>		<b>3</b>	<b>57</b>	<b>49.504</b>
<b>Jumlah Tahun 2021</b>		<b>3</b>	<b>63</b>	<b>56.336</b>
<b>Jumlah Tahun 2020</b>		<b>3</b>	<b>63</b>	<b>56.336</b>
<b>Jumlah Tahun 2019</b>		<b>3</b>	<b>63</b>	<b>56.336</b>
<b>Jumlah Tahun 2018</b>		<b>3</b>	<b>63</b>	<b>56.312</b>

Sumber : Kabupaten Kebumen Dalam Angka tahun 2023, BPS

Tabel 2.24. Jumlah Perusahaan Industri Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Industri di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	Kecamatan	Industri Besar	Industri Menengah	Industri Kecil
1.	Ayah	-	1	8.664
2.	Buayan	-	1	1.065
3.	Puring	-	-	1.003
4.	Petanahan	-	3	7.554
5.	Klirong	-	2	3.512
6.	Buluspesantren	-	1	2.074
7.	Ambal	-	-	2.921
8.	Mirit	-	-	1.823
9.	Bonorowo	-	-	395
10.	Prembun	-	2	353
11.	Padureso	-	-	278
12.	Kutowinangun	-	1	723
13.	Alian	-	1	908
14.	Poncowarno	-	-	403
15.	Kebumen	1	19	1.681
16.	Pejagoan	-	10	1.258
17.	Sruweng	-	6	1.269
18.	Adimulyo	-	-	504

No.	Kecamatan	Industri Besar	Industri Menengah	Industri Kecil
19.	Kuwarasan	-	-	856
20.	Rowokele	-	-	3.808
21.	Sempor	1	-	5.749
22.	Gombong	1	10	633
23.	Karamanyar	-	4	3.281
24.	Karanggayam	-	-	2.302
25.	Sadang	-	1	553
26.	Karangsambung	-	1	2.775
<b>Jumlah Tahun 2022</b>		<b>3</b>	<b>63</b>	<b>56.345</b>
<b>Jumlah Tahun 2021</b>		<b>3</b>	<b>63</b>	<b>56.336</b>
<b>Jumlah Tahun 2020</b>		<b>3</b>	<b>63</b>	<b>56.336</b>
<b>Jumlah Tahun 2019</b>		<b>3</b>	<b>63</b>	<b>56.312</b>
<b>Jumlah Tahun 2018</b>		<b>3</b>	<b>61</b>	<b>54.835</b>

Sumber : Kabupaten Kebumen Dalam Angka tahun 2023, BPS

Total penyerapan tenaga kerja menurut klasifikasi dan kelompok industri di Kabupaten Kebumen tahun 2022 terbesar masih pada industri kecil dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 109.168 orang, industri menengah sebanyak 2.193 orang dan untuk industri besar sebanyak 3.733 orang. Secara rinci, jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Kabupaten Kebumen tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.25. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi dan Kelompok Industri di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Klasifikasi Industri	Besar	Menengah	Kecil
1	Industri batubara dan pengilangan minyak	-	-	-
2	Industri makanan dan minuman	-	303	72.652
3	Pengolahan tembakau	2500	140	146
4	Industri tekstil dan pakaian jadi	-	45	1.957
5	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	-	167	902
6	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus	726	227	17.093

No	Klasifikasi Industri	Besar	Menengah	Kecil
7	Industri anyaman dari bamboo, rotan dan sejenisnya	-	-	-
8	Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman-	-	122	628
9	Industri kimia, farmasi dan obat tradisional	-	410	1.364
10	Industri karet, barang dari karet dan plastik	507	-	56
11	Industri barang galian bukan logam	-	639	13.700
12	Industri logam dasar	-	-	-
13	Industri barang dari logam, computer	-	110	666
14	Industri barang elektronik, optik dan peralatan dari listrik	-	-	-
15	Industri mesin dan perlengkapan YTDL	-	30	4
16	Industri alat angkutan	-	-	-
17	Industri mesin dan perlengkapan YTDL	-	-	-
18	Industri alat angkutan	-	-	-
<b>Jumlah Tahun 2022</b>		<b>3.733</b>	<b>2.193</b>	<b>109.168</b>
<b>Jumlah Tahun 2021</b>		<b>3.733</b>	<b>2.416</b>	<b>120.672</b>
<b>Jumlah Tahun 2020</b>		<b>3.733</b>	<b>2.416</b>	<b>120.672</b>
<b>Jumlah Tahun 2019</b>		<b>3.733</b>	<b>2.416</b>	<b>120.672</b>
<b>Jumlah Tahun 2018</b>		<b>3.733</b>	<b>2.416</b>	<b>120.559</b>

Sumber : Kabupaten Kebumen Dalam Angka tahun 2023, BPS

### 2.7.2. Industri di Kabupaten Kebumen Berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kebumen Tahun 2019 – 2039

Gambaran sektor industri di Kabupaten Kebumen berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kebumen Tahun 2019 – 2039. Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2019, menyebutkan bahwa industri unggulan yang dikembangkan

untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Kebumen antara lain :

- 1) Industri makanan
- 2) Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya
- 3) Industri tekstil
- 4) Industri barang galian bukan logam lainnya

Pembangunan sektor industri didukung dengan ketersediaan Kawasan peruntukan industri dan kawasan industri. Kawasan Peruntukan Industri berdasarkan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut:

**1) Kawasan peruntukan industri terdiri atas :**

- a. kawasan peruntukan industri besar
- b. kawasan peruntukan industri menengah
- c. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro

**2) Kawasan peruntukan industri besar, terdiri atas :**

- a. Kecamatan Buayan
- b. Kecamatan Petanahan
- c. Kecamatan Kebumen
- d. Kecamatan Sempor
- e. Kecamatan Gombang

**3) Kawasan peruntukan industri menengah, terdiri atas :**

- a. Kecamatan Petanahan
- b. Kecamatan Kebumen
- c. Kecamatan Alian
- d. Kecamatan Karanggayam
- e. Kecamatan Prembun
- f. Kecamatan Sempor
- g. Kecamatan Gombang

**4) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro tersebar di seluruh Kecamatan**

### **2.7.3. Industri Yang Berpotensi Mencemari Lingkungan**

Untuk mengidentifikasi jenis industri yang mencemari lingkungan hidup, pada tahun 2014 dilaksanakan pengawasan terhadap lima belas

usaha/kegiatan inti yang berpotensi menimbulkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup sebagai berikut :

1. PT Mitra Prasmitha Selaras Jl Raya Sempor Desa Jatinegara Kecamatan Sempor.
2. Varia Pabrik Mesin Plastik Jalan A yani Kebumen.
3. PT Trada Asfalt Mixing Plant dan Stone crusher Desa Karangpoh Kecamatan Pejagoan.
4. PT Karya Adi Kencana Asfalt Mixing Plant dan Stone crusher Desa Karangpoh Kecamatan Pejagoan.
5. RSUD Kab Kebumen Jalan Rumah sakit panjer Kebumen.
6. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong.
7. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sruweng.
8. RS Permata Medika Jl Indrakila Kebumen.
9. Hotel Putra Jl Pemuda Kebumen.
10. Hotel dan Rumah Makan Candisari Jl. Revolusi no 123 Karanganyar.
11. Rumah Makan Lestari, Jl. Revolusi No 6 Karanganyar.
12. RM dan Hotel Grafika Gombong.
13. Bale Cafe Gombong
14. Penambangan Batu Dua Group Sendangdalem Padureso
15. Penambangan Batu Andesit Mangunweni Ayah

Disamping pengawasan terhadap penataan Baku Mutu Lingkungan juga melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang lain, namun belum mengarah ke penataan baku mutu lingkungan. Hal ini disebabkan dari hasil laporan pemantauan kualitas lingkungan, kegiatan tersebut sudah melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan kualitas yang baik atau belum.

## **2.8. TRANSPORTASI**

Di Kabupaten Kebumen sistem transportasi sebagian besar memanfaatkan jalan raya sebagai jalur utama pergerakan lalu lintas, baik untuk pergerakan lokal maupun regional yang menghubungkan kota-kota disekitarnya; sedang sistem angkutan umum yang melayani terbagi atas pelayanan regional (Antar Kota Antar Provinsi/AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta lokal (pedesaan).

Data panjang jalan di Kabupaten Kebumen dapat dirinci menurut Keadaan (Jenis Permukaan, Kondisi dan Kelas Jalan) dan Status Jalan (Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten). Panjang jalan pada tahun 2022 adalah 92.360 Km merupakan Jalan Negara, 44.970 Km Jalan Provinsi dan 960.358 Km merupakan Jalan Kabupaten.

Tabel 2.26. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Kebumen (Km) Tahun 2018 – 2022

No	Tingkat Kewenangan Pemerintahan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Negara	56,428	56,428	56,428	56,428	92,360
2	Provinsi	29,670	29,670	39,67	39,67	44,970
3	Kabupaten	960,35	960,36	960,358	960,358	960,358

Sumber : Dokumen Statistik Sektoral Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tabel 2.27. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Kebumen (Km) Tahun 2018 – 2022

No	Jenis Permukaan Jalan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Aspal	695,182	791,33	732,507	742,145	767,914
2	Beton	90,876	28,371	104,944	123,231	146,506
3	Kerikil	30,133	111,81	87,741	86,382	35,688
4	Tanah	24,621	24,372	35,166	8,6	10,25
5	Lainnya	119,54	4,476	0	0	0

Sumber : Dokumen Statistik Sektoral Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kebumen, jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan. Berikut ini adalah jumlah kendaraan bermotor sejak tahun 2012-2022 dibagi berdasarkan jumlah roda.

Tabel 2.28. Data Rekapitulasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2022

NO	TAHUN	RODA 2	RODA 4	JUMLAH	PENAMBAHAN OBYEK
1	2012	210.316	16.616	226.932	-
2	2013	242.804	18.740	261.544	34.612
3	2014	237.595	19.684	257.279	4.265
4	2015	258.888	22.353	281.241	23.962
5	2016	279.565	25.153	304.718	23.477
6	2017	307.442	29.330	336.772	32.054
7	2018	337.346	31.071	368.417	31.645
8	2019	368.032	34.082	402.114	33.697
9	2020	388.483	37.036	425.519	23.405
10	2021	560.646	54.398	615.044	189.525
11	2022	584.047	57.430	641.477	26.433

Sumber: UPPD Samsat Kebumen, 2023

Terkait dengan jumlah kendaraan umum di Kabupaten Kebumen dilihat berdasarkan jenis kendaraan secara rinci tiap kecamatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29. Jumlah Kendaraan Umum di Kabupaten Kebumen Menurut Kecamatan dan Jenis Kendaraan

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Satuan
	Jumlah Kendaraan Umum di Kabupaten Kebumen Menurut Kecamatan dan Jenis Kendaraan	6954			1707	-	unit
1	Bus Penumpang 55 orang atau lebih	659	651	651	320	276	unit

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Satuan
	1. Kecamatan Ayah	4	4	4	15	0	unit
	2. Kecamatan Buayan				0	0	unit
	3. Kecamatan Puring	1	1	1	0	0	unit
	4. Kecamatan Petanahan				5	0	unit
	5. Kecamatan Klirong				0	0	unit
	6. Kecamatan Buluspesantren	28	28	28	22	9	unit
	7. Kecamatan Ambal	2	2	2	0	0	unit
	8. Kecamatan Mirit				0	0	unit
	9. Kecamatan Bonorowo				0	0	unit
	10. Kecamatan Prembun	3	3	3	0	0	unit
	11. Kecamatan Padureso				0	0	unit
	12. Kecamatan Kutowinangun				0	0	unit
	13. Kecamatan Alian				0	0	unit
	14. Kecamatan Poncowarno				0	0	unit
	15. Kecamatan Kebumen	471	457	457	101	154	unit
	16. Kecamatan Pejagoan	84	89	89	124	66	unit
	17. Kecamatan Sruweng				0	0	unit
	18. Kecamatan Adimulyo	1	1	1	0	0	unit
	19. Kecamatan Kuwarasan				0	0	unit
	20. Kecamatan Rowokele	4	4	4	0	0	unit
	21. Kecamatan Sempor	2	2	2	15	15	unit
	22. Kecamatan Gombang	58	59	59	38	32	unit
	23. Kecamatan Karanganyar	1	1	1	0	0	unit
	24. Kecamatan Karanggayam				0	0	unit
	25. Kecamatan Sadang				0	0	unit
	26. Kecamatan Karangsambung				0	0	unit
2	Bus Penumpang 24 orang atau lebih	205	185	185	19	158	unit
	1. Kecamatan Ayah	7	7	7	0	2	unit
	2. Kecamatan Buayan	4	4	4	0	3	unit
	3. Kecamatan Puring				0	3	unit
	4. Kecamatan Petanahan				2	15	unit
	5. Kecamatan Klirong				0	3	unit
	6. Kecamatan Buluspesantren	16	16	16	6	3	unit
	7. Kecamatan Ambal				0	0	unit
	8. Kecamatan Mirit				0	0	unit
	9. Kecamatan Bonorowo				0	0	unit
	10. Kecamatan Prembun	4	4	4	8	0	unit
	11. Kecamatan Padureso				0	4	unit
	12. Kecamatan Kutowinangun				0	0	unit
	13. Kecamatan Alian				0	0	unit
	14. Kecamatan Poncowarno				0	0	unit
	15. Kecamatan Kebumen	136	116	116	3	20	unit

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Satuan
	16. Kecamatan Pejagoan	14	14	14	0	76	unit
	17. Kecamatan Sruweng				0	10	unit
	18. Kecamatan Adimulyo				0	0	unit
	19. Kecamatan Kuwarasan				0	0	unit
	20. Kecamatan Rowokele	6	6	6	0	0	unit
	21. Kecamatan Sempor	4	4	4	0	22	unit
	22. Kecamatan Gombong	14	14	14	0	6	unit
	23. Kecamatan Karanganyar				0	0	unit
	24. Kecamatan Karanggayam				0	0	unit
	25. Kecamatan Sadang				0	0	unit
	26. Kecamatan Karangsembung				0	0	unit
3	Bus Penumpang 14-16 orang	516	516	483	265	338	unit
	1. Kecamatan Ayah	44	44	35	0	2	unit
	2. Kecamatan Buayan	36	36	36	0	6	unit
	3. Kecamatan Puring	9	9	9	0	6	unit
	4. Kecamatan Petanahan	25	25	15	9	30	unit
	5. Kecamatan Klirong	13	13	13	0	7	unit
	6. Kecamatan Buluspesantren	32	32	32	0	3	unit
	7. Kecamatan Ambal	8	8	8	0	2	unit
	8. Kecamatan Mirit	10	10	10	0	3	unit
	9. Kecamatan Bonorowo	1	1	1	0	0	unit
	10. Kecamatan Prembun	31	31	25	0	1	unit
	11. Kecamatan Padureso	4	4	4	0	4	unit
	12. Kecamatan Kutowinangun	30	30	25	0	2	unit
	13. Kecamatan Alian	6	6	6	0	14	unit
	14. Kecamatan Poncowarno			0	0	0	unit
	15. Kecamatan Kebumen	14	14	14	15	42	unit
	16. Kecamatan Pejagoan	23	23	20	0	80	unit
	17. Kecamatan Sruweng	15	15	15	0	4	unit
	18. Kecamatan Adimulyo	4	4	4	0	5	unit
	19. Kecamatan Kuwarasan	8	8	8	0	0	unit
	20. Kecamatan Rowokele	7	7	7	0	9	unit
	21. Kecamatan Sempor	103	103	103	241	90	unit
	22. Kecamatan Gombong	59	59	59	0	10	unit
	23. Kecamatan Karanganyar	1	1	1	0	4	unit
	24. Kecamatan Karanggayam	16	16	16	0	7	unit
	25. Kecamatan Sadang	15	15	15	0	0	unit
	26. Kecamatan Karangsembung	2	2	2	0	7	unit
4	Angkutan Kota/Angkudes Penumpang 12+orang	349	349	321	327	132	unit
	1. Kecamatan Ayah	15	15	15	0	1	unit
	2. Kecamatan Buayan	12	12	10	0	4	unit
	3. Kecamatan Puring	11	11	11	0	2	unit

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Satuan
	4. Kecamatan Petanahan	7	7	6	0	2	unit
	5. Kecamatan Klirong	4	4	4	0	2	unit
	6. Kecamatan Buluspesantren	10	10	10	0	3	unit
	7. Kecamatan Ambal	17	17	17	0	2	unit
	8. Kecamatan Mirit	24	24	20	0	2	unit
	9. Kecamatan Bonorowo			0	0	0	unit
	10. Kecamatan Prembun	12	12	12	0	1	unit
	11. Kecamatan Padureso	11	11	11	0	1	unit
	12. Kecamatan Kutowinangun	4	4	4	0	2	unit
	13. Kecamatan Alian	21	21	21	0	4	unit
	14. Kecamatan Poncowarno	4	4	4	0	1	unit
	15. Kecamatan Kebumen	36	36	30	0	12	unit
	16. Kecamatan Pejagoan	20	20	15	0	12	unit
	17. Kecamatan Sruweng	5	5	5	0	0	unit
	18. Kecamatan Adimulyo	14	14	14	0	0	unit
	19. Kecamatan Kuwarasan	19	19	19	0	0	unit
	20. Kecamatan Rowokele	11	11	11	0	4	unit
	21. Kecamatan Sempor	16	16	16	327	66	unit
	22. Kecamatan Gombang	36	36	30	0	7	unit
	23. Kecamatan Karanganyar	16	16	12	0	0	unit
	24. Kecamatan Karanggayam	6	6	6	0	0	unit
	25. Kecamatan Sadang	7	7	7	0	2	unit
	26. Kecamatan Karangsembung	11	11	11	0	2	unit
5	Truk/Pick Up Box Niaga	5225	5505	5505	776	4345	unit
	1. Kecamatan Ayah	182	188	188	21	115	unit
	2. Kecamatan Buayan	170	174	174	25	75	unit
	3. Kecamatan Puring	124	128	128	15	115	unit
	4. Kecamatan Petanahan	281	287	287	22	198	unit
	5. Kecamatan Klirong	189	200	200	25	88	unit
	6. Kecamatan Buluspesantren	169	168	168	12	105	unit
	7. Kecamatan Ambal	147	155	155	30	90	unit
	8. Kecamatan Mirit	164	160	160	11	195	unit
	9. Kecamatan Bonorowo	35	35	35	10	89	unit
	10. Kecamatan Prembun	251	274	274	17	270	unit
	11. Kecamatan Padureso	75	80	80	10	70	unit
	12. Kecamatan Kutowinangun	180	185	185	20	70	unit
	13. Kecamatan Alian	138	144	144	10	220	unit
	14. Kecamatan Poncowarno	18	20	20	10	45	unit
	15. Kecamatan Kebumen	1056	1142	1142	340	535	unit
	16. Kecamatan Pejagoan	351	391	391	11	245	unit
	17. Kecamatan Sruweng	235	235	235	11	179	unit
	18. Kecamatan Adimulyo	63	80	80	15	78	unit

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Satuan
	19. Kecamatan Kuwarasan	138	148	148	15	70	unit
	20. Kecamatan Rowokele	147	145	145	11	120	unit
	21. Kecamatan Sempor	165	179	179	13	270	unit
	22. Kecamatan Gombong	496	517	517	55	545	unit
	23. Kecamatan Karanganyar	261	278	278	22	470	unit
	24. Kecamatan Karanggayam	59	57	57	15	75	unit
	25. Kecamatan Sadang	61	61	61	5	88	unit
	26. Kecamatan Karangsembung	70	74	74	25	75	unit

Sumber : Dokumen Statistik Sektorial Kabupaten Kebumen Tahun 2023

## 2.9. PARIWISATA

Kabupaten Kebumen memiliki kekayaan bentang alam yang sangat kompleks mulai dari kawasan pegunungan, dataran hingga pesisir dapat dijumpai di Kabupaten Kebumen, dengan keanekaragaman bentang lahan tersebut menjadikan Kabupaten Kebumen memiliki potensi wisata yang sangat beragam baik wiata pantai, alam pegunungan, desa wisata maupun budayanya. Berdasarkan data BPS, Kabupaten Kebumen dalam Angka Tahun 2023, terdapat 9 obyek wisata yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan total jumlah pengunjung obyek wisata tahun 2022 mencapai 1.623.865 orang, dengan rincian 9 orang wisatawan manca negara dan 1.623.856 orang wisatawan domestik.

Tabel 2.30. Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik  
Di Kabupaten Kebumen Tahun 2018 – 2022

No	Wisatawan Manca Negara	Wisatawan Domestik	Jumlah
2018	-	1.079.169	1.079.169
2019	-	947.260	947.260
2020	-	383.120	383.120
2021	5	334.724	334.729
2022	9	1.623.856	1.623.865

Sumber : Kabupaten Kebumen Dalam Angka tahun 2023, BPS

Tabel 2.31. Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Menurut Obyek Wisata di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Obyek Wisata	Jumlah Pengunjung	
		Domestik	Mancanegara
1.	Goa Jatijajar	1.319.122	9

No	Obyek Wisata	Jumlah Pengunjung	
		Domestik	Mancanegara
2.	Goa Petruk	20.415	-
3.	Pantai Logending	358.942	-
4.	Pantai Karangbolong	177.775	-
5.	Pantai Petanahan	479.029	-
6.	Waduk Sempor	609.180	-
7.	Pemandian Air Panas Krakal	440.951	-
8.	Waduk Wadaslintang	212.699	-
9.	Pantai Suwuk	888.686	-

Sumber : Kabupaten Kebumen Dalam Angka tahun 2023, BPS

Selain potensi wisata alam yang sudah dikembangkan, di Kabupaten Kebumen juga sudah berkembang desa wisata yang dikelola oleh masyarakat untuk dapat dikunjungi oleh masyarakat. Pada umumnya desa wisata tersebut mengangkat tema yang berbeda-beda tergantung oleh potensi yang ada dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen, jumlah desa wisata yang ada di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.32. Jumlah Desa Wisata Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Kecamatan	Desa	Pokdarwis/Desa Wisata
1.	Ayah	Argopeni	Pokdarwis Argo Pesona Asri
		Karangduwur	Pokdarwis Karangduwur Mountain
		Srati	Desa Wisata Pesona Wisata Srati
		Pasir	Desa Wisata Pancasila Pasir Indah dan Pokdarwis wisata Pesona wana bahari
		Candirenggo	Desa Wisata Petruk Jaya dan Kelompok Sadar Wisata Petruk Jaya
		Jatijajar	Desa Wisata Jatijajar, Pokdarwis Argo Jati

No	Kecamatan	Desa	Pokdarwis/Desa Wisata
2	Puring	Tambakmulyo	Pokdarwis Kampung Wisata Suwuk,dan Desa Wisata Tambakmulyo
3	Petanahan	Grogolbeningsari	Desa Wisata Grogolbeningsari Pokdarwis Mandiri Pariwisata
4	Alian	Krakal	Pokdarwis Enjang Sonten Terus Usaha
5	Kebymen	Jemur	Desa Wisata Jemur Pokdarwis Sidomukti
6	Adimulyo	Adiluhur	Pokdarwis KWIK Berkah Mandiri
7	Sempor	Sempor	Pokdarwis Mukti Marandesa
8	Gombong	Wero	Desa Wisata Wero Pokdarwis Green Village
		Klopogodo	Desa Wisata Klopogodo Pokdarwis pandan Raharja
9	Sadang	Seboro	Desa wisata Seboro Selo asri dan Pokdarwis watu kelir
10	Poncowarno	Jembangan	Pokdawis Suryo Kencono
11	Karangsambung	Langse	Desa Wisata Karangsambung, Desa Wisata Goa Langse Indah dan Pokdarwis Sido Kumpul
		Karangsambuning	Pokdarwis Paras Adi Prakarsa

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

## 2.10. KONDISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN KEBUMEN

### 2.10.1 Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kabupaten Kebumen pada akhir tahun 2022 berjumlah 1.421.143 jiwa, meliputi 720.789 jiwa penduduk laki-laki dan 700.354 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupate Kebumen Tahun

2022, diketahui bahwa jumlah penduduk rata-rata dari tahun 2018 hingga 2022 di Kecamatan Kebumen sebesar 134.145 jiwa. Secara rinci mengenai pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kebumen berdasarkan wilayah kecamatannya untuk tahun 2018 dan 2022 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.33. Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Kebumen  
Setiap Kecamatan Tahun 2018 - 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Ayah	64.079	65.016	66.015	66.466	67.371
2	Buayan	65.506	66.212	67.377	67.809	68.727
3	Puring	64.021	64.620	64.869	65.264	66.112
4	Petanahan	60.352	60.644	61.322	61.837	62.689
5	Klirong	64.369	64.967	65.152	65.643	66.341
6	Buluspesantren	58.971	59.444	60.356	60.534	61.236
7	Ambal	63.275	63.779	64.448	64.894	65.603
8	Mirit	53.455	54.236	54.599	55.050	55.663
9	Prembun	29.210	29.368	29.530	29.475	29.808
10	Kutowinangun	48.598	48.972	49.511	49.416	49.827
11	Alian	66.945	67.863	68.652	69.288	70.093
12	Kebumen	132.556	134.083	134.132	134.615	135.338
13	Pejagoan	54.696	55.318	56.001	56.310	56.980
14	Sruweng	62.269	62.975	63.030	63.345	63.861
15	Adimulyo	38.036	38.277	38.503	38.495	38.800
16	Kuwarasan	51.154	51.700	52.197	52.290	52.765
17	Rowokele	51.890	52.297	52.669	52.972	53.413
18	Sempor	69.928	70.498	71.428	71.562	72.509
19	Gombong	51.071	51.332	50.676	50.452	50.474
20	Karanganyar	38.365	38.392	38.202	38.147	38.427
21	Karanggayam	59.402	60.072	60.901	61.422	62.205

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)				
		2018	2019	2020	2021	2022
22	Sadang	22.667	22.909	23.411	23.698	23.928
23	Bonorowo	22.051	22.249	22.217	22.298	22.503
24	Padureso	16.768	16.969	17.026	17.088	17.286
25	Poncowarno	18.428	18.668	18.991	19.157	19.418
26	Karangsambung	47.159	47.630	48.761	49.079	49.766
<b>Jumlah</b>		<b>1.375.2</b>	<b>1.388.4</b>	<b>1.399.9</b>	<b>1.406.60</b>	<b>1.421.14</b>
		<b>21</b>	<b>90</b>	<b>76</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kebumen, Tahun 2022

### 2.10.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah tertentu dengan satuan per kilometer persegi. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Kebumen tahun 2022 mencapai 1.109 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan kepadatan tertinggi di wilayah Kecamatan Kebumen yang mencapai 3.219 jiwa/km<sup>2</sup> dan kepadatan terendah di wilayah Kecamatan Sadang dengan kepadatan penduduk sebesar 441 jiwa/km<sup>2</sup>.

Tabel 2.34. Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kebumen Menurut Kecamatan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )
1.	Ayah	76,370	67.371	882,17
2.	Buayan	68,420	68.727	1.004,49
3.	Puring	61,970	66.112	1.066,84
4.	Petanahan	44,840	62.689	1.398,06
5.	Klirong	43,250	66.341	1.533,90

6.	Buluspesantren	48,770	61.236	1.255,61
7.	Ambal	62,410	65.603	1.051,16
8.	Mirit	52,350	55.663	1.063,29
9.	Prembun	22,960	29.808	1.298,26
10.	Kutowinangun	33,730	49.827	1.477,23
11.	Alian	57,750	70.093	1.213,73
12.	Kebumen	42,040	135.338	3.219,27
13.	Pejagoan	34,580	56.980	1.647,77
14.	Sruweng	43,680	63.861	1.462,02
15.	Adimulyo	43,430	38.800	893,39
16.	Kuwarasan	33,840	52.765	1.559,25
17.	Rowokele	53,800	53.413	992,81
18.	Sempor	100,150	72.509	724,00
19.	Gombong	19,480	50.474	2.591,07
20.	Karanganyar	31,400	38.427	1.223,79
21.	Karanggayam	109,290	62.205	569,17
22.	Sadang	54,230	23.928	441,23
23.	Bonorowo	20,910	22.503	1.076,18
24.	Padureso	28,950	17.286	597,10
25.	Poncowarno	27,370	19.418	709,46
26.	Karangsambung	65,150	49.766	763,87
<b>Jumlah</b>		<b>1.281,115</b>	<b>1.421.143</b>	<b>1109,30</b>

*dukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, Tahun 2022*

## 2.11. KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT BENCANA ALAM

### 2.11.1. Ancaman Bencana di Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen memiliki ancaman terhadap beberapa jenis bencana seperti bencana banjir; gempabumi; angin puting beliung; kebakaran hutan dan lahan; kekeringan; gelombang tinggi; tsunami dan tanah longsor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen mencatat kejadian bencana di Kabupaten Kebumen 12 tahun terakhir sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.35. Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Kebumen  
(2011-2022)

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian
1	Banjir	198
2	Gempabumi	9
3	Tanah Longsor	651
4	Angin	482
5	Kekeringan	180
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	218
7	Gelombang Tinggi	7

Sumber : BPBD Kabupaten Kebumen, 2023

Tabel jumlah kejadian bencana menunjukkan bahwa bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Kebumen adalah longsor dan banjir. Berdasarkan tabel di atas, 21 dari 26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen mengalami kejadian tanah longsor. Sedangkan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Kebumen, terjadi pada 10 kecamatan di Kabupaten Kebumen. Dengan intensitas bencana yang tinggi butuh kajian mendalam terkait risiko bencana yang ada di Kabupaten Kebumen, sehingga dapat dianalisis dan diketahui kisaran kerugian yang akan terjadi.



Gambar 2.21. Jumlah kejadian bencana di Kabupaten Kebumen  
(2011-2022)

Berdasarkan gambar di atas, jumlah kejadian bencana di Kabupaten Kebumen terbanyak terdapat pada bencana tanah longsor dengan jumlah kejadian 477 kali selama 10 tahun terakhir. Bencana yang memiliki frekuensi kejadian terbanyak kedua adalah angin puting beliung dengan jumlah kejadian 302 kali. Bencana yang memiliki frekuensi kejadian paling sedikit adalah bencana gelombang tinggi dengan jumlah kejadian 3 kali. Frekuensi kejadian bencana kekeringan cenderung kecil, namun bencana kekeringan sudah menjadi bencana tahunan di Kabupaten Kebumen. Penguraian Kelas Risiko Bencana Kabupaten Kebumen berdasarkan jenis ancaman diuraikan pada berikut ini.

Tabel 2.36. Kelas risiko bencana tiap ancaman di Kabupaten Kebumen

<b>Bencana</b>	<b>Bahaya</b>	<b>Kerentanan</b>	<b>Kapasitas</b>	<b>Risiko</b>
Banjir	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Banjir Bandang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung)	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
Epidemi dan Wabah Penyakit (Wabah Covid-19)	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
Gelombang Ekstrem	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

<b>Bencana</b>	<b>Bahaya</b>	<b>Kerentanan</b>	<b>Kapasitas</b>	<b>Risiko</b>
dan Abrasi				
Gempa bumi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
Kebakaran Hutan dan Lahan	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah
Kekeringan	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah
Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Tsunami	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

*Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun*

2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa bencana yang memiliki kelas risiko tinggi adalah bencana banjir; gelombang ekstrem dan abrasi; tanah longsor; dan tsunami. Sedangkan bencana yang memiliki kelas risiko sedang adalah bencana banjir bandang; cuaca ekstrem; epidemic dan wabah penyakit; dan gempa bumi. Bencana yang memiliki risiko rendah adalah bencana kebakaran hutan dan lahan; dan kekeringan.

### **2.11.2. Risiko Bencana di Kabupaten Kebumen**

Pengkajian risiko adalah suatu metode untuk menentukan sifat dan besarnya risiko dengan menganalisa bahaya potensial dan mengevaluasi kondisi kerentanan yang ada. Risiko tersebut dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta benda, mata pencaharian dan lingkungan. Indeks risiko bencana merupakan gabungan dari indeks bahaya, kerentanan dan kapasitas.

#### **A. Bencana Banjir**

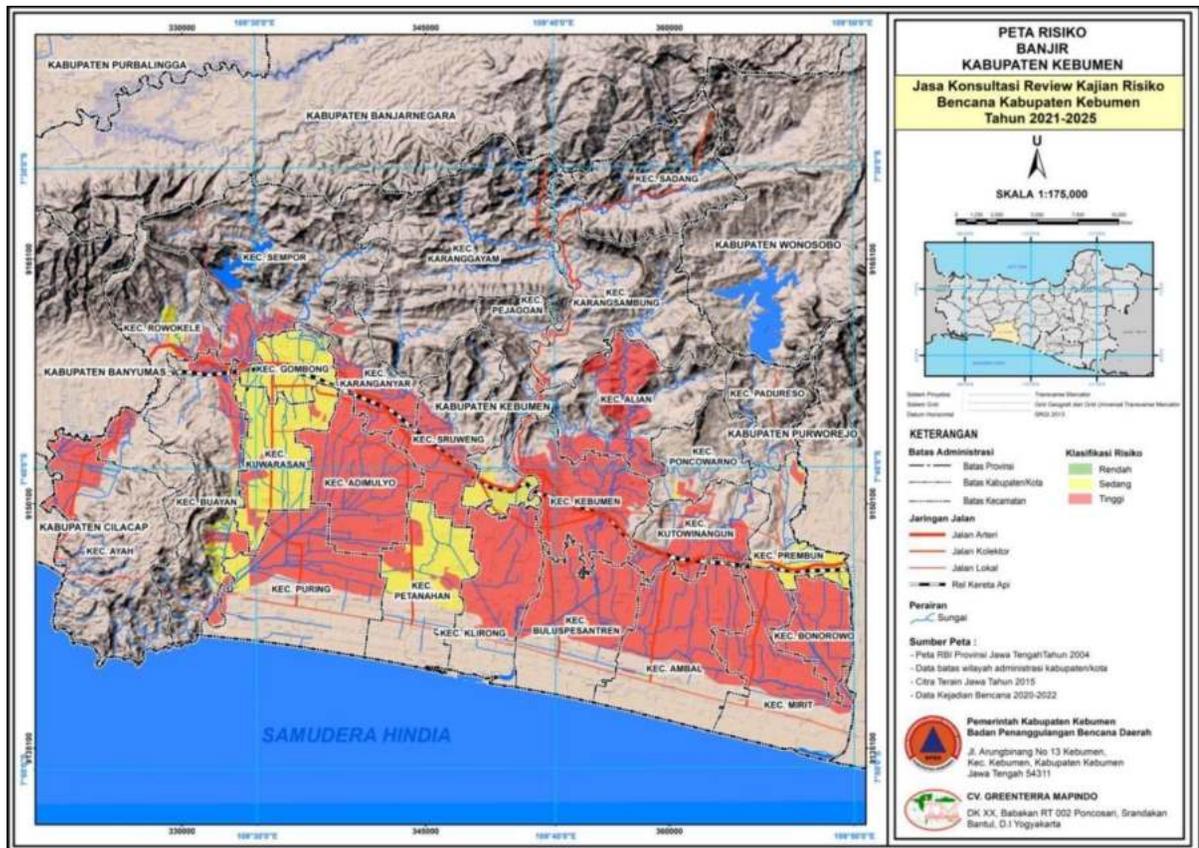
Banjir termasuk bencana yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Kebumen bagian selatan. Berdasarkan topografi daerah, Kabupaten Kebumen bagian selatan cenderung landai hingga sangat landai. Sebagian besar banjir di Kabupaten Kebumen diakibatkan oleh adanya luapan air sungai. Air luapan tersebut menggenang di wilayah daratan baik lahan persawahan maupun lahan pemukiman. Berdasarkan hasil dari pengolahan data dan sejarah

kejadian bencana banjir, didapatkan peta ancaman bencana banjir seperti pada gambar dan tabel dibawah ini.

Tabel 2.37. Luas dan Kelas Risiko Banjir di Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Luas Risiko (Ha)			Kelas Risiko
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Adimulyo	0	0	4.485,50	Tinggi
2	Alian	0	0	2.563,00	Tinggi
3	Ambal	0	11,56	3.777,71	Tinggi
4	Ayah	0	0	1.234,18	Tinggi
5	Bonorowo	0	0	2.244,35	Tinggi
6	Buayan	0	574,86	1.205,77	Tinggi
7	Buluspesantren	0	0	3.213,66	Tinggi
8	Gombang	0	1.836,63	0	Sedang
9	Karanggayam	0	0	0,77	Tinggi
10	Karanganyar	0	0	1.517,58	Tinggi
11	Karangsambung	0	0	69,54	Tinggi
12	Kebumen	0	0	3.887,66	Tinggi
13	Klirong	0	0	3.115,56	Tinggi
14	Kutowinangun	0	0	1.740,92	Tinggi
15	Kwarasan	0	3.225,29	446,50	Sedang
16	Mirit	0	0	3.077,66	Tinggi
17	Padureso	0	0	0	-
18	Pejagoan	0	803,91	44,34	Sedang
19	Petanahan	0	2.108,42	523,74	Sedang
20	Poncowarno	0	21,74	117,27	Tinggi
21	Prembun	0	1.055,34	69,71	Sedang
22	Puring	0	273,09	2.850,40	Tinggi
23	Rowokele	0	271,03	591,40	Tinggi
24	Sadang	0	0	0	-
25	Sempor	0	0	1.054,62	Tinggi
26	Sruweng	0	0	2.115,40	Tinggi
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>10.181,84</b>	<b>39.947,23</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen, Tahun 2023



Gambar 2.22. Peta Risiko Banjir Kabupaten Kebumen

Luas wilayah di Kabupaten Kebumen didominasi oleh risiko banjir dengan klasifikasi tinggi yaitu dengan luas 39.947,23 Ha. Sedangkan ancaman banjir dengan klasifikasi sedang terdapat pada luas wilayah 10.181,84 Ha.

## B. Banjir Bandang

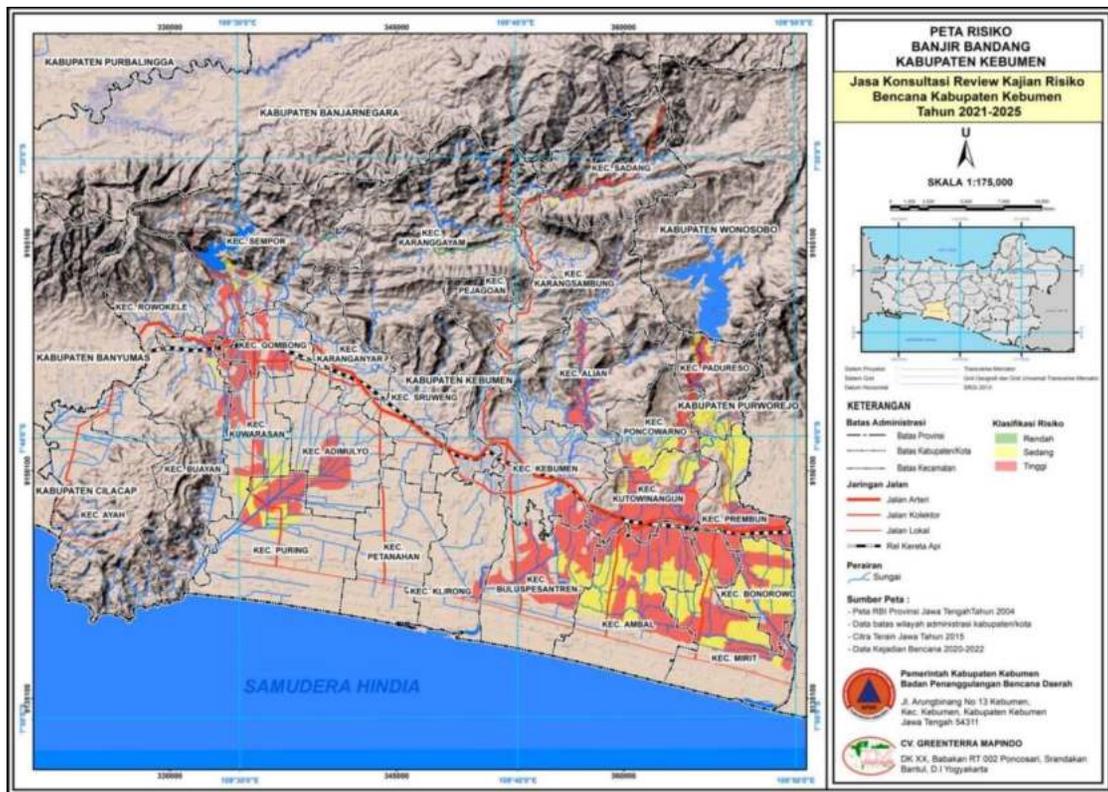
Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dalam jumlah debit yang besar pada alur sungai. Banjir bandang biasanya terjadi di hulu sungai yang beralur sempit. Penyebab banjir bandang antara lain hujan lebat sehingga menimbulkan lonjakan debit yang besar dan mendadak melebihi kapasitas aliran alur hilirnya dan runtuhnya bendungan. Parameter yang digunakan dalam analisis bahaya banjir bandang yaitu sungai utama, topografi, dan potensi longsor di hulu sungai.

Tabel 2.38. Luas dan Kelas Risiko Banjir Bandang Per Kecamatan di Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Luas Risiko (Ha)			Kelas Risiko
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Adimulyo	0	64,41	675,15	Tinggi

2	Alian	0	24,33	608,65	Tinggi
3	Ambal	0	1.609,47	2.361,24	Tinggi
4	Ayah	0	0	0	-
5	Bonorowo	0	1.353,18	787,19	Sedang
6	Buayan	0	80,35	220,41	Tinggi
7	Buluspesantren	0	0	0	-
8	Gombang	0	13,39	741,17	Tinggi
9	Karanggayam	0	0	0	-
10	Karanganyar	0	0	0	-
11	Karangsambung	0	0	0	-
12	Kebumen	0	0	371,59	Tinggi
13	Klirong	0	40,76	174,02	Tinggi
14	Kutowinangun	0	477,08	2.027,95	Tinggi
15	Kuwarasan	0	374,69	777,53	Tinggi
16	Mirit	0	1.234,74	1.863,03	Tinggi
17	Padureso	0	385,20	349,88	Sedang
18	Pejagoan	0	0	0	-
19	Petanahan	0	0	0	-
20	Poncowarno	0	486,56	342,87	Sedang
21	Prembun	0	729,45	1.109,85	Tinggi
22	Puring	0	468,45	819,95	Tinggi
23	Rowokele	0	0	0	-
24	Sadang	0	145,74	189,36	Tinggi
25	Sempor	0	264,50	583,61	Tinggi
26	Sruweng	0	0	0	-

*Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen, Tahun 2023*



Gambar 2.23. Peta Risiko Banjir Bandang Kabupaten Kebumen

Berdasarkan tabel di atas, terlihat besaran luas risiko banjir bandang. Besarnya luas risiko dipengaruhi kondisi wilayah yang berpotensi banjir bandang. Risiko banjir bandang di Kabupaten Kebumen dengan kelastinggi berada pada wilayah seluas 14.003,45 Ha, sedangkan risiko banjir bandang kelas rendah seluas 7.752,3 Ha.

### C. Cuaca Ektrem

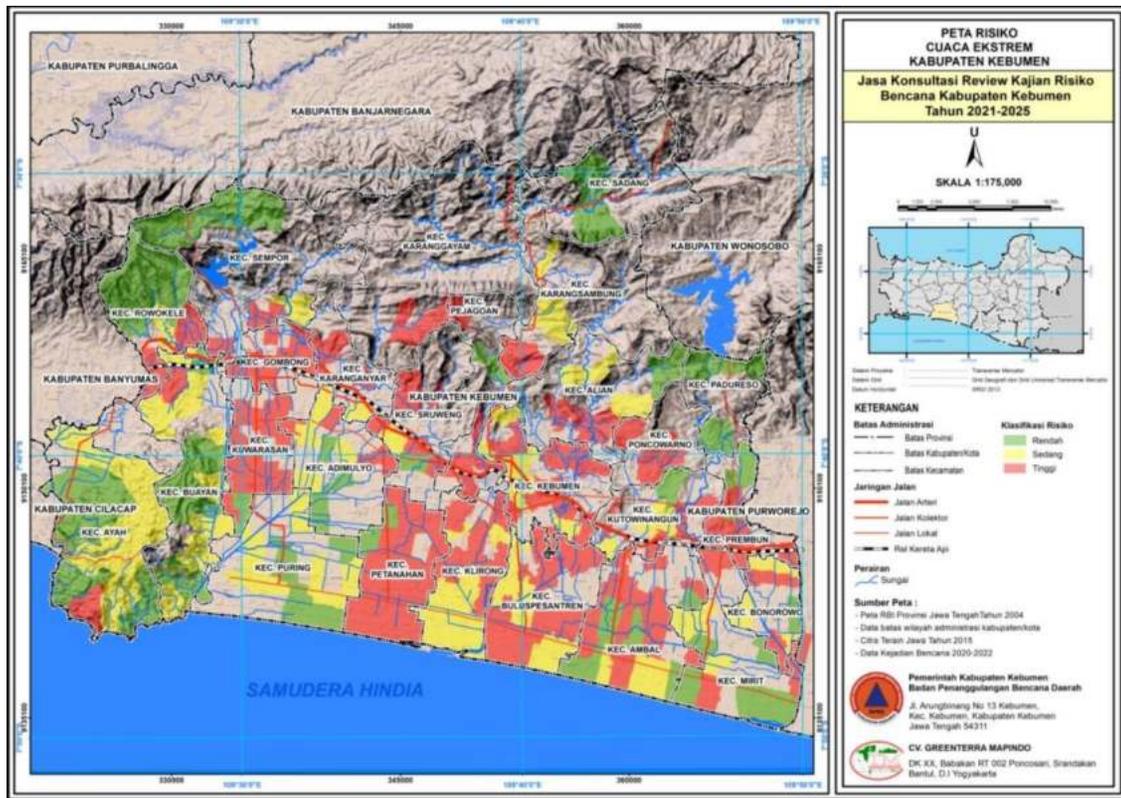
Wilayah dataran rendah memiliki potensi lebih tinggi untuk terkena dampak angin puting beliung. Sebaliknya, daerah pegunungan dengan keterbukaan lahan rendah seperti kawasan hutan lebat memiliki potensi lebih rendah untuk terdampak angin puting beliung. Parameter bahaya cuaca ekstrem antara lain keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan.

Tabel 2.39. Luas dan Kelas Risiko Cuaca Ektrem Per Kecamatan di Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Luas Risiko (Ha)			Kelas Risiko
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Adimulyo	633,35	1.023,58	591,05	Sedang
2	Alian	563,91	841,82	860,14	Tinggi
3	Ambal	1.383,25	817,84	2.709,08	Tinggi

4	Ayah	3.534,40	3.936,96	463,32	Sedang
5	Bonorowo	217,61	690,32	561,07	Sedang
6	Buayan	2.495,40	2.805,78	312,93	Sedang
7	Buluspesantren	0	1.406,57	3.057,16	Tinggi
8	Gombang	0	0	1.286,40	Tinggi
9	Karanggayam	0	0	727,12	Tinggi
10	Karanganyar	0	200,53	719,07	Tinggi
11	Karangsambung	0	847,26	637,33	Sedang
12	Kebumen	0	1.159,82	2.125,24	Tinggi
13	Klirong	0	2.089,62	1.786,38	Sedang
14	Kutowinangun	360,24	677,81	666,64	Sedang
15	Kwarasan	242,48	0	2.214,27	Tinggi
16	Mirit	1.712,68	668,42	1.103,36	Rendah
17	Padureso	1.337,20	0	0	Rendah
18	Pejagoan	296,18	0	1.052,83	Tinggi
19	Petanahan	389,39	0	3.981,39	Tinggi
20	Poncowarno	0	0	1.047,68	Tinggi
21	Prembun	507,74	0	1.236,62	Tinggi
22	Puring	1.469,92	1.939,78	0	Sedang
23	Rowokele	2.578,29	318,87	929,07	Rendah
24	Sadang	1.421,65	0	0	Rendah
25	Sempor	2.272,52	380,16	534,11	Rendah
26	Sruweng	214,71	234,11	1.174,36	Tinggi
<b>Total</b>		<b>21.630,93</b>	<b>20.039,25</b>	<b>29.776,64</b>	<b>Sedang</b>

*Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen, Tahun 2023*



Gambar 2.24. Peta Risiko Cuaca Ekstrem Kabupaten Kebumen

Besarnya luas risiko dipengaruhi kondisi wilayah yang berpotensi cuaca ekstrem. Berdasarkan tabel dan peta di atas, risiko cuaca ekstrem di Kabupaten Kebumen dengan kelas tinggi seluas 29.776,64 Ha. Pada urutan kedua, terdapat risiko cuaca ekstrem kelas rendah dengan luasan wilayah 21.630,93 Ha. Sementara risiko cuaca ekstrem pada kelas sedang seluas 20.039,25 Ha.

**D. Bencana Epidemii dan Wabah Penyakit**

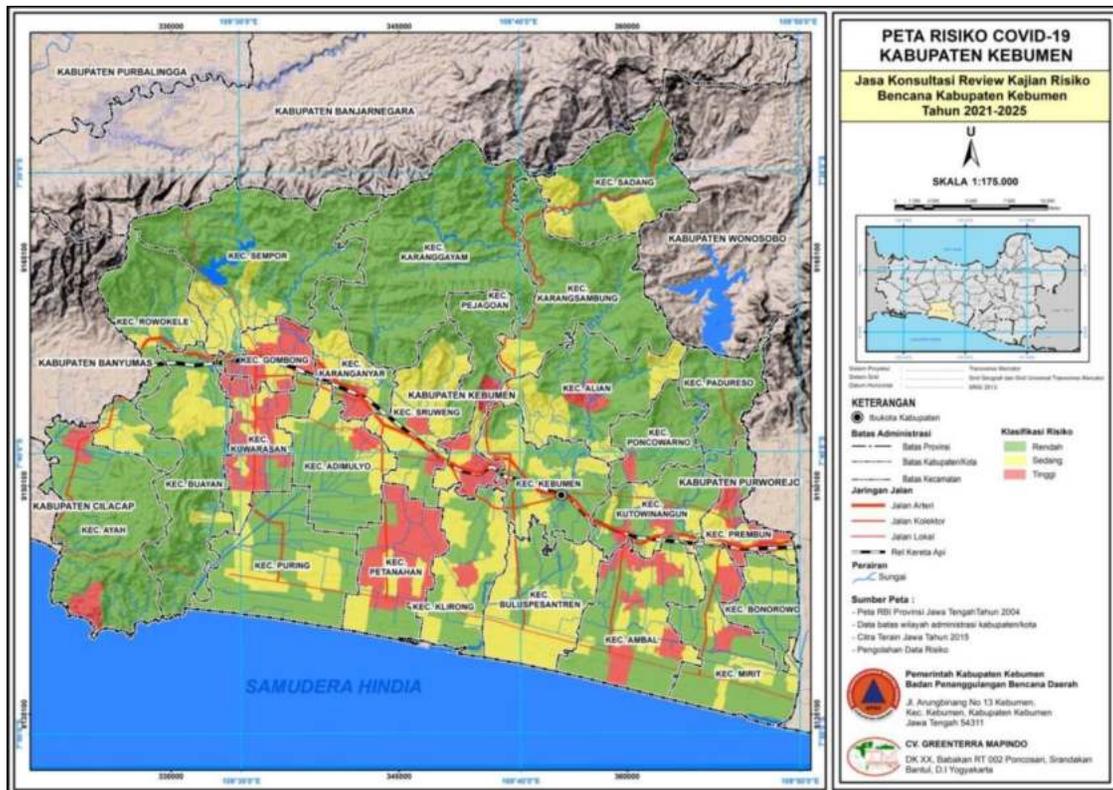
Epidemi dan wabah penyakit yang terdapat di Kabupaten Kebumen meliputi wabah *corona virus disease* 19. Wabah covid-19 mulai masuk ke Kabupaten Kebumen pada tahun 2020. Secara kewilayahan yang memilikipotensi terjangkit covid-19 adalah wilayah yang memilikikepadatan penduduk tinggi dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi.

Tabel 2.40. Luas dan Kelas Risiko Epidemii dan Wabah Penyakit Per-Kecamatan di Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Luas Risiko (Ha)			Kelas Risiko
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Adimulyo	4.100	243	0	Rendah
2	Alian	5.441,47	333,53	0	Rendah
3	Ambal	6.241	0	0	Rendah

4	Ayah	7.266,12	370,88	0	Rendah
5	Bonorowo	1.977,13	113,87	0	Rendah
6	Buayan	6.842	0	0	Rendah
7	Buluspesantren	4.877	0	0	Rendah
8	Gombong	1.700,97	247,03	0	Rendah
9	Karanggayam	10.929	0	0	Rendah
10	Karanganyar	2.781,69	358,31	0	Rendah
11	Karangsambung	6.515	0	0	Rendah
12	Kebumen	4.204	0	0	Rendah
13	Klirong	4.126,88	198,12	0	Rendah
14	Kutowinangun	2.988,26	384,74	0	Rendah
15	Kwarasan	3.199,70	184,30	0	Rendah
16	Mirit	4.595,35	639,65	0	Rendah
17	Padureso	2.895	0	0	Rendah
18	Pejagoan	3.058,02	399,98	0	Rendah
19	Petanahan	4.484	0	0	Rendah
20	Poncowarno	2.737	0	0	Rendah
21	Prembun	2.296	0	0	Rendah
22	Puring	6.197	0	0	Rendah
23	Rowokele	5.380	0	0	Rendah
24	Sadang	4.590,70	832,30	0	Rendah
25	Sempor	10.015	0	0	Rendah
26	Sruweng	4.051,04	316,46	0	Rendah
<b>Total</b>		<b>123.489,33</b>	<b>4.622,17</b>	<b>0,00</b>	<b>Sedang</b>

*Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen, Tahun 2023*



Gambar 2.25. Peta Risiko Epidemi dan Wabah Penyakit Kabupaten Kebumen

Berdasarkan data pada tabel di atas, besaran luas risiko epidemi dan wabah penyakit di Kabupaten Kebumen hanya ada pada kelas rendah dan sedang. Pada risiko epidemi dan wabah kelas rendah terdapat 123.489,33 Ha. Sementara, pada risiko epidemi dan wabah penyakit kelas sedang seluas 4.622,17 Ha.

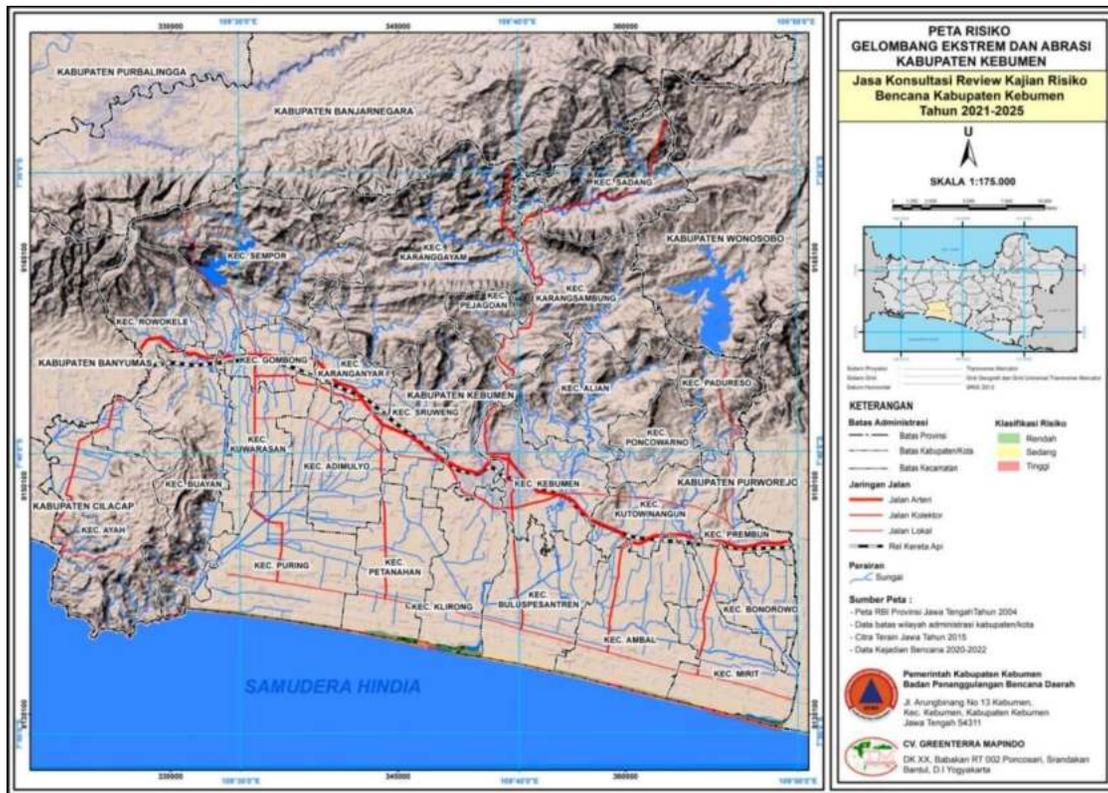
**E. Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi**

Bahaya gelombang ekstrem pada umumnya ditimbulkan oleh efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Secara geografis Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis memberikan pengaruh kuat terhadap terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dapat berdampak pada rusaknya berbagai infrastruktur yang ada di kawasan pantai seperti bangunan pelindung pantai, pelabuhan, dermaga, tempat sandaran perahu, dan kerusakan lingkungan.

Tabel 2.41. Luas dan Kelas Risiko Gelombang Ekstrem dan Abrasi  
Per-Kecamatan di Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Luas Risiko (Ha)			Kelas Risiko
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Adimulyo	0	0	0	-
2	Alian	0	0	0	-
3	Ambal	53,73	30,03	109,07	Tinggi
4	Ayah	0	0	76,82	Tinggi
5	Bonorowo	0	0	0	-
6	Buayan	4,33	4,33	18,63	Tinggi
7	Buluspesantren	0	63,69	56,86	Sedang
8	Gombong	0	0	0	-
9	Karanggayam	0	0	0	-
10	Karanganyar	0	0	0	-
11	Karangsambung	0	0	0	-
12	Kebumen	0	0	0	-
13	Klirong	152,31	10,39	74,67	Rendah
14	Kutowinangun	0	0	0	-
15	Kwarasan	0	0	0	-
16	Mirit	93,68	15,71	206,13	Tinggi
17	Padureso	0	0	0	-
18	Pejagoan	0	0	0	-
19	Petanahan	95,75	12,33	73,99	Rendah
20	Poncowarno	0	0	0	-
21	Prembun	0	0	0	-
22	Puring	109,28	7,95	115,35	Tinggi
23	Rowokele	0	0	0	-
24	Sadang	0	0	0	-
25	Sempor	0	0	0	-
26	Sruweng	0	0	0	-
<b>Total</b>		<b>509,09</b>	<b>144,44</b>	<b>731,52</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen,  
Tahun 2023



Gambar 2.26. Peta Risiko Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Kebumen

Berdasarkan tabel di atas, terlihat besaran luas risiko gelombang ekstrim dan abrasi per kecamatan. Secara keseluruhan risiko gelombang ekstrim dan abrasi memiliki potensi luas risiko di Kabupaten Kebumen dengan total 1.260,77 Ha yang berada pada kelas tinggi.

#### F. Bencana Gempa Bumi

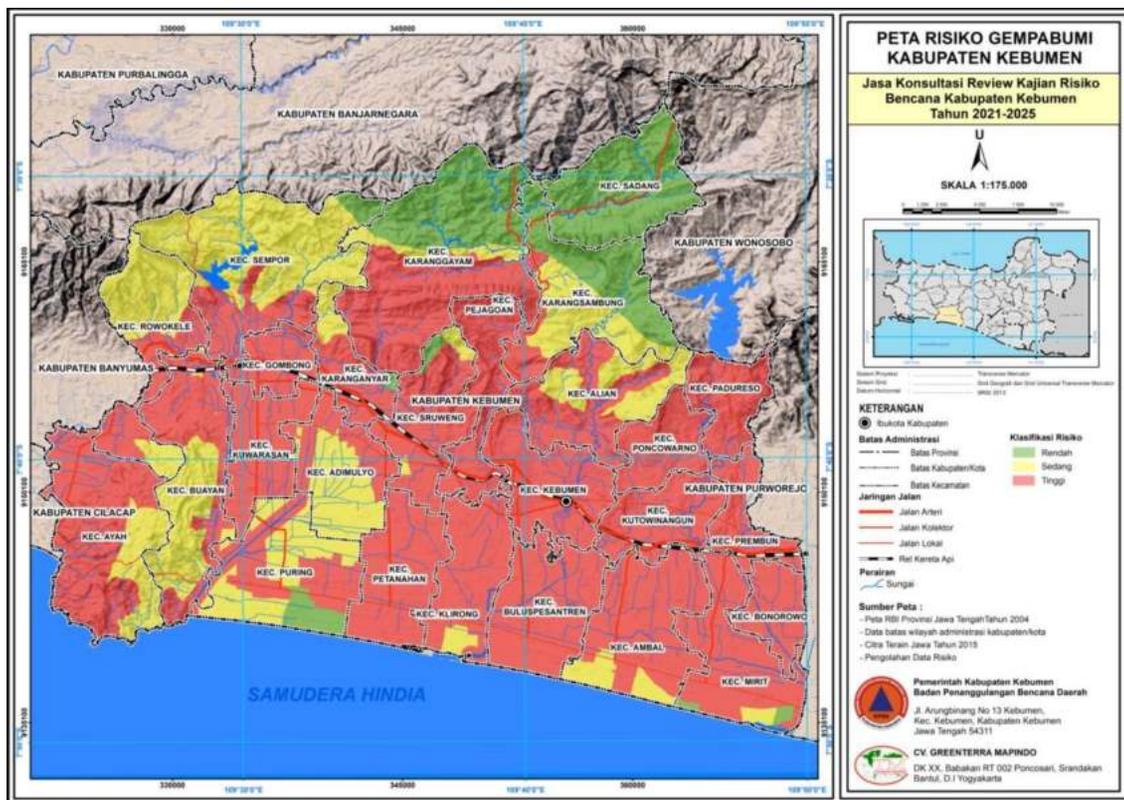
Bahaya gempabumi terjadi karena getaran atau guncangan di permukaan bumi akibat tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi, atau runtuhnya batuan. Penentuan indeks bahaya gempabumi pada kajian ini menggunakan data guncangan di batuan dasar yang dikonversi menjadi data guncangan di permukaan. Konversi perlu dilakukan karena gempabumi dengan magnitudo yang tinggi dilokasi yang dalam belum tentu menghasilkan guncangan permukaan yang lebih besar dibandingkan gempabumi dengan magnitudo yang lebih rendah pada lokasi yang lebih dangkal.

Tabel 2.42. Luas dan Kelas Risiko Gempabumi Per-Kecamatan di Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Luas Risiko (Ha)			Kelas Risiko
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Adimulyo	0	2.611,03	1.731,90	Sedang

2	Alian	23,92	1.960,33	3.790,72	Tinggi
3	Ambal	0	974,72	5.266,29	Tinggi
4	Ayah	0	1.846,46	5.790,54	Tinggi
5	Bonorowo	0	0	2.091	Tinggi
6	Buayan	0	2.981,60	3.860,4	Tinggi
7	Buluspesantren	0	0	4.877	Tinggi
8	Gombang	0	0	1.948	Tinggi
9	Karanggayam	4.692,77	867,62	5.368,62	Tinggi
10	Karanganyar	104,19	564,23	2.471,50	Tinggi
11	Karangsambung	3.326,20	2.775,41	413,30	Rendah
12	Kebumen	0	0	4.204	Tinggi
13	Klirong	0	324,85	4.000,15	Tinggi
14	Kutowinangun	0	0	3.373	Tinggi
15	Kwarasan	0	0	3.384	Tinggi
16	Mirit	228,66	261,72	4.744,6	Tinggi
17	Padureso	2,01	0	2.892,90	Tinggi
18	Pejagoan	0	0	3.458	Tinggi
19	Petanahan	0	0	4.484	Tinggi
20	Poncowarno	0	0	2.737	Tinggi
21	Prembun	0	0	2.296	Tinggi
22	Puring	805,36	2.908,77	2.482,80	Sedang
23	Rowokele	0	3.279,37	2.100,60	Sedang
24	Sadang	0	0	5.423	Tinggi
25	Sempor	442,44	7.304,35	2.268,20	Sedang
26	Sruweng	196,57	321,72	3.849,70	Tinggi
<b>Total</b>		<b>9.822,11</b>	<b>28.982,18</b>	<b>89.307,21</b>	<b>Sedang</b>

*Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen,  
Tahun 2023*



Gambar 2.26. Peta Risiko Gempabumi Kabupaten Kebumen

Berdasarkan tabel di atas, terlihat besaran luas risiko gempabumi per kecamatan. Risiko gempabumi di Kabupaten Kebumen didominasi oleh kelas tinggi dengan luasan 89.307,21 Ha. Pada peta risiko gempabumi di atas terlihat secara jelas bahwa risiko gempa bumi di Kabupaten Kebumen didominasi oleh risiko tinggi yang ditandai dengan warna merah.

**G. Kebakaran Hutan dan Lahan**

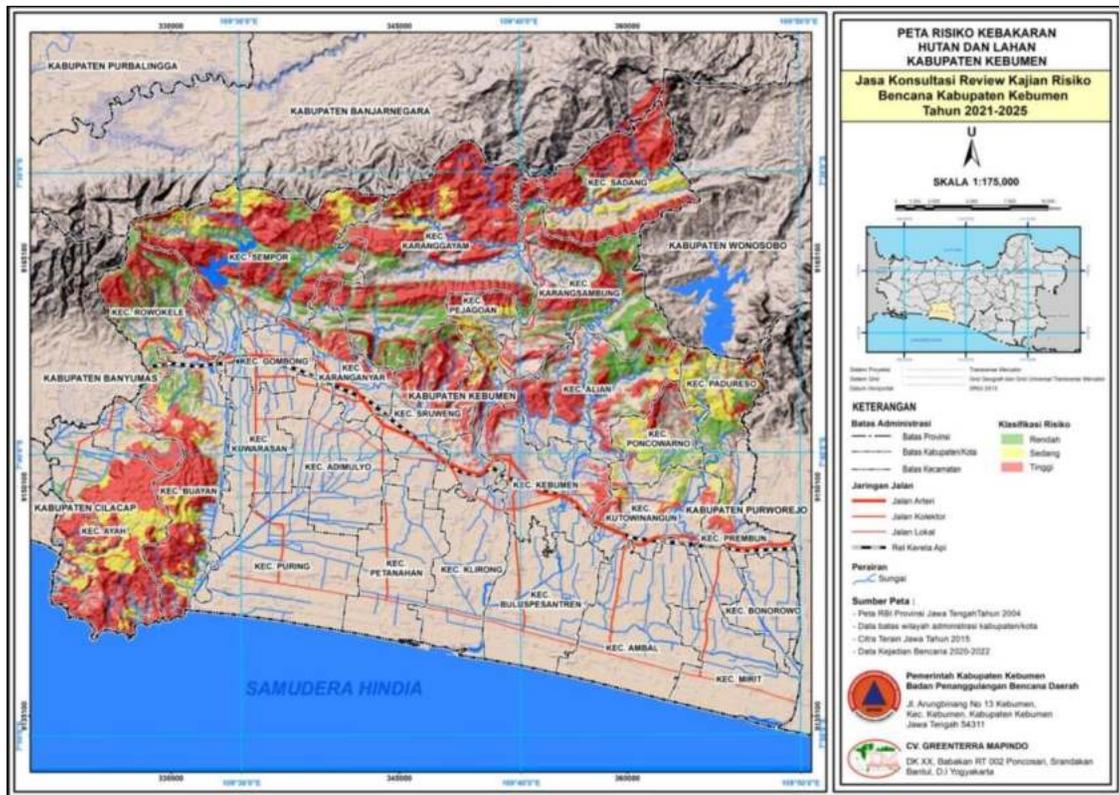
Kebakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada wilayah yang vegetasinya rawan untuk terbakar misalnya pada wilayah gambut. Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain kekeringan yang berkepanjangan, sambaran petir, dan pembukaan lahan oleh manusia. Parameter untuk menentukan indeks bahaya kebakaran hutan dan lahan terdiri atas: jenis hutan dan lahan, iklim, dan jenis tanah.

Tabel 2.43. Luas dan Kelas Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Per-Kecamatan di Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Luas Risiko (Ha)			Kelas Risiko
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Adimulyo	0	0	0	-
2	Alian	706,66	345,67	2.052,81	Tinggi
3	Ambal	0	0	0	-

4	Ayah	275,66	1.531,63	4.079,43	Tinggi
5	Bonorowo	0	0	0	-
6	Buayan	623,38	726,61	2.945,74	Tinggi
7	Buluspesantren	0	0	0	-
8	Gombang	0	1,26	104,20	Tinggi
9	Karanggayam	1431,59	316,95	5909,71	Tinggi
10	Karanganyar	423,82	95,10	804,74	Tinggi
11	Karangsambung	2.091,69	76,26	2.099,58	Tinggi
12	Kebumen	0	213,84	523,74	Tinggi
13	Klirong	0	0	0	-
14	Kutowinangun	159,54	312,92	363,11	Tinggi
15	Kwarasan	0	0	0	-
16	Mirit	0	0	0	-
17	Padureso	719,02	881,55	261,26	Sedang
18	Pejagoan	35,07	682,91	852,74	Tinggi
19	Petanahan	0	0	0	-
20	Poncowarno	226,97	765,10	371,20	Sedang
21	Prembun	125,12	179,57	140,80	Sedang
22	Puring	0	0	0	-
23	Rowokele	1.320,33	142,80	1.764,37	Tinggi
24	Sadang	96,07	740,08	3.630,88	Tinggi
25	Sempor	1.567,84	1.245,04	4.284,49	Tinggi
26	Sruweng	203,05	71,59	1.371,39	Tinggi
<b>Total</b>		<b>10.005,80</b>	<b>8.328,86</b>	<b>31.560,18</b>	<b>Rendah</b>

*Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen, Tahun 2023*



Gambar 2.27. Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Kebumen

Tabel di atas, menunjukkan besaran luas risiko kebakaran hutan dan lahan per kecamatan. Berdasarkan tabel tersebut beserta data-data lain serta argument lain yang mendukung, secara keseluruhan risiko kebakaran hutan dan lahan memiliki potensi luas risiko di Kabupaten Kebumen termasuk pada kelas rendah.

### H. Kekeringan

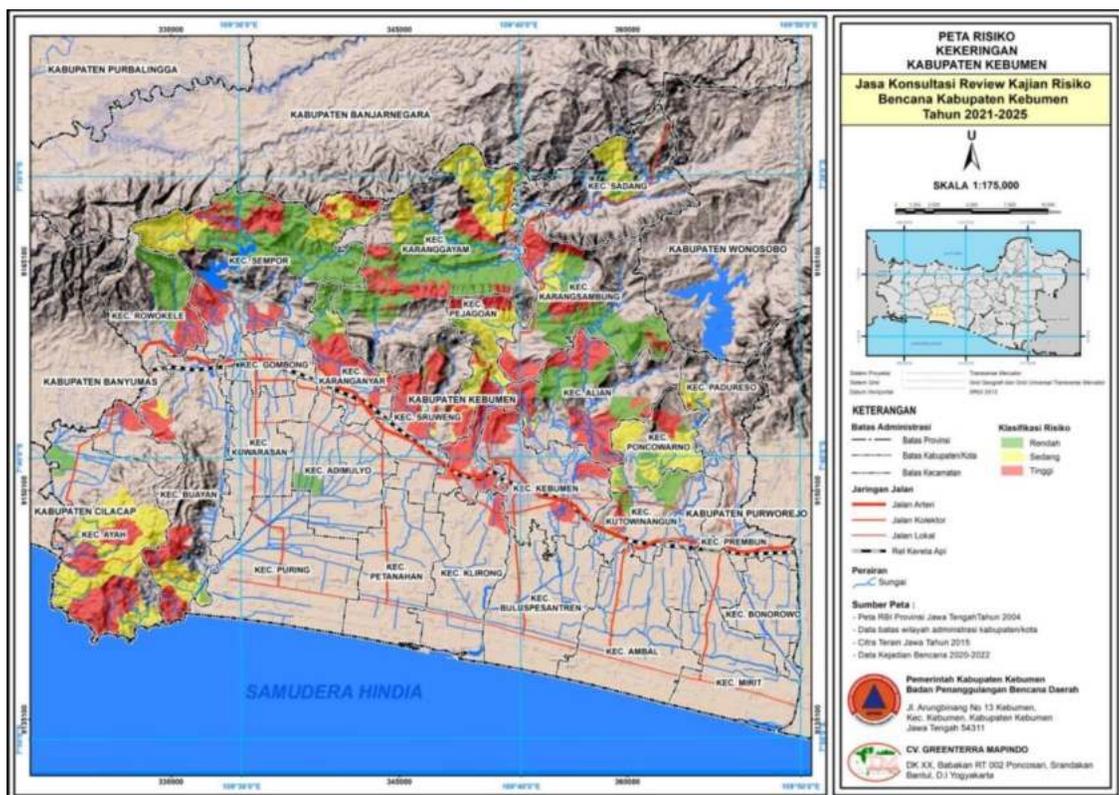
Bahaya kekeringan muncul karena ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kondisi ini bermula saat berkurangnya curah hujan di bawah normal dalam periode waktu yang lama sehingga ketersediaan cadangan air dalam tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman dengan normal. Kekeringan yang dibahas pada kajian ini adalah kekeringan meteorologi yaitu kondisi berkurangnya curah hujan dibawah normal. Metode penentuan kekeringan dilakukan dengan Standardized Precipitation Index (SPI) yang menggunakan data curah hujan selama 3 bulanan yang menghasilkan indeks kekeringan berdasarkan frekuensi bulan kering.

Tabel 2.44. Luas dan Kelas Risiko Kekeringan Per-Kecamatan di Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Luas Risiko (Ha)	Kelas
----	-----------	------------------	-------

		Rendah	Sedang	Tinggi	Risiko
1	Adimulyo	272,65	0	0	Rendah
2	Alian	1.064,16	152,81	2.043,21	Tinggi
3	Ambal	0	0	0	-
4	Ayah	267,32	2.841,93	1.870,43	Sedang
5	Bonorowo	0	0	0	-
6	Buayan	74	697,91	1.237,37	Tinggi
7	Buluspesantren	0	0	0	-
8	Gombong	0	0	0	-
9	Karanggayam	3.801,12	1.948,43	1.144,79	Rendah
10	Karanganyar	538,25	134,27	998,71	Tinggi
11	Karangsambung	2.220,91	358,29	1.347,39	Rendah
12	Kebumen	0	0	850,41	Tinggi
13	Klirong	0	0	226,09	Tinggi
14	Kutowinangun	496,53	39,72	140,03	Rendah
15	Kwarasan	0	0	0	-
16	Mirit	0	0	0	-
17	Padureso	0	300,07	21,65	Sedang
18	Pejagoan	144,56	1.237,75	1.550,83	Tinggi
19	Petanahan	0	0	0	-
20	Poncowarno	337,53	1.246,28	239,88	Sedang
21	Prembun	0	0	0	-
22	Puring	0	0	0	-
23	Rowokele	1.010,8	0	798,76	Rendah
24	Sadang	134,32	630,26	0	Sedang
25	Sempor	3.227,17	1.613,17	1.980,98	Rendah
26	Sruweng	45,18	164,66	1.372,9	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen, Tahun 2023



Gambar 2.28. Peta Risiko Kekeringan Kabupaten Kebumen

Berdasarkan tabel di atas, terlihat besaran luas risiko kekeringan per kecamatan. Secara keseluruhan risiko kekeringan memiliki potensi luas risiko di Kabupaten Kebumen dengan total 40.825 Ha yang berada pada kelas rendah.

### I. Tanah Longsor

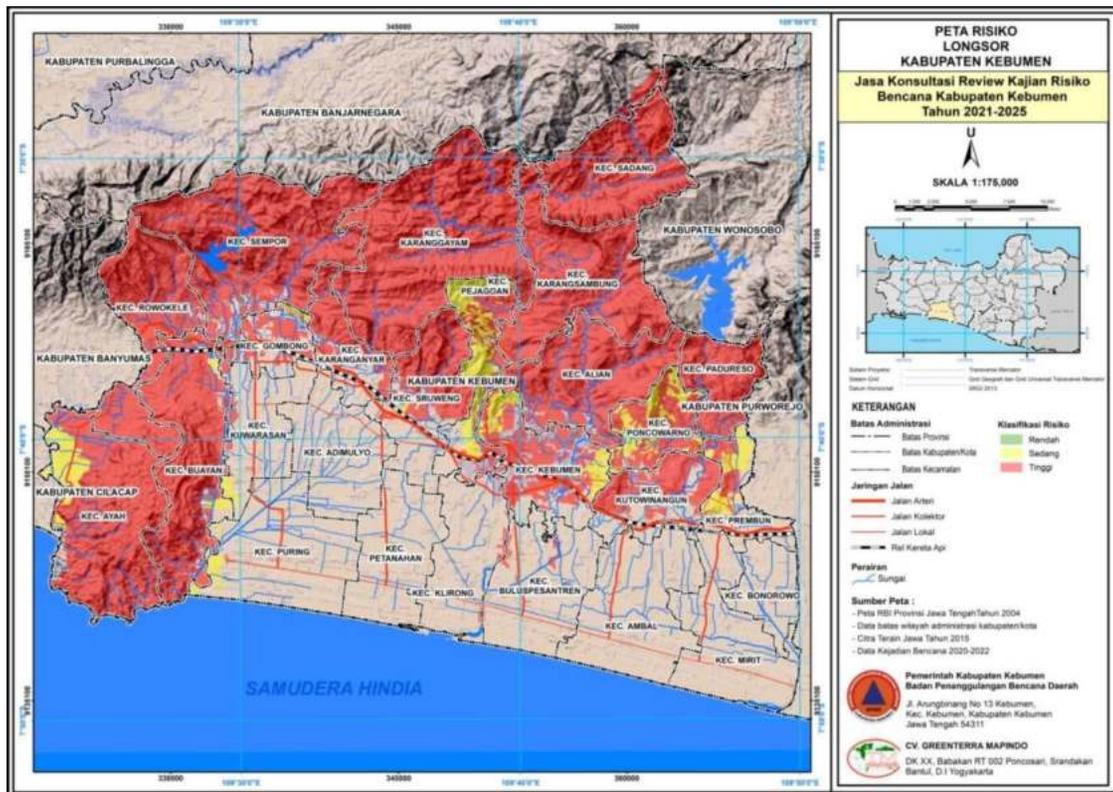
Tanah longsor merupakan kejadian bergeraknya masa tanah atau batuan yang diakibatkan oleh lebih besarnya gaya pendorong (sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah/batuan) dibandingkan gaya penahan dari batuan dan kepadatan tanah. Longsor termasuk bencana yang paling sering terjadi di wilayah Kabupaten Kebumen bagian utara. Berdasarkan topografi daerah, Kabupaten Kebumen bagian utara cenderung terjal hingga sangat terjal.

Tabel 2.45. Luas dan Kelas Risiko Tanah Longsor Per-Kecamatan di Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Luas Risiko (Ha)			Kelas Risiko
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Adimulyo	0	8,45	0,03	Sedang
2	Alian	0	0	5.523,51	Tinggi
3	Ambal	0	0	0	-
4	Ayah	0	882,26	7.025,05	Tinggi
5	Bonorowo	0	0	0	-
6	Buayan	0	153,65	6.327,98	Tinggi
7	Buluspesantren	0	0	135,93	Tinggi
8	Gombong	0	86,34	912,13	Tinggi
9	Karangayam	0	0	10.876,79	Tinggi
10	Karanganyar	0	0	2.096,75	Tinggi
11	Karangsambung	0	0	6.900,94	Tinggi
12	Kebumen	0	742,41	2.098,49	Tinggi
13	Klirong	0	0	151,82	Tinggi
14	Kutowinangun	0	0	1.850,04	Tinggi
15	Kwarasan	0	1.49,79	161,16	Tinggi
16	Mirit	0	1,05	0	Sedang
17	Padureso	0	0	2.653,96	Tinggi
18	Pejagoan	0	1.405,41	1.107,59	Sedang
19	Petanahan	0	0	0	-
20	Poncowarno	0	943,35	1.722,29	Tinggi

21	Prembun	0	605,32	461,96	Sedang
22	Puring	0	255,15	10,16	Sedang
23	Rowokele	0	0	5.468,70	Tinggi
24	Sadang	0	0	5.859,12	Tinggi
25	Sempor	0	0	9.467,50	Tinggi
26	Sruweng	0	329,96	2.658,48	Tinggi
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>5.563,12</b>	<b>73.470,35</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen, Tahun 2023



Gambar 2.29. Peta Risiko Tanah Longsor Kabupaten Kebumen Berdasarkan tabel di atas, terlihat besaran luas risiko tanah longsor per kecamatan. Secara keseluruhan risiko tanah longsor memiliki potensi luas risiko di Kabupaten Kebumen dengan total 79.033,60 Ha yang berada pada kelas tinggi.

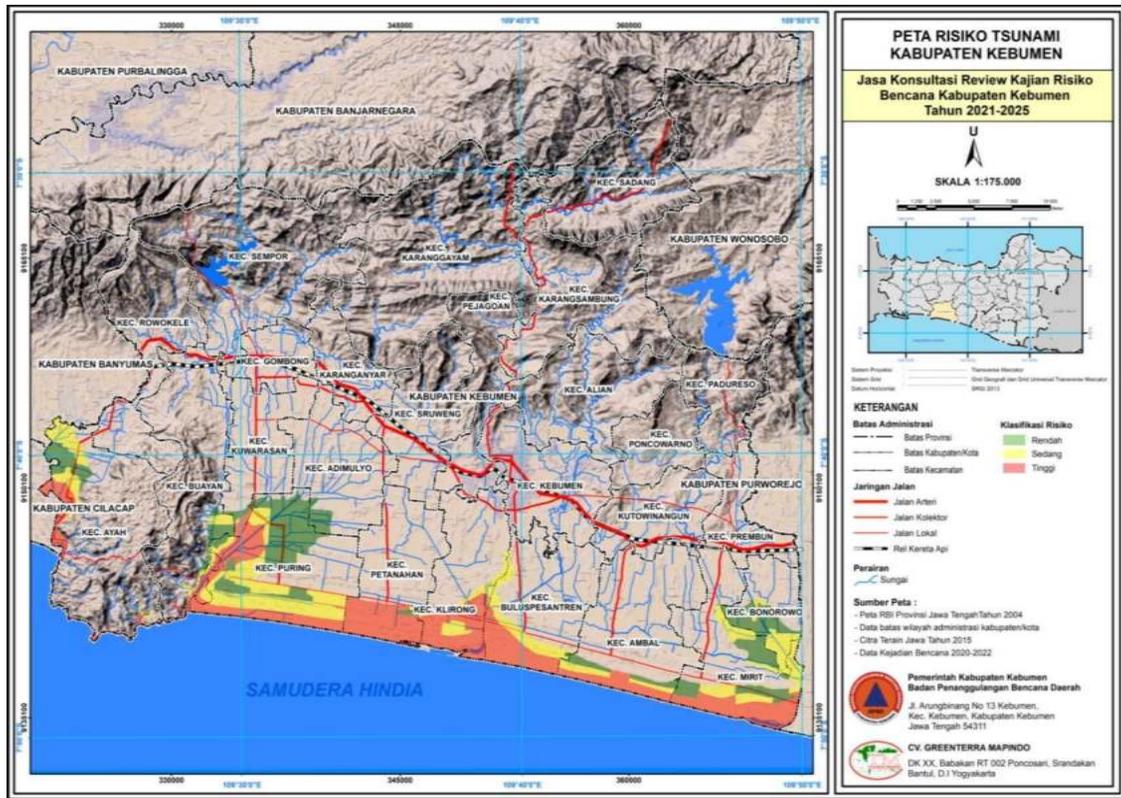
## J. Tsunami

Kabupaten Kebumen terletak di wilayah bagian Selatan Pulau Jawa, berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Adanya penunjaman lempeng samudra (Samudera Hindia) dengan lempeng benua (Pulau Jawa) atau biasa disebut dengan subduksi mengakibatkan Kabupaten Kebumen memiliki ancaman gempa bumi (gempa tektonik). Apabila terjadi gempa cukup besar yang menimpa wilayah bagian Selatan Kebumen, akan mengakibatkan adanya potensi tsunami di wilayah Selatan Kebumen.

Tabel 2.46. Luas dan Kelas Risiko Tsunami Per-Kecamatan di Kabupaten Kebumen

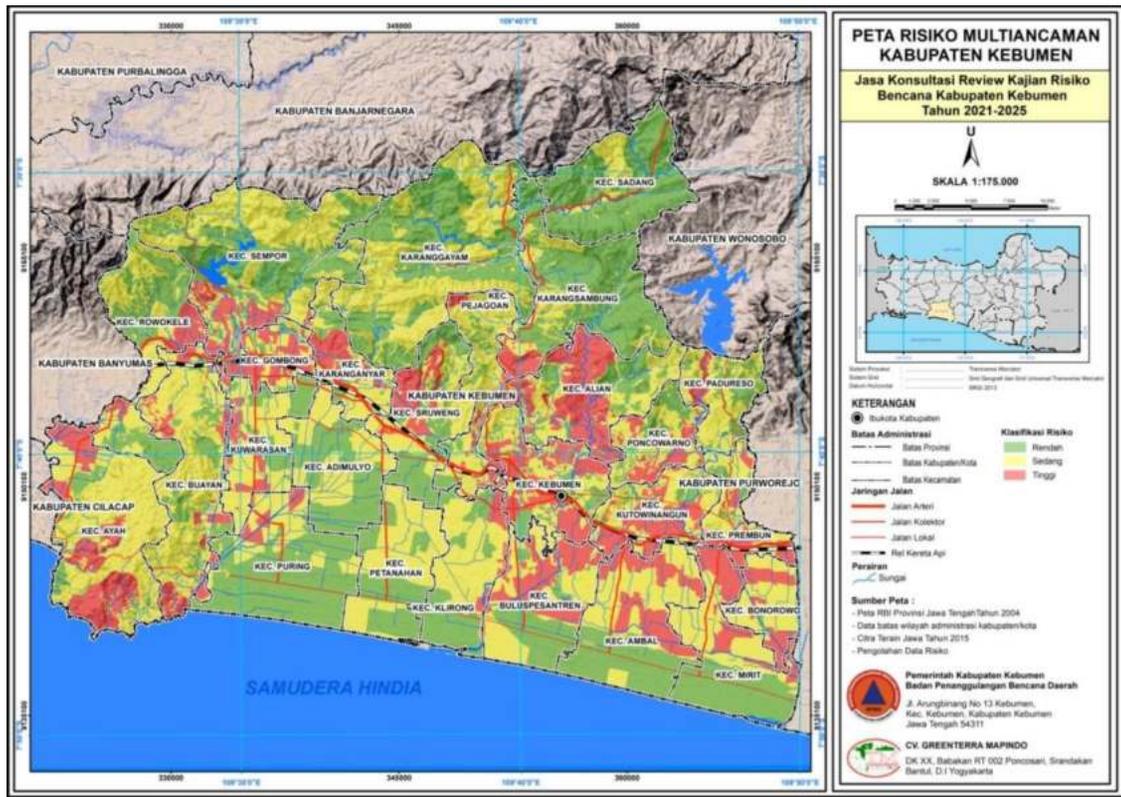
No	Kecamatan	Luas Risiko (Ha)			Kelas Risiko
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Adimulyo	235,80	0	0	Rendah
2	Alian	0	0	0	-
3	Ambal	231,66	222,15	502,09	Tinggi
4	Ayah	393,20	581,72	485,34	Rendah
5	Bonorowo	575,28	407,38	0,00	Rendah
6	Buayan	238,70	235,13	186,30	Rendah
7	Buluspesantren	0	552,79	890,92	Tinggi
8	Gombang	0	0	0	-
9	Karanggayam	0	0	0	-
10	Karanganyar	0	0	0	-
11	Karangsambung	0	0	0	-
12	Kebumen	0	0	0	-
13	Klirong	0	410,03	1.102,74	Sedang
14	Kutowinangun	0	0	0	-
15	Kwarasan	67,19	5,81	89,51	Sedang
16	Mirit	730,38	785,11	993,64	Rendah
17	Padureso	0	0	0	-
18	Pejagoan	0	0	0	-
19	Petanahan	43,49		1.129,21	Sedang
20	Poncowarno	0	0	0	-
21	Prebun	0	0	0	-
22	Puring	1.718,19	1.831,59	1.243,78	Rendah
23	Rowokele	0	0	0	-
24	Sadang	0	0	0	-
25	Sempor	0	0	0	-
26	Sruweng	0	0	0	-
<b>Total</b>		<b>7.115,90</b>	<b>4.226,57</b>	<b>4.562,24</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen, Tahun 2023



Gambar 2.29. Peta Risiko Tanah Longsor Kabupaten Kebumen Berdasarkan tabel di atas, terlihat besaran luas risiko tsunami per kecamatan. Secara keseluruhan risiko tsunami memiliki potensi luas risiko di Kabupaten Kebumen dengan total 15.904,71 Ha yang berada pada kelas tinggi.

### K. Multiancam



Gambar 2.30. Peta Risiko Multiancam Kabupaten Kebumen

Peta Multi Ancaman mewakili kondisi kebencanaan Kabupaten Kebumen. Peta Multi Ancaman dibuat dengan menumpang susunan 10 ancaman yang ada di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan peta di atas, dapat dilihat bahwa risiko multiancaman di Kabupaten Kebumen didominasi oleh klasifikasi kelas rendah.

## 2.12. KONDISI PERSAMPAHAN KABUPATEN KEBUMEN

Sampah tidak bisa dipisahkan dari proses dan aktivitas masyarakat, dan kehadirannya sulit untuk dihindarkan. Selain itu, penggunaan produk oleh masyarakat akan menghasilkan residu. Pada banyak kasus, jenis-jenis bahan ini tidak bisa dipakai kembali dengan cara-cara lain dan mungkin juga tidak bisa untuk dijual, bahan-bahan ini secara khusus disebut sebagai sampah. Sampah sebagai hasil dari proses dan aktivitas masyarakat, dengan demikian salah satu faktor yang memicu kompleksnya pengelolaan sampah yaitu penambahan jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk maka timbulan sampah semakin banyak, kebutuhan sumber daya untuk mengelola sampah semakin besar pula. Bertambahnya volume jumlah sampah setiap harinya di Kabupaten Kebumen disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi, bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya daerah permukiman dan tingkat aktifitas kegiatan sosial.

Tabel 2.47. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (kg/hari)
1	Ayah	67.371	22.906,14
2	Buayan	68.727	23.367,18
3	Puring	66.112	22.478,08
4	Petanahan	62.689	21.314,26
5	Klirong	66.341	22.555,94
6	Buluspesantren	61.236	20.820,24
7	Ambal	65.603	22.305,02
8	Mirit	55.663	18.925,42
9	Prembun	29.808	10.134,72
10	Kutowinangun	49.827	16.941,18

11	Alian	70.093	23.831,62
12	Kebumen	135.338	46.014,92
13	Pejagoan	56.980	19.373,2
14	Sruweng	63.861	21.712,74
15	Adimulyo	38.800	13.192
16	Kuwarasan	52.765	17.940,1
17	Rowokele	53.413	18.160,42
18	Sempor	72.509	24.653,06
19	Gombang	50.474	17.161,16
20	Karanganyar	38.427	13.065,18
21	Karanggayam	62.205	21.149,7
22	Sadang	23.928	8.135,52
23	Bonorowo	22.503	7.651,02
24	Padureso	17.286	5.877,24
25	Poncowarno	19.418	6.602,12
26	Karangsambung	49.766	16.920,44
<b>Jumlah</b>		<b>1.421.143</b>	<b>483.188,6</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen, 2022

Komposisi sampah yang dihasilkan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022 bervariasi dimana komposisi terbesar berupa sampah kayu/ranting sebesar 36,80 % dan sampah sisa makanan dengan komposisi sebesar 30 %. Secara rinci, komposisi jenis sampah yang dihasilkan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48. Persentase Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah	Jumlah (%)
1	Sisa makanan	30,00
2	Kayu ranting	36,80
3	Kertas karton	7,00
4	Plastik	12,00
5	Logam	7,00

6	Kain	4,00
7	Karet	2,00
8	Kaca	1,00
9	Lainnya	0,20

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Tahun 2022

Penanganan persampahan di Kabupaten Kebumen telah mengikuti sistem pengelolaan persampahan di mana sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga telah dilakukan pewadahan, kemudian juga telah terdapat tempat pembuangan sementara (TPS) yang berfungsi sebagai pengumpul sampah sementara yang berasal dari pewadahan. Sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) tersebut kemudian diangkut truk pengangkut sampah dibawa dan diproses di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kabupaten Kebumen memiliki 2 (dua) TPA yaitu TPA Kaligending yang melayani wilayah tengah dan timur, dan TPA Semali yang melayani wilayah barat. Rincian TPA di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.49. Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

No	Lokasi	Nama TPA	Jenis TPA	Luas TPA (Ha)	Kapasitas (m <sup>3</sup> )	Volume Eksisting (m <sup>3</sup> )
1	Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung	TPA Kaligending	<i>Controlled landfill</i>	5	938.777	217.304
2	Desa Semali Kecamatan Sempor	TPA Semali	<i>Controlled landfill</i>	3,7	444.000	121.304

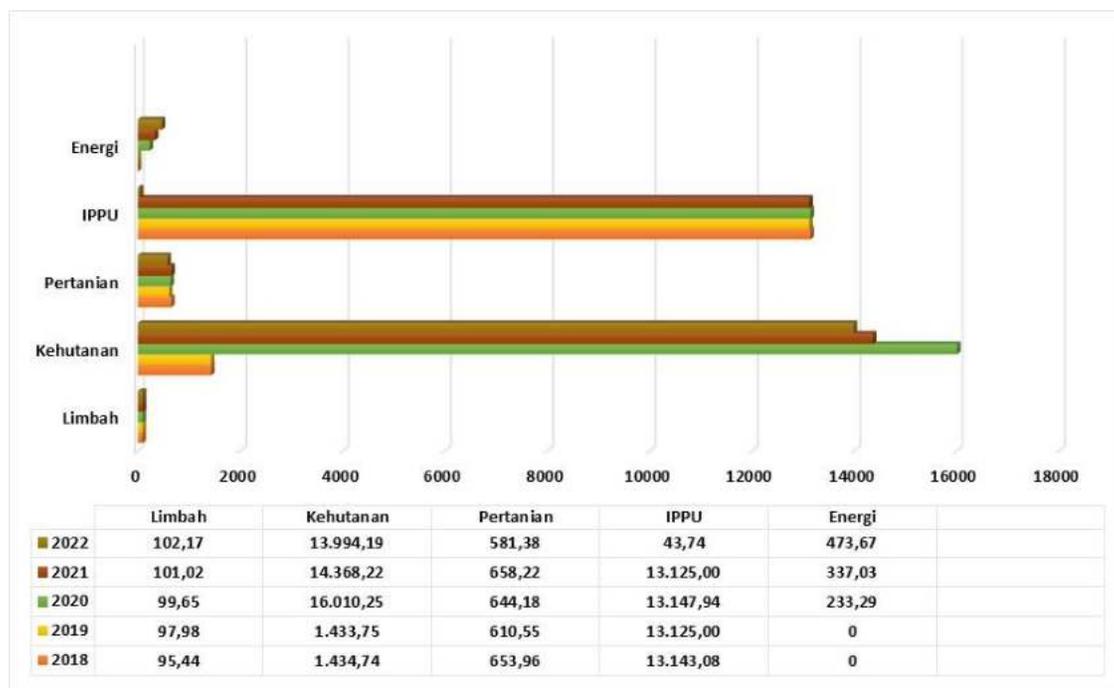
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen, Tahun 2022

### 2.13. KONDISI EMISI GAS RUMAH KACA KABUPATEN KEBUMEN

Emisi GRK di Kabupaten Kebumen tahun 2018 - 2022 menunjukkan bahwa emisi mengalami fluktuasi. Besarnya emisi pada tahun 2018 - 2022 adalah 15.327,22 Ton CO<sub>2</sub>eq pada tahun 2018 dan 15.195,15 Ton CO<sub>2</sub>eq. Sepanjang tahun 2018 - 2022 Sektor IPPU berkontribusi paling besar terhadap emisi GRK di kabupaten Kebumen disusul oleh sektor Kehutanan. Pada tahun 2018 - 2022, Kabupaten Kebumen justru menyerap emisi GRK sebesar (12.457,75 Ton CO<sub>2</sub>eq) pada tahun 2018 dan menyerap GRK sebesar (12.793,230 Ton CO<sub>2</sub>eq) pada tahun 2022. Serapan emisi gas rumah kaca berasal dari sektor Kehutanan yang mempunyai nilai cukup besar, sehingga emisi GRK yang ditimbulkan

dari sector energy, IPPU, pertanian dan limbah dapat diimbangi dengan adanya penyerapan emisi tersebut oleh sector kehutanan.

Pada tahun 2018 total emisi GRK Kabupaten Kebumen mencapai 12.457,740 Ton CO<sub>2</sub>eq, kemudian emisi mengalami fluktuasi dan ditahun 2022 tercatat emisi menjadi 12.793,230 Ton CO<sub>2</sub>eq atau naik sekitar 30% dibandingkan dengan emisi tahun 2018. Tren emisi GRK tahun 2018 – 2022 disajikan pada Gambar berikut.

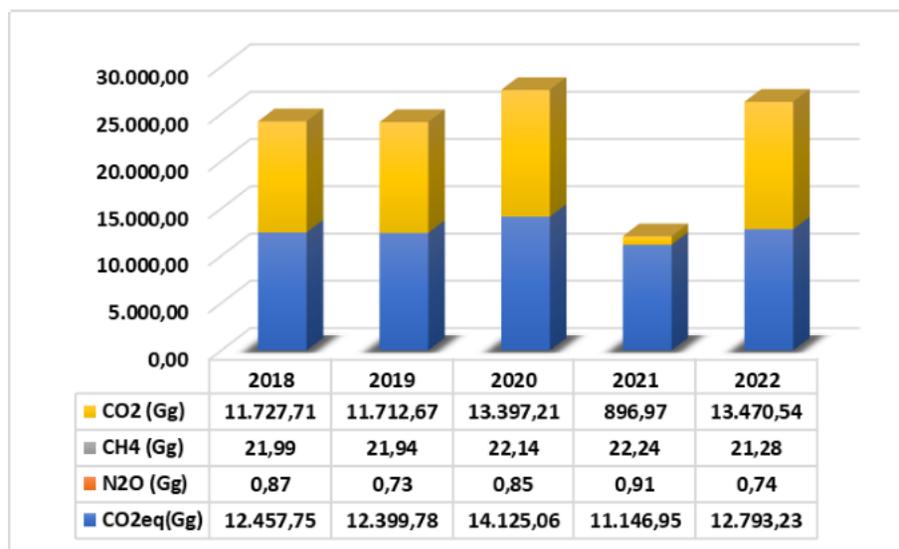


Gambar 2.31. Tren Emisi GRK Kabupaten Kebumen Tahun 2018 - 2022

Pada tahun 2022, kontribusi terbesar sumber emisi di Kabupaten Kebumen adalah sektor pertanian sebesar 581,380 Ton CO<sub>2</sub>eq, disusul oleh sektor Energi sebesar 473,670 Ton CO<sub>2</sub>eq, sektor limbah sebesar 102,170 Ton CO<sub>2</sub>eq dan sektor IPPU sebesar 43,74 Ton CO<sub>2</sub>eq.

Berdasarkan jenis gas, jumlah dan komposisi emisi GRK di Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 - 2022 didominasi oleh CO<sub>2</sub> hingga lebih dari 99% dimana mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 sebesar 13.397,21 Gg. Gas CH<sub>4</sub> berkontribusi pada kisaran 0,48% dan Gas N<sub>2</sub>O berkontribusi pada kisaran 0,02%, Kontribusi masing-masing gas dengan mempertimbangkan GWP (*Global Warming Potential*) diketahui bahwa CO<sub>2</sub> mencapai 86,94 % (kecuali tahun 2021 dan 2022), gas CH<sub>4</sub> sebesar 3 % (kecuali tahun 2021 dan 2022) dan gas N<sub>2</sub>O sebesar 1 % hingga 2 % (kecuali tahun 2021 dan 2022). Dengan demikian, kontribusi per jenis gas berdasarkan berat absolut maupun relatif terhadap GWP

menunjukkan bahwa Gas CO<sub>2</sub> menempati porsi paling banyak, disusul gas CH<sub>4</sub> dan terakhir gas N<sub>2</sub>O. Nilai emisi gas rumah kaca berdasarkan jenis gasnya tahun 2018 – 2022 disajikan pada gambar berikut ini.

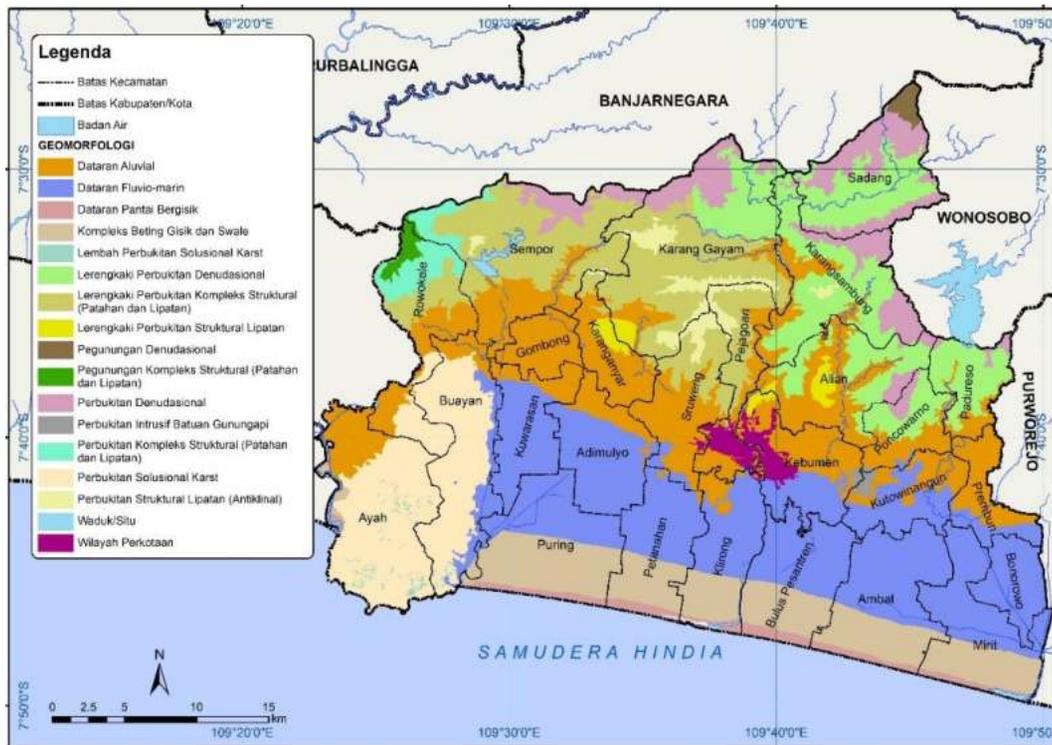


Gambar 2.32. Emisi GRK berdasarkan jenis tahun 2018 – 2022

## 2.14. EKOREGION KABUPATEN KEBUMEN

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ekoregion (ekosistem region) merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan meliputi iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, dan pola interaksi antara alam dengan manusia yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Hal ini menyebabkan ekoregion tidak berdasarkan pada batas wilayah administrasi. Selain itu, ekoregion juga merupakan wujud dari konsep ekosistem yang di dalamnya terdapat informasi meliputi karakteristik bentang alam berupa geomorfologi dan morfogenesis. Tiap ekoregion memiliki jenis dan fungsi ekosistem sesuai dengan karakteristiknya. Secara umum Kabupaten Kebumen memiliki 15 jenis ekoregion darat yaitu (1) Dataran Aluvial; (2) Dataran Fluvio-marine; (3) Dataran Pantai Bergisik; (4) Komplek Beting Gisik dan Swale; (5) Pegunungan Kompleks Struktural (Patahan dan Lipatan); (6) Lembah Perbukitan Solusional Karst; (7) Lerengkaki Perbukitan Kompleks Struktural (Patahan dan Lipatan); (8) Lerengkaki Perbukitan Stukrural Lipatan; (9) Lerengkaki Perbukitan Denudasional; (10) Perbukitan Denudasional; (11) Perbukitan Kompleks Struktural (Patahan dan Lipatan); (12) Perbukitan Solusional Karst; (13) Perbukitan Struktural

Lipatan (Antklinal); (14) Perbukitan Intrusif Batuan Gunung Api; dan (15) Pegunungan Denudasional seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.33. Peta Satuan Ekoregion Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Buku Deskripsi Peta Ekoregion Pulau/Kepulauan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2013, 15 jenis ekoregion tersebut dapat dikategorikan kembali menjadi ketegori ekoregion yang lebih umum/besar yaitu menjadi 6 jenis ekoregion, yaitu dataran fluvial, dataran marin, pegunungan struktural, perbukitan solusional, perbukitan denudasional, serta perbukitan struktural. Adapun penjelasan mengenai karakteristik ekoregion tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.50. Diskripsi Ekoregion di Kaupaten Kebumen

No	Ekoregion	Deskripsi
1	Dataran Fluvial	Ekoregion dataran Fluvial di Kabupaten Kebumen mencakup beberapa bagian di Kecamatan Rowokele, Sempor, Gembong, dan Karang Gayam. Kondisi iklim ekoregion ini relatif basah dengan curah hujan tahun 1.000-2.500 mm di marin utara dan 2.000-3.500 mm di marin selatan dan suhu udara rata-rata 26-280C. Secara genetik, material

No	Ekoregion	Deskripsi
		<p>penyusun umumnya berupa aluvium, dengan komposisi pasir, debu, dan lempung relatif seimbang, dengan sumber sangat bergantung kepada kondisi daerah hulu, yang terbentuk akibat aktivitas pengendapan aliran sungai. Potensi sumberdaya mineral yang mungkin dijumpai berupa tanah urug (galian golongan C). Topografi berupa dataran, dengan morfologi atau relief datar, dan kemiringan lereng secara umum 0-3%, pada beberapa lokasi berombak hingga bergelombang (3-8%). Kondisi hidrologi pada ekoregion ini dibangun oleh material aluvium yang mampu membentuk akuifer yang potensial, dengan dukungan morfologi yang datar, maka menyebabkan cadangan atau ketersediaan air tanah dangkal sangat potensial, sehingga membentuk reservoir air tanah atau cekungan hidrogeologi. Material aluvium merupakan material yang mudah untuk mengalami pengikisan oleh aliran sungai, sehingga pada umumnya satuan ini dicirikan oleh pola aliran seperti cabang pohon (dendritik). Aliran sungai bersifat mengalir sepanjang tahun (perennial) dengan debit aliran relatif besar, karena mendapat input dari air hujan dan aliran air tanah yang masuk kedalam badan atau lembah sungai</p>
2	Dataran Marin	<p>Dataran Marin di Kabupaten Kebumen mencakup di beberapa bagian Kecamatan Buayan. Secara umum ekoregion ini tersusun atas batuan sedimen, baik berupa sedimen lepas (pasir) maupun sedimen organik (batugamping terumbu), dan</p>

No	Ekoregion	Deskripsi
		<p>batuan beku vulkanik. Topografinya berupa dataranm dengan morfologi atau relief datar, dan kemiringan lereng secara umum 0-3%, pada beberapa lokasi agak miring (3-8%). Pada ekoregion tersebut terbentuk oleh proses pengendapan marin (gelombang) yang bekerja sama dengan aliran sungai (fluvial) yang bermuara ke laut, sehingga dapat disebut sebagai pesisir yang terbentuk akibat pengendapan material daratan oleh sungai (sub aerial deposition coast). Sedangkan untuk kondisi hidrologi dikontrol oleh aliran sungai-sungai dengan debit aliran dan beban sedimen yang tinggi, khususnya pada musim penghujan, dan kondisi air tanah pada umumnya berasa payau hingga asin, yang hampir merata di seluruh stasiun satuan daratan marin yang berlumpur (endapan aluvium).</p>
3	Pegunungan Struktural	<p>Pegunungan struktural di Kabupaten Kebumen mencakup di beberapa bagian Kecamatan Rowokele. Secara genetik, ekoregion ini tersusun oleh batuan vulkanik intrusif dan batuan sedimen yang sudah mengalami deformasi. Morfologi yang terbentuk berupa pegunungan yang menempati elevasi tinggi (&gt;300 m). Tanah yang dijumpai di ekoregion berlereng terjal (&gt; 45%) ini didominasi oleh bahan-bahan induk vulkan yang sudah terdeformasi, seperti tanah Latosol, Podolisik, dan Litosol. Pegunungan struktural berada dibawah kondisi iklim tropika basah dengan suhu sejuk tropikal hingga dingin</p>
4	Perbukitan Solusional	<p>Perbukitan Solusional di Kabupaten Kebumen mencakup bebepa tempat di</p>

No	Ekoregion	Deskripsi
		<p>Kecamatan Ayah dan Kecamatan Buayan. Satuan perbukitan solusional menempati daerah dengan iklim basah bercurah hujan tinggi sebagai media utama proses pelarutan batuan (solusional), dan mempunyai perbedaan yang tegas antara musim kemarau dan penghujan. Material dominan adalah batuan sedimen organik atau non klastik, berupa batugamping terumbu (limestone, CaCO<sub>3</sub>), batugamping napal, atau batugamping napal, atau batugamping dolomit, yang pada beberapa tempat telah mengalami metamorfosis menjadi kalsit. Batuan ini terbentuk dari hasil metamorfosis terumbu yang tumbuh pada lingkungan laut dangkal (lithoral), yang mengalami pengangkatan oleh tektonik dan gunung berapi purba. Hidrologi yang berkembang pada satuan ekoregion perbukitan karst adalah hidrologi permukaan berupa telaga-telaga karst (logva), dan sungai bawah tanah dengan potensi aliran yang besar. Pemunculan mata air dimungkinkan berupa mata air topografik atau basinal pada lembah-lembah karst, atau mata air struktur akibat retakan atau patahan lokal</p>
5	Perbukitan Denudasional	<p>Perbukitan Denudasional di Kabupaten Kebumen mencakup beberapa tempat di Kecamatan Karang Gayam dan Kecamatan Sempor. Ekoregion ini dominan tersusun oleh batuan-batuan beku gunung berapi tua yang telah mengalami pelapukan tingkat lanjut, dan batuan sedimen berupa batugamping. Morfologinya berbukit dengan lereng curam (30-40%), dengan proses</p>

No	Ekoregion	Deskripsi
		<p>utama berupa denudasional yang dicirikan oleh tingkat pelapukan batuan yang telah lanjut, erosi lereng dan gerakan massa batuan sangat potensial. Proses ini menyebabkan morfologi perbukitan tidak teratur, banyak alur-alur dan parit-parit erosional (seperti dicakar-cakar), dan degradasi lahan semakin meningkat. Akibat proses erosional dan longsor lahan yang intensif, maka pola aliran sungai seperti cabang-cabang pohon (dendritik), dengan alur rapat sejajar menuruni lereng dan bertemu di lembaj perbukitan menyatu menjadi sungai yang lebih besar. Namun demikian sifat aliran sungai relatif epimeral atau perenial dengan fluktuasi debit aliran sungai sangat tinggi antara musim penghujan dengan kemarau.</p>
6	Perbukitan Struktural	<p>Perbukitan Struktural di Kabupaten Kebumen mencakup beberapa tempat di Kecamatan Rowokolele, Sempor, dan Karang Gayam. Perbukitan Struktural terusus oleh batuan intrusif dan batuan sedimen (batugamping dan batupasir) yang mengalami deformasi oleh tenaga tektonik, dengan membetuk sturuktur lipatan atau patahan. Morfologi yang terbentuk berupa perbukitan pada elevasi sedang (&lt; 300 m), dengan kemiringan lereng yang curam (25-45%). Pada umumnya, kondisi iklimnya termasuk tropika basah, namun semakin ke timur cenderung lebih kering. Suhu udaranya relatif panas hingga sejuk. Pola aliran air terkontrol oleh jalur patahan, yaitu dalam bentuk rektangular atau trellis. Air sungainya umumnya mengalir</p>

No	Ekoregion	Deskripsi
		sepanjang tahun (perennial) dan ketersediaan air permukaan dan air tanah relatif cukup sepanjang tahun. Tanah yang dijumpai didominasi oleh tanah latosol (alfisol), podsolik (ultisol) dengan solum dalam dan memiliki tingkat kesuburan rendah hingga sedang

Sumber : Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Kebumen, Tahun 2020

## 2.15. INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEBUMEN

### 2.14.1. Distribusi Luas Lahan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Hidup

Kabupaten Kebumen memiliki beberapa jenis ekoregion. Setiap satu unit wilayah ekoregion memiliki satu jasa lingkungan yang dominan. Nilai dari jasa lingkungan ini disebut dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup. Jasa lingkungan dominan merupakan jasa lingkungan maksimum yang dihitung dengan mengalikan luas satu unit wilayah ekoregion dengan setiap nilai IJE yang ada di dalam wilayah ekoregion tersebut. Sementara itu, lima jenis jasa lingkungan yang paling dominan untuk setiap ekoregion di Kabupaten Kebumen terdapat pada table berikut ini.

Tabel 2.51. Jenis ekoregion dan jasa lingkungan hidup dominan di setiap ekoregion Kabupaten Kebumen

No	Ekoregion	Jasa Lingkungan Dominan
1	Dataran Aluvial Material Aluvium	Penyedia pangan, penyedia air, pengaturan air dan banjir, regenerasi tanah, siklus hara.
2	Dataran Fluvio-marin Pesisir Selatan Jawa Material Aluvium	Penyedia pangan, penyedia air, pengaturan air dan banjir, pemurnian, regenerasi tanah.

No	Ekoregion	Jasa Lingkungan Dominan
3	Dataran Pantai Bergisik Material Pasir Marin	Penyedia pangan, penyerbukan alami, regenerasi tanah, produksi primer, siklus hara.
4	Kompleks Beting Gisik dan Swale Material Pasir Marin	Penyedia pangan, penyedia air, pengaturan air dan banjir, pemurnian, regenerasi tanah.
5	Lembah Perbukitan Solusional Karst Karangbolong Batugamping Terumbu	Pengaturan air dan banjir, pengendalian hama, habitat dan kehati, produksi primer, siklus hara.
7	Lerengkaki Perbukitan Denudasional Jalur Kebumen-Purworejo Material Gunungapi Tua	Penyediaan pangan, penyerbukan alami, pengendalian hama, produksi primer, siklus hara.
7	Lerengkaki Perbukitan Kompleks Struktural (Patahan dan Lipatan) Jalur Cilacap-Kebumen Batuan Sedimen Gunungapi, Batupasir, Batugamping,	Mitigasi bencana, penyerbukan alami, pengendalian hama, produksi primer, siklus hara.
8	Lerengkaki Perbukitan Struktural Lipatan Jalur Majenang-Kebumen Material Batulempung Gampingan	Mitigasi bencana, penyerbukan alami, pengendalian hama, produksi primer, siklus hara.
9	Pegunungan Denudasional Kebumen-Purworejo	Kualitas udara, pengaturan iklim, mitigasi bencana, penyerbukan alami, pengendalian hama.

No	Ekoregion	Jasa Lingkungan Dominan
10	Pegunungan Kompleks Struktural (Patahan dan Lipatan) Jalur Cilacap-Kebumen Batuan Sedimen Gunungapi,	Mitigasi bencana, penyerbukan alami, pengendalian hama, produksi primer, siklus hara.
11	Perbukitan Denudasional Jalur Kebumen-Purworejo Material Gunungapi Tua	Mitigasi bencana, penyerbukan alami, pengendalian hama, produksi primer, siklus hara.
12	Perbukitan Intrusif Batuan Gunungapi	Mitigasi bencana, pengaturan air dan banjir, penyerbukan alami, pengendalian hama, produksi primer.
13	Perbukitan Kompleks Struktural (Patahan dan Lipatan) Jalur Cilacap-Kebumen Batuan Sedimen Gunungapi,	Mitigasi bencana, penyerbukan alami, pengendalian hama, produksi primer, siklus hara.
14	Perbukitan Solusional Karst Karangbolong Batugamping Terumbu	Pengaturan air dan banjir, pengendalian hama, habitat dan kehati, produksi primer, siklus hara.
15	Perbukitan Struktural Lipatan (Antiklinal) Jalur Majenang-Kebumen	Mitigasi bencana, penyerbukan alami, pengendalian hama, produksi primer, siklus hara.
16	Waduk/Situ Sempor	Penyedia air, sumber daya genetik, mitigasi bencana, pengaturan air dan banjir, permurnian.

No	Ekoregion	Jasa Lingkungan Dominan
17	Wilayah Perkotaan (Bentang Antropogenik)	Kualitas udara, pengaturan iklim, mitigasi bencana, penyerbukan alami, produksi primer.

Sumber : Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Kebumen, Tahun 2020

Di dalam inventarisasi lingkungan terkait dengan data dan informasi indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen, identifikasi permasalahan lingkungan dapat di dasarkan pada luas lahan dari masing-masing Jasa Lingkungan Hidup yang memiliki indikasi atau kecenderungan luasan yang besar pada kelas jasa sangat rendah dan rendah. Secara rinci, distribusi luas lahan untuk masing-masing Jasa Lingkungan Hidup di Kabupaten Kebumen disajikan pada table berikut ini.

Tabel 2.52. Distribusi Luas (Ha) Lahan D3TLH Jasa Lingkungan Hidup di Kabupaten Kebumen

Fungsi Jasa Lingkungan Hidup	Luas Kelas Jasa Lingkungan Hidup (ha)					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Penyediaan Bahan Pangan	1.036,901	15.352,14	51.738,62	18.173,62	46.995,43	133.296,7
	0,77%	11,51%	38,81%	13,63%	35,25%	100%
Penyediaan Air Bersih	10.36,901	15.616,811	73.802,794	41.390,329	1.449,871	133.296,7
	0,78%	11,72%	55,37%	31,05%	1,09%	100%
Penyediaan Serat	6,705567	54.048,724	78.465,409	775,86573	-	13.3296,7
	0,01%	40,55%	58,87%	0,58%	-	100%
Penyediaan Sumber Daya Genetik	6,705567	52.451,505	79.385,942	1.324,4736	128,0783	133.296,7
	0,01%	39,35%	59,56%	0,99%	0,10%	100%
Pengaturan Udara	6,705567	83.195,87	4.352,6236	45.741,506	-	133.296,7
	0,01%	62,41%	3,27%	34,32%	-	100%

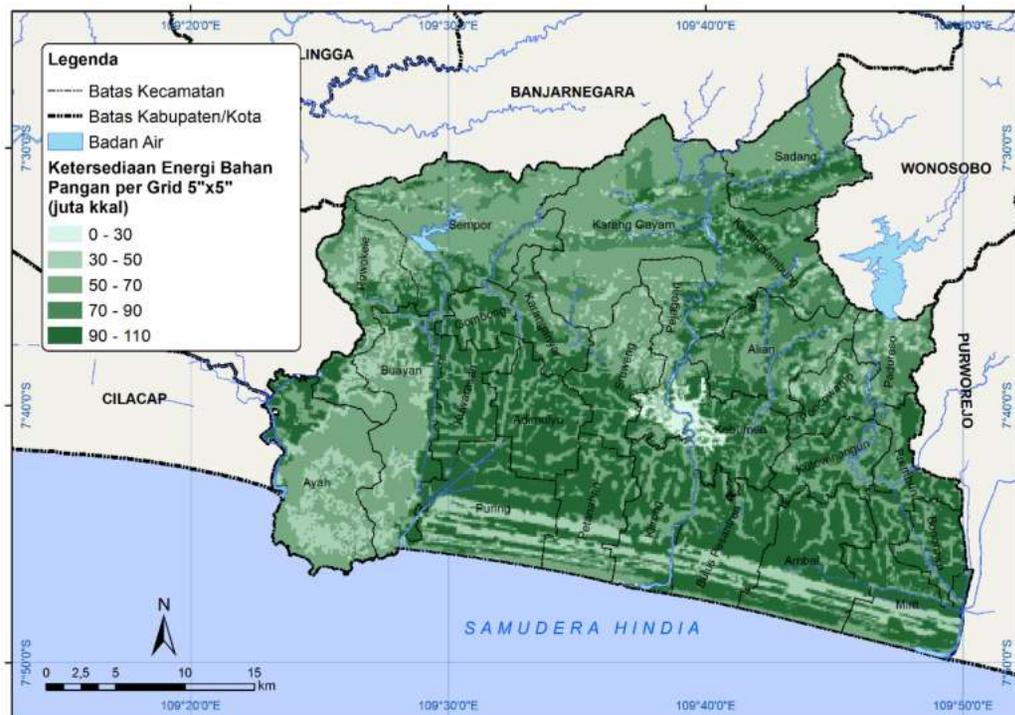
Fungsi Jasa Lingkungan Hidup	Luas Kelas Jasa Lingkungan Hidup (ha)					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Pengaturan Iklim	6,706	83.149,5 71	4.438,200	45.702,2 29	-	133.296,7 05
	0,01%	62,38%	3,33%	34,29%	-	100,00%
Pengaturan Pencegahan Bencana	6,706	51.630,4 42	32.313,48 3	47.891,7 07	1.454,3 66	133.296,7 05
	0,01%	38,73%	24,24%	35,93%	1,09%	100,00%
Pengaturan Tata Air dan Banjir	1.031,9 55	11.907,7 49	77.115,29 3	41.987,2 69	1.254,4 39	133.296,7 05
	0,77%	8,93%	57,85%	31,50%	0,94%	100,00%
Pengaturan Pemurnian Air dan Limbah	179,307	27.263,5 02	104.686,3 28	1.041,05 3	126,514	133.296,7 05
	0,13%	20,45%	78,54%	0,78%	0,09%	100,00%
Pengaturan Penyerbukan Alami	6,706	49.802,1 48	37.258,13 8	45.712,7 24	516,990	133.296,7 05
	0,01%	37,36%	27,95%	34,29%	0,39%	100,00%
Pengaturan Habitat dan Keanekaragaman Hayati	1.176,3 4	62.039,2 6	25.590,55	44.361,0 7	129,48	133.296,7 0
	0,88%	46,54%	19,20%	33,28%	0,10%	100,00%
Pengaturan Pengendalian Hama	6,71	49.802,1 5	38.439,27	44.272,7 2	775,87	133.296,7 0
	0,01%	37,36%	28,84%	33,21%	0,58%	100,00%
Pendukung Siklus Hara	6,71	17.589,4 5	65.010,53	50.690,0 2	0,00	133.296,7 0
	0,01%	13,20%	48,77%	38,03%	0,00%	100,00%
Pendukung Kesuburan Tanah	0,00	2.036,95	116.444,0 4	14.593,4 4	222,28	133.296,7 0
	0,00%	1,53%	87,36%	10,95%	0,17%	100,00%
Pendukung Produksi Primer	6,71	49.861,9 2	42.399,14	41.028,9 4	0,00	133.296,7 0
	0,01%	37,41%	31,81%	30,78%	0,00%	100,00%

Sumber : Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Kebumen, Tahun 2020

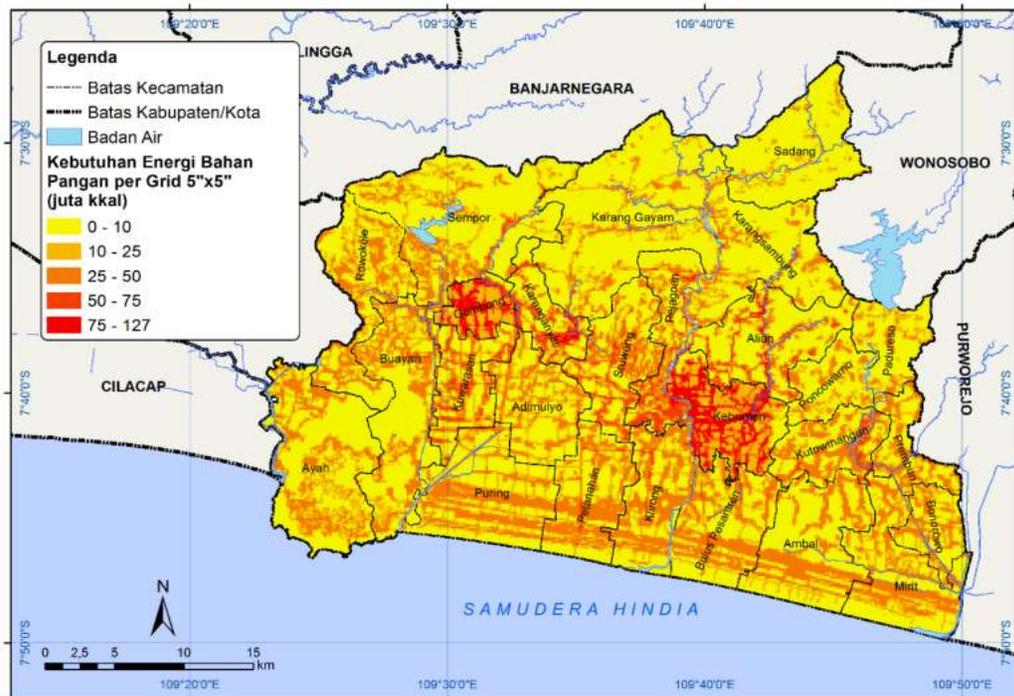
## 2.14.2. Ambang Batas dan Status DDLH Kabupaten Kebumen

### A. Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Pangan

Berdasarkan kajian analisis DDLH Kabupaten Kebumen tahun 2020, Kabupaten Kebumen memiliki ketersediaan pangan yang tinggi, wilayah ini diantaranya meliputi Kecamatan Adimulyo, Puring, Kuwarasan, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, dan Ambal. Kabupaten Kebumen dengan nilai ketersediaan pangan per grid yang tinggi ini memiliki tutupan lahan yang didominasi oleh sawah irigasi. Kebutuhan pangan di Kabupaten Kebumen berdasarkan Kebutuhan pangan di Kabupaten Kebumen berdasarkan Berdasarkan kajian analisis DDLH Kabupaten Kebumen tahun 2020 dihitung dengan mengalikan jumlah penduduk di setiap grid dengan kebutuhan pangan per kapita, sehingga dapat dipastikan bahwa grid dengan jumlah penduduk tinggi akan memiliki kebutuhan pangan yang tinggi pula. Kebutuhan pangan per grid yang tinggi terdapat pada wilayah Kabupaten Kebumen bagian tengah, diantaranya Kecamatan Kebumen, Gombong, Karanganyar, Sruweng, dan Pejagoan. Sama halnya dengan ketersediaan bahan pangan.



Gambar 2.34. Ketersediaan energi bahan pangan di Kabupaten Kebumen tahun 2015 dalam sistem grid 5"x5"



Gambar 2.35. Kebutuhan energi bahan pangan di Kabupaten Kebumen tahun 2015 dalam sistem grid 5”x5”

Total ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Kebumen sebesar 4.284.965,03 juta kkal dengan kebutuhan bahan pangan untuk penduduk sebesar 928.599,38 juta kkal. Secara umum daya dukung penyedia pangan di Kabupaten Kebumen memiliki status belum terlampaui hal ini dapat dilihat dari selisih antara nilai ketersediaan bahan pangan dengan kebutuhan bahan pangan dengan jumlah sebesar 3.356.365,65 juta k kal. Secara rinci perhitungan angka ketersediaan dan kebutuhan energi pangan di Kabupaten Kebumen sebagaimana distribusi spasial gambar 2.34 dan 2.35 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.53. Nilai Ketersediaan dan Kebutuhan serta Nilai Selisih Daya Dukung Penyedia Pangan di Kabupaten Kebumen

<b>KECAMATAN</b>	<b>Ketersediaan Bahan Pangan (juta kkal)</b>	<b>Kebutuhan Bahan Pangan (juta kkl)</b>	<b>Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan (juta kkal)</b>
Adimulyo	174.408,10	27.204,93	147.203,17
Alian	185.059,13	42.817,53	142.241,60
Ambal	234.118,64	42.989,39	191.129,25
Ayah	219.541,69	43.280,53	176.261,16
Bonorowo	88.688,77	14.547,70	74.141,08
Buayan	189.246,58	42.852,06	146.394,52
Buluspesantren	192.205,54	41.400,27	150.805,27

<b>KECAMATAN</b>	<b>Ketersediaan Bahan Pangan (juta kkal)</b>	<b>Kebutuhan Bahan Pangan (juta kkl)</b>	<b>Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan (juta kkal)</b>
Gombang	68.791,83	37.352,53	31.439,30
Karanggayam	331.304,06	38.247,93	293.056,13
Karanganyar	87.705,50	26.782,73	60.922,76
Karangsambung	223.658,76	29.474,43	194.184,33
Kebumen	155.506,22	95.286,70	60.219,52
Klirong	155.312,46	42.742,19	112.570,27
Kutowinangun	119.820,75	33.441,34	86.379,42
Kuwarasan	138.241,77	34.914,31	103.327,46
Mirit	202.407,21	34.537,63	167.869,58
Padureso	81.261,25	10.608,25	70.653,00
Pejagoan	96.262,73	38.117,66	58.145,07
Petanahan	158.630,67	41.607,45	117.023,23
Poncowarno	88.307,27	11.727,30	76.579,97
Prembun	89.177,12	20.802,94	68.374,18
Puring	227.689,68	41.453,63	186.236,04
Rowokele	154.143,31	33.484,50	120.658,81
Sadang	184.546,19	14.000,72	170.545,46
Sempor	295.777,53	46.612,58	249.164,94
Sruweng	143.152,26	42.312,15	100.840,11
<b>TOTAL</b>	<b>4.284.965,03</b>	<b>928.599,38</b>	<b>3.356.365,65</b>

*Sumber : Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Kebumen, Tahun 2020*

Untuk mengetahui jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan pangannya dengan ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Kebumen, Nilai ambang batas penduduk terhadap daya dukung penyedia pangan terlihat bahwa wilayah dengan ketersediaan pangan yang tinggi memiliki nilai ambang batas yang tinggi pula. Ambang batas penduduk untuk setiap grid memiliki nilai tertinggi 141, hal ini berarti grid tersebut mampu memenuhi kebutuhan pangan untuk 141 jiwa penduduk.



Gambar 2.36. Nilai ambang batas penduduk terhadap penyediaan pangan di Kabupaten Kebumen tahun 2015 dalam sistem grid 5”x5” Berdasarkan pola data sebaran spasial sebagaimana gambar 2.36, maka dapat dirinci jumlah penduduk yang dapat terpenuhi berdasarkan kondisi ketersediaan pangan yang ada di wilayah masing-masing Kecamatan. Secara rinci, ambang batas penduduk yang dapat dipenuhi terkait penyediaan pangan di Kabupaten Kebumen disajikan pada tabel berikut ini.

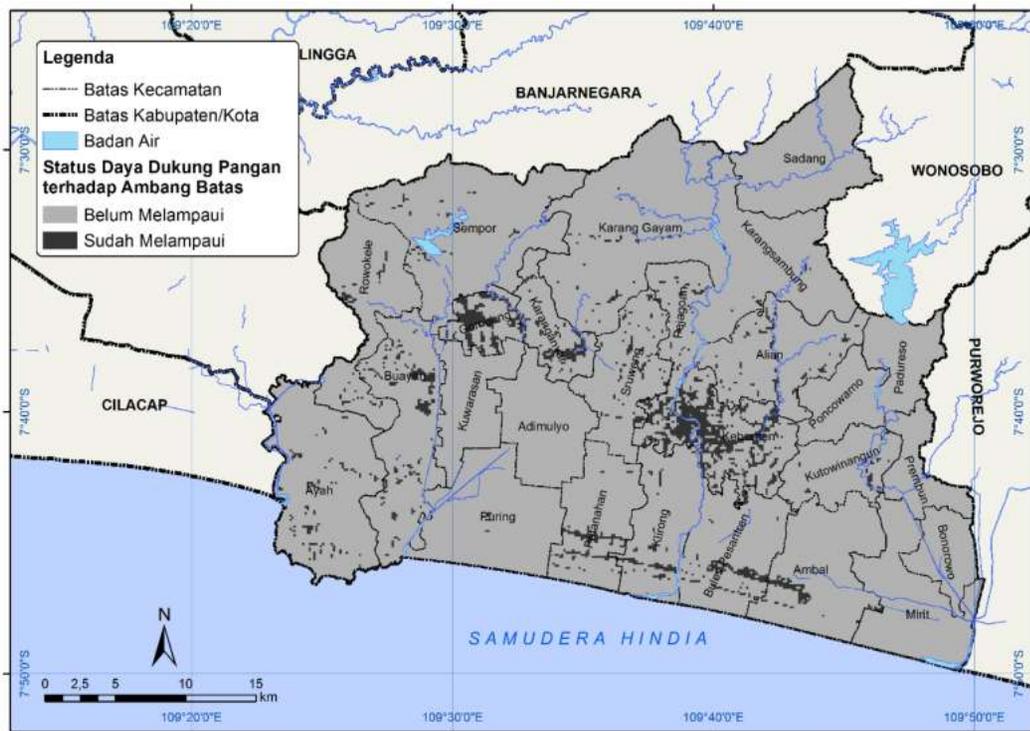
Tabel 2.54. Nilai Ambang Batas Penduduk Terhadap Daya Dukung Penyedia Pangan di Kabupaten Kebumen

<b>KECAMATAN</b>	<b>Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan (juta kkal)</b>	<b>Ambang Batas (jiwa)</b>
Adimulyo	147.203,17	221.971
Alian	142.241,60	235.810
Ambal	191.129,25	298.074
Ayah	176.261,16	279.674
Bonorowo	74.141,08	112.885
Buayan	146.394,52	241.038
Buluspesantren	150.805,27	244.724
Gombang	31.439,30	87.581
Karanggayam	293.056,13	422.317
Karanganyar	60.922,76	111.718
Karangsambung	194.184,33	285.029
Kebumen	60.219,52	198.056
Klirong	112.570,27	197.770

<b>KECAMATAN</b>	<b>Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan (juta kkal)</b>	<b>Ambang Batas (jiwa)</b>
Kutowinangun	86.379,42	152.626
Kuwarasan	103.327,46	175.950
Mirit	167.869,58	257.772
Padureso	70.653,00	103.540
Pejagoan	58.145,07	122.692
Petanahan	117.023,23	201.963
Poncowarno	76.579,97	112.521
Prembun	68.374,18	113.638
Puring	186.236,04	289.930
Rowokele	120.658,81	196.355
Sadang	170.545,46	235.143
Sempor	249.164,94	377.009
Sruweng	100.840,11	182.340
<b>TOTAL</b>	<b>3.356.365,65</b>	<b>5.458.126,00</b>

*Sumber : Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Kebumen, Tahun 2020*

Berdasarkan nilai ambang batas yang telah dihitung dan dipetakan, maka dapat dilakukan penentuan status daya dukung penyedia pangannya. Status daya dukung ditentukan dengan membandingkan antara jumlah penduduk di setiap grid dengan nilai ambang batasnya. Apabila nilai ambang batas suatu grid lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduknya, maka grid tersebut masih mampu mendukung penyediaan pangan yang statusnya adalah 'belum melampaui', dan sebaliknya. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Kebumen masih dapat mendukung penyediaan pangan bagi penduduknya. Berdasarkan perhitungan sebesar 95,46% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen memiliki status daya dukung pangan yang belum melampaui. Distribusi status D3TLH untuk Jasa Lingkungan Hidup penyedia pangan di Kabupaten Kebumen disajikan pada peta dan tabel berikut ini.



Gambar 2.37. Status daya dukung penyedia bahan pangan di Kabupaten Kebumen tahun 2015 dalam sistem grid 5”x5”

Tabel 2.55. Status Daya Dukung Penyedia Pangan di Kabupaten Kebumen

KECAMATAN	Selisih Ketersediaan (juta kkal)	Ambang Batas (jiwa)	Luas Belum Melampaui	
			(Ha)	(%)
Adimulyo	147.203,17	221.971	4.461,89	100%
Alian	142.241,60	235.810	5.456,25	94,88%
Ambal	191.129,25	298.074	6.092,35	96,25%
Ayah	176.261,16	279.674	8.030,08	96,82%
Bonorowo	74.141,08	112.885	2.289,19	100%
Buayan	146.394,52	241.038	6.493,97	92,96%
Buluspesantren	150.805,27	244.724	4.973,19	94,08%
Gombang	31.439,30	87.581	1.303,98	66,51%
Karanggayam	293.056,13	422.317	11.432,70	98,96%
Karanganyar	60.922,76	111.718	2.311,29	86,98%
Karangsambung	194.184,33	285.029	6.982,59	99,76%
Kebumen	60.219,52	198.056	3.211,88	68,77%
Klirong	112.570,27	197.770	4.287,69	94,80%
Kutowinangun	86.379,42	152.626	3.388,04	97,36%
Kuwarasan	103.327,46	175.950	3.673,81	100%
Mirit	167.869,58	257.772	5.619,45	100%
Padureso	70.653,00	103.540	2.741,54	100%
Pejagoan	58.145,07	122.692	2.939,45	82,06%
Petanahan	117.023,23	201.963	4.277,46	93,28%
Poncowarno	76.579,97	112.521	2.741,29	100%
Prembun	68.374,18	113.638	2.375,26	99,99%

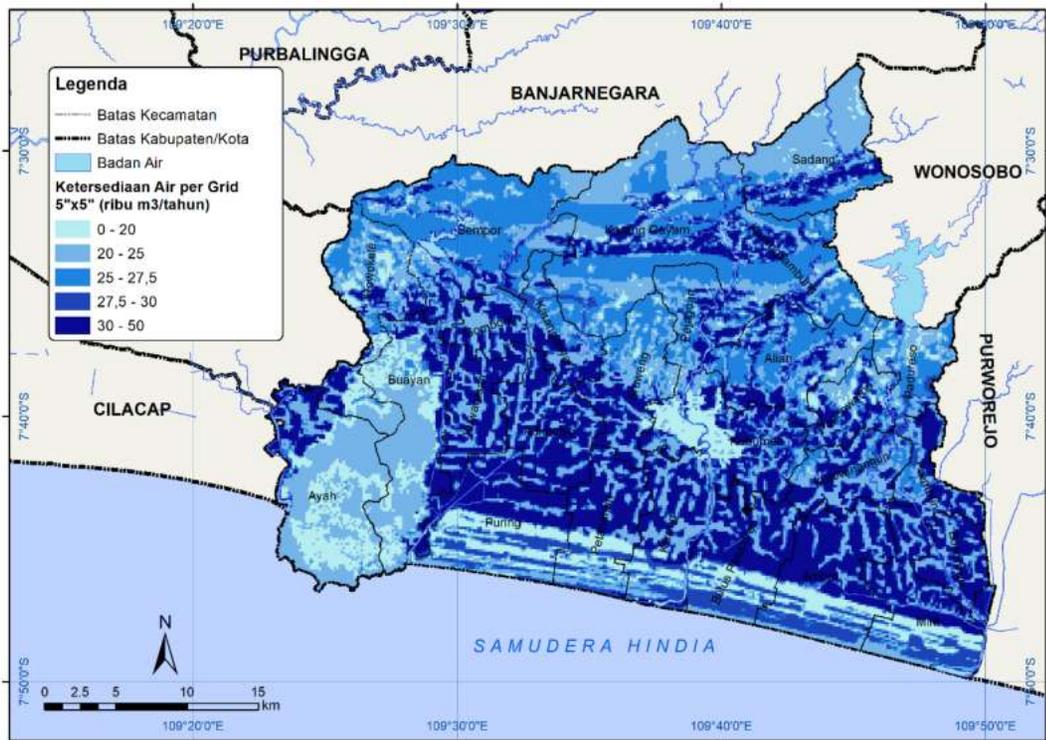
KECAMATAN	Selisih Ketersediaan (juta kkal)	Ambang Batas (jiwa)	Luas Belum Melampaui	
			(Ha)	(%)
Puring	186.236,04	289.930	6.571,64	99,75%
Rowokele	120.658,81	196.355	5.380,09	97,48%
Sadang	170.545,46	235.143	5.975,92	99,96%
Sempor	249.164,94	377.009	9.965,34	98,59%
Sruweng	100.840,11	182.340	4.349,05	93,85%
<b>TOTAL</b>	<b>3.356.365,65</b>	<b>5.458.126,00</b>	<b>127.325,38</b>	<b>95,46%</b>

Sumber : Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Kebumen, Tahun 202

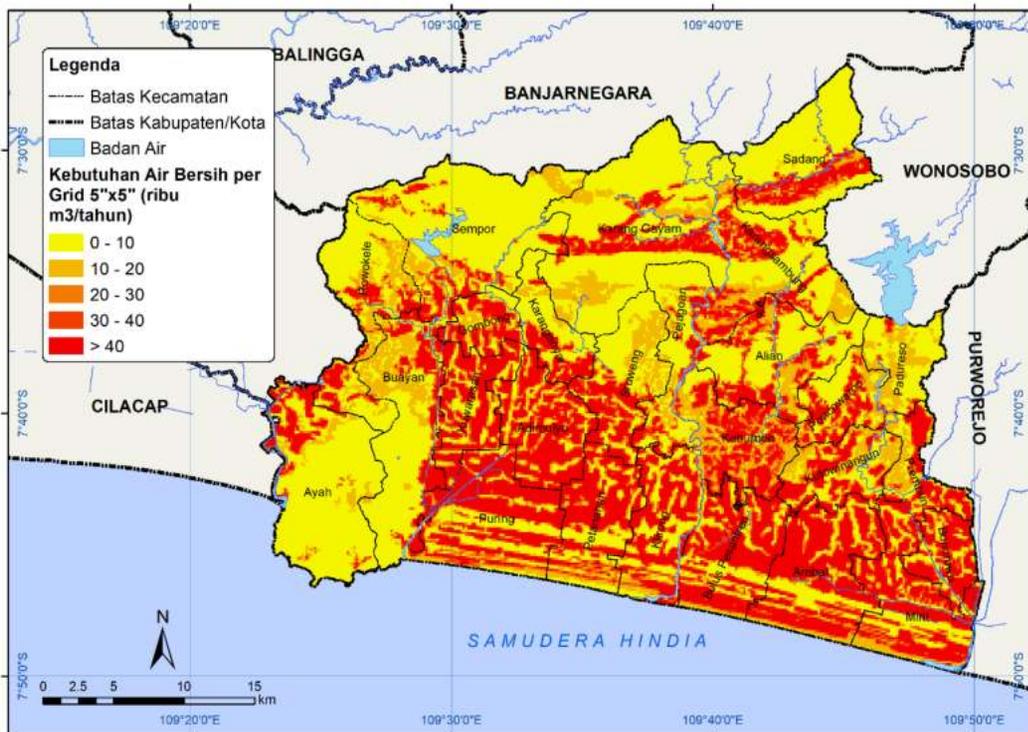
## **B. Ambang Batas dan Status DDLH Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air**

Berdasarkan kajian analisis DDLH Kabupaten Kebumen tahun 2020, secara umum kebutuhan air yang tinggi tersebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen. Kebutuhan air yang tinggi paling banyak berada di bagian selatan Kecamatan Puring, Petanahan, Klirong, Bulus Pesantren, Ambal dan Mirit. Selain itu, kebutuhan air yang tinggi terdapat pada bagian tengah Kabupaten Kebumen yaitu Kecamatan Kuwarasan, Adimulyo, Kebumen, dan Bonorowo. Terdapat pula pada barat laut Kecamatan Ayah, bagian timur Kecamatan Buayan, sebagian wilayah di Kecamatan Rowokele dan Kecamatan Sempor, serta bagian tengah Kecamatan Karanggayam.

Kebutuhan air di Kabupaten Kebumen bervariasi berdasarkan sebaran penduduk dan jenis tutupan lahan. Namun, kebutuhan air yang dibutuhkan untuk lahan pertanian lebih dominan atau lebih besar dibandingkan kebutuhan air untuk domestik. Bagian selatan Kabupaten Kebumen di Kecamatan Ambal, Puring, Bulus Pesantren, dan Kecamatan Mirit memiliki kebutuhan air yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal ini karena daerah tersebut merupakan lahan sawah, sehingga memiliki kebutuhan air yang lebih tinggi.



Gambar 2.38. Ketersediaan air di Kabupaten Kebumen dalam sistem grid 5"x5"



Gambar 2.39. Kebutuhan air di Kabupaten Kebumen dalam sistem grid 5"x5"

Total ketersediaan air di Kabupaten Kebumen berdasarkan analisis spasial dengan menggunakan sistem Grid 5"x5" sebesar 1.496.313.452,31 m<sup>3</sup>/tahun dengan kebutuhan air total sebesar 1.199.506.647,17 m<sup>3</sup>/tahun, berdasarkan nilai ketersediaan air dan

kebutuhannya, secara keseluruhan di Kabupaten Kebumen masih dapat dikatakan surplus atau belum terlampaui dengan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air sebesar 296.806.805,14 m<sup>3</sup>/tahun. Secara rinci, distribusi nilai ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Kebumen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.56. Nilai Ketersediaan dan Kebutuhan serta Nilai Selisih Daya Dukung Penyedia Air di Kabupaten Kebumen

<b>Kecamatan</b>	<b>Ketersediaan Air (m<sup>3</sup>/tahun)</b>	<b>Kebutuhan Total (m<sup>3</sup>/tahun)</b>	<b>Selisih (m<sup>3</sup>/tahun)</b>
Karanggayam	125.662.091,17	49.923.455,05	75.738.636,12
Sempor	114.343.028,52	36.631.428,29	77.711.600,23
Ayah	80.749.405,98	31.079.435,08	49.669.970,90
Karangsambung	79.406.466,56	52.874.814,31	26.531.652,25
Ambal	75.429.747,68	94.220.625,60	-18.790.877,92
Puring	75.172.453,59	89.266.741,84	-14.094.288,25
Buayan	67.684.673,32	42.457.072,65	25.227.600,67
Mirit	66.911.856,77	75.065.688,26	-8.153.831,49
Sadang	65.557.478,49	29.334.040,11	36.223.438,38
Alian	65.165.085,85	41.612.629,19	23.552.456,66
Buluspesantren	62.331.207,65	77.327.520,91	-14.996.313,25
Rowokele	58.378.885,86	33.390.885,01	24.988.000,85
Adimulyo	56.033.205,45	68.675.725,70	-12.642.520,25
Petanahan	52.918.741,43	60.237.026,86	-7.318.285,43
Klirong	52.291.646,70	59.203.519,78	-6.911.873,08
Kebumen	51.721.928,60	61.435.472,96	-9.713.544,37
Sruweng	51.325.691,60	40.055.047,70	11.270.643,90
Kuwarasan	44.989.116,22	53.094.747,10	-8.105.630,88
Kutowinangun	40.606.975,70	37.660.430,25	2.946.545,45
Pejagoan	36.081.705,07	21.005.329,76	15.076.375,31
Poncowarno	31.027.473,27	26.757.178,43	4.270.294,84
Karanganyar	30.537.438,74	21.045.475,68	9.491.963,06
Padureso	30.187.472,95	11.270.509,26	18.916.963,68
Prembun	29.926.216,58	28.458.793,44	1.467.423,14
Bonorowo	28.914.134,13	32.875.823,97	-3.961.689,83
Gombong	22.959.324,42	24.547.229,98	-1.587.905,56
<b>Total</b>	<b>1.496.313.452,31</b>	<b>1.199.506.647,17</b>	<b>296.806.805,14</b>

Sumber : Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Kebumen, Tahun 2020

Penentuan ambang batas dilakukan untuk mengetahui kapasitas penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan airnya oleh suatu wilayah. Pada perhitungan ambang batas, diasumsikan ketersediaan air digunakan untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan lahan terlebih dahulu, kemudian sisanya digunakan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan air domestik. Semakin tinggi ketersediaan air untuk pemenuhan kebutuhan domestik, akan semakin tinggi pula nilai ambang batasnya. Kabupaten Kebumen memiliki nilai ambang batas yang cukup tinggi. Hal ini berarti bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Kebumen masih mampu menampung banyak penduduk untuk pemenuhan kebutuhan domestik. Kecamatan yang memiliki nilai ambang batas paling banyak terdapat pada bagian utara dan barat Kabupaten Kebumen yaitu Kecamatan Ayah, Buayan, Rowokele, Sempor, Karang Gayam, Karang Sambung, Sadang, dan Alian.



Gambar 2.40. Ambang batas penduduk untuk penyediaan air di Kabupaten Kebumen dalam sistem grid 5"x5"

Status daya dukung lingkungan hidup terhadap penyediaan air ditentukan dengan membandingkan nilai ambang batas terhadap jumlah penduduk yang ada. Apabila jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut lebih besar dari ambang batas, hal ini

mengindikasikan bahwa ambang batasnya telah terlampaui sehingga terdapat beberapa penduduk yang tidak dapat dipenuhi kebutuhan airnya oleh wilayah tersebut, begitu juga sebaliknya. Secara umum, ambang batas penduduk terhadap penyediaan air di Kabupaten Kebumen masih belum terlampaui, terutama pada wilayah utara dan barat. Secara keseluruhan, masih terdapat 58,84% lahan yang masih dapat mendukung penyediaan air di Kabupaten Kebumen. Secara detail, kuantifikasi nilai kebutuhan, ketersediaan, selisih, ambang batas, dan luasan yang mendukung penyediaan air berada pada table berikut ini.



Gambar 2.41. Status daya dukung terhadap penyediaan air Di Kabupaten Kebumen dalam sistem grid 5”x5”

Tabel 2.57. Luas Lahan Yang Masih Mendukung Penyedia Air Di Kabupaten Kebumen

Kecamatan	Luas yang Masih Mendukung (m <sup>2</sup> )	Luas yang Masih Mendukung (%)
Karanggayam	97.991.340,916	84,82
Sempor	89.445.405,506	88,49
Ayah	72.668.692,408	87,61
Karangsambung	49.077.774,552	70,12
Ambal	19.660.849,233	31,06
Puring	24.372.640,499	36,99
Buayan	55.337.373,717	79,21
Mirit	21.844.707,216	38,87

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas yang Masih Mendukung (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Luas yang Masih Mendukung (%)</b>
Sadang	46.746.470,403	78,19
Alian	41.573.810,620	72,30
Buluspesantren	16.982.869,231	32,13
Rowokele	44.374.049,833	80,40
Adimulyo	12.872.802,073	28,85
Petanahan	18.350.770,985	40,02
Klirong	20.315.899,547	44,92
Kebumen	15.789.008,500	33,80
Sruweng	31.724.218,405	68,46
Kuwarasan	12.614.750,357	34,34
Kutowinangun	21.034.176,067	60,45
Pejagoan	28.147.173,969	78,58
Poncowarno	16.847.857,406	61,46
Karanganyar	18.241.075,546	68,65
Padureso	26.194.270,040	95,55
Prembun	12.731.190,656	53,60
Bonorowo	7.725.454,220	33,75
Gombong	9.250.274,809	47,18
<b>Total</b>	<b>831.914.906,72</b>	<b>58,84</b>

Sumber : Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Kebumen, Tahun 2020

## **2.16. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH) KABUPATEN KEBUMEN**

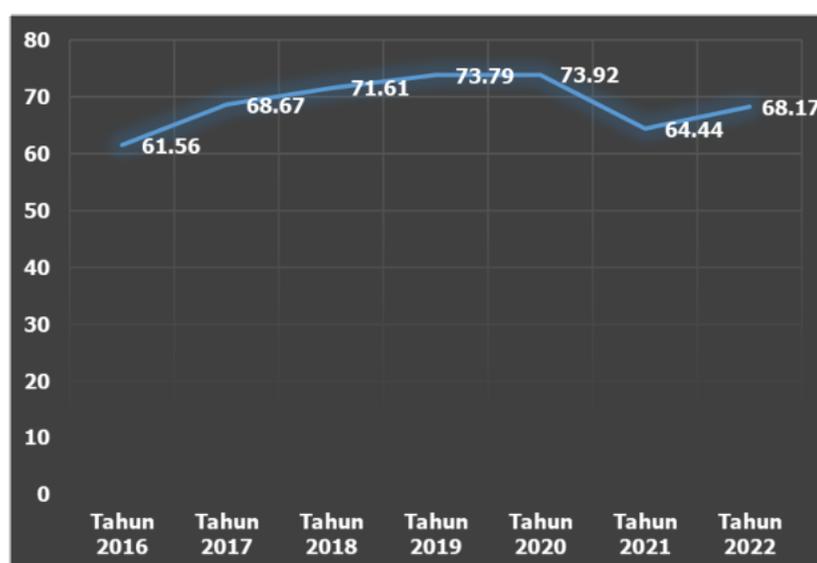
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen tahun 2022 menunjukkan nilai indeks sebesar 68,17 atau masuk kategori sedang. Untuk indikator indeks pencemaran udara selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Kebumen menunjukkan angka yang fluktuatif, sedangkan indikator indeks pencemaran air menunjukkan angka yang fluktuatif selama 5 tahun terakhir dan mengalami kenaikan angka indeks dari tahun 2021 ke tahun 2022. Untuk indeks kualitas lahan berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen menunjukkan nilai indeks yang mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan

2022. Secara rinci kondisi IKLH di Kabupaten Kebumen tahun 2016 – 2022 disajikan pada tabel dan diagram berikut ini.

Tabel 2.58. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2022

Tahun	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Lahan	IKLH	Keterangan
2016	75,00	51,25	59,21	61,56	Sedang
2017	93,90	56,67	59,21	68,67	Sedang
2018	87,83	56,67	70,66	71,61	Baik
2019	88,44	63,33	70,66	73,79	Baik
2020	90,75	57,69	70,66	73,92	Baik
2021	89,99	52,38	37,86	64,44	Sedang
2022	90,94	54,49	49,53	68,17	Sedang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, Tahun 2022



Gambar 2.42. Perkembangan Nilai IKLH Kabupaten Kebumen Tahun 2017 – 2022

## 2.17. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

### 2.16.1. Penyusunan Peraturan Desa Lingkungan Hidup

Peraturan Desa (Perdes) Lingkungan Hidup merupakan salah satu wujud kontribusi masyarakat dalam hal ini pemerintah desa untuk bersama berkomitmen dalam pelestarian lingkungan. Berdasarkan Surat Edaran yang telah diterbitkan Kepada Bupati/Walikota nomor 660/002146

Tanggal 25 Februari 2015 tentang Penyusunan Peraturan Desa terkait Pelestarian Lingkungan Hidup. Menghimbau agar seluruh perangkat desa untuk menyusun Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup dengan mengacu perundang-undangan yang berlaku. Beberapa desa di Kabupaten Kebumen yang sudah memiliki Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di antaranya adalah :

Tabel 2.59. Daftar Desa yang Memiliki Perdes di Kabupaten Kebumen

No.	Tahun	Nama Desa	Kecamatan	Nomor/Tanggal	Peraturan Desa
1	2016	Desa Kembaran	Kec. Kebumen	No. 1 Tahun 2016 / 16 Mei 2016	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
2		Desa Tambakagung	Kec. Klirong	No. 4 Tahun 2016 / 17 Mei 2016	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
3	2017	Desa Adikarso	Kec. Kebumen	No. 2 Tahun 2017 / 15 Agustus 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
4		Desa Karang Sari	Kec. Kebumen	No. 8 Tahun 2017 / 15 Juli 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
5		Desa Jatimalang	Kec. Klirong	No. 9 Tahun 2017 / 23 Agustus 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
6		Desa Tanggulangin	Kec. Klirong	No. 3 Tahun 2017 / 28 Agustus 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
7		Desa Kemangguan	Kec. Alian	No. 9 Tahun 2017 / 13 September 2017	Tentang Pelestarian

No.	Tahun	Nama Desa	Kecamatan	Nomor/Tanggal	Peraturan Desa
					Lingkungan Hidup
8		Desa Kaliputih	Kec. Alian	No. 4 Tahun 2017 / 7 September 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
9		Desa Purbowangi	Kec. Buayan	No. 5 Tahun 2017 / 25 September 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
10		Desa Sikayu	Kec. Buayan	No. 6 Tahun 2017 / 5 Oktober 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
11		Desa Pasir	Kec. Ayah	No. 3 Tahun 2017 / 21 Agustus 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
12		Desa Kalipoh	Kec. Ayah	No. 6 Tahun 2017 / 24 Agustus 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
13		Desa Ampelsari	Kec. Petanahan	No. 05 Tahun 2017 / 30 November 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
14		Desa Kewayuhan	Kec. Pejagoan	No. 04 Tahun 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
15		Desa Kalitengah	Kec. Gombang	No. 05 Tahun 2017 / 8 Desember 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan

No.	Tahun	Nama Desa	Kecamatan	Nomor/Tanggal	Peraturan Desa
					Hidup
16		Desa Babadsari	Kec. Kutowinangun	No. 05 Tahun 2017 / 18 Desember 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
17		Desa Selokerto	Kec. Sempor	No. 06 Tahun 2017 / November 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
18		Desa Surejan	Kec. Puring	No. 16 Tahun 2017 / 6 Desember 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
19		Desa Sidoagung	Kec. Sruweng	No. 07 Tahun 2017 / 27 November 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
20		Desa Sidomukti	Kec. Ambal	No. 07 Tahun 2017 / 15 Desember 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
21		Desa Adiluhur	Kec. Adimulyo	No. 09 Tahun 2017 / 8 November 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
22		Desa Jembangan	Kec. Poncowarno	No. 06 Tahun 2017 / 29 November 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
23	2018	Desa Wagirpandan	Kec. Rowokele	Tahun 2018	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup

No.	Tahun	Nama Desa	Kecamatan	Nomor/Tanggal	Peraturan Desa
24		Desa Lembupurwo	Kec. Mirit	Tahun 2018	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
25		Desa Seling	Kec. Karangsambung	Tahun 2018	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
26		Desa Karanggayam	Kec. Karanggayam	Tahun 2018	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
27	2019	Desa Ayamputih	Kec. Buluspesantren	No. 8 Tahun 2019/ 18 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
28		Desa Maduretno	Kec. Buluspesantren	No. 5 Tahun 2019 / 3 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
29		Desa Tanjungsari	Kec. Buluspesantren	No. 5 Tahun 2019 / 6 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
30		Desa Rantewringin	Kec. Buluspesantren	No. 5 Tahun 2019 / 6 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
31		Desa Balingasal	Kec. Padureso	No. 6 Tahun 2019/ 4 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
32		Desa	Kec. Padureso	No. 8 Tahun 2019 /	Tentang

No.	Tahun	Nama Desa	Kecamatan	Nomor/Tanggal	Peraturan Desa
		Padureso		16 Desember 2019	Pelestarian Lingkungan Hidup
33		Desa Sidomukti	Kec. Kuwarasan	No. 5 Tahun 2019 / 3 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
34		Desa Lemahduwur	Kec. Kuwarasan	No. 8 Tahun 2019 / 7 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
35		Desa Serut	Kec. Kuwarasan	No. 3 Tahun 2019 / Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
36		Desa Bendungan	Kec. Kuwarasan	No. 7 Tahun 2019 / 18 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
37	2020	Desa Kalirancang	Kec. Alian	No. 8 Tahun 2020/ 21 Oktober 2020	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
38		Desa Kenoyojayan	Kec. Ambal	No. 16 Tahun 2020/ Oktober 2020	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
39		Desa Logedhe	Kec. Pejagoan	No. 9 Tahun 2020/ 27 Nov 2020	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
40		Desa Candiwulan	Kec. Adimulyo	No. 9 Tahun 2020/ 22 Oktober 2020	Tentang Pelestarian

No.	Tahun	Nama Desa	Kecamatan	Nomor/Tanggal	Peraturan Desa
					Lingkungan Hidup
41		Desa Argopeni	Kec. Ayah	No. 6 Tahun 2020/ 15 Oktober 2020	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
42	2021	Desa Karang Tengah	Kec. Poncowarno	No. 5 Tahun 2021/ Maret 2021	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
43		Desa Pujotirto	Kec. Karangsambung	No. 7 Tahun 2021/ 15 September 2021	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
44		Desa Grenggeng	Kec. Karanganyar	No. 5 Tahun 2021/ 25 Oktober 2021	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
45		Desa Pakuran	Kec. Sruweng	No. 4 Tahun 2021/ 06 Oktober 2021	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
46		Desa Tanjungsari	Kec. Petanahan	No. 5 Tahun 2021/ Juli 2021	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen, Tahun 2022

Banyak kearifan lokal yang secara implisit bermaksud melindungi dan melestarikan alam sekitar, dimana semuanya tidak dapat dijangkau oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat melestarikannya. Oleh karena itu pemerintah desa di kabupaten Kebumen diharapkan bisa ikut serta melestarikan lingkungan melalui perdes ini.

### 2.16.2. Rehabilitasi Lingkungan

Tekanan terhadap lingkungan terutama pada kawasan hutan di Kabupaten Kebumen berupa meningkatnya lahan kritis dan pengurangan luas hutan. Pengurangan luas merupakan suatu kerusakan hutan akibat eksploitasi terhadap sumberdaya alam yang kurang memperhatikan azas kelestarian, disamping akibat kebakaran hutan dan juga sebab-sebab lain di dalam pengelolaan hutan. Selain itu, di Kabupaten Kebumen, kondisi kerusakan hutan juga didukung oleh adanya penambangan-penambang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Zona-zona wilayah yang mempunyai kondisi fisiografi berupa perbukitan akan semakin tidak terkontrol oleh kerusakan-kerusakan tersebut sehingga permukaan semakin tidak stabil.

Upaya itu ditempuh melalui kegiatan penghijauan dan reboisasi. Kabupaten Kebumen melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) berupa penanaman tanaman kehutanan di luar kawasan hutan negara. Penghijauan dilakukan di pekarangan, tegalan, hutan rakyat, sempadan sungai dan ruang terbuka hijau lainnya. Pada Tahun 2022 sebagai upaya rehabilitasi lahan di Kabupaten Kebumen, tertanam sebanyak 46.682 batang pohon dengan luas tanah rehabilitasi 232 hektar. Upaya rehabilitasi yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.60. Realisasi Kegiatan Penghijauan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No.	Kabupaten/ Kota	Lokasi Penanaman	Penghijauan		
			Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
1	Ayah	Desa Karangduwur, Desa Kalipoh, Desa Argopeni	20	15	4400
2	Buayan	Desa Wonodadi	10	10	1744
3	Puring	Desa Tambakmulyo, Desa Surejan	20	10	2.700
4	Petanahan	Desa Tegalretno	10	5	1.100

No.	Kabupaten/ Kota	Lokasi Penanaman	Penghijauan		
			Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
5	Klirong	Desa Jogosimo	10	10	1.685
6	Buluspesantren	Desa brecong	20	10	1.780
7	Ambal				
8	Mirit	Desa wiromartan, Lembupurwo	30	20	1.340
9	Bonorowo				
10	Prembun				
11	Padureso				
12	Kutowinangun	Desa Kaliputih	20	10	2.720
13	Alian	Desa Kalirancang, Tlogowulung, Kaliputih	25	15	2.060
14	Poncowarno	Desa Kebapangan, Karangtengah, Soka	30	20	3.055
15	Kebumen				
16	Pejagoan	Desa Watulawang ,Pangempon, Pengaringan	20	15	2.620
17	Sruweng	Desa Pangempon, Desa Pakuran	20	17	3.269
18	Adimulyo				
19	Kuwarasan				
20	Rowokele	Desa Rowokele Desa Wagirpandan	10	5	4.084
21	Sempor	Desa Tunjungseto	10	10	1.150
22	Gombong				
23	Karanganyar	Desa wonorejo, Desa Karangkemiri, Desa Giripurno,	30	20	3.410

No.	Kabupaten/ Kota	Lokasi Penanaman	Penghijauan		
			Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
		Desa Grengeng			
24	Karanggayam	Desa Karanggayam, Desa Kajoran. Desa Karangrejo, Desa Ginandong	30	25	2.895
25	Sadang				
26	Karangsambung	Desa Pujotriero, Desa Langse,	30	15	6.850

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen, Tahun 2022

### 2.16.3. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kebijakan dalam bidang lingkungan hidup yang tertuang dalam peraturan daerah dan peraturan bupati di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

Tabel 2.61. Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Tentang
1	Peraturan Daerah	6	2018	Pengelolaan Air Limbah Domestik
2	Peraturan Daerah	7	2018	Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan
3	Peraturan Bupati	46	2018	Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
4	Keputusan Bupati	660/27	2018	Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Sanitasi Penugasan Tahun Anggaran 2018
5	Keputusan Bupati	050/36	2018	Pembentukan District Project Manajement Unit Program Penyediaan Air Minum

No	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Tentang
				Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018
6	Keputusan Bupati	050/48	2018	Penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Pembangunan Prasarana Sanitasi (Dana Alokasi Khusus Reguler) Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018
7	Keputusan Bupati	050/62	2018	Penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018
8	Keputusan Bupati	070/179	2018	Delineasi Kawasan Geopark Di Kabupaten Kebumen
9	Keputusan Bupati	050/188	2018	Penerima Belanja Bantuan Sosial Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018
10	Keputusan Bupati	050/191	2018	Penerima Belanja Bantuan sosial Rumah Swadaya Di Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018
11	Keputusan Bupati	660.1/343	2018	Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kebumen
12	Keputusan Bupati	050/366	2018	Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen
13	Keputusan Bupati	141/435	2018	Pemenang Lomba Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2018

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen, Tahun 2022*

#### **2.16.4. Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah menginisiasi dan melaksanakan beberapa inovasi yang sudah dilaksanakan. Beberapa inovasi dimaksud meliputi:

##### **a. Program Nandur Wit Nggo Anak Putu**

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 yaitu Kebumen SEMARAK (Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat) maka dilaksanakan Program Nandur Wit go Anak Putu (Program 1 Anak 2 Pohon dan 1 Nikah 2 Pohon). Sebagai pelaksanaan program ini telah diterbitkan Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor : 660/1466.2 tanggal 30 Juli 2021 tentang Implementasi Program Nandur Wit Nggo Anak Putu. Tujuan program ini adalah meningkatkan penghijauan di Kabupaten Kebumen. Sampai dengan Tahun 2021, kegiatan penghijauan telah terealisasi sebesar 49.248 bibit dengan estimasi luas penghijauan ha.

##### **b. Laporan Cepat Bupati Kebumen**

Aplikasi yang diluncurkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen merupakan salah satu program Pemerintah Kabupaten Kebumen. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memberikan saran, masukan maupun pengaduan terhadap kinerja pengelolaan pemerintahan, termasuk diantaranya adalah pengaduan atas dugaan pencemaran lingkungan.

##### **c. Masyarakat Sadar Konservasi Lingkungan**

Upaya edukasi masyarakat dalam upaya konservasi lingkungan hidup dengan melakukan pendampingan pengelolaan lingkungan hidup berupa kebijakan, kelembagaan masyarakat dan upaya konservasi lingkungan di wilayah desa konservasi. Salah satu desa yang sudah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Kebumen tentang Pembentukan Desa Konservasi adalah Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen melalui kegiatan konservasi mangrove di Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Mangrove Muara Kali Ijo.

##### **d. Inovasi Pengelolaan Sampah dan Limbah**

Inovasi-inovasi dalam pengelolaan sampah dikembangkan dan dilaksanakan guna mencegah dan mengurangi dampak negatif

sampah yang tidak terkelola dengan baik sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Beberapa inovasi dimaksud meliputi:

- Pemanfaatan Gass Methane

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan instalasi penangkap gas metan di TPA Kaligending dan didistribusikan ke warga sekitar lokasi TPA.

- Wisata TPA Semali dan Kaligending

TPA Semali merupakan tempat pembuangan akhir sampah dengan luas 3,7 Ha yang terdapat di Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen dengan volume eksisting 1 Ha sedangkan TPA Kaligending dengan luas 5 Ha dengan volume existing 1,87 Ha . TPA Semali berdiri Tahun 1996 dengan pengelolaan sampah sitem sanitary landfill lengkap dengan teropong gas metan dan pengolahan Lindi. Kegiatan wisata edukasi untuk anak sekolah bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan kesadaran untuk melakukan pemilahan sampah secara baik dan benar.

#### **e. Pembuatan TPS 3R**

Tempat pengolahan sampah di Kabupaten Kebumen meliputi pemilahan sampah yang masuk untuk memisahkan komposisi sampah berdasarkan jenisnya. TPS 3R di Kabupaten Kebumen sudah terbentuk di 7 Lokasi Kawasan perkotaan penyangga Adipura antara lain:

- TPS 3R Kelurahan Selang
- TPS 3R Desa Kembaran
- TPS 3R Kelurahan Panjer
- TPS 3R Desa Karang Sari
- TPS 3R Kelurahan Tamanwinangun
- TPS 3R Desa Kawedusan
- TPS 3R Kelurahan Kebumen

#### **f. Pembentukan Bank Sampah**

Bank sampah merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar “bersahabat” dengan sampah, sehingga memperoleh manfaat ekonomi langsung dari sampah. Sampai

dengan tahun 2022, Bank Sampah di Kabupaten Kebumen berjumlah sekitar 157 unit.

**g. Pembuatan IPAL Biodigester untuk mengatasi limbah ternak yang dilengkapi penangkap Gas**

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah sentra sapi PO, kotoran ternak yang semula hanya dimanfaatkan sebagai pupuk sekarang lebih berharga karena dapat menjadi sumber energi baru untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat.

**h. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri Kecil**

Industri di Kabupaten Kebumen didominasi oleh industri kecil tahu, tempe dan industri lanting sebagai salah satu makanan khas Kebumen. Ketiga industri kecil tersebut menghasilkan limbah organik dengan karakteristik menimbulkan bau dan pencemaran air jika tidak dilakukan pengolahan. Industri kecil lain yang berkembang di Kabupaten Kebumen adalah industri kecil batik. Industri ini banyak terdapat di Desa Gemeksekti yang berada di pinggiran sungai Luk Ulo Kebumen. Pada akhir tahun 2019, paguyuban pengusaha batik Lawet Sakti Desa Gemeksekti Kebumen mendapat bantuan pembangunan IPAL batik dari Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

**2.16.5. Pengaduan Lingkungan**

Meningkatnya pembangunan di berbagai sektor telah mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut dan didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menyebabkan makin meningkatnya pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Salah satu upaya pemerintah kabupaten/ kota untuk menyikapi kondisi tersebut dengan peningkatan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat. Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis dan /atau lisan mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup kepada instansi lingkungan hidup Kabupaten Kebumen. Dalam rangka menjamin hak dan peran setiap orang, instansi lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen wajib mengelola pengaduan masyarakat. Tanggung

jawab pengelolaan ini sebagai bentuk pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Berdasarkan peraturan ini setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada bupati/walikota atau kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat, instansi lingkungan hidup kabupaten/kota melalui bupati/walikota atau kepala instansi yang bersangkutan dapat membentuk pos pengaduan lingkungan. Pos pengaduan ini berfungsi sebagai unit kerja yang mengkoordinir pengelolaan pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, bagi instansi yang belum memiliki unit kerja struktural yang bertanggung jawab untuk mengelola pengaduan. Sedangkan bagi instansi yang telah memiliki unit kerja struktural berperan dalam meningkatkan koordinasi kerja antar unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup kabupaten/kota meliputi:

1. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya berada pada suatu wilayah kabupaten/kota.
2. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terjadi di wilayah 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
3. Usaha dan/atau kegiatan yang penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup oleh komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup kabupaten/kota.
4. Usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau izin lingkungannya diberikan oleh pejabat kabupaten/kota.

Selama tahun 2022, tercatat ada 12 laporan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan di Kabupaten Kebumen dari ke-12 laporan tersebut, seluruhnya telah selesai ditangani sesuai dengan jenis laporan yang masuk. Pengaduan

Masyarakat yang masuk dan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan sebagian besar berupa pengaduan yang terkait dengan kegiatan yang menimbulkan polusi udara ataupun pencemaran udara. Secara rinci, jumlah pengaduan Masyarakat selama tahun 2022 berdasarkan jenis pengaduannya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.62. Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Jenis Pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan
1	Pencemaran udara	4
2	Pencemaran air	3
3	Penambangan	2
4	Sampah	3
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen, Tahun 2022

#### 2.16.6. Peran Serta Masyarakat

Sebagaimana kita ketahui bahwa tatanan kehidupan masyarakat tidak akan lepas dari lingkungan. Semakin bagus pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan maka semakin kecil dampak yang diperoleh masyarakat, akan tetapi bila pengelolaan lingkungan tidak bagus maka dampaknya pun akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Pengelolaan lingkungan tidak bisa dibebankan kepada masyarakat, demikian juga pada pemerintah semata, namun semua pihak termasuk dunia usaha harus berperan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan tersebut. Bahkan dunia usaha atau bisnis merupakan bagian penting yang memiliki beban dan tanggung jawab apabila dalam usahanya memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen telah melaksanakan beberapa kegiatan yang menyertakan keterlibatan masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan, workshop, seminar tentang lingkungan dan telah melaksanakan kegiatan fisik perbaikan kualitas lingkungan.

Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, perilaku buang air besar pada tempatnya adalah dengan melakukan perubahan bentuk perilaku yang didasarkan pada kebutuhan atas kondisi lingkungan yang bersih yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kebersihan. Pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif termasuk diantaranya memanfaatkan keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Kebumen dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui :

a) Pengembangan Sekolah Peduli dan Berwawasan Lingkungan/  
Sekolah Adiwiyata

Saat ini di Kabupaten Kebumen terdapat 42 sekolah dengan predikat adiwiyata yaitu 8 sekolah adiwiyata nasional dan 6 sekolah Adiwiyata Provinsi serta puluhan sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten. Selain itu juga di kembangkan peluang kerjasama dengan pihak swasta melalui program CSR, saat ini dikembangkan kerjasama dengan Pertamina Foundation melalui program Sekolah Sobat Bumi.

b) Penyuluhan/ Sosialisasi Lingkungan Hidup di Kabupaten Kebumen  
Bekerjasama dengan TP PKK, Perguruan Tinggi, LSM maupun lembaga lainnya dalam mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen.

c) Penyuluhan dan Sosialisasi Pemanfaatan Limbah dan Pembuatan  
Kompos

Dilaksanakan disekolah-sekolah maupun sesuai dengan permintaan dari kelompok masyarakat di Kabupaten Kebumen.

d) Pengembangan Pupuk Organik /Kompos

Merupakan kegiatan lintas sektoral, dibangun Tempat Pengolahan Sampah di Desa Kembaran yang merupakan kerjasama antara Kantor Lingkungan Hidup, DPU Kabupaten Kebumen dan Desa Kembaran.

Kelompok masyarakat yang ikut berperan aktif dengan memanfaatkan keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.63. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

<b>No</b>	<b>Nama LSM</b>	<b>Alamat</b>
1	Putra Pertiwi	Kebumen
2	IRE	Kebumen
3	Indipt	Kebumen
4	KOMPAK	Kebumen
5	Yakum	Kebumen
6	FKMD	Kebumen
7	PMII	Kebumen
8	Permaden	Kebumen
9	HMI	Kebumen
10	FORSA	Kebumen
11	Ki Hajar Dewantoro	Kebumen
12	PERSADA	Kebumen
13	Lima Desa	Kebumen
14	FMP	Kebumen
15	Padamu Negeri	Kebumen
16	Tanah Air	Kebumen
17	YKEK	Kebumen

*Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten Kebumen Tahun 2022*

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP**

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KEBUMEN**

Seiring berjalannya waktu dan pesatnya pembangunan mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan. Efek dari degradasi lingkungan ini berpengaruh terhadap keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan hidup di masa mendatang. Guna mengantisipasi permasalahan lingkungan yang semakin kompleks dibutuhkan seperangkat aturan serta pedoman dalam menanganinya. Hal ini bertujuan agar aspek keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan hidup di masa mendatang tetap terjaga serta dapat terus mendukung kehidupan manusia.

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen secara mendasar mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Kebumen, terutama yang memberikan implikasi secara signifikan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Isu-isu strategis yang diangkat didalam Penyusunan RPPLH Kabupaten Kebumen diperoleh melalui beberapa proses identifikasi dan analisis terhadap dokumen perencanaan nasional, regional dan karakteristik satuan ekoregion beberapa dasar yang digunakan didalam mengidentifikasi permasalahan lingkungan di Kabupaten Kebumen antara lain :

- Identifikasi dan analisis isu strategis terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan RPPLH Nasional;
- Identifikasi dan analisis isu strategis terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan RPPLH Provinsi Jawa Tengah;
- Identifikasi dan analisis isu strategis terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2020;
- Identifikasi dan analisis isu strategis terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011 – 2031;

- Identifikasi dan analisis isu strategis terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Dokumen IKPLHD Kabupaten Kebumen Tahun 2019;
- Identifikasi dan Analisis satuan ekoregion atau bentang lahan Kabupaten Kebumen terkait dengan permasalahan lingkungan;
- Identifikasi dan analisis isu strategis terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen tahun 2016 – 2020;
- Identifikasi permasalahan lingkungan hidup berdasarkan indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Kabupaten Kebumen;
- Analisis *Driver, Pressure, Impact dan Response (DPSIR)*.

### **3.1.1. Identifikasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Ekoregion Jawa**

Ekoregion Pulau Jawa dipengaruhi proses vulkanik, struktural, denudasional (pelapukan dan erosi) dan solusional (pelarutan batu gamping), serta fluvial. Kawasan ekoregion Pulau Jawa memiliki berbagai tipe ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami didominasi oleh ekosistem hujan tropika di dataran pegunungan/perbukitan vulkanik, pegunungan/perbukitan struktural yang tersebar di bagian tengah serta beberapa bagian di selatan Jawa. Ekosistem buatan yang merupakan kawasan perkotaan yang padat pemukiman, kawasan industri dan kawasan budidaya pertanian/beras serta budidaya hutan tersebar di bagian utara Pulau Jawa.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, 2 (dua) hal utama yang secara nasional dihadapi sebagai isu strategis yang berkaitan dengan menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup terutama di ekoregion Jawa adalah :

#### **1. Menurunnya kemampuan ekosistem untuk menjaga keseimbangan siklus air**

Siklus hidrologi, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera sudah sangat terganggu. Bencana alam yang semakin sering terjadi menjadi salah satu indikasi yang dapat dirujuk. Daerah-daerah yang berfungsi sebagai resapan air harus dilindungi ekosistemnya, dipulihkan kerusakannya dan ditingkatkan kualitas tutupan hutannya. Sedangkan daerah-daerah yang

merupakan penyimpan air alami harus dipulihkan dan dibebaskan dari area terbangun. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup ke depan harus dapat menjamin pulihnya kemampuan ekosistem untuk menyerap, menahan, menyimpan dan mengatur distribusi air. Daerah-daerah yang menjadi resapan air harus dilindungi ekosistemnya, dipulihkan kerusakannya, dan ditingkatkan kualitas tutupan hutannya. Sedangkan daerah-daerah yang merupakan penyimpan air alami harus dipulihkan dan dibebaskan dari area terbangun.

## **2. Berkurangnya luasan lahan pangan kualitas tinggi di daerah-daerah lumbung pangan tradisional.**

Berdasarkan perhitungan Bappenas, bahwa Indonesia kedepan akan dihuni oleh  $\pm$  305,6 juta jiwa pada tahun 2035. Diperlukan produksi pangan yang besar untuk dapat mendukung jumlah penduduk tersebut, yang selama ini dipasok dari lahan-lahan sawah tradisional di Jawa, Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Perkembangan pembangunan yang pesat terutama di Jawa dan Sumatera menyebabkan banyak lahan-lahan produktif berubah fungsi menjadi perumahan, kawasan industri, jalan tol dan kawasan terbangun lainnya. Untuk mendorong penyelesaian isu tersebut, pengelolaan lingkungan hidup ke depan harus mampu melindungi lahan-lahan pangan produktif, mencegah alih fungsi lahan pertanian, dan memperketat penggunaan lahan yang potensial untuk pangan menjadi daerah-daerah terbangun. Disamping itu, perlu dikembangkan sumber-sumber pangan baru yang mempunyai kemampuan adaptasi tinggi di luar Jawa.

### **3.1.2. Identifikasi Permasalahan Lingkungan Hidup Berdasarkan RPPLH Provinsi Jawa Tengah**

Kabupaten Kebumen didalam identifikasi isu strategis RPPLH Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang berada di Provinsi Jawa Tengah bagian selatan. Kabupaten/kota yang berada pada bagian Jawa Tengah bagian tselatan adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Wonogiri

Arahan isu strategis terkait permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen berdasarkan RPPLH Provinsi Jawa Tengah antara lain :

**1. Alih fungsi lahan pertanian dan tata ruang di Daerah Aliran Sungai (DAS);**

Alih fungsi lahan di Kabupaten Kebumen yang terjadi pada umumnya adalah alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian yaitu menjadi lahan permukiman, industri, perdagangan, jasa, jalan tol dan lain sebagainya.

**2. Penurunan kualitas air dan udara;**

Beberapa hal yang dapat menyebabkan rendahnya kualitas air adalah pencemaran air oleh industri, limbah domestik dan perilaku masyarakat. Rendahnya kualitas air dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Dalam jangka waktu lama penurunan kualitas air yang disebabkan oleh industri dapat mengganggu keberlangsungan organisme perairan, kerusakan ekosistem dan penurunan daya dukung lingkungan.

Telah dilakukan upaya pengendalian pencemaran dalam memperbaiki kualitas air melalui pembinaan terhadap para pelaku usaha/kegiatan, pembangunan IPAL baik industri maupun komunal, penaatan terhadap ijin lingkungan, serta pemantauan kualitas lingkungan secara berkala. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan air penduduk dilakukan dengan, penanaman, serta peningkatan daerah resapan air. Pencemaran udara adalah bentuk perubahan kandungan udara akibat masuknya zat pencemar ke dalam udara dalam jumlah tertentu dan jangka waktu yang cukup lama. Hal ini dapat disebabkan oleh keberadaan kawasan industri, emisi gas kendaraan, pembusukan air limbah, dan sebagainya. Pencemaran udara berkaitan dengan indra pendengaran dan penciuman. Selain kawasan industri, pencemaran udara dapat disebabkan oleh transportasi dimana semakin banyak jumlah kendaraan maka semakin banyak kendaraan yang menghasilkan polutan yang berasal dari emisi gas buang kendaraan.

### **3. Pengolahan sampah dan limbah industri.**

Sampah dan limbah industri saat ini sangat berisiko terhadap lingkungan hidup karena menimbulkan pencemaran udara, air, dan tanah, serta berkontribusi terhadap perubahan iklim. Selain itu masalah persampahan juga memberikan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat serta mempengaruhi daya dukung dan daya tampung suatu wilayah akibat pencemaran yang disebabkan oleh minimnya pengelolaan sampah. Masalah persampahan juga dapat menjadi pemicu bencana banjir di wilayah Kabupaten Kebumen utamanya di wilayah sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).

#### **3.1.3. Identifikasi Permasalahan Lingkungan Hidup Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026**

Isu strategis terkait bidang lingkungan hidup didalam KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 antara lain :

##### **1. Infrastruktur air bersih dan limbah**

Isu strategis ini dititikberatkan pada permasalahan lingkungan yang terkait dengan prasarana air bersih untuk masyarakat yang masih kurang dan infrastruktur pengolahan air limbah yang belum optimal.

##### **2. Infrastruktur dasar air minum dan sanitasi**

Isu strategis yang berkaitan dengan Infrastruktur dasar air minum dan sanitasi adalah isu dengan pokok permasalahannya berupa akses layanan sanitasi yang layak untuk rumah tangga belum merata serta akses terhadap layanan untuk air minum yang layak belum merata dan optimal.

##### **3. Pengelolaan sampah**

Isu strategis pengelolaan sampah menitikberatkan pada permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah perkotaan dan pedesaan yang tertangani belum maksimal dan pengelolaan sampah yang belum optimal.

#### **3.1.4. Identifikasi Permasalahan Lingkungan Hidup Berdasarkan KLHS Revisi RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011 – 2031**

Didalam proses identifikasi permasalahan lingkungan, yang nantinya menjadi dasar didalam penentuan isu strategis untuk penyusunan

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kebumen, mengacu pada dokumen KLHS Revisi RTRW Kabupaten Kebumen tahun 2011 - 2031, terdapat 121 isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kebumen, dari 121 daftar identifikasi isu pembangunan tersebut, selanjutnya dikelompokkan berdasarkan isu pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan hidup sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Lingkungan Berdasarkan KLHS Revisi RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011 - 2031

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan
1	Pelayanan sanitasi di kawasan perkotaan belum optimal
2	Belum optimalnya penyediaan air bersih untuk kebutuhan pokok sehari-hari
3	Masih kurangnya upaya peningkatan kualitas pemukiman
4	Perilaku masyarakat akan kesadaran lingkungan masih kurang
5	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir
6	Belum akuratnya data potensi geologi dan belum adanya data mitigasi bencana geologi, sarana prasarana dan pengawasan mitigasi bencana geologi
7	Banyak tanggul dan tebing sungai yang rusak akibat bencana banjir.
8	Abrasi Pantai
9	Bencana alam banjir dan longsor pada saat musim hujan tinggi
10	Ketidakjelasan Kewenangan pelestarian hutan bakau belum optimal dan direncanakan secara sistematis
11	Kurangnya RTH publik
12	Pengelolaan persampahan belum berjalan optimal
13	Alih fungsi lahan tinggi
14	Penataan pembangunan lingkungan pemukiman penduduk belum sesuai harapan
15	Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman
16	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana sanitasi di kawasan pedesaan

<b>No</b>	<b>Isu Pembangunan Berkelanjutan</b>
17	Belum optimalnya pemanfaatan sumber energy terbarukan
18	Pembangunan yang dilakukan masih belum memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup
19	Meningkatnya volume limbah cair baik dari industri maupun domestik cukup besar, sementara unit pengolahan limbah cair yang ada belum memadai
20	Sistem sanitasi yang masih belum terpadu dalam perencanaan induk sistem pengelolaan limbah cair
21	Menurunnya kualitas air akibat dari kegiatan ekonomi masyarakat
22	Tingginya polusi udara akibat emisi gas buang dari sumber bergerak dan tidak bergerak
23	Masih rendahnya capaian pengurangan dan penanganan sampah
24	Masih Kurangnya sarana penanganan sampah (TPS 3R, TPST, PDU dan Bank Sampah) disemua wilayah Kabupaten Kebumen
25	Terjadinya kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan
26	Belum dilakukan pengelolaan limbah oleh industri kecil dan UMKM
27	Semakin meningkatnya kegiatan / usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan
28	Rusaknya gumuk pasir di kawasan pesisir (Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring)
29	Menurunnya Keanekaragaman Hayati, flora, fauna, dan ekosistem
30	Belum adanya kejelasan tapal batas kawasan sempadan pantai
31	Belum optimalnya pengelolaan kawasan karst Gombang Selatan dan Cagar Alam Geologi Karangsembung sebagai kawasan lindung geologi
32	Terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan hortikultura menjadi permukiman dan kegiatan lainnya
33	Perlunya peningkatan pengendalian usaha pertambangan

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan
34	Kawasan Bentang Alam Karst Gombang Selatan

Sumber : Dokumen KLHS Revisi RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031

### 3.1.5. Identifikasi Pemasalahan Lingkungan Hidup Berdasarkan Dokumen IKPLHD Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Didalam dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Kebumen tahun 2022, dijelaskan bahwa isu strategis yang diangkat terdiri dari :

#### 1. Alih Fungsi Lahan

Klasifikasi pengembangan wilayah di Kabupaten Kebumen meliputi hutan bakau, perikanan, perkebunan, permukiman dan hutan. Seiring dinamika sosial ekonomi masyarakat, pengembangan kawasan di Kabupaten Kebumen senantiasa menimbulkan masalah berupa kerusakan alam dan lingkungan, seperti banjir, erosi, longsor, kerusakan hutan, kekeringan, alih fungsi lahan, sumber daya manusia yang rendah, pengangguran, dan terbatasnya ketersediaan lahan. Oleh karena itu, tata kelola pengembangan wilayah perlu dilakukan secara terfokus agar aspek keberlanjutan dan aspek keberdayaan masyarakat dapat terwujud secara bersama.

#### 2. Pencemaran Air Akibat Limbah Domestik dan Industri

Jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Kebumen membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari juga termasuk untuk kebutuhan sanitasi yang menghasilkan air limbah. Peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan suatu kota/kabupaten berakibat pula pada pola perubahan konsumsi masyarakat yang cukup tinggi dari tahun ke tahun, dengan luas lahan yang tetap akan mengakibatkan tekanan terhadap lingkungan semakin berat. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berasal dari pertanian, industri dan kegiatan rumah tangga akan menghasilkan limbah yang memberi sumbangan pada penurunan kualitas air.

Pencemaran limbah industri dan domestik juga menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya peningkatan kualitas

lingkungan hidup. Sejumlah sungai di Kabupaten Kebumen tercemar limbah domestik dan industri. Ada pula yang mengalami sedimentasi akibat penggundulan hutan. Hasil analisa kualitas air sungai yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen menunjukkan hasil 50 % sungai yang dipantau diwilayah Kabupaten Kebumen masuk kategori memenuhi syarat, 33 % cemar ringan dan 17 % cemar sedang karena adanya beberapa parameter yang melebihi baku mutu kualitas air sungai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

### **3. Peningkatan Volume Sampah**

Bertambahnya volume jumlah sampah setiap harinya disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi, bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya daerah permukiman dan tingkat aktifitas kegiatan sosial. Sarana dan prasarana persampahan yang terbatas akan menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks sehingga masyarakat membuang sampah di jalan, saluran selokan, sungai dan lahan-lahan terbuka yang dapat mencemari lingkungan hidup. Persoalan sampah selalu menjadi bahan topik pembicaraan yang hangat untuk dibahas karena tidak terlepas atas kaitannya dengan budaya masyarakat itu sendiri. Sumber-sumber sampah biasanya diperoleh dari sisa sampah rumah tangga, sampah pertanian, sampah dari pasar, sampah perkantoran, sampah rumah sakit, sampah sekolah, sampah industri, sampah konstruksi bangunan gedung, sampah peternakan dan sampah perikanan. Oleh sebab itu penanggulangan sampah bukan hanya urusan pemerintah semata namun juga membutuhkan partisipasi seluruh elemen lapisan masyarakat dan industri swasta.

Di wilayah Kabupaten Kebumen, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk pada tahun 2011-2016 mengalami peningkatan walaupun belum terlalu signifikan. Hal ini disebabkan karena pola penanganan sampah di Kabupaten Kebumen masih bertumpu pada kawasan perkotaan khususnya Ibu Kota Kecamatan, sedangkan sebagian besar lainnya belum terkelola atau dikelola secara mandiri oleh masyarakat baik melalui pengelolaan TPS 3R maupun Bank sampah. Di kawasan-kawasan perdesaan,

penanganan sampah masih banyak dilakukan secara konvensional yaitu melalui sistem gali urug terkendali. Hal ini disebabkan karena masih tersedianya lahan untuk pembuangan sampah dengan model galian (juglangan). Jumlah sampah di Kabupaten Kebumen dalam satu tahun produksinya mencapai sekitar 587,28 m<sup>3</sup> /hari yang sampai saat ini tidak semuanya bisa dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Hanya sekitar 45,97% atau 270 m<sup>3</sup> /hr yang bisa diangkut ke TPA. Sisanya, 54,03% dari sampah tersebut masih memerlukan pengolahan supaya tidak mencemari lingkungan.

### 3.1.6. Identifikasi Pemasalahan Lingkungan Hidup Berdasarkan Satuan Ekoregion Kabupaten Kebumen

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup. Satuan Ekoregion sebagaimana UU. Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 7, menyebutkan Penetapan Wilayah Ekoregion harus mempertimbangkan kesamaan karakteristik berupa bentang lahan, iklim, curah hujan, daerah aliran sungai, geologi, tanah dan penggunaan lahan.

Tabel 3.2. Identifikasi Pemasalahan Lingkungan Berdasarkan Satuan Ekoregion

No	Ekoregion	Identifikasi Permasalahan Lingkungan Berdasarkan Karakteristik Ekoregion
1	Dataran Fluvial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alih fungsi lahan, terutama lahan pertanian menjadi lahan terbangun (permukiman, perdagangan dan jasa)</li> <li>2. Morfologi dataran yang sangat luas berpotensi menciptakan bencana alam, seperti : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puting beliung</li> <li>• Banjir</li> </ul> </li> <li>3. Pencemaran baik pencemaran udara maupun pencemaran air, mengingat pada ekoregion ini merupakan pusat dari kegiatan perekonomian dan aktivitas masyarakat.</li> </ol>

No	Ekoregion	Identifikasi Permasalahan Lingkungan Berdasarkan Karakteristik Ekoregion
		4. Timbulan sampah, morfologi yang berupa dataran menjadi tempat akumulasi sampah yang dihasilkan oleh penduduk, sehingga kepadatan penduduk pada ekoregion memiliki potensi yang terus bertambah.
2	Dataran Marin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alih fungsi lahan, terutama lahan pertanian menjadi lahan terbangun (permukiman, pariwisata dan industri)</li> <li>2. Morfologi dataran yang sangat luas berpotensi menciptakan bencana alam, seperti : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puting beliung</li> <li>• Banjir</li> </ul> </li> <li>3. Timbulan sampah, Morfologi yang berupa dataran menjadi tempat akumulasi sampah yang dihasilkan oleh penduduk</li> </ol>
3	Pegunungan Struktural	Bencana alam, terutama erosi dan tanah longsor mengingat satuan ekoregion ini memiliki potensi adanya proses denudasi
4	Perbukitan Solusional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekeringan, hal ini dikarenakan kondisi fisik yang berupa bentuk lahan solusional/karst, dimana hujan yang jatuh langsung masuk ke dalam sungai-sungai bawah tanah</li> <li>2. Gelombang tinggi, terutama pada daerah di selatan Kawasan karst Karang Bolong</li> <li>3. Alih fungsi lahan terutama di kawasan Geopark Karang Bolong yang dapat mempengaruhi pengembangan kawasan tersebut menjadi kawasan lindung yang memiliki keunikan geologi.</li> </ol>
5	Perbukitan Denudasional	Bencana alam, terutama erosi dan tanah longsor mengingat satuan ecoregion ini memiliki potensi adanya proses denudasi
6	Perbukitan Struktural	1. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan terutama di sisi utara dari Kabupaten Kebumen termasuk didalamnya Kawasan Geopark

No	Ekoregion	Identifikasi Permasalahan Lingkungan Berdasarkan Karakteristik Ekoregion
		Karangsambung 2. Alih fungsi lahan akibat kegiatan pertambangan terutama : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutan</li> <li>• Kebun</li> <li>• Permukiman</li> <li>• Padang rumput</li> <li>• Sawah irigasi</li> <li>• Sawah Tadah hujan</li> <li>• Tegalan</li> </ul> 3. Bencana alam, terutama erosi dan tanah longsor mengingat satuan ecoregion ini memiliki potensi adanya proses denudasi

*Sumber : Peta Satuan Ekoregion Kabupaten Kebumen, Pusat Pengendalian Ekoregion Jawa, Tahun 2016*

### **3.1.7. Identifikasi Pemasalahan Lingkungan Berdasarkan Data dan Informasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen**

Sebagaimana yang telah dijabarkan secara rinci pada Bab 2 terkait dengan kondisi IKLH di Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, maka berdasarkan kondisi IKLH tersebut, maka dapat diidentifikasi indikator lingkungan hidup mana saja yang memiliki potensi menjadi permasalahan lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara cepat dan tepat terutama di dalam program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen. IKLH Kabupaten Kebumen selama 5 tahun terakhir masuk kategori Cukup yaitu IKLH dengan nilai indeks antara  $50 \leq X \leq 70$ . Berdasarkan indikator IKLH salah satu parameter yaitu indeks kualitas udara di Kabupaten Kebumen masih berada pada kategori sangat baik dan unggul, walaupun beberapa indikator lainnya masih sangat kurang untuk indeks kualitas air dan cukup untuk indeks kualitas tutupan lahan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka identifikasi permasalahan lingkungan yang muncul berdasarkan kondisi IKLH di Kabupaten Kebumen dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 3.3. Identifikasi Permasalahan Lingkungan Berdasarkan Kondisi IKLH di Kabupaten Kebumen

No	Tahun	Indikator IKLH			IKLH	Identifikasi Permasalahan Lingkungan
		IKA	IKU	IKL		
1	2017	Sedang	Sangat Baik	Sedang	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencemaran air sungai selama 5 tahun terakhir dengan status ringan hingga sedang</li> </ul>
2	2018	Sedang	Baik	Baik	Baik	
3	2019	Sedang	Baik	Baik	Baik	
4	2020	Sedang	Sangat Baik	Baik	Baik	
5	2021	Sedang	Baik	Kurang	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas dan kuantitas lahan yang masih kurang pada tahun 2021 turun dari 4 tahun sebelumnya</li> </ul>

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

### 3.1.8. Identifikasi Pemasalahan Lingkungan Berdasarkan Data dan Informasi Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Berbasis Jasa Lingkungan

Identifikasi permasalahan lingkungan berdasarkan data dan informasi indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis Jasa Lingkungan Hidup di Kabupaten Kebumen dilakukan dengan cara melihat prosentase luas lahan pada masing-masing Jasa Lingkungan Hidup yang telah dipetakan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk melihat seberapa besar manfaat dari ekosistem/lingkungan yang masih dapat dirasakan oleh manusia baik jasa penyedia, jasa pengaturan, jasa pendukung dan jasa budaya.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) dapat menjadi obyek dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana dan program yang dijalankan didalam pembangunan suatu daerah, dengan melihat indikasi dari D3TLH yang ada di Kabupaten Kebumen, dalam

hal ini adalah distribusi luasan, maka kita dapat menganalisa bahwa D3TLH suatu daerah apakah diindikasikan menurun atau tidak dengan melihat prosentase luas lahan terbesar dari kelas Jasa Lingkungan Hidup/lingkungannya (DR. Lutfi Muata'ali, S.Si., MSP, dalam *Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Hidup untuk Perencanaan Lingkungan Hidup, Tahun 2019*). Ada atau tidaknya permasalahan lingkungan berdasarkan indikasi D3TLH ditandai dengan tanda (+) yang artinya adalah bahwa D3TLH masih dalam kondisi bagus atau bukan menjadi permasalahan lingkungan, sedangkan tanda (-) diartikan bahwa adanya indikasi permasalahan lingkungan berdasarkan D3TLH berbasis Jasa Lingkungan Hidup/lingkungan. Secara rinci hasil dari identifikasi permasalahan lingkungan berdasarkan indikasi D3TLH di Kabupaten Kebumen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4. Identifikasi Permasalahan Lingkungan Berdasarkan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan di Kabupaten Kebumen

No	Fungsi Jasa Lingkungan Hidup	Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung	Identifikasi Permasalahan Lingkungan	
1	Penyediaan Bahan Pangan	Status Belum Terlampaui	95,46%	+
2	Penyediaan Air Bersih	Status Belum Terlampaui	58,84 %	+
3	Penyediaan Serat	Sedang	58,87%	-
4	Penyediaan Sumber Daya Genetik	Sedang	59,56%	-
5	Pengaturan Udara	Rendah	62,41%	-
6	Pengaturan Iklim	Rendah	62,38%	-
7	Pengaturan Pencegahan Bencana	Rendah	38,73%	-
8	Pengaturan Tata Air dan Banjir	Sedang	57,85%	+
9	Pengaturan Pemurnian Air dan Limbah	Sedang	78,54%	-

No	Fungsi Jasa Lingkungan Hidup	Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung		Identifikasi Permasalahan Lingkungan
10	Pengaturan Penyerbukan Alami	Rendah	37,36%	-
11	Pengaturan Habitat dan Keanekaragaman Hayati	Rendah	46,54%	-
12	Pengaturan Pengendalian Hama	Rendah	37,36%	-
13	Pendukung Siklus Hara	Sedang	48,77%	+
14	Pendukung Kesuburan Tanah	Sedang	87,36%	+
15	Pendukung Produksi Primer	Rendah	37,41%	-

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

**Keterangan :**

(+) : Indikasi D3TLH masih baik

(-) :Indikasi D3TLH menurun (Adanya Permasalahan Lingkungan)

### 3.1.9. Pengelompokan Identifikasi Permasalahan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen

Berdasarkan hasil identifikasi dan tinjauan terhadap beberapa dokumen perencanaan, dokumen kajian dan kondisi bentang lahan di Kabupaten Kebumen terkait isu strategis dan permasalahan lingkungan hidup, maka beberapa isu yang teridentifikasi dikelompokkan berdasarkan kesamaan jenis dan tema dari daftar panjang isu dan permasalahan lingkungan yang ada di Kabupaten Kebumen, maka dapat dikelompokkan menjadi 13 permasalahan lingkungan yang akan diangkat didalam RPPLH Kabupaten Kebumen. Sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.5. Pengelompokan Isu Strategis/Permasalahan Lingkungan

No	Pengelompokan Permasalahan Lingkungan RPPLH Kabupaten Kebumen	Sumber
1	Menurunnya jasa lingkungan penyedia air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arahan isu di Ekoregion Jawa</li> <li>• Indikasi D3TLH</li> </ul>
2	Menurunnya jasa lingkungan penyedia pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arahan isu di Ekoregion Jawa</li> <li>• KLHS Revisi RTRW Tahun 2011 – 2031</li> <li>• Indikasi D3TLH</li> </ul>
3	Alih fungsi lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RPPLH Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• KLHS Revisi RTRW Tahun 2011 – 2031</li> <li>• Karakteristik ecoregion/bentang lahan</li> </ul>
4	Penurunan kualitas air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RPPLH Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• KLHS Revisi RTRW Tahun 2011 – 2031</li> <li>• Karakteristik ecoregion/bentang lahan</li> <li>• IKLH Kabupaten Kebumen 2017s/d 2021</li> <li>• Indikasi D3TLH</li> </ul>
5	Pengelolaan persampahan dan limbah yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RPPLH Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• KLHS Revisi RTRW Tahun 2011 – 2031</li> <li>• KLHS RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2020</li> <li>• Indikasi D3TLH</li> <li>• Karakteristik ecoregion/bentang lahan</li> </ul>
6	Infrastruktur air bersih dan limbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KLHS Revisi RTRW Tahun 2011 – 2031</li> <li>• KLHS RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2020</li> </ul>
7	Infrastruktur dasar air minum dan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KLHS Revisi RTRW Tahun 2011 – 2031</li> <li>• KLHS RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2020</li> </ul>
8	Risiko Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KLHS Revisi RTRW Tahun 2011 – 2031</li> <li>• Karakteristik ecoregion/bentang lahan</li> <li>• Indikasi D3TLH</li> </ul>

No	Pengelompokkan Permasalahan Lingkungan RPPLH Kabupaten Kebumen	Sumber
9	Menurunnya Keanekaragaman Hayati, flora, fauna dan ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KLHS Revisi RTRW Tahun 2011 – 2031</li> <li>• Indikasi D3TLH</li> </ul>
10	Kurangnya RTH publik	KLHS Revisi RTRW Tahun 2011 – 2031
11	Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan	KLHS Revisi RTRW Tahun 2011 – 2031
12	Rusaknya gumuk pasir di kawasan pesisir	KLHS Revisi RTRW Tahun 2011 – 2031
13	Kurangnya kesadaran lingkungan masyarakat	KLHS Revisi RTRW Tahun 2011 – 2031

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

## 3.2. ISU STRATEGIS DAN ISU PRIORITAS RPPLH KABUPATEN KEBUMEN

### 3.2.1. Isu Strategis RPPLH Kabupaten Kebumen

Penetapan isu strategis yang akan diangkat di dalam RPPLH Kabupaten Kebumen untuk kurun waktu 30 tahun yang akan datang dilakukan melalui proses *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan seluruh stake holder meliputi instansi/OPD terkait, kecamatan, perguruan tinggi, swasta, tokoh masyarakat dan pelaku usaha. FGD telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 di Ruang Rapat Lantai 2 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen. Pada proses FGD, dasar penetapan isu strategis melalui pembahasan dengan meminta masukan dari seluruh stake holder terkait dengan hasil identifikasi permasalahan lingkungan yang telah dijabarkan dan dikelompokkan sesuai dengan sumber dan literatur yang melatar belakangi-nya. Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pengelompokkan permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen didalam kegiatan FGD, terdapat 4 jenis permasalahan lingkungan yang banyak dipilih oleh stake holder untuk kemudian diangkat menjadi isu strategis didalam RPPLH Kabupaten Kebumen dan disepakati secara bersama-sama didalam kegiatan FGD tersebut. Empat isu strategis RPPLH Kabupaten Kebumen yang merupakan hasil dari keputusan kegiatan FGD yang telah dilakukan antara lain :

1. Alih fungsi lahan;

2. Pengelolaan sampah dan limbah;
3. Risiko bencana; dan
4. Penurunan kualitas dan kuantitas air.

### **3.2.2. Analisis *Driver, Pressure, State, Impact dan Response (DPSIR)* Isu Strategis didalam RPPLH Kabupaten Kebumen**

Isu strategis hasil pembahasan didalam FGD selanjutnya dikuatkan dalam bentuk analisis hubungan sebab akibat untuk mengetahui secara mendetail isu strategis tersebut mempengaruhi pembangunan yang ada di Kabupaten Kebumen sehingga perlu diangkat didalam RPPLH Kabupaten Kebumen sebagai dasar didalam perencanaan lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen.

Sebagaimana Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/II/2016, tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota, Hasil dari penetapan isu strategis Terkait dengan permasalahan lingkungan yang ada di Kota Kebumen yang akan menjadi fokus utama dalam kurun waktu 30 tahun yang akan datang didalam RPPLH selanjutnya dianalisis didalam matriks DPSIR. Model analisis *Driver-Pressure-State-Impact and Response (DPSIR)* ini memberi kerangka dasar hubungan sebab akibat antara kegiatan manusia memberikan tekanan kepada lingkungan hidup (*pressure*) dan menyebabkan perubahan pada sumberdaya alam, lingkungan hidup baik secara kuantitas maupun secara kualitas (*state*). Selanjutnya pemerintah dan masyarakat (*stakeholders*) perlu melakukan respon atau upaya terhadap perubahan tersebut baik dalam bentuk adaptasi maupun mitigasi melalui berbagai kebijakan, program, maupun kegiatan (*response*).

Tabel 3.6. Analisis Driving, Pressure, State, Impact dan Response (DPSIR) RPPLH Kabupaten Kebumen

NO	ISU STRATEGIS	DRIVING FORCE (PENDORONG)	PRESSURE (TEKANAN)	STATE (KONDISI)	IMPACT (DAMPAK)	RESPONSE (RESPON)
1	Penurunan Kuantitas Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan penduduk;</li> <li>- Terbatasnya sumber daya air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa lingkungan penyedia air bersih</li> <li>- Kebutuhan air untuk kegiatan domestik, industri dan lain-lain</li> <li>- Ketersediaan air yang menurun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen 1.376.825 Jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,11 %/tahun dari tahun 2020</li> <li>- Jumlah ketersediaan air di Kabupaten Kebumen sebesar 1.496.313.452,31 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Jumlah kebutuhan air di Kabupaten Kebumen sebesar 1.199.506.647,17 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air sebesar 296.806.805,14 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Luas status D3TLH penyedia air belum terlampaui sebesar 58,84 % dari luas total Kabupaten Kebumen</li> <li>- Defisit penyedia air berada di Kecamatan Ambal, Puring, Bulus Pesantren, Mirit, Adimulyo, Kebumen, Petanahan, Klirong, Kuwarasan, Karangawung, Bonorowo dan Gombong</li> <li>- Data dan informasi bantuan dan droping air bersih periode Agustus 2023 :</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk jasa penyedia air</li> <li>- Kekeringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventarisasi dan perlindungan sumber mata air di Kabupaten Kebumen;</li> <li>- Program Daerah Yu Darsi (Ayo Masyarakat Sadar Konservasi);</li> <li>- Program Daerah Nandur Wit untuk Anak Putu;</li> <li>- Penyusunan Dokumen D3TLH tahun 2020;</li> <li>- Penyusunan RPPLH Kabupaten Kebumen tahun 2021;</li> <li>- Respon terhadap setiap Pengaduan Masyarakat terkait Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan.</li> </ul>

NO	ISU STRATEGIS	DRIVING FORCE (PENDORONG)	PRESSURE (TEKANAN)	STATE (KONDISI)	IMPACT (DAMPAK)	RESPONSE (RESPON)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat 7 desa yaitu Kalirejo, Karangjambu, Sidoagung, Tanggeran, Kenteng, Rowokele dan Kalijering</li> <li>• Jumlah KK terdampak = 1.478</li> <li>• Jumlah jiwa terdampak = 5.503</li> <li>• Jumlah tangka yang sudah didroping 23 unit</li> <li>• Volume air yang didistribusi 115.000 lt</li> </ul>		
2	Alih Fungsi Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan penduduk;</li> <li>- Pengembangan kawasan perkotaan dan permukiman;</li> <li>- Peningkatan kegiatan industri di Kabupaten Kebumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan pada penggunaan lahan ;</li> <li>- Pengembangan wilayah</li> <li>- Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas lahan yang telah direhabilitasi tahun 2021 sebesar 856,38 ha yang tersebar di beberapa Desa di Kabupaten Kebumen</li> <li>- Perubahan lahan pertanian, perkebunan dan pertanian lahan kering menjadi pertambangan;</li> <li>- Menurunnya luas lahan pertanian tanaman pangan;</li> <li>- Lahan perkebunan berkurang 151,05 Ha (2018-2019);</li> <li>- Petanian lahan kering berkurang 230,85 Ha (2018-2019);</li> <li>- Tambak, kolam, empang berkurang 651,21 Ha (2018-2019);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada beberapa Jasa Lingkungan Hidup/lingkungan;</li> <li>- Ketahanan pangan;</li> <li>- Degradasi kualitas lingkungan hidup terutama pada nilai indeks kualitas tutupan lahan;</li> <li>- Potensi kejadian bencana yang tinggi terutama banjir, erosi dan longsor;</li> <li>- Berkurangnya keindahan di lokasi wisata pantai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 - 2031;</li> <li>- Program Daerah Yu Darsi (Ayo Masyarakat Sadar Konservasi);</li> <li>- Program Daerah Nandur Wit untuk Anak Putu;</li> <li>- Kajian risiko bencana Kabupaten Kebumen;</li> <li>- Penyusunan Dokumen D3TLH tahun 2020;</li> </ul>

NO	ISU STRATEGIS	DRIVING FORCE (PENDORONG)	PRESSURE (TEKANAN)	STATE (KONDISI)	IMPACT (DAMPAK)	RESPONSE (RESPON)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan non pertanian berkurang 1.472,95 Ha (2018-2019);</li> <li>- Luas D3TLH Rendah dan Sangat Rendah &gt; 40 % pada Jasa Lingkungan Hidup/lingkungan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa penyedia serat 58,87 %</li> <li>• Jasa penyedia sumberdaya genetic 59,56 %</li> <li>• Jasa pengaturan kualitas udara 62,41 %</li> <li>• Jasa pengaturan pemurnian air dan limbah 78,54 %</li> <li>• Jasa Pengaturan habitat dan keanekaragaman hayati 46,54 %</li> </ul> </li> <li>- Indeks kualitas tutupan lahan selama 4 tahun terakhir mengalami penurunan dari Baik menjadi Sedang;</li> <li>- Indeks kualitas lahan tahun 2022 sebesar 49,53 atau masuk kategori kurang.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan RPPLH Kabupaten Kebumen tahun 2021;</li> <li>- Respon terhadap setiap Pengaduan Masyarakat terkait Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan.</li> </ul>
3	Penurunan Kualitas Air	- Laju Pertumbuhan penduduk yang tinggi;	- Jasa lingkungan pengaturan pemurnian air dan limbah;	- Persentase luas jasa lingkungan pengaturan pemurnian air dan limbah masuk kelas sedang sebesar	- Penurunan kualitas air sungai; - Terganggunya kesehatan	- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan

NO	ISU STRATEGIS	DRIVING FORCE (PENDORONG)	PRESSURE (TEKANAN)	STATE (KONDISI)	IMPACT (DAMPAK)	RESPONSE (RESPON)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya sumber daya air;</li> <li>- Pengelolaan limbah domestik yang belum optimal.</li> <li>- Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kebumen;</li> <li>- Peningkatan kegiatan industry di Kabupaten Kebumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas lingkungan hidup;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 78,54 % dengan kecenderungan mengarah pada kelas rendah dan sangat rendah;</li> <li>- Indeks Kualitas Air tahun 2022 naik dari tahun 2021 dengan kategori sedang</li> <li>- Indeks kualitas air selama 5 tahun terakhir (2018-2022) masuk kategori sedang dengan status tercemar ringan hingga sedang.</li> <li>- Sepanjang 2014-2019, sebanyak 35 perusahaan mendapatkan izin mengelola limbah B3.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Air Limbah Domestik;</li> <li>- Penyusunan Dokumen D3TLH tahun 2020;</li> <li>- Penyusunan RPPLH Kabupaten Kebumen tahun 2021;</li> <li>- Pemantauan kualitas air sungai melalui kegiatan Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup setiap tahunnya.</li> <li>- Respon terhadap setiap Pengaduan Masyarakat terkait Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan.</li> <li>- Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, perilaku buang air besar pada tempatnya</li> </ul>
4	Pengelolaan Sampah dan Limbah yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan Penduduk;</li> <li>- Kompleksitas Pengelolaan Sampah;</li> <li>- Gaya hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan volume produksi sampah yang berasal dari sisa sampah rumah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah sampah di Kabupaten Kebumen dalam satu tahun produksinya mencapai sekitar 4.389 kg/hari;</li> <li>- Total jumlah timbulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat;</li> <li>- Penurunan kualitas air sungai;</li> <li>- Konflik Sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah</li> </ul>

NO	ISU STRATEGIS	DRIVING FORCE (PENDORONG)	PRESSURE (TEKANAN)	STATE (KONDISI)	IMPACT (DAMPAK)	RESPONSE (RESPON)
		<p>masyarakat yang konsumtif;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyak produk di pasaran yang mengandung B3;</li> <li>- Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kebumen;</li> <li>- Peningkatan kegiatan industry di Kabupaten Kebumen</li> </ul>	<p>tangga, sampah pertanian, sampah dari pasar, sampah perkantoran, sampah rumah sakit, sampah sekolah, sampah industri, sampah konstruksi bangunan gedung, sampah peternakan dan sampah perikanan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan limbah B3</li> <li>- Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen.</li> </ul>	<p>sampah tahun 2022 sebesar 169.013,40 ton/tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah pengurangan sampah sebesar 26,17 % atau 44.237,54 ton/tahun</li> <li>- Jumlah penanganan sampah sebesar 60,51 % atau 102.269,35 ton/tahun</li> <li>- Sampah yang dapat dikelola sebesar 37,90 % atau 63.523,23 ton/tahun</li> <li>- Sampah yang tidak terkelola sebesar 86,68 % atau 146.506,89 ton/tahun</li> <li>- Kapasitas TPA Kaligending = 938.777 m<sup>3</sup>, dengan volume eksisting 217.304 m<sup>3</sup></li> <li>- Kapasitas TPA Semali = 444.000 m<sup>3</sup>, dengan volume eksisting 121.304 m<sup>3</sup></li> <li>- 2014-2019, sebanyak 35 perusahaan mendapatkan izin mengelola limbah B3</li> <li>- Pola fikir/sisi pandang masyarakat masih beranggapan bahwa pengelolaan sampah adalah bagian dari tanggungjawab pemerintah yang harus dipenuhi sebagai kebutuhan masyarakatnya;</li> <li>- Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung (TPS</li> </ul>		<p>Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;</li> <li>- Keputusan Bupati Kebumen Nomor 660.1/343, Tahun 2018, tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kebumen;</li> <li>- Penerapan layanan persampahan yaitu jam buang sampah yaitu pada pukul 05.00 – 07.00 WB pada daerah layanan;</li> <li>- Wisata TPA Semali;</li> <li>- Pembuatan TPS 3R di Kabupaten Kebumen <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPS 3R Selang</li> <li>• TPS 3R Kembaran</li> <li>• TPS 3R Panjer</li> <li>• TPS 3R Karangsari</li> </ul> </li> </ul>

NO	ISU STRATEGIS	DRIVING FORCE (PENDORONG)	PRESSURE (TEKANAN)	STATE (KONDISI)	IMPACT (DAMPAK)	RESPONSE (RESPON)
				<p>dan TPA) relatif terbatas;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks kualitas air selama 5 tahun terakhir (2017-2021) masuk kategori sedang dengan status tercemar ringan hingga sedang.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Pengelolaan Sampah 3R berbasis masyarakat di tingkat RW;</li> <li>- Sosialisasi peningkatan kapasitas pengelola Bank Sampah;</li> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3;</li> <li>- Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Yang Mengandung B3;</li> <li>- Penanganan 3R (reduce, reuse, recycle ) Terhadap Limbah B3 Medis.</li> <li>- Penyusunan RPPLH Kabupaten Kebumen tahun 2021;</li> <li>- Respon terhadap setiap Pengaduan Masyarakat terkait Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan.</li> </ul>

NO	ISU STRATEGIS	DRIVING FORCE (PENDORONG)	PRESSURE (TEKANAN)	STATE (KONDISI)	IMPACT (DAMPAK)	RESPONSE (RESPON)
						- Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, perilaku buang air besar pada tempatnya
5	Risiko Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alih fungsi lahan</li> <li>- Karakteristik bentang lahan/ecoregion;</li> <li>- Perubahan iklim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa lingkungan pengaturan dan pencegahan bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa lingkungan pengaturan dan pencegahan bencana masuk kategori rendah sebesar 38,73 %</li> <li>- Jenis bencana dengan risiko tinggi antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banjir</li> <li>• Gelombang ekstrim dan abrasi</li> <li>• Tanah longsor</li> <li>• Tsunami</li> </ul> </li> <li>- Jenis bencana dengan risiko sedang antara lain <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banjir bandang</li> <li>• Cuaca ekstrim</li> <li>• Epidemii dan wabah penyakit (Virus Covid-19)</li> <li>• Gempa bumi</li> </ul> </li> <li>- Jenis bencana dengan risiko rendah antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebakaran hutan dan lahan</li> <li>• Kekeringan</li> </ul> </li> <li>- Luas wilayah bahaya bencana tinggi banjir sebesar 12,7 %;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerusakan lingkungan;</li> <li>- Kerugian harta benda dan korban jiwa;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;</li> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 - 2031;</li> <li>- Program Daerah Yu Darsi (Ayo Masyarakat Sadar Konservasi);</li> <li>- Program Daerah Nandur Wit untuk Anak Putu;</li> <li>- Penyusunan RPPLH Kabupaten Kebumen tahun 2021;</li> <li>- Respon terhadap</li> </ul>

NO	ISU STRATEGIS	DRIVING FORCE (PENDORONG)	PRESSURE (TEKANAN)	STATE (KONDISI)	IMPACT (DAMPAK)	RESPONSE (RESPON)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas wilayah bahaya bencana tinggi longsor sebesar 30,7 %;</li> <li>- Luas wilayah bahaya bencana tinggi kekeringan sebesar 5,17 %;</li> <li>- Luas wilayah bahaya bencana tinggi puting beliung sebesar 1,25 %;</li> <li>- Luas wilayah bahaya bencana tinggi gempa bumi sebesar 47,56 %;</li> <li>- Luas wilayah bahaya bencana tinggi tsunami sebesar 3,56 %;</li> <li>- Luas wilayah bahaya bencana tinggi kebakaran hutan dan lahan sebesar 21,08 %;</li> <li>- Luas wilayah bahaya bencana tinggi gelombang ekstrim dan abrasi sebesar 0,49 %;</li> </ul>		<p>setiap Pengaduan Masyarakat terkait Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan.</p>

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

### 3.2.3. Isu Prioritas RPPLH Kabupaten Kebumen

Analisis penentuan isu prioritas didalam RPPLH Kabupaten Kebumen disusun dalam rangka untuk menentukan permasalahan lingkungan yang menjadi prioritas untuk segera ditangani dalam kurun waktu hingga 30 tahun yang akan datang. Analisis yang dilakukan untuk memperoleh isu prioritas mengacu pada Pedoman Nirwasita Tantra yang di Tetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Isu strategis yang telah dihasilkan pada kegiatan FGD selanjutnya dianalisis dengan menilai skala prioritasnya kemudian dilakukan proses pengkalian dengan bobot pada masing-masing kriteria. Isu prioritas dilakukan melalui proses skoring yang dilakukan oleh seluruh stake holder yang terlibat didalam kegiatan FGD.

Tabel 3.7. Nilai Skala Prioritas Isu Strategis

Nilai Skala	Parameter
1	Tidak Prioritas
2	Kurang Prioritas
3	Cukup Prioritas
4	Prioritas
5	Sangat Prioritas

Sumber : Pedoman Nirwasita Tantra yang di Tetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Tabel 3.8. Pembobotan Isu Strategis Berdasarkan Kriteria Nirwasita Tantra

No.	Kriteria	Jumlah Bobot
1	Kerusakan Keanekaragaman Hayati	10
2	Kerusakan Sumberdaya Alam	15
3	Menjadi Perhatian Publik Luas dan Perlu Ditangani Segera (urgent)	25
4	Berdampak Signifikan terhadap Kehidupan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Kualitas Lingkungan Hidup	50
Total		100

Sumber : Pedoman Nirwasita Tantra yang di Tetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Hasil rekapitulasi penilaian skoring oleh stake holder didalam kegiatan FGD terhadap isu strategis untuk menghasilkan isu prioritas RPPLH Kabupaten Kebumen sebagaimana kriteria Nirwasita Tantra disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 3.9. Rekapitulasi Score Total Isu Prioritas untuk RPPLH  
Kabupaten Kebumen

No	Stake Holder	Hasil Rata-rata Skoring Setiap Isu Strategis			
		A	B	C	D
1	Siti Khalimah, SE., M.Si (Disnakerkum)	106,25	96,25	91,25	75
2	Ika Neni Kristanti (Universitas Putra Bangsa)	83,75	125	125	125
3	Dodi Yulianto	90	100	100	75
4	Dyah (Disperkim LH)	106,25	100	118,75	118,75
5	Retno Sundari (Dinas Kesehatan)	75	90	100	103,75
6	Syadza Salsabya Tamam (Bappeda)	93,75	110	81,25	93,75
7	Venny Yustin, ST (Disporawisata)	75	115	125	122,5
8	Sarwono	112,5	102,5	93,75	33,75
9	Suratman (Kecamatan Buayan)	125	125	125	125
10	Karyanto (DPMPSTP)	87,5	87,5	87,5	87,5
11	PDAM	125	100	75	93,75
12	Walto, SE (Kecamatan Karangsembung)	50	75	75	75
13	Sri Pambudi (Disperkim LH)	106,25	93,75	106,25	97,5
14	Siti DY (Disperkim LH)	120	116,25	122,5	120
15	Tri Atmoko (Kecamatan Gombang)	66,25	125	68,75	100
16	Saimun (Kecamatan Bonorowo)	122,5	121,25	116,25	108,75
17	Ahmad Sofwani (BPBD)	100	125	121,25	97,5
18	Kardi	125	100	125	93,75
19	Yuniasih (Ditlunkan)	100	100	106,25	87,5
20	Sri Hastuti, S.Sos (Kecamatan Rowokele)	93,75	75	87,5	75
21	Suroso (Kecamatan Mirit)	100	125	75	75
22	Fitri Hadi S (DPUPR)	75	75	75	75
23	Sugiyono (Kecamatan Petanahan)	93,75	100	100	87,5
24	Bambang (Kecamatan Alian)	93,75	100	106,25	75
25	Rahmat Aris P (Kecamatan Buluspesantren)	93,75	100	100	106,25
26	Harfiyadi (Tenaga Ahli)	75	118,75	100	93,75
27	Pudji Setyaningsih (Tenaga Ahli)	125	93,75	112,5	75
<b>Jumlah Score</b>		<b>2620,00</b>	<b>2795,00</b>	<b>2720,00</b>	<b>2496,25</b>

Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

Keterangan :

No	Isu Strategis
A	Alih Fungsi Lahan
B	Pengelolaan Sampah dan Limbah
C	Resiko Bencana
	Penurunan Kualitas dan
D	Kuantitas Air

Berdasarkan hasil analisis dari tabel skoring di atas, maka dapat dilihat bahwa yang menjadi isu prioritas yang akan dihadapi oleh Kabupaten Kebumen dalam RPPLH m kurun waktu 30 tahun yang akan datang adalah :

1. Prioritas 1 : Pengelolaan sampah dan limbah
2. Prioritas 2 : Risiko bencana
3. Prioritas 3 : Alih fungsi lahan
4. Prioritas 4 : Penurunan kualitas dan kuantitas air

### 3.3. TARGET PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Penentuan target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk 30 tahun yang akan datang ditentukan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diinginkan. IKLH menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan aksi nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen. Tujuan dari IKLH adalah untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan di Lingkungan Kabupaten Kebumen tentang kondisi lingkungan yang ada di Kabupaten Kebumen. Secara rinci, target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen terkait Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 30 tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10. Target RPPLH untuk 30 Tahun Terkait dengan IKLH

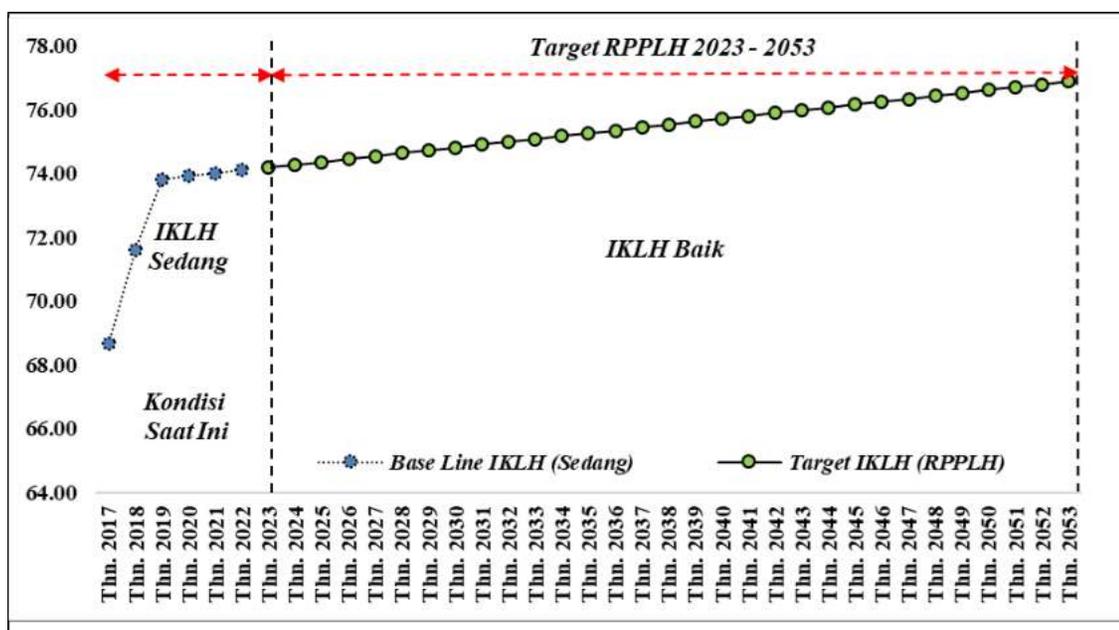
Tahun	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	IKLH	Keterangan
<b>2021</b>	<b>90.85</b>	<b>57.79</b>	<b>70.71</b>	<b>74.01</b>	<b>Baik</b>
2022	90.95	57.89	70.76	74.10	Baik
2023	91.05	57.99	70.81	74.19	Baik
2024	91.15	58.09	70.86	74.28	Baik
2025	91.25	58.19	70.91	74.36	Baik
2026	91.35	58.29	70.96	74.45	Baik
2027	91.45	58.39	71.01	74.54	Baik
2028	91.55	58.49	71.06	74.63	Baik
2029	91.65	58.59	71.11	74.72	Baik
2030	91.75	58.69	71.16	74.81	Baik
2031	91.85	58.79	71.21	74.90	Baik
2032	91.95	58.89	71.26	74.99	Baik
2033	92.05	58.99	71.31	75.08	Baik
2034	92.15	59.09	71.36	75.17	Baik

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Kualitas Udara (IKU)</b>	<b>Indeks Kualitas Air (IKA)</b>	<b>Indeks Kualitas Lahan (IKL)</b>	<b>IKLH</b>	<b>Keterangan</b>
2035	92.25	59.19	71.41	75.26	Baik
2036	92.35	59.29	71.46	75.35	Baik
2037	92.45	59.39	71.51	75.44	Baik
2038	92.55	59.49	71.56	75.53	Baik
2039	92.65	59.59	71.61	75.62	Baik
2040	92.75	59.69	71.66	75.71	Baik
2041	92.85	59.79	71.71	75.80	Baik
2042	92.95	59.89	71.76	75.89	Baik
2043	93.05	59.99	71.81	75.98	Baik
2044	93.15	60.09	71.86	76.07	Baik
2045	93.25	60.19	71.91	76.16	Baik
2046	93.35	60.29	71.96	76.25	Baik
2047	93.45	60.39	72.01	76.34	Baik
2048	93.55	60.49	72.06	76.43	Baik
2049	93.65	60.59	72.11	76.52	Baik
2050	93.75	60.69	72.16	76.61	Baik
2051	93.85	60.79	72.21	76.70	Baik
2052	93.95	60.89	72.26	76.79	Baik
2053	94.05	60.99	72.31	76.88	Baik

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

Didalam penentuan target RPPLH Kabupaten Kebumen yaitu nilai IKLH secara kuantitatif baseline ataupun data dasar yang digunakan adalah data dasar tahun 2021 dengan proyeksi kecendrungan IKLH selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Target IKLH didalam RPPLH untuk tahun 2021 hingga tahun 2053 target RPPLH Kabupaten Kebumen yang akan dicapai adalah IKLH dengan kondisi Baik.

Diharapkan dengan kondisi yang ada baik permasalahan lingkungan dan potensi yang ada didukung dengan respon dan pengelolaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, maka diharapkan target IKLH didalam RPPLH Kabupaten Kebumen tersebut diatas dapat tercapai melalui kebijakan, strategi implementasi dan rencana program dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Gambaran peningkatan target dari IKLH didalam RPPLH Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada grafik berikut ini



Gambar 3.1. Grafik Target Kuantitatif IQLH didalam RPPLH Kabupaten Kebumen

### 3.3.1. Target Capaian 30 Tahun

Target capaian jangka panjang yang akan dicapai melalui penerapan dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen untuk 30 tahun kedepan antara lain :

#### a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan di Kabupaten Kebumen perlu berada dalam koridor target pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup yang baik dan terjaga. Maksudnya adalah kondisi minimal yang perlu dicapai yaitu kuantitas dan kualitas lingkungan hidup berada pada kondisi stabil dan optimum dalam mendukung peri kehidupan masyarakat. Indeks kualitas lingkungan hidup dalam jangka panjang dapat berarti menjaga kualitas dan ketersediaan air, udara maupun tanah di Kabupaten Kebumen. Kondisi lingkungan hidup dikatakan layak apabila kualitas air di daerah khususnya area permukiman penduduk tidak melebihi ambang batas baku pencemaran; Kawasan ruang terbuka hijau dapat dipertahankan dan ditingkatkan luasannya; Perbaiki sistem tata kelola transportasi seperti pengaturan volume kendaraan di perkotaan dan sistem tata kelola kegiatan ekonomi utama seperti industri, usaha dan perdagangan baik di bidang pariwisata maupun non-pariwisata untuk menghindari terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah serta kawasan rentan dan bernilai penting tetap terjaga. Serta

berkurangnya kejadian bencana alam, penyakit, dan bencana lain yang disebabkan oleh rusaknya kondisi lingkungan. Penjagaan kualitas air dan udara menjadi bagian terpenting dari target IKLH jangka panjang karena sangat berpengaruh terhadap seluruh kondisi ekosistem di Kabupaten Kebumen.

#### **b. Penerapan dan Peningkatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Kabupaten Kebumen akan melakukan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup agar tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Fokus pembangunan selama ini masih menitikberatkan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Berdasarkan hal tersebut maka dalam jangka panjang, pembangunan di Kabupaten Kebumen harus diupayakan pada upaya pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup dari tahap perencanaan hingga implementasi. Target pelaksanaan khususnya integrated prinsip lingkungan berkelanjutan dalam perencanaan daerah mulai dari RTRW maupun RPJP dan RPJM. Secara politis RPJP harus memuat prinsip pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung lingkungan sedangkan dalam penyusunan dan implementasi RPJM sangat penting utamanya untuk meletakkan daya dukung lingkungan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah.

Guna mencapai kondisi lingkungan hidup yang ideal diperlukanlah perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang tidak hanya mengatur kondisi lingkungan hidup namun juga pengelolaan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Kondisi lingkungan hidup yang akan dicapai melalui penerapan dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen hingga 30 tahun yang akan datang, antara lain :

##### **1. Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen yang sejalan dan diselenggarakan berdasarkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.**

Selama ini pembangunan nasional di Indonesia khususnya di Kabupaten Kebumen masih menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur secara besar-besara. Pembangunan yang dijalankan belum mempertimbangkan

kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di suatu wilayah, selain kawasan lindung yang dilarang untuk dibangun, pada kawasan budidaya tidak ada pembatasan pembangunan sama sekali. Padahal hampir seluruh masyarakat bermukim di kawasan budidaya, sehingga membutuhkan keseimbangan kondisi jasa lingkungan.

Pembangunan infrastruktur secara besar-besaran tentunya tidak dapat dihentikan mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga *demand* terhadap pembangunan semakin tinggi, untuk mengharmonisasikan antara *demand* yang tinggi dengan kondisi lingkungan perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi agar kondisi lingkungan tidak semakin parah, salah satu caranya adalah pengembangan *green cities* atau kota hijau di wilayah-wilayah yang berjasa lingkungan tinggi dengan salah satu programnya adalah infrastruktur hijau. Selain penerapan program kota hijau, pengendalian tata ruang, terutama di perkotaan untuk menjaga kondisi daya dukung dan daya tampungnya perlu diintensifkan, dengan cara membatasi perubahan penggunaan lahan di kawasan jasa lingkungan tinggi dan memperbanyak RTH. Untuk menjalankan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang kita inginkan, maka pembagian dan perimbangan anggaran antara pembangunan infrastruktur dengan pemulihan dan pelestarian kondisi lingkungan hidup harus dapat lebih proporsional. Terkait hal ini, pada tahun 2023 diharapkan Kabupaten Kebumen telah memiliki Peraturan Daerah terkait RPPLH yang terverifikasi dan tersinkronisasi, dan diimplementasikan/diintegrasikan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen selama periode 30 tahun berikutnya.

**2. Kualitas dan fungsi lingkungan hidup berada pada kondisi yang optimum dalam mendukung kehidupan bermasyarakat yang sejahtera;**

Kondisi lingkungan hidup dikatakan layak dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat apabila : kondisi sungai-sungai tidak melebihi ambang batas baku pencemaran, kawasan hutan dapat dipertahankan dan ditingkatkan luasannya, perbaikan sistem tata

kelola perindustrian untuk menghindari terjadinya pencemaran air, udara dan tanah, serta kawasan-kawasan rentan dan bernilai penting tetap terjaga, serta berkurangnya kejadian bencana alam, penyakit, dan bencana lain yang disebabkan oleh rusaknya kondisi lingkungan.

Dalam 30 tahun ke depan diharapkan terjadi : 1) Peningkatan kualitas air sebesar 0,10 point per tahun atau sebesar 1 point tiap 10 tahun terutama pada sungai-sungai utama di Kabupaten Kebumen dari kondisi saat ini; 2) Peningkatan kualitas udara, di wilayah perkotaan Kabupaten Kebumen sebesar 0,1 point per tahun atau sebesar 1 point tiap 10 tahun dan menjaga penurunan kualitas udara dari kondisi saat ini; 3) Peningkatan luas Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung sebanyak 0,05 point per tahun atau sebesar 0,5 point tiap 10 tahun, dan 4) Berkurangnya laju perubahan lahan pertanian ke non pertanian hingga dibawah 2 % dalam 30 tahun serta bertambahnya lahan pertanian baru pada daerah-daerah dengan jasa lingkungan penyedia pangan tinggi.

**3. Kerja sama pengelolaan lingkungan hidup antar daerah dalam mewujudkan kelestarian lingkungan;**

Sebagai sebuah kesatuan ekoregion, kerjasama antar daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumberdaya alam, maupun kegiatan lain yang berbasis lahan merupakan sebuah keharusan. Hubungan sebab akibat dan pengaruh mempengaruhi dari perubahan pada suatu bentang lahan, dapat menimbulkan konflik kepentingan, baik horizontal maupun vertikal, yang menyebabkan inefisiensi pemanfaatan sumberdaya yang berujung pada rusaknya lingkungan hidup.

**4. Kepedulian dan kewaspadaan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menjaga kondisi dan kualitas lingkungan hidup harus menjadi gaya hidup/kebiasaan/budaya.**

Kearifan lokal masyarakat yang memperhatikan kelestarian dalam mengelola sumberdaya alam merupakan budaya yang selama ini mengakar dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Kebumen. Masuknya kepentingan ekonomi yang besar banyak menggerus

budaya ramah lingkungan ini pada beberapa kelompok masyarakat, sehingga pada beberapa dekade terakhir nilai-nilai kearifan lokal ini hampir tidak dipedulikan. Ke depan, budaya ini harus dimunculkan kembali, dibina dan dihargai sehingga menjadi gaya hidup generasi muda yang akan datang. Pendidikan, penyuluhan dan pelatihan dari mulai tingkat paling dasar pada pendidikan formal maupun non formal serta pengembangan organisasi kemasyarakatan, paguyuban, dan atau kelompok masyarakat peduli lingkungan lainnya harus menjadi prioritas dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen.

Meningkatnya keterlibatan Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang antara lain ditandai dengan meningkatnya anggaran lingkungan hidup didalam APBD serta produk-produk industri bersertifikat ramah lingkungan, serta meningkatnya kelompok masyarakat peduli lingkungan sampai pada tingkat RT/RW.

### **3.3.2. Target Pencapaian 10 Tahunan**

Selain menetapkan target 30 tahun, RPPLH Kabupaten Kebumen juga menetapkan target skenario 10 tahunan dalam rangka penyelesaian isu strategis dan isu prioritas di dalam RPPLH Kabupaten Kebumen. Target tersebut ditetapkan sebagai acuan sekaligus pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen. Target capaian 10 tahunan terkait dengan penyelesaian isu prioritas di tetapkan sesuai dengan Fokus Kinerja pada arahan rencana kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Kebumen hingga 30 tahun yang akan datang.

Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam mencapai target 10 tahunan terkait penyelesaian isu prioritas di dalam RPPLH Kabupaten Kebumen antara lain :

- 1) Kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan isu prioritas yang ada di Kabupaten Kebumen, seperti :

- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kebumen Tahun 2019 – 2039;
  - Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - Hasil pemantauan kualitas udara, kualitas air dan kualitas lahan yang tertuang dalam realisasi capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); dan
  - Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH).
- 2) Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan implementasi program RPPLH di Kabupaten Kebumen.

Secara rinci persentase target yang diharapkan dalam menyelesaikan setiap isu prioritas dalam RPPLH Kabupaten Kebumen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11. Target Pencapaian RPPLH 10 Tahunan terkait Penyelesaian Isu Prioritas

No	Tahun Pelaksanaan	Isu Prioritas	Persentase Penanganan (%)		
			10 Tahun I	10 Tahun II	10 Tahun III
1	2023 - 2033	Pengelolaan sampah dan limbah	35	35	30
		Risiko bencana	25	25	50
		Alih fungsi lahan	20	20	60
		Penurunan kualitas dan kuantitas air	15	15	70
2	2034 - 2044	Pengelolaan sampah dan limbah	35	35	30

No	Tahun Pelaksanaan	Isu Prioritas	Persentase Penanganan (%)		
			10 Tahun I	10 Tahun II	10 Tahun III
		Risiko bencana	25	25	50
		Alih fungsi lahan	20	20	60
		Penurunan kualitas dan kuantitas air	15	15	70
3	2045 - 2053	Pengelolaan sampah dan limbah	35	35	30
		Risiko bencana	25	25	50
		Alih fungsi lahan	20	20	60
		Penurunan kualitas dan kuantitas air	15	15	70

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

Tabel 3.11. di atas memberikan gambaran mengenai persentase penyelesaian isu prioritas yang ditargetkan setiap 10 tahunan. Masing-masing isu prioritas dalam RPPLH Kabupaten Kebumen diharapkan dapat secara bertahap diselesaikan 100 % selama 30 tahun implementasi RPPLH Kabupaten Kebumen. Dari 100 % penyelesaian isu prioritas selama 30 tahun tersebut, selanjutnya dibagi menjadi target 10 tahunan dimana persentase target setiap 10 tahunan terhadap keempat isu prioritas mempertimbangkan urutan tingkat prioritas isu yang akan diselesaikan jadi, persentase isu prioritas pertama lebih besar dari persentase isu prioritas kedua, dan seterusnya isu prioritas ketiga lebih besar dari isu prioritas keempat (Isu prioritas 1 > isu prioritas 2 > isu prioritas 3 > isu prioritas 4). Selain mempertimbangkan tingkat prioritas isu yang akan diselesaikan, dalam target 10 tahunan juga memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang ada didukung dengan ketersediaan anggaran yang digunakan.

Untuk mengukur keberhasilan dari penanganan isu prioritas RPPLH Kabupaten Kebumen, maka diperlukan indikator secara kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarannya. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan target dari penyelesaian isu prioritas dalam RPPLH Kabupaten Kebumen antara lain :

Tabel 3.12. Indikator Capaian dari Target Penyelesaian Isu Prioritas RPPLH Kabupaten Kebumen

<b>No</b>	<b>Isu Prioritas</b>	<b>Indikator Capaian</b>
1	Pengelolaan sampah dan limbah	1) Persentase pengurangan sampah 2) Persentase penanganan sampah 3) Persentase timbulan sampah yang ditangani 4) Indeks Kualitas Udara (IKU) 5) Indikasi jasa lingkungan pengaturan pengolahan, penguraian limbah
2	Risiko bencana	1) Indeks Risiko Bencana (IRB) 2) Indikasi jasa lingkungan pengaturan perlindungan bencana 3) Indikasi jasa lingkungan pengaturan iklim
3	Alih fungsi lahan	1) Indeks Kualitas Lahan (IKL) 2) Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis 3) Status D3TLH Jasa Penyedia Pangan 4) Indikasi D3TLH berbasis jasa lingkungan
4	Penurunan kualitas dan kuantitas air	1) Indeks Kualitas Air (IKA) 2) Status D3TLH Jasa Lingkungan Penyedia Air

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

Target Pencapaian RPPLH 10 Tahunan terkait Penyelesaian Isu Prioritas sebagaimana tabel 3.11 diatas, apabila dikaitkan dengan target terhadap perbaikan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk 30 tahun kedepan maka terdapat beberapa jenis jasa lingkungan yang diharapkan kondisinya juga mengalami perbaikan kualitas. Adapun target perbaikan terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen sejalan dengan isu prioritas yang akan ditangani disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13. Target Perbaikan Kualitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Berdasarkan Isu Prioritas

No.	Isu Prioritas	Target Perbaikan D3TLH
1	Pengelolaan sampah dan limbah	Jasa pengaturan pengolahan, penguraian limbah
2	Risiko bencana dan perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa pengaturan perlindungan bencana</li> <li>• Jasa pengaturan iklim</li> <li>• Jasa pengaturan kualitas udara</li> </ul>
3	Alih fungsi lahan	Seluruh jasa lingkungan (jasa penyedia, jasa pengaturan, fungsi budaya dan jasa pendukung)
4	Menurunnya Kualitas dan Kuantitas Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa lingkungan penyedia pangan</li> <li>• Jasa lingkungan pengaturan tata aliran air</li> <li>• Jasa lingkungan pengaturan pemurnian air</li> </ul>

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

Pencapaian target yang dijabarkan secara kuantitatif ditetapkan berbasis keberadaan data yang tersedia. Dalam dua indikator keberhasilan RPPLH, dapat diperoleh data yang memiliki kecenderungan kuantitatif dan sifatnya kualitatif. Untuk menyusun target jangka menengah didalam RPPLH Kabupaten Kebumen yaitu sebagai berikut:

## A. Target Kualitatif RPPLH Kabupaten Kebumen

Tabel 3.14. Target Kualitatif Lima Tahunan RPPLH Kabupaten Kebumen

No.	Kriteria	2023-2037			2038-2053		
		1	2	3	1	2	3
1.	Indeks Kualitas Air	Peningkatan indeks kualitas air, peningkatan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan disertai penyuluhan dan penegakan hukum.			Mempertahankan indeks kualitas air, peningkatan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan disertai penyuluhan dan penegakan hukum.		
2.	Indeks Kualitas Udara	Peningkatan indeks kualitas udara, peningkatan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan disertai penyuluhan dan penegakan hukum.			Mempertahankan indeks kualitas udara, peningkatan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan disertai penyuluhan dan penegakan hukum.		
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Peningkatan luas tutupan lahan hutan			Mempertahankan luas tutupan lahan hutan		
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya IKLH dengan kriteria : Baik pada tahun 2023 hingga tahun 2037			Mempertahankan dan meningkatkan IKLH dengan kriteria Baik hingga tahun 2053		

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

## B. Target Kuantitatif RPPLH Kabupaten Kebumen

Tabel 3.15. Target Kuantitatif Sepuluh Tahunan RPPLH Kabupaten Kebumen

Kriteria	Variabel	Target										
		Baseline (2021)	2021 s/d 2025					2027	2032	2037	2042	2047
			2022	2023	2024	2025	2026	s/d 2031	s/d 2036	s/d 2041	s/d 2046	s/d 2053
Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai Indeks Kualitas Air	57.79	57.89	57.99	58.09	58.19	58.29	58.39 s/d 58.79	58.89 s/d 59.29	59.39 s/d 59.79	59.89 s/d 60.29	60.39 s/d 60.99
	Jumlah pemantauan dan pengujian kualitas air limbah dan air permukaan	26	26	27	27	28	28	28	28	28	28	28
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai Indeks Kualitas Udara	90.85	90.95	91.05	91.15	91.25	91.35	91.45 s/d 91.85	91.95 s/d 92.35	92.45 s/d 92.85	92.95 s/d 93.35	93.45 s/d 94.05
	Jumlah pemantauan dan pengujian kualitas udara	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	6
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Nilai Indeks Kualitas Lahan	70.71	70.76	70.81	70.86	70.91	70.96	71.01 s/d 71.21	71.26 s/d 71.46	71.51 s/d 71.71	71.76 s/d 71.96	72.01 s/d 72.31

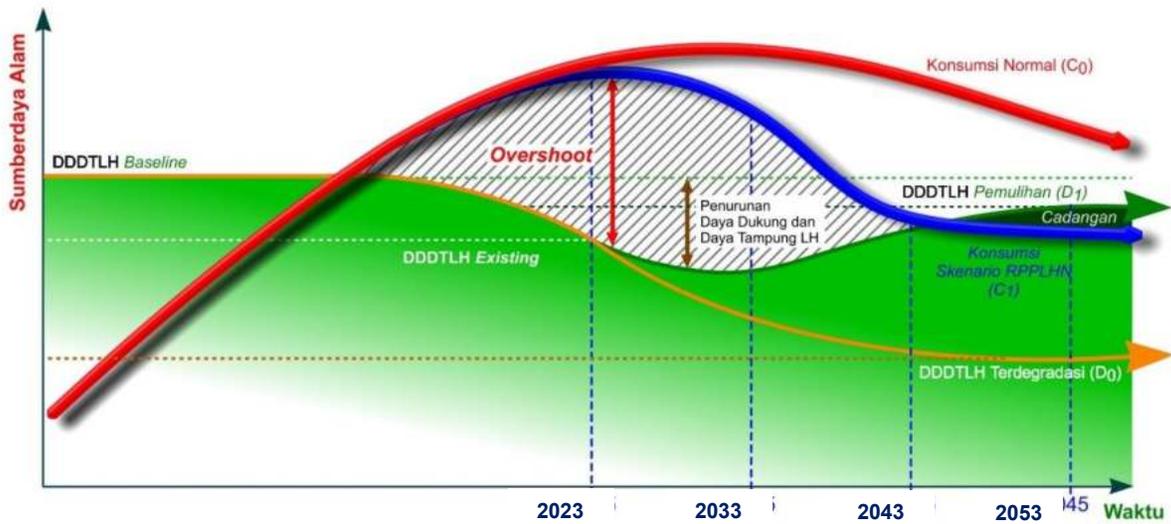
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas lingkungan Hidup	74.01	74.10	74.19	74.28	74.36	74.45	74.54 s/d 74.90	74.99 s/d 75.35	75.44 s/d 75.80	75.89 s/d 76.25	76.34 s/d 76.88
----------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

**BAB IV**  
**ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN**  
**LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEBUMEN**

Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Kebumen selama 30 tahun kedepan, diskenariokan sebagai penjabaran dari tindakan menyeluruh terkoordinasi oleh seluruh elemen pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat, sebagai respon terhadap kondisi lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Kebumen yang diperkirakan akan dihadapi akibat proses pembangunan. Dalam beberapa tahun ke depan, penggunaan sumberdaya alam sebagai modal pembangunan masih akan terjadi. Percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan baru dan eksploitasi energi yang bersumber dari fosil, yang kemudian diikuti dengan meluasnya perkotaan, meningkatnya kepadatan penduduk, dan menurunnya kualitas air dan udara, tetap menjadi sumber pendorong utama penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen,

Skema skenario kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Kebumen mencakup strategi untuk menahan laju penurunan daya dukung dan daya tampung, memperbaiki kualitas jasa dari lingkungan, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam segala aspek pembangunan, meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim, sekaligus mendorong efisiensi konsumsi dan pemanfaatan sumberdaya alam. Dengan pola dan penekanan perencanaan yang tepat dan memadai, diharapkan akan tercapai keseimbangan baru dari konsumsi jasa dan sumberdaya dengan daya dukung lingkungannya (Gambar 4.1).



Gambar 4.1 Gambaran Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional

#### 4.1 ARAHAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PULAU JAWA

Di dalam menyusun arahan kebijakan strategi dan indikasi program didalam dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, maka perlu melihat arahan kebijakan RPPLH secara nasional yang diturunkan untuk Pulau Jawa dan terkait dengan isu strategis, isu prioritas dan kondisi yang ada di Kabupaten Kebumen. Arahan tersebut mencakup beberapa hal yaitu :

1. Membatasi pengembangan perumahan dan infrastruktur, terutama pada wilayah-wilayah lumbung pangan dan pesisir;
2. Meningkatkan dan memulihkan kualitas air permukaan;
3. Mengembangkan infrastruktur hijau;
4. Menjaga dan memulihkan Daerah Aliran Sungai (DAS), khususnya DAS yang aliran sungainya menjadi sumber air minum dan melintasi wilayah perkotaan;
5. Memulihkan daerah-daerah yang terkontaminasi B3 dan limbah B3 dan
6. Memulihkan wilayah-wilayah pesisir yang mengalami kerusakan.

## 4.2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEBUMEN

### 4.2.1. Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya Alam

Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan nasional di masa mendatang. Terciptanya keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya keberlanjutan pembangunan berbasis sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan

Sumber daya alam (SDA) merupakan rahmat karunia Tuhan YME yang harus dikelola secara baik dan benar agar dapat memberikan manfaat kepada manusia secara maksimal dan lestari. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengembangkan dan memanfaatkan SDA yang ada. Dalam pemanfaatan SDA melalui pembangunan senantiasa terjadi perubahan ekosistem yang pada akhirnya memberi dampak positif (manfaat) ataupun dampak negatif (resiko) terhadap manusia kembali. Semakin besar manfaat yang akan diupayakan, semakin besar pula resiko yang ada ataupun muncul resiko baru (Soemarwoto, 1985).

Pengelolaan SDA (*natural resource management*) dimaksud untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang tinggi, aman dan manusiawi terjamin. Hanya dalam kondisi kualitas lingkungan yang tinggi, manusia lebih banyak memperoleh manfaat dari pada resiko lingkungan. Secara lebih spesifik pengertian pengelolaan SDA meliputi dua hal sebagai berikut :

- 1) Usaha manusia dalam mengubah ekosistem SDA agar dapat diperoleh manfaat yang maksimal (*maximum yield*) dan berkesinambungan (*sustained yield*)
- 2) Proses pengalokasian SDA dalam ruang dan waktu untuk memenuhi kebutuhan manusia

Tujuan dari rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam adalah :

1. Menjaga keberlanjutan ketersediaan dan penggunaan sumber daya alam
2. Mencegah penyusutan/penurunan jumlah dan mutu cadangan modal sumber daya alam
3. Memastikan pemanfaatan sumber daya alam akan meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah harmonisasi rencana pembangunan di Kabupaten Kebumen melalui pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Tabel 4.1. Kebijakan dan Strategi Implementasi  
Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya Alam

<b>KEBIJAKAN</b>	<b>STRATEGI IMPLEMENTASI</b>	<b>KETERKAITAN ISU STRATEGIS RPPLH</b>
Mengharmonisasikan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan melalui Keputusan Kabupaten D3TLH Surat Bupati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sampah dan limbah</li> <li>• Risiko bencana</li> <li>• Alih fungsi lahan</li> <li>• Penurunan kualitas air</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi dan membatasi pemanfaatan wilayah yang memiliki Daya Dukung sangat tinggi dan tinggi</li> <li>• Pelestarian dan pencadangan SDA di dalam kawasan Geopark Karangsembung dan Karangbolong</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencadangkan</li> </ul>	

	kawasan yang secara kumulatif memiliki Daya Dukung Lingkungan sedang sebagai kawasan penyangga kehidupan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengarahkan pembangunan Kabupaten Kebumen, terutama pada daerah-daerah dengan Daya Dukung Sedang sampai Sangat Rendah</li> </ul>	

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

#### **4.2.2. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan / atau Fungsi Lingkungan Hidup**

Kegiatan dari rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup adalah berupaya untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan serta melakukan pengelolaan kawasan yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik dan tetap terjaga

Dalam upaya pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup diperlukan adanya kerja sama antara semua pihak baik oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat umum yang bersifat kolektif atau secara sendiri-sendiri dengan melibatkan ketiga komponen tersebut. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu usaha terencana untuk melibatkan masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dalam proses pembuatan keputusan (*decision making*) dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat dapat mencegah atau menyelesaikan konflik melalui komunikasi dua arah yang terus menerus, dan menguntungkan berbagai pihak yang terli bat.

Mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup banyak memberikan keuntungan, di antaranya penelaahan kebutuhan dan masalah

lingkungan yang lebih akurat, meningkatkan kredibilitas perencanaan lingkungan hidup, teridentifikasinya solusi-solusi alternatif yang dapat diterima secara sosial, dan menciptakan rasa memiliki atas rencana pengelolaan yang ditetapkan.

Keterlibatan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat akan lebih membantu dalam pengembangan kemitraan. Perguruan Tinggi berperan membantu upaya memahami permasalahan, pemecahan masalah, dan perumusan kemitraan yang dapat dikembangkan; sedangkan LSM membantu pelaksanaan kemitraan dengan menjadi fasilitator atau pendamping. Hal yang penting adalah keterlibatan masyarakat sejak awal secara utuh mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen. Tujuan perencanaan pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup Antara Lain :

1. Mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup
2. Mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup
3. Menjaga dan meningkatkan kinerja layanan ekosistem

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah mempertahankan kualitas lingkungan hidup dalam rangka memelihara dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka kebijakan dan strategi yang tepat didalam Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan hidup disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2. Kebijakan dan Strategi Implementasi Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan hidup

<b>NO</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>STRATEGI IMPLEMENTASI</b>	<b>KETERKAITAN ISU STRATEGIS RPPLH</b>
1	Memberikan perlindungan dan memulihkan fungsi kawasan-kawasan dengan jasa lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membatasi pembangunan infrastruktur pada lahan dengan jasa penyimpan air tinggi; dan</li> <li>• Meninjau kembali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alih fungsi lahan</li> <li>• Risiko bencana</li> </ul>

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KETERKAITAN ISU STRATEGIS RPPLH
	pengaturan dan penyimpanan air tinggi	penggunaan ruang pada lahan dengan jasa penyimpanan air tinggi	
2	Pemulihan DAS prioritas lintas Kabupaten dan ekosistemnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi Perencanaan Pengelolaan DAS yang integratif, lintas sektor, dan lintas administrasi</li> <li>• Merevitalisasi dan menormalisasi sungai-sungai vital yang berada, melintasi, atau bermuara di perkotaan;</li> <li>• Merehabilitasi kawasan hulu Daerah Aliran Sungai; dan</li> <li>• Mengendalikan pencemaran sungai melalui pengetatan ijin lokasi dan pengawasan pengelolaan limbah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan kualitas air</li> <li>• Alih fungsi lahan</li> <li>• Risiko bencana</li> </ul>
3	Pemulihan kawasan tercemar limbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memulihkan kawasan tercemar limbah dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan;</li> <li>• Merehabilitasi bekas kawasan tercemar limbah;</li> <li>• Mengembangkan teknologi untuk mempercepat pemulihan kawasan tercemar limbah</li> <li>• Pemetaan dan Pemulihan kawasan tercemar limbah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sampah dan limbah</li> <li>• Penurunan kualitas air</li> </ul>
4	Perlindungan dan pemeliharaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperketat mekanisme alih fungsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alih fungsi lahan</li> </ul>

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KETERKAITAN ISU STRATEGIS RPPLH
	yang memiliki nilai jasa lingkungan penyedia pangan tinggi	<p>lahan pertanian menjadi non pertanian;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi penggunaan lahan pertanian produktif untuk permukiman dan kawasan terbangun lainnya; dan</li> <li>• Menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur strategis yang melewati lahan-lahan pertanian produktif</li> </ul>	
5	Penataan lingkungan kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi, pendataan dan pemetaan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Kebumen</li> <li>• Perbaiki lingkungan di kawasan permukiman perkotaan</li> <li>• Memberdayakan masyarakat baik diperkotaan maupun diperdesaan dalam rangka pemanfaatan SDA yang berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sampah dan limbah</li> <li>• Penurunan kualitas air</li> </ul>
6	Perlindungan daerah pesisir dari abrasi dan intrusi air laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membatasi penggunaan lahan pesisir untuk kawasan pemukiman, perkantoran, dan atau industri</li> <li>• Menerapkan konsep wisata ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur wisata di kawasan pesisir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko bencana</li> <li>• Alih fungsi lahan</li> <li>• Penurunan kualitas air</li> </ul>

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KETERKAITAN ISU STRATEGIS RPPLH
7	Rehabilitasi ekosistem mangrove sebagai pelindung daratan dari abrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memutakhirkan data dan informasi tutupan mangrove</li> <li>• Mengembangkan ekowisata untuk mendukung eksistensi kawasan mangrove</li> <li>• Rehabilitasi ekosistem mangrove di daerah rawan abrasi</li> <li>• Meningkatkan seluruh hutan mangrove tersisa dan mangrove yang dipulihkan sebagai kawasan lindung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko bencana</li> <li>• Alih fungsi lahan</li> </ul>
8	<p><b>Pengelolaan Persampahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> <li>• Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan/penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> <li>• Penguatan koordinasi dan kerja sama antar Pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah, bermitra dengan Badan Usaha dalam Pengelolaan Sampah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>• Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah kota dalam penyediaan anggaran pengurangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sampah dan limbah</li> <li>• Risiko bencana</li> <li>• Penurunan kualitas air</li> </ul>

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KETERKAITAN ISU STRATEGIS RPPLH
		<p>dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> <li>• Pembentukan sistem informasi persampahan</li> <li>• Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi</li> <li>• Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> <li>• Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul>	
9	Perlindungan dan Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membatasi pembangunan di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alih Fungsi Lahan</li> <li>• Risiko Bencana</li> </ul>

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KETERKAITAN ISU STRATEGIS RPPLH
	Lingkungan Hidup Kawasan Geopark Karangsambung Karangbolong	Geopark Karangsambung dan Karangbolong terutama wilayah yang didalamnya memiliki kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tinggi dan sangat tinggi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan dan pengelolaan didalam kawasan Geopark Karangsambung Karangbolong berdasarkan karakteristik ekoregionnya</li> </ul>	

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

#### 4.2.3. Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA

Arahan pengendalian adalah upaya melaksanakan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan karena kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan pembangunan melalui mekanisme penerapan instrument KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Amdal/UKL – UPL, perijinan, instrument ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undang berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. Pengendalian dan pemulihan dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, atau pelaku usaha sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab nya masing-masing.

Arahan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan sumber daya alam difokuskan pada aspek perijinan, penertiban secara hukum, pemantauan secara berkala serta pemberdayaan masyarakat untuk ikut menjaga keberlangsungan lingkungan hidup.

Kegiatan rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat, perairan tawar dan laut, maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Tujuan perencanaan pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian sumber daya alam adalah :

1. Memastikan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kriteria pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam
2. Mendorong pelaksanaan tindakan-tindakan efisiensi, diversifikasi, dan peningkatan nilai tambah pemanfaatan sumber daya alam yang diikuti upaya penyempurnaan terus menerus.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam rangka pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan lingkungan hidup.

Tabel 4.3. Kebijakan dan Strategi Implementasi

Rencana Pengendalian, Pemantauan Serta Pendayagunaan Pelestariaan SDA

<b>NO</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>STRATEGI IMPLEMENTASI</b>	<b>KETERKAITAN ISU STRATEGIS RPPLH</b>
1	Penguatan sistem pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun sistem dan infrastruktur pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup</li> <li>• Mengembangkan metode pengukuran kualitas lingkungan hidup yang komprehensif, terstandar dan terpercaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan kualitas air</li> <li>• Pengelolaan sampah dan limbah</li> </ul>
2	Penguatan sistem penganggaran lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan alokasi dan distribusi penganggaran pengelolaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sampah dan limbah</li> <li>• Risiko bencana</li> <li>• Alih fungsi lahan</li> </ul>

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KETERKAITAN ISU STRATEGIS RPPLH
		<p>Lingkungan Hidup secara bertahap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan koordinasi, transparansi, dan efisiensi pengelolaan dana-dana lingkungan hidup non APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan kualitas air</li> </ul>
3	<p>Penguatan peraturan dan sistem perijinan lingkungan hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki aturan-aturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berpotensi saling melemahkan; dan</li> <li>• Mengendalikan dan mengawasi penerapan aturan secara konsisten di seluruh jenjang dan tahapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sampah dan limbah</li> <li>• Risiko bencana</li> <li>• Alih fungsi lahan</li> <li>• Penurunan kualitas air</li> </ul>
4	<p>Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk dan membina komunitas pecinta lingkungan;</li> <li>• mengembangkan sistem "penghargaan" atas peran serta masyarakat dalam perlindungan lingkungan;</li> <li>• Mengembangkan pola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal; dan</li> <li>• Meningkatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sampah dan limbah</li> <li>• Risiko bencana</li> <li>• Alih fungsi lahan</li> <li>• Penurunan kualitas air</li> </ul>

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KETERKAITAN ISU STRATEGIS RPPLH
		penyebaran luasan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	
5	Penerapan instrumen insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempercepat penetapan peraturan tentang instrumen ekonomi Lingkungan Hidup dan seluruh ketentuan turunannya;</li> <li>• Menginisiasi penerapan instrumen ekonomi lingkungan dalam beberapa kegiatan berdampak besar, seperti pencemaran air dan udara, limbah, sampah dan banjir/genangan; dan</li> <li>• Menerapkan instrumen ekonomi dalam proses kerjasama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antar daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sampah dan limbah</li> <li>• Risiko bencana</li> <li>• Alih fungsi lahan</li> <li>• Penurunan kualitas air</li> </ul>
6	Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinkronisasi pola ruang RTRW dengan Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH); dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko bencana</li> <li>• Alih fungsi lahan</li> </ul>

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KETERKAITAN ISU STRATEGIS RPPLH
	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang pada zona-zona rentan penurunan kualitas lingkungan hidup</li> </ul>	
7	Mengembangkan perangkat pengawasan sumber dan bahan pencemar lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat kualitas SDM pengawas lapangan pencemaran lingkungan;</li> <li>• Memperbaharui data dan informasi produksi, distribusi, dan pemanfaatan dan penggunaan bahan-bahan pencemar lingkungan hidup; dan</li> <li>• Meningkatkan pengawasan, mengendalikan, dan menindak kepatuhan penerapan sistem pengamanan penanganan bahan pencemar lingkungan hidup.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sampah dan limbah</li> <li>• Penurunan kualitas air</li> </ul>
8	Koordinasi antar pemerintah daerah dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan koordinasi antar daerah didalam perencanaan dan pengelolaan Lingkungan Hidup secara berkala</li> <li>• Koordinasi penerapan instrumen ekonomi lingkungan antar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sampah dan limbah</li> <li>• Risiko bencana</li> <li>• Alih fungsi lahan</li> <li>• Penurunan kualitas air</li> </ul>

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KETERKAITAN ISU STRATEGIS RPPLH
		daerah	
9	Menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dokumen RPPMU</li> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Kebumen terutama pada kawasan perkantoran, industri, permukiman dan transportasi sebagai upaya untuk menyerap karbondioksida (CO<sub>2</sub>), menghasilkan oksigen, menurunkan suhu dan memberikan suasana sejuk serta menjadi area resapan air</li> <li>• Pemantauan aktivitas kegiatan industri yang memberikan dampak pada kualitas udara seperti pemasangan alat pengendali emisi, meningkatkan penggunaan energi bersih untuk aktivitas industri, penerapan konversi bahan bakar ke gas serta mendorong konversi energi baru terbarukan</li> <li>• Pengelolaan kualitas udara melalui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alih fungsi lahan, dalam upaya meningkatkan mutu kualitas udara ambien dalam</li> </ul>

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KETERKAITAN ISU STRATEGIS RPPLH
		<p>Penerapan Transportasi Berkelanjutan seperti meminimalisasi penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum, uji emisi kendaraan bermotor secara rutin serta pemantauan kualitas bahan bakar di setiap SPBU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kesadaran publik untuk selalu memperhatikan kualitas udara yang bersih dan sehat</li> </ul>	
10	Menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dokumen RPPMA</li> <li>• Penguatan pemantauan dan pengendalian pencemaran air Sungai</li> <li>• Inventarisasi sumber jasa lingkungan penyedia air secara berkala</li> <li>• Menyusun mekanisme dan sistem imbal jasa lingkungan hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air</li> </ul>

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KETERKAITAN ISU STRATEGIS RPPLH
		khusus penyedia air • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kesadaran publik untuk selalu memperhatikan kualitas air yang bersih dan sehat	
11	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Geopark Karangsambung Karangbolong	Pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup terutama wilayah-wilayah di dalam Geopark Karangsambung Karang Bolong yang memiliki potensi pencemaran lingkungan yang tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air</li> <li>• Alih fungsi lahan</li> <li>• Risiko bencana</li> <li>• Persampahan dan limbah</li> </ul>

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

#### 4.2.4. Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim

Mitigasi didefinisikan sebagai upaya yang ditujukan untuk meminimalisasi dan mengurangi dampak dari bencana baik bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Mitigasi merupakan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen dalam rangka adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yaitu :

- ✓ Perubahan iklim mikro di suatu lokasi dikaitkan dengan keberadaan manusia (permukiman) di sekitar hutan, akan berpengaruh terhadap perasaan nyaman dan tidak nyaman bagi penghuninya. Masyarakat, sebagai tingkat kenyamanan sebenarnya berhubungan dengan kondisi nyata iklim mikro pada kurun waktu tertentu. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat

jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Efek gas rumah kaca merupakan akumulasi gas rumah kaca hasil emisi yang memantulkan panas/energi di atmosfer bumi dengan pantulan tersebut, sehingga bumi mengalami peningkatan temperatur. Pemanasan global dapat memberikan dampak terjadinya perubahan iklim global yaitu pada proses penguapan, pembentukan awan, pola hujan dan kecepatan angin.

- ✓ Perubahan fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian, pemukiman, atau perkebunan, telah menyebabkan adanya perubahan kondisi iklim mikro, yang lebih mengarah kepada kondisi kurang nyaman. Perubahan-perubahan yang telah terjadi, juga nampak jelas ketika melakukan survei lapangan dengan membandingkan tutupan bervegetasi hutan dengan tutupan vegetasi bukan hutan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan misalnya dengan program penghijauan dan reboisasi, peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), penanaman tanaman buah-buahan di pekarangan rumah penduduk, dan sebagainya. Perubahan iklim mikro yang dipicu oleh kegiatan konversi hutan, juga dapat berdampak terhadap karakteristik aliran sungai dan pembentukan lahan kritis.
- ✓ Adanya perubahan fungsi hidrologi, sehingga dapat mengancam keseimbangan dinamik sumberdaya lahan dan lingkungan. Terbukanya penutupan lahan akibat pembukaan hutan memberikan konsekuensi terhadap peningkatan erosi dan aliran permukaan dalam sistem lahan dan daerah aliran sungai (DAS).
- ✓ Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sangat berbahaya bila terkontaminasi dengan lingkungan, oleh sebab itu perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kebumen diwajibkan untuk mengelola Limbah B3 nya dengan baik dan benar.
- ✓ Pengelolaan sampah skala rumah tangga perlu diterapkan dengan melakukan kegiatan *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R) adalah kegiatan memperlakukan sampah dengan cara, menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang.

Tujuan Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim adalah tersusunnya rencana pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan (*resiliensi*) tinggi terhadap dampak perubahan iklim dan mengurangi penyebab perubahan iklim (Gas Rumah Kaca). Adapun

sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan ketahanan dan kesiapan Kabupaten Kebumen terhadap perubahan iklim.

Tabel 4.4. Kebijakan dan Strategi Implementasi Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KETERKAITAN ISU STRATEGIS RPPLH
1	Meningkatkan efisiensi pemanfaatan air dan mengembangkan infrastruktur sistem penampung dan distribusi air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan distribusi infrastruktur jaringan air bersih, air minum dan irigasi.</li> <li>• Membangun, meningkatkan, dan atau memperbaiki infrastruktur penampung dan pengendali air di daerah rawan kelangkaan air; dan</li> <li>• Meningkatkan dan atau memperbaiki infrastruktur distribusi air untuk keperluan industri, rumah tangga, dan pertanian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko bencana</li> <li>• Alih fungsi lahan</li> </ul>
2	Mengendalikan tata ruang kawasan perkotaan secara komprehensif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan minimal 30%;</li> <li>• Perbaiki infrastruktur yang berpengaruh terhadap berkurangnya pengendalian atas kelancaran aliran air permukaan;</li> <li>• Mengembangkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sampah dan limbah</li> <li>• Risiko bencana</li> <li>• Alih fungsi lahan</li> <li>• Penurunan kualitas air</li> </ul>

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KETERKAITAN ISU STRATEGIS RPPLH
		<p>sistem pengelolaan sampah dan limbah dalam skala komunal dan rumah tangga; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membatasi kawasan jasa perhotelan dan industri di Kabupaten Kebumen</li> </ul>	
3	<p>Mengembangkan sistem transportasi masal yang ramah lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan dan mengembangkan sistem transportasi masal yang hemat energi dan ramah lingkungan;</li> <li>• Menerapkan bahan bakar ramah lingkungan dalam moda transportasi umum; dan</li> <li>• Penerapan insentif pajak moda transportasi umum, moda transportasi ramah energi dan ramah lingkungan serta penerapan disinsentif pajak untuk kendaraan bermotor pribadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko bencana</li> </ul>
4	<p>Pemanfaatan energi baru terbarukan</p>	<p>Mengembangkan sumber energi baru terbarukan</p>	-
5	<p>Mengembangkan <i>green cities</i> dan kota tangguh</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun Master Plan Kota Hijau yang memuat target</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko bencana</li> <li>• Alih fungsi lahan</li> </ul>

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KETERKAITAN ISU STRATEGIS RPPLH
	<p>untuk wilayah yang rentan terhadap bencana</p>	<p>pencapaian 8 atribut kota hijau (<i>green planning &amp; design, green open space, green waste, green transportation, green energy, green water, green building, and green community</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan alokasi lahan peruntukan ruang terbuka hijau;</li> <li>• Merevitalisasi setiap ruang terbuka yang ada untuk dijadikan ruang terbuka hijau public (<i>greening</i>) baik pada lahan swasta maupun pemerintah;</li> <li>• Mengembangkan infrastruktur hijau berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan</li> <li>• Meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya <i>green cities</i> dengan membentuk forum komunitas Kota Hijau</li> </ul>	
6	<p>Meningkatkan diversifikasi pangan dalam rangka mendukung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan sumber pangan lokal non beras sebagai pangan pokok; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko bencana</li> <li>• Alih fungsi lahan</li> </ul>

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KETERKAITAN ISU STRATEGIS RPPLH
	ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan dan meningkatkan promosi penggunaan bahan pangan lokal non beras sebagai bahan substitusi produk makanan.</li> </ul>	
7	Pengurangan risiko bencana : a) Penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalinkan partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal</li> <li>• Mengintegrasikan Kebijakan pengurangan risiko bencana dan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim</li> <li>• Menyediakan cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pascabencana</li> <li>• Menyediakan prosedur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko bencana</li> </ul>

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KETERKAITAN ISU STRATEGIS RPPLH
		yang relevan untuk melakukan tinjauan pascabencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat	
	b) Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan sistem yang siap untuk memantau, mengarsipkan dan menyebarkan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama</li> <li>• Menyediakan informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi</li> <li>• Memperkuat Dokumen Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko bencana</li> </ul>
	c) Penelitian, Pendidikan dan	Menerapkan metode riset untuk kajian risiko multi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko bencana</li> </ul>

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	KETERKAITAN ISU STRATEGIS RPPLH
	Pelatihan	bencana serta analisis manfaat-biaya ( <i>cost benefit analysis</i> )	
	d) Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk dan memberdayakan forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana</li> <li>• Mewujudkan rencana dan kebijakan bidang ekonomi dan produksi untuk mengurangi kerentanan perekonomian masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko bencana</li> </ul>
	e) Perlindungan Masyarakat dari Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan dan Mitigasi Bencana</li> <li>• Kesiapsiagaan Bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko bencana</li> </ul>
	f) Penanganan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggap Darurat Bencana</li> <li>• Pemulihan Bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko bencana</li> </ul>
8	Pengurangan eksploitasi air tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membatasi penggunaan air tanah dalam untuk industri dan perhotelan;</li> <li>• Membatasi penggunaan air tanah dalam di wilayah perkotaan; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko bencana</li> <li>• Alih fungsi lahan</li> </ul>

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

#### 4.3. STRATEGI PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEBUMEN

Strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diuraikan pada pembahasan strategi umum selanjutnya dirumuskan dalam bentuk strategi pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk implementasikan dalam jangka waktu 30 tahun mendatang. Arah strategi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada empat tema utama, yaitu; (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya hutan; (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan pelestarian sumberdaya alam, serta (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Terkait dengan hal tersebut, pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah ditempuh melalui pelaksanaan skenario 10 tahunan dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 4.5. Skenario 10 Tahunan Strategi Implementasi RPPLH Kabupaten Kebumen

No	Target Tahunan	Isu Prioritas	Prosentase Penanganan	Skenario
<b>Target Umum RPPLH Kabupaten Kebumen 3 Tahun Pertama</b>				
1) Penetapan RPPLH Kabupaten Kebumen melalui Peraturan Daerah				
2) Sinkronisasi perencanaan pembangunan di daerah dengan RPPLH Kabupaten Kebumen				
3) Sosialisasi RPPLH ke seluruh stake holder di Kabupaten Kebumen				
4) Implementasi penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Kebumen				
1	10 Tahun Pertama (2023 – 2033)	Pengelolaan sampah dan limbah	35 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan kualitas udara, kualitas air dan tutupan lahan untuk mengetahui pencapaian target IKLH</li> <li>• Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30 % pada tahun 2033</li> <li>• Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70 % pada tahun 2033</li> <li>• Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
		Risiko bencana	25 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan kualitas udara, kualitas air dan tutupan lahan untuk mengetahui pencapaian</li> </ul>

No	Target Tahunan	Isu Prioritas	Prosentase Penanganan	Skenario
				target IKLH <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan program kampung iklim</li> <li>• Pengendalian emisi gas rumah kaca</li> <li>• Peningkatan kapasitas bencana dan pengurangan risiko bencana</li> <li>• Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
		Alih fungsi lahan	20 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan kualitas udara, kualitas air dan tutupan lahan untuk mengetahui pencapaian target IKLH</li> <li>• Perbaikan pemanfaatan ruang melalui penegakan hukum dan pengawasan</li> <li>• Perlindungan dan pemeliharaan lahan-lahan yang memiliki daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tinggi dan sangat tinggi</li> <li>• Perlindungan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan ataupun lahan dengan jasa penyedia pangan yang tinggi</li> <li>• Perlindungan daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi</li> <li>• Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
		Menurunnya kualitas dan kuantitas air	15 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan kualitas udara, kualitas air dan tutupan lahan untuk mengetahui pencapaian target IKLH</li> <li>• Pemulihan lahan kritis di kawasan jasa lingkungan pengaturan air tinggi dan sangat tinggi</li> <li>• Perlindungan dan pemeliharaan mata air, termasuk penutup lahan alami disekitar mata air</li> <li>• Perbaikan infrastruktur penampung air</li> </ul>

No	Target Tahunan	Isu Prioritas	Prosentase Penanganan	Skenario
				<p>hujan/air permukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
2	10 Tahun Kedua (2034 – 2044)	Pengelolaan sampah dan limbah	35 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan kualitas udara, kualitas air dan tutupan lahan untuk mengetahui pencapaian target IKLH</li> <li>• Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30 % pada tahun 2044</li> <li>• Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70 % pada tahun 2044</li> <li>• Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
		Risiko bencana	25 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan kualitas udara, kualitas air dan tutupan lahan untuk mengetahui pencapaian target IKLH</li> <li>• Penerapan konsep <i>green city</i> pada pusat-pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Kebumen</li> <li>• Pengurangan konsumsi bahan bakar fosil pada alat transportasi umum</li> <li>• Pengurangan penggunaan bahan tidak ramah lingkungan di rumah tangga dan pertanian</li> <li>• Pengembangan teknologi ramah lingkungan yang mampu mengurangi konsumsi energi</li> <li>• Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
		Alih fungsi lahan	20 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan kualitas udara, kualitas air dan tutupan lahan untuk mengetahui pencapaian target IKLH</li> <li>• Perbaiki pemanfaatan ruang melalui penegakan hukum dan pengawasan</li> </ul>
		Menurunnya	15 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan kualitas udara, kualitas air dan</li> </ul>

No	Target Tahunan	Isu Prioritas	Prosentase Penanganan	Skenario
		kualitas air		<p>tutupan lahan untuk mengetahui pencapaian target IKLH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengawasan dan Perbaikan sistem pengelolaan limbah industri</li> <li>• Peningkatan kualitasutupan lahan pada kawasan penyedia jasa air yang tinggi serta penyedia jasa pengaturan tata aliran air dan banjir</li> <li>• Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
3	10 Tahun Ketiga (2045 – 2053)	Pengelolaan sampah dan limbah	30 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan kualitas udara, kualitas air danutupan lahan untuk mengetahui pencapaian target IKLH</li> <li>• Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30 % pada tahun 2055</li> <li>• Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70 % pada tahun 2053</li> <li>• Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
		Risiko bencana	50 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan kualitas udara, kualitas air danutupan lahan untuk mengetahui pencapaian target IKLH</li> <li>• Mempertahankan jumlah titik pantau kualitas udara hingga tahun 2053</li> <li>• Melanjutkan Penerapan konsep <i>green city</i> pada seluruh daerah pemukiman</li> <li>• Peningkatan pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam infrastrukutr, industri, dan transportasi</li> <li>• Sosialisasi dan pemberdayaan</li> </ul>

No	Target Tahunan	Isu Prioritas	Prosentase Penanganan	Skenario
				masyarakat
		Alih fungsi lahan	60 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan kualitas udara, kualitas air dan tutupan lahan untuk mengetahui pencapaian target IKLH</li> <li>• Mempertahankan kondisi tutupan lahan pada kawasan penyedia jasa air yang tinggi serta penyedia jasa pengaturan tata aliran air dan banjir</li> <li>• Pengembangan sumber-sumber pangan baru</li> <li>• Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
		Menurunnya kualitas air	70 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan kualitas udara, kualitas air dan tutupan lahan untuk mengetahui pencapaian target IKLH</li> <li>• Pengembangan teknologi pengolahan air bersih</li> <li>• Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat</li> </ul>

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

#### **4.4. IMPLEMENTASI RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN KEBUMEN**

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari 19 (Sembilan belas) tugas dan salah satunya adalah “Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Mengenai RPPLH Kabupaten Kebumen”.

RPPLH adalah sebuah dokumen perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu RPPLH menjadi dasar dalam penyusunan dan pembuatan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Daerah yang belum menyusun RPPLH dapat menimbulkan persoalan dan permasalahan dalam perencanaan di daerahnya, khususnya terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan tercapai apabila pemerintah, masyarakat, dan semua *stakeholder* bertanggung jawab.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional dan regional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan aspek yang kompleks dan bersifat interdisiplin dan bersifat lintas wilayah dan lintas sektor, oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain. Dalam pelaksanaan PPLH ini melibatkan berbagai pihak serta memerlukan ketegasan dalam penataan lingkungan hidup. Sehingga diharapkan dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak maka akan ada pengawasan serta penataan hukum yang betul-betul dapat ditegakkan sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan dengan tepat.

Beberapa ketentuan untuk meningkatkan sinergitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mendorong tercapainya kualitas lingkungan hidup yang diharapkan, maka :

- 1) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Kebumen memuat arahan kebijakan pengembangan kewilayahan yang wajib dijadikan rujukan dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan dalam skala kabupaten, seperti RTRW dan RPJM serta kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan;
- 2) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Kebumen menjadi panduan bagi proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kebijakan, Rencana, dan Program;
- 3) Pemerintah Kabupaten Kebumen wajib melakukan koordinasi pengintegrasian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (RPPLH) Provinsi Jawa Tengah ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat sektoral kabupaten/kota;

- 4) Kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) wajib dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan tingkat kabupaten; dan
- 5) Pemerintah Kabupaten Kebumen wajib menginformasikan dokumen RPPLH nasional kepada setiap lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dalam Rangka mewujudkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen, disusunlah indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Kebumen yang berisi program-program baik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaligus mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang dan menengah serta untuk pemenuhan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Bagian berikut menyajikan Matriks Rencana Program Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kebumen selama tiga puluh tahun, yang terbagi dalam sepuluh tahunan. Program disusun berdasarkan isu strategis Kabupaten Kebumen yang dikelompokkan kedalam empat produk Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yaitu:

1. Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;
2. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup;
3. Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam; dan
4. Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim.

#### **4.4.1. Implementasi Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam**

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana pemanfaatan sumber daya alam dilakukan terhadap sumber daya alam yang layak untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan menjadi isu strategis dan prioritas dalam keberlangsungan hidup di Kabupaten Kebumen . Implementasi pemanfaatan sumberdaya alam yang termasuk pada zona pemanfaatan terbatas ditentukan sebagai daerah yang kondisi eksistingnya merupakan kawasan penyimpan air

yang dibatasi penggunaannya untuk kegiatan non pertanian, serta difungsikan untuk menjaga kondisi dan kualitasnya. Adapun rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam yang ditentukan telah menyesuaikan isu strategis yang ada di Kabupaten Kebumen yaitu (1) Menurunnya kualitas dan kuantitas air, (2) Pengelolaan sampah dan limbah , (3) Alih fungsi lahan, (4) Risiko bencana dan perubahan iklim.

Tabel 4.6. Implementasi Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Program	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5	6		
1	Pengelolaan sampah dan limbah	Mengharmonisasikan pembangunan di Kabupaten Kebumen dengan kemampuan D3TLH	Karakteristik Ekoregion	Perencanaan Lingkungan Hidup	✓						Kabupaten Kebumen	Instansi yang menangani lingkungan hidup
2	Risiko Bencana			<i>Penetapan SK Bupati terkait ekoregion</i>								
3	Alih fungsi lahan		Indikasi D3TLH	Perencanaan Lingkungan Hidup	Perencanaan Lingkungan Hidup	✓					Kabupaten Kebumen	Instansi yang menangani lingkungan hidup
4	Penurunan kualitas air				<i>Penetapan SK Bupati terkait D3TLH</i>							
					Mengharmonisasikan pembangunan di Kabupaten Kebumen dengan RPPLH	Naskah Akademik RPPLH	Perencanaan Lingkungan Hidup	✓				
			Peraturan Daerah RPPLH	Perencanaan Lingkungan Hidup	✓					Kabupaten Kebumen	Instansi yang menangani lingkungan hidup	
		Melindungi dan membatasi pemanfaatan lahan yang memiliki Daya Dukung sangat tinggi dan tinggi	Indikasi D3TLH	Peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	✓							

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Program	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5	6		
												menangani pemberdayaan masyarakat
			Indikasi D3TLH	Penanggulangan bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan kelas D3TLH Tinggi dan sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang menangani kebencanaan</li> </ul>
			Indikasi D3TLH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>• Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan Jasa Penyedia dan jasa pendukung tinggi dan sangat tinggi	Instansi yang menangani pertanian dan pangan
			Indikasi D3TLH	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan kelas D3TLH Tinggi dan sangat Tinggi	Instansi yang menangani lingkungan hidup
			Indikasi D3TLH	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	✓						Lahan dengan kelas jasa pendukung biodiversitas tinggi dan sangat tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang menangani kehutanan</li> </ul>

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Program	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5	6		
		Mencadangkan kawasan yang secara kumulatif memiliki Daya Dukung Lingkungan sedang sebagai kawasan penyangga kehidupan	Indikasi D3TLH	Penyelenggaraan penataan ruang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan kelas D3TLH sedang	Instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang
			Indikasi D3TLH	Pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan Jasa Penyedia dan jasa pendukung tinggi dan sangat tinggi	Instansi yang menangani pertanian dan pangan
		Mengarahkan pembangunan Kabupaten Kebumen, terutama pada daerah-daerah dengan Daya Dukung Sedang, rendah sampai Sangat Rendah	Indikasi D3TLH	Penyelenggaraan penataan ruang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan kelas D3TLH rendah dan sangat rendah	Instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang
			Indikasi D3TLH	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan kelas D3TLH rendah dan sangat rendah	Instansi yang menangani lingkungan hidup
			Indikasi D3TLH	Pengembangan perumahan dan permukiman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan jasa fungsi budaya untuk tempat tinggal atau ruang hidup	Instansi yang menangani perumahan dan permukiman
			Indikasi D3TLH	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan jasa fungsi budaya untuk rekreasi atau ekowisata	Instansi yang menangani pariwisata

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Program	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5	6		
			Indikasi D3TLH	Perencanaan pembangunan industri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan kelas D3TLH rendah dan sangat rendah	Instansi yang menangani perindustrian
			Indikasi D3TLH	Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan kelas D3TLH rendah dan sangat rendah	Instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang
			Indikasi D3TLH	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan kelas D3TLH rendah dan sangat rendah	Instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

#### 4.4.2. Implementasi Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan / atau Fungsi Lingkungan Hidup

Untuk meningkatkan sinergitas perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen dan mendorong tercapainya kualitas lingkungan hidup yang diharapkan. Zonasi perlindungan lingkungan hidup merupakan daerah yang harus dijaga kualitas jasanya lingkungannya karena memiliki nilai jasa yang sangat penting dan menentukan serta memastikan ekosistem berjalan.

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup dilakukan terhadap seluruh stakeholder di Kabupaten Kebumen. Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, maka terdapat isu strategis yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi implementasi yang akan dilaksanakan.

Tabel 4.7. Implementasi Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan / atau Fungsi Lingkungan Hidup

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Program	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5	6		
1	Pengelolaan sampah dan limbah	Perlindungan jasa pengolahan dan penguraian limbah D3TLH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikasi D3TLH</li> <li>• Peningkatan nilai Indeks Kualitas Air (IKA)</li> </ul>	Konservasi sumberdaya alam dan ekosistem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan kelas D3TLH tinggi dan sangat tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang menangani kehutanan</li> </ul>
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan kelas D3TLH tinggi dan sangat tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang menangani kehutanan</li> </ul>
				Pegelolaan persampahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan kelas D3TLH tinggi dan sangat tinggi	Instansi yang menangani lingkungan hidup
		Pengembangan sistem pendataan dan registrasi untuk perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001 dan produk yang ramah lingkungan	Bertabahnya perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001 dan produk yang ramah lingkungan	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kabupaten Kebumen	Instansi yang menangani lingkungan hidup
		Memulihkan kawasan tercemar limbah dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan	Peningkatan nilai Indeks Kualitas Air (IKA)	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan jasa lingkungan pengaturan dan pengolahan limbah tinggi dan sangat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang menangani perumahan dan</li> </ul>

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Program	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5	6		
											tinggi	permukiman
				Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan jasa lingkungan tata aliran air dan banjir tinggi hingga sangat tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang</li> </ul>
				Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan jasa lingkungan pengaturan dan pengolahan limbah tinggi dan sangat tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang menangani kesehatan</li> </ul>
				Pengembangan permukiman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan jasa lingkungan fungsi budaya untuk tempat tinggal/ruang hidup tinggi dan sangat tinggi	Instansi yang menangani perumahan dan permukiman
2	Risiko Bencana	Pemeliharaan dan Perlindungan jasa lingkungan pengaturan Pencegahan dan perlindungan dari Bencana	Indikasi D3TLH	Konservasi sumberdaya alam dan ekosistem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan kelas D3TLH tinggi dan sangat tinggi	Instansi yang menangani lingkungan hidup
			Indikasi D3TLH	Penyelenggaraan penataan ruang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan kelas D3TLH tinggi dan sangat tinggi	Instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang
			Indikasi D3TLH	Penanggulangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan	Instansi yang

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Program	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5	6		
				bencana							kelas D3TLH tinggi dan sangat tinggi	menangani kebencanaan
		Pemeliharaan dan perlindungan jasa pengaturan iklim dan kualitas udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkurangnya emisi gas rumah kaca</li> <li>Peningkatan indeks kualitas udara (IKU)</li> </ul>	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan kelas jasa pengaturan iklim dan kualitas udara tinggi dan sangat tinggi	Instansi yang menangani lingkungan hidup
				Peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kabupaten Kebumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>Instansi yang menangani pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
		Pemeliharaan dan perlindungan jasa pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikasi D3TLH</li> <li>Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)</li> </ul>	Pengelolaan keanekaragaman hayati	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan jasa pendukung tinggi dan sangat tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>Instansi yang menangani kehutanan</li> </ul>
		Pemeliharaan dan perlindungan jasa penyedia pangan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikasi D3TLH</li> <li>Peningkatan indeks kualitas air (IKA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan jasa penyedia pangan tinggi dan sangat tinggi	Instansi yang menangani pertanian dan pangan

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Program	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5	6		
3	Alih fungsi lahan	Penetapan kawasan untuk perlindungan keanekaragaman hayati baik pada perkotaan, kawasan hutan dan kawasan pertanian	Penetapan SK Bupati	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	✓						Lahan dengan kelas D3TLH Tinggi dan sangat Tinggi	Instansi yang menangani lingkungan hidup
		Perlindungan D3TLH berbasis jasa lingkungan	Indikasi D3TLH	Konservasi sumberdaya alam dan ekosistem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan kelas D3TLH Tinggi dan sangat Tinggi	Instansi yang menangani lingkungan hidup
		Perlindungan dan memulihkan fungsi kawasan-kawasan dengan jasa lingkungan pengaturan dan penyimpan air tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikasi D3TLH</li> <li>• Peningkatan indeks kualitas air (IKA)</li> </ul>	Konservasi sumberdaya alam dan ekosistem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan kelas jasa lingkungan penyedia air tinggi dan sangat tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang menangani kehutanan</li> </ul>
		Pemulihan DAS prioritas lintas Kabupaten dan ekosistemnya	Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Pengelolaan daerah aliran sungai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DAS yang ada di Kabupaten Kebumen	Instansi yang menangani lingkungan hidup
		Perlindungan dan pemeliharaan lahan yang memiliki nilai jasa lingkungan penyedia pangan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikasi D3TLH</li> <li>• Produktivitas pertanian</li> </ul>	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan kelas jasa lingkungan penyedia pangan tinggi dan sangat tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang menangani pertanian dan pangan</li> </ul>
4	Penurunan kualitas dan kuantitas air	Perlindungan jasa lingkungan pengaturan pemurnian air	Indikasi D3TLH	Konservasi sumberdaya alam dan ekosistem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan kelas D3TLH tinggi dan sangat tinggi	Instansi yang menangani lingkungan hidup
		Kualitas mata	Perlindungan dan		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh mata air di	Instansi yang

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Program	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5	6		
			air	pemeliharaan mata air							Kabupaten Kebumen	menangani lingkungan hidup
		Pemeliharaan dan perlindungan lahan yang memiliki jasa penyedia air tinggi dan sangat tinggi	Imbal jasa penyedia air	Pengelolaan sumberdaya air	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan kelas D3TLH Jasa Penyedia Air tinggi dan sangat tinggi	Instansi yang menangani lingkungan hidup
		Meningkatkan kapasitas dan jaringan prasarana air baku	Peningkatan penyediaan air minum	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan D3TLH jasa penyedia air dan jasa pengaturan tata aliran air tinggi dan sangat tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang menangani perumahan dan permukiman</li> <li>• Instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang</li> </ul>
		Peningkatan vegetasi sebagai perlindungan kawasan yang memiliki fungsi imbunan dan resapan air tanah	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan kelas D3TLH tinggi dan sangat tinggi	Instansi yang menangani lingkungan hidup
		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait	Jumlah komunitas perlindungan mata air yang dibentuk	Pengakuan keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kabupaten Kebumen	Instansi yang menangani lingkungan hidup

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Program	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5	6		
		dengan PPLH										
		Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen profiling mata air yang dibuat	Pengakuan keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kabupaten Kebumen	Instansi yang menangani lingkungan hidup
		Perlindungan, pemeliharaan dan pengelolaan daerah aliran sungai	Peningkatan nilai Indeks Kualitas Air (IKA)	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DAS yang ada di Kabupaten Kebumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang</li> </ul>
			Kualitas dan kuantitas air permukaan	Pengelolaan daerah aliran sungai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DAS yang ada di Kabupaten Kebumen	Instansi yang menangani lingkungan hidup
			Pengelolaan DAS Prioritas	Program pengelolaan sumber daya air	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DAS yang ada di Kabupaten Kebumen	Instansi yang menangani lingkungan hidup

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

#### 4.4.3. Implementasi Rencana Pengendalian, Pemantauan Serta Pendayagunaan Pelestarian SDA

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam diarahkan dalam rangka efektifitas pencapaian target yang telah ditetapkan. Berdasarkan dari pemilihan isu strategis prioritas, direncanakan program kegiatan yang berkaitan dalam hal pengendalian, pemantauan dan pelestarian guna terwujudnya pembangunan sumber daya alam berkelanjutan.

Tabel 4.8. Implementasi Rencana Pengendalian, Pemantauan Serta Pendayagunaan Pelestarian SDA

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Program	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5	6		
1	Pengelolaan sampah dan limbah	Penguatan regulasi terkait pengelolaan sampah dan limbah	Jumlah regulasi yang dihasilkan	Perencanaan lingkungan hidup	✓						Kabupaten Kebumen	Instansi yang menangani lingkungan hidup
		Terwujudnya kebersihan dan keindahan kota dan peningkatan fungsi lingkungan hidup	Penurunan volume sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	Pengelolaan persampahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Penutup lahan permukiman dan wilayah perkotaan (ekoregon antropogenik)	Instansi yang menangani lingkungan hidup
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Indeks kualitas air (IKA)</li> <li>• Peningkatan Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)</li> </ul>	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan jasa pengaturan pengolahan dan penguraian limbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</li> </ul>
		Pemantauan pencemaran limbah domestik, industri dan kegiatan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Indeks kualitas air (IKA)</li> <li>• Peningkatan Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)</li> </ul>	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan jasa pengaturan pengolahan dan penguraian limbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang menangani kesehatan</li> </ul>
	Pengendalian bahan berbahaya dan beracun		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan jasa pengaturan pengolahan dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> </ul>		

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Program	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5	6		
											penguraian limbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani kesehatan</li> </ul>
			Jumlah pengaduan masyarakat yang direspon	Penanganan pengaduan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kabupaten Kebumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang menangani ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</li> </ul>
		Penghargaan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dan limbah	Peningkatan jumlah masyarakat yang aktif melakukan pengelolaan sampah dan limbah	Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kabupaten Kebumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang menangani pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
		Pemberdayaan masyarakat, institusi dan lembaga terkait pengelolaan sampah dan limbah	Peningkatan kapasitas masyarakat, institusi dan lembaga	Peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kabupaten Kebumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang menangani pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
2	Risiko Bencana	Pemantauan kejadian bencana	Data dan informasi kebencanaan	Penanggulangan bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Wilayah dengan risiko bencana alam tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani kebencanaan</li> <li>• Instansi yang menangani komunikasi dan informatika</li> </ul>

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Program	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5	6		
		Peringatan dini dan Mitigasi bencana alam	Pengurangan korban jiwa dan harta benda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanggulangan bencana</li> <li>• Penyelenggaraan penataan ruang</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Wilayah dengan risiko bencana alam tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani kebencanaan</li> <li>• Instansi yang menangani komunikasi dan informatika</li> </ul>
		Kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kapasitas masyarakat dan lembaga	Penanggulangan bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Wilayah dengan risiko bencana alam tinggi	Instansi yang menangani kebencanaan
		Pengelolaan sumber pencemaran dari usaha kecil dan mikro	Jumlah bantuan pengelolaan limbah usaha industri kecil	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Usaha industri kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang</li> </ul>
		Penguatan kapasitas laboratorium lingkungan	Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kabupaten Kebumen	Instansi yang menangani lingkungan hidup
		Penurunan emisi gas rumah kaca	Peningkatan indeks kualitas udara (IKU)	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan jasa pengaturan iklim dan kualitas udara tinggi dan sangat tinggi	Instansi yang menangani lingkungan hidup
3	Alih fungsi lahan	Penguatan regulasi terkait dengan perizinan lingkungan	Jumlah regulasi yang dihasilkan	Perencanaan lingkungan hidup	✓						Kabupaten Kebumen	Instansi yang menangani lingkungan hidup
		Sinkronisasi perencanaan tata	Indikasi D3TLH	Penyelenggaraan penataan ruang	✓						Kabupaten Kebumen	• Instansi yang menangani

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Program	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5	6		
		ruang dengan D3TLH										lingkungan hidup • Instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang
		Pemantauan lahan kritis	Indeks kualitasutupan lahan (IKTL)	Pengelolaan keanekaragaman hayati	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan jasa lingkungan pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	Instansi yang menangani lingkungan hidup
		Peningkatan ruang terbuka hijau	Peningkatan Indeks kualitasutupan lahan (IKTL)	Pengelolaan keanekaragaman hayati	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan jasa lingkungan pendukung biodiversitas	• Instansi yang menangani lingkungan hidup • Instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang
4	Penurunan kualitas air	Peningkatan kapasitas Lembaga ddalam pengendalian dan pelestarian sumberdaya alam	Terbentuknya Tim Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan LH (TKPPLH)	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	✓						Kabupaten Kebumen	Instansi yang menangani lingkungan hidup
		Pemantauan kualitas air sungai/air permukaan	Indeks kualitas air (IKA)	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sungai yang ada di Kabupaten Kebumen (Base Line Data Sungai didalam IKLH Tahun 2021)	Instansi yang menangani lingkungan hidup
		Pemantauan dan pengelolaan limbah usaha industri kecil dan mikro	Menurunnya sumber pencemaran air dari usaha industri kecil	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Usaha industri kecil dan mikro	Instansi yang menangani lingkungan hidup

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Program	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5	6		
				Peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Usaha industri kecil dan mikro	Instansi yang menangani lingkungan hidup
		Pemberdayaan masyarakat, institusi dan lembaga terkait pencemaran air	Peningkatan Indeks kualitas air (IKA)	Peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kabupaten Kebumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang menangani pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
		Pengaduan masyarakat terkait pencemaran air	Jumlah pengaduan masyarakat yang direspon	Penanganan pengaduan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kabupaten Kebumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang menangani ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</li> </ul>
		Penanggulangan pencemaran air	Peningkatan Indeks kualitas air (IKA)	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kabupaten Kebumen	Instansi yang menangani lingkungan hidup

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

#### 4.4.4. Implementasi Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim

Arah kebijakan penanggulangan bencana yang tertuang adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Selanjutnya, kebijakan dan strategi

implementasi serta indikasi program pada rencana adaptasi terhadap perubahan iklim diarahkan dalam rangka penyesuaian dan mengantisipasi risiko serta meningkatkan ketahanan terhadap kondisi/dampak perubahan iklim.

Tabel 4.9. Implementasi Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Program	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5	6		
1	Pengelolaan sampah dan limbah	Penurunan emisi gas rumah kaca	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan indeks kualitas air (IKA)</li> <li>• Peningkatan indeks kualitas udara (IKU)</li> </ul>	Pengelolaan persampahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan jasa pengaturan iklim dan kualitas udara rendah dan sangat rendah	Instansi yang menangani lingkungan hidup
			Peningkatan kapasitas stake holder terkait pengelolaan sampah	Peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kabupaten Kebumen	Instansi yang menangani lingkungan hidup
		Pengurangan sampah	Target pengurangan sampah	Pengelolaan persampahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kawasan permukiman dan perkotaan	Instansi yang menangani lingkungan hidup
		Penanganan sampah	Target penanganan sampah	Pengelolaan persampahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kawasan permukiman dan perkotaan	Instansi yang menangani lingkungan hidup
2	Risiko Bencana	Penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan	Regulasi terkait dengan kebencanaan	Penanggulangan bencana	✓						Kabupaten Kebumen	Instansi yang menangani kebencanaan
		Bertambahnya kelas jasa tinggi dan sangat tinggi untuk pengaturan	Indikasi D3TLH	Perencanaan lingkungan	✓	✓					Lahan dengan jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan dari	Instansi yang menangani lingkungan hidup

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Program	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana	
					1	2	3	4	5	6			
		pencegahan dan perlindungan dari bencana										bencana	
		Mitigasi bencana alam	Menurunnya tingkat risiko bencana	Penanggulangan bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Wilayah dengan risiko bencana alam tinggi	Instansi yang menangani kebencanaan	
			Pengembangan flood forecasting and warning system (FFWS)	Penanganan bencana	✓						Wilayah dengan risiko bencana banjir tinggi	Instansi yang menangani kebencanaan	
		Penanganan kejadian bencana	Menurunnya korban jiwa dan harta benda	Penanggulangan bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Wilayah dengan risiko bencana alam tinggi	Instansi yang menangani kebencanaan	
			Rehabilitasi dan rekonstruksi	Penanganan bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Wilayah dengan risiko bencana alam tinggi	Instansi yang menangani kebencanaan	
		Ketahanan energy	Energi baru terbarukan	Pengelolaan energi terbarukan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan jasa lingkungan penyedia bahan bakar, kayu dan fosil	Instansi yang menangani energi dan sumberdaya mineral	
		Peningkatan kapasitas wilayah dan masyarakat terhadap ancaman perubahan iklim akibat cuaca ekstrem melalui kesiapsiagaan menghadapi bencana	Peningkatan kapasitas wilayah dan masyarakat	Peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kabupaten Kebumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang menangani kebencanaan</li> </ul>	

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Program	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5	6		
		banjir dan longsor										
		Pengembangan transportasi ramah lingkungan	Peningkatan indeks kualitas udara (IKU)	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan jasa lingkungan pengaturan pemeliharaan kualitas udara	Instansi yang menangani perhubungan
		Penurunan emisi gas rumah kaca	Peningkatan indeks kualitas udara (IKU)	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan jasa pengaturan iklim dan kualitas udara tinggi dan sangat tinggi	Instansi yang menangani lingkungan hidup
		Mengembangkan green cities dan kota tangguh untuk wilayah yang rentan terhadap bencana	Bertambahnya jumlah desa Tangguh bencana	Penanggulangan bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Wilayah dengan risiko bencana alam tinggi	Instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang
			bertambahnya program kampung iklim	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kabupaten Kebumen	Instansi yang menangani lingkungan hidup
			Kota hijau	Penyelenggaraan penataan ruang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Wilayah perkotaan	Instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang
3	Alih fungsi lahan	Peningkatan ketahanan pangan	LP2B	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	✓						Lahan dengan jasa lingkungan penyedia pangan	Instansi yang menangani pertanian dan pangan

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Program	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5	6		
				Pertanian							sedang, tinggi dan sangat tinggi	
			Sumber bahan pangan alternatif	Penelitian dan Pengembangan Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan jasa lingkungan penyedia pangan	Instansi yang menangani pertanian dan pangan
		Peningkatan kuantitas jasa penyedia air	Indikasi D3TLH	Pengelolaan sumberdaya air	✓						Lahan dengan jasa lingkungan penyedia air tinggi dan sangat tinggi	Instansi yang menangani lingkungan hidup
			Ketersediaan air bersih dan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan air bersih	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan jasa lingkungan penyedia air tinggi dan sangat tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang</li> </ul>
				Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan jasa lingkungan penyedia air tinggi dan sangat tinggi	Instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang
			Berkurangnya wilayah yang mengalami kekeringan	Penanggulangan bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Wilayah dengan risiko bencana kekeringan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang</li> <li>• Instansi yang menangani</li> </ul>

No	Isu Strategis	Sasaran	Indikator	Program	Waktu Pelaksanaan (5 Tahunan)						Lokasi	Instansi Pelaksana
					1	2	3	4	5	6		
												kebencanaan
		Peningkatan ruang terbuka hijau (RTH)	Peningkatan Indeks kualitas udara	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan jasa lingkungan pengaturan pemeliharaan kualitas udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang</li> </ul>
			Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Wilayah perkotaan atau ekoregion antropogenik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi yang menangani lingkungan hidup</li> <li>• Instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang</li> </ul>
4	Penurunan kualitas air	Peningkatan kualitas lahan D3TLH dengan jasa penyedia iar	Peningkatan D3TLH	Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan jasa penyedia air tinggi dan sangat tinggi	Instansi yang menangani lingkungan hidup
			Peningkatan D3TLH	Pengelolaan keanekaragaman hayati	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kawasan permukiman dan perkotaan	Instansi yang menangani lingkungan hidup
		Peningkatan kualitas lahan D3TLH jasa pangaturan pemurnian air	Peningkatan indeks kualitas air (IKA)	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lahan dengan jasa lingkungan pengaturan pemurnian air tinggi dan sangat tinggi	Instansi yang menangani lingkungan hidup

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

Arahan lokasi dalam pelaksanaan implementasi terhadap 4 muatan RPPLH sebagaimana yang telah diuraikan dalam Tabel 4.6. hingga Tabel 4.9. merupakan lokasi yang masuk pada masing-masing kelas jasa lingkungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis Jasa Lingkungan, dengan arahan lokasi secara rinci meliputi :

1) **Sebaran Jasa Lingkungan Penyedia Pangan**

No	Kelas Jasa Lingkungan	Lokasi (Kecamatan)
1	Sangat Rendah	Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Gombang, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
2	Rendah	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombang, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sempor, Sruweng
3	Sedang	Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Gombang, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
4	Tinggi	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombang, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
5	Sangat Tinggi	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombang,

		Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sempor, Sruweng
--	--	---

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

## 2) Sebaran Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih

No	Kelas Jasa Lingkungan	Lokasi (Kecamatan)
1	Sangat Rendah	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
2	Rendah	Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
3	Sedang	Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Mirit, Pejagoan, Petanahan, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
4	Tinggi	Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prembun, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng

5	Sangat Tinggi	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombang, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
---	---------------	--

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

### 3) Sebaran Jasa Lingkungan Penyedia Serat

No	Kelas Jasa Lingkungan	Lokasi (Kecamatan)
1	Sangat Rendah	Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Gombang, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Mirit, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Puring, Rowokele, Sempor, Sruweng
2	Rendah	Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Puring, Rowokele, Sadang
3	Sedang	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombang, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
4	Tinggi	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Gombang, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prembun, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng

5	Sangat Tinggi	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
---	---------------	--

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

#### 4) Sebaran Jasa Lingkungan Penyedia Bahan Bakar

No	Kelas Jasa Lingkungan	Lokasi (Kecamatan)
1	Sangat Rendah	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prempun, Puring, Rowokele, Sempor, Sruweng
2	Rendah	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
3	Sedang	Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
4	Tinggi	Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar,

		Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prembun, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
5	Sangat Tinggi	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

#### 5) Sebaran Jasa Lingkungan Penyedia Sumberdaya Genetik

No	Kelas Jasa Lingkungan	Lokasi (Kecamatan)
1	Sangat Rendah	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prempun, Puring, Rowokele, Sempor, Sruweng
2	Rendah	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
3	Sedang	Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
4	Tinggi	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Padureso, Pejagoan, Poncowarno,

		Prembun, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
5	Sangat Tinggi	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

6) **Sebaran Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim**

No	Kelas Jasa Lingkungan	Lokasi (Kecamatan)
1	Sangat Rendah	Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
2	Rendah	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sempor, Sruweng
3	Sedang	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
4	Tinggi	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prembun, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
5	Sangat Tinggi	Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Karanganyar, Karanggayam,

		Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prembun, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
--	--	--

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

7) **Sebaran Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir**

No	Kelas Jasa Lingkungan	Lokasi (Kecamatan)
1	Sangat Rendah	Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Mirit, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Puring, Rowokele, Sempor, Sruweng
2	Rendah	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
3	Sedang	Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Klirong, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
4	Tinggi	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring,

		Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
5	Sangat Tinggi	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

8) **Sebaran Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana**

No	Kelas Jasa Lingkungan	Lokasi (Kecamatan)
1	Sangat Rendah	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prempun, Puring, Rowokele, Sempor, Sruweng
2	Rendah	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
3	Sedang	Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
4	Tinggi	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor,

		Sruweng
5	Sangat Tinggi	Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

9) **Sebaran Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air**

No	Kelas Jasa Lingkungan	Lokasi (Kecamatan)
1	Sangat Rendah	Adimulyo, Alian, Ayah, Buayan, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prembun, Rowokele, Sempor, Sruweng
2	Rendah	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
3	Sedang	Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Klirong, Kutowinangun, Mirit, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
4	Tinggi	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
5	Sangat Tinggi	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Pejagoan, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

10) **Sebaran Jasa Lingkungan Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah**

No	Kelas Jasa Lingkungan	Lokasi (Kecamatan)
1	Sangat Rendah	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prempun, Puring, Rowokele, Sempor, Sruweng
2	Rendah	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
3	Sedang	Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
4	Tinggi	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
5	Sangat Tinggi	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sempor, Sruweng

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

11) **Sebaran Jasa Lingkungan Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara**

No	Kelas Jasa Lingkungan	Lokasi (Kecamatan)
1	Sangat Rendah	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prempun, Puring, Rowokele, Sempor, Sruweng
2	Rendah	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
3	Sedang	Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
4	Tinggi	Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Mirit, Padureso, Poncowarno, Prembun, Rowokele, Sadang, Sempor
5	Sangat Tinggi	Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Mirit, Pejagoan, Petanahan, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

12) **Sebaran Jasa Lingkungan Pengaturan Pengaturan Penyerbukan Alami / *Pollination***

<b>No</b>	<b>Kelas Jasa Lingkungan</b>	<b>Lokasi (Kecamatan)</b>
1	Sangat Rendah	Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Mirit, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sempor, Sruweng
2	Rendah	Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
3	Sedang	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
4	Tinggi	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
5	Sangat Tinggi	Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng

*Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022*

13) **Sebaran Jasa Lingkungan Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit**

No	Kelas Jasa Lingkungan	Lokasi (Kecamatan)
1	Sangat Rendah	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prempun, Puring, Rowokele, Sempor, Sruweng
2	Rendah	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
3	Sedang	Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
4	Tinggi	Alian, Ayah, Buayan, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
5	Sangat Tinggi	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

14) **Sebaran Jasa Lingkungan Tempat Tinggal dan Ruang Hidup**

No	Kelas Jasa Lingkungan	Lokasi (Kecamatan)
1	Sangat Rendah	Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Mirit, Pejagoan, Petanahan, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
2	Rendah	Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor
3	Sedang	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
4	Tinggi	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
5	Sangat Tinggi	Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

15) **Sebaran Jasa Lingkungan Rekreasi dan Ekowisata**

No	Kelas Jasa Lingkungan	Lokasi (Kecamatan)
1	Sangat Rendah	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prempun, Puring, Rowokele, Sempor, Sruweng
2	Rendah	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
3	Sedang	Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
4	Tinggi	Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Mirit, Padureso, Poncowarno, Prembun, Rowokele, Sadang, Sempor
5	Sangat Tinggi	Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Mirit, Pejagoan, Petanahan, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

16) Sebaran Jasa Lingkungan Untuk Estetika

No	Kelas Jasa Lingkungan	Lokasi (Kecamatan)
1	Sangat Rendah	Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Mirit, Pejagoan, Petanahan, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
2	Rendah	Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor
3	Sedang	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
4	Tinggi	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
5	Sangat Tinggi	Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

17) **Sebaran Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Tanah**

No	Kelas Jasa Lingkungan	Lokasi (Kecamatan)
1	Sangat Rendah	Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Mirit, Padureso, Pejagoan, Prtanahan, Poncowarno, Puring, Rowokele, Sadang, Sruweng
2	Rendah	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombang, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
3	Sedang	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombang, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
4	Tinggi	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombang, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prembun, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
5	Sangat Tinggi	Alian, Ayah, Buayan, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Kutowinangun, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prembun, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

18) **Sebaran Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara**

No	Kelas Jasa Lingkungan	Lokasi (Kecamatan)
1	Sangat Rendah	Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Puring, Rowokele, Sempor, Sruweng
2	Rendah	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
3	Sedang	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
4	Tinggi	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
5	Sangat Tinggi	Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

19) **Sebaran Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer**

No	Kelas Jasa Lingkungan	Lokasi (Kecamatan)
1	Sangat Rendah	Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Mirit, Pejagoan, Petanahan, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
2	Rendah	Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor
3	Sedang	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
4	Tinggi	Alian, Ayah, Buayan, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Kutowinangun, Kuwarasan, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prembun, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
5	Sangat Tinggi	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022

20) **Sebaran Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas**

No	Kelas Jasa Lingkungan	Lokasi (Kecamatan)
1	Sangat Rendah	Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Mirit, Pejagoan, Puring, Rowokele, Sempor, Sruweng
2	Rendah	Alian, Ambal, Ayah, Buayan, Buluspesantren, Karanggayam, Karang Sambung, Klirong, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor
3	Sedang	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
4	Tinggi	Alian, Ayah, Buayan, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng
5	Sangat Tinggi	Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karang Sambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor, Sruweng

Sumber : Dokumen RPPLH Kabupaten Kebumen, Tahun 2022



Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan harus berperan aktif sebagai mediator bagi pihak yang berkepentingan terlebih dalam kasus terjadinya konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam, pencemaran dan kerusakan lingkungan. Koordinasi dan komunikasi dua arah antara tim Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan, baik secara vertikal (dengan provinsi) maupun horisontal (antar instansi) perlu ditingkatkan. Beberapa kasus pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam yang tidak dapat diselesaikan oleh kabupaten, maka dapat berkonsultasi dengan tim yang lebih tinggi (provinsi atau nasional). Mekanisme perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen, dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti:

- a. Pertemuan rutin antar instansi sektoral terkait yang bersifat koordinatif, yang membahas dan memonitor rencana maupun pelaksanaan dari program dan kegiatan sektoral, serta kesesuaiannya dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Menggunakan laporan dari berbagai instansi terkait sebagai bahan umpan balik tentang pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang berskala besar di Kabupaten Kebumen;
- c. Peninjauan lapangan ke lokasi-lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam di Kabupaten Kebumen;
- d. Instansi-instansi sektoral dan pemerintah, informasi mengenai program dan pelaksanaan kegiatan dan proyek pembangunan dapat diperoleh juga dari kalangan swasta, lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat, maupun masyarakat umum secara langsung.

Berikut gambaran tentang sistem kelembagaan terkait dengan fungsi kelembagaan pada masing-masing tahapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) untuk jangka waktu 30 tahun di Kabupaten Kebumen.

Tabel 4.10 Fungsi Kelembagaan Pada Masing-Masing Tahapan RPPLH

Fungsi Manajemen Stakeholder dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kebumen			
Koordinatif	Perencanaan	Implementasi	Monitoring dan Evaluasi
1. Instansi yang menangani lingkungan hidup	1. Instansi yang menangani lingkungan hidup	1. Instansi yang menangani lingkungan hidup	1. Instansi yang menangani lingkungan hidup
2. Instansi yang menangani bidang perencanaan dan program pembangunan daerah	2. Instansi yang menangani bidang perencanaan dan program pembangunan daerah	2. Instansi yang menangani bidang perencanaan dan program pembangunan daerah	2. Instansi yang menangani bidang perencanaan dan program pembangunan daerah
3. Instansi yang menangani kebencanaan	3. Instansi yang menangani kebencanaan	3. Instansi yang menangani kebencanaan	3. Instansi yang menangani kebencanaan
4. Setda	4. Instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang	4. Instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang	4. Instansi yang menangani ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
5. DPRD	5. Instansi terkait lainnya	5. Instansi yang menangani perumahan dan permukiman	5. DPRD
	6. Perguruan Tinggi	6. Instansi yang menangani perhubungan dan pangan	6. Instansi terkait lainnya
	7. Kelompok Masyarakat (LSM)	7. Instansi yang menangani pertanian dan pangan	7. Perguruan Tinggi
		8. Instansi yang menangani kesehatan	8. Kelompok Masyarakat (LSM)
		9. Instansi yang menangani pariwisata	
		10. Instansi yang menangani kepemudaan dan olahraga	
		11. Instansi yang menangani perindustrian	
		12. Instansi yang menangani kelautan dan perikanan	
		13. Instansi yang menangani komunikasi dan informatika	
		14. Instansi yang menangani perzinan	
		15. Instansi yang menangani pendidikan dan kebudayaan	
		16. Instansi yang menangani sosial	
		17. Instansi yang menangani ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	
		18. Perguruan Tinggi	
		19. Kelompok Masyarakat (LSM)	

Selain kerangka kelembagaan didalam RPPLH secara umum sebagaimana tabel di atas, di dalam kerangka kelembagaan juga diatur terkait dengan peranan masing-masing stake holder terutama dalam upaya untuk memenuhi target didalam RPPLH Kabupaten Kebumen yaitu upaya koordinasi antar instansi/OPD/kelompok masyarakat sehingga indikator didalam IKLH Kabupaten Kebumen untuk 30 tahun yang akan datang dapat memenuhi target setiap tahunnya. Secara rinci fungsi kelembagaan didalam pencapaian target RPPLH Kabupaten Kebumen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11. Fungsi Kelembagaan Dalam Rangka Pencapaian Target RPPLH Kabupaten Kebumen

No	Indikator IKLH	Stake Holder
1.	Indeks Kualitas Air	1) Instansi yang menangani lingkungan hidup ( <i>Leading Sector</i> ); 2) Instansi yang menangani kelautan dan perikanan; 3) Instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) Instansi yang menangani kesehatan; 5) Instansi yang menangani pertanian dan pangan; 6) Instansi yang menangani tenaga kerja dan

No	Indikator IKLH	Stake Holder
		koperasi, usaha kecil dan menengah; 7) Instansi yang menangani perindustrian dan perdagangan; 8) Instansi yang menangani pendidikan; 9) Satuan Polisi Pamong Praja; 10) Kelompok Masyarakat
2.	Indeks Kualitas Udara	1) Instansi yang menangani lingkungan hidup ( <i>Leading Sector</i> ); 2) Instansi yang menangani kelautan dan perikanan; 3) Instansi yang menangani perhubungan; 4) Instansi yang menangani kesehatan; 5) Instansi yang menangani tenaga kerja dan koperasi, usaha kecil dan menengah; 6) Instansi yang menangani pendidikan; 7) Instansi yang menangani perindustrian dan perdagangan 8) Satuan Polisi Pamong Praja; 9) Kelompok Masyarakat
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	1) Instansi yang menangani lingkungan hidup ( <i>Leading Sector</i> ); 2) Instansi yang menangani perencanaan dan penelitian dan pengembangan daerah; 3) Instansi yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) Instansi yang menangani kelautan dan perikanan; 5) PERHUTANI; 6) Kelompok Masyarakat

#### 4.6. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPPLH KABUPATEN KEBUMEN

Untuk menjamin terselenggaranya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berjenjang dan berkesinambungan, maka:

- 1) Bupati wajib melakukan sosialisasi dan supervisi untuk memastikan bahwa seluruh RPPLH Kabupaten Kebumen sinkron dan mengacu pada RPPLH Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Bupati wajib melakukan supervisi untuk memastikan bahwa seluruh perencanaan pembangunan di Kabupaten Kebumen, khususnya OPD terkait telah mengacu dan sesuai dengan RPPLH;
- 3) Minimal setiap periode 5 tahunan, Bupati wajib melakukan evaluasi pencapaian target kualitas lingkungan hidup dan selanjutnya dapat

menyesuaikan target maupun kebijakan dalam RPPLH Kabupaten Kebumen sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional (RPPLH) Kabupaten Kebumen merupakan arahan-arahan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup yang wajib dijadikan rujukan dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan dan kegiatan/usaha, yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup untuk jangka waktu 30 tahun. RPPLH Kabupaten Kebumen menjadi acuan bagi dokumen perencanaan lain ditingkat daerah seperti RTRW, RPJM, RPJP, serta menjadi pedoman didalam perencanaan pembangunan dan perencanaan sumberdaya lainnya. Maka, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didukung oleh

- (a) komitmen pemerintah daerah terhadap pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup;
- (b) kebijakan terhadap pembangunan berkelanjutan;
- (c) lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama pembangunan;
- (d) peran serta pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang aktif; dan
- (e) menyegerakan penyusunan peraturan daerah RPPLH daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adanya mekanisme pendanaan diharapkan upaya konservasi dapat dikelola secara benar dan terintegrasi, baik yang berasal dari lembaga internasional maupun dalam negeri serta menyalurkan secara bijak kepada pengelola kawasan konservasi. Kerangka pendanaan untuk penanganan perubahan iklim bersumber dari pendanaan pemerintah pusat (APBN) dan daerah (APBD), serta sumber dana lain yang sifatnya tidak mengikat. Untuk penanganan perubahan iklim, pengembangan dana perwalian melalui *Indonesia Climate Change Trust Fund* dan dana internasional lainnya perlu ditingkatkan pemanfaatannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian dalam Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kebumen, maka selanjutnya RPPLH Kabupaten Kebumen dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Kebumen, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan menjadi bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan yang ada di daerah agar pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam lebih terkontrol berdasarkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta karakteristik ekoregion/bentang lahan yang ada di Kabupaten Kebumen, melalui arahan kebijakan, strategi dan indikasi program RPPLH meliputi :

1. Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya Alam;
2. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan hidup;
3. Rencana Pengendalian, Pemantauan Serta Pendayagunaan Pelestarian SDA; dan
4. Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO